



RPJMD KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2025 – 2029



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana...

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut KUA dan PPAS adalah dasar penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyusun rencana pembangunan di tingkat Daerah, dan bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat, menyepakati prioritas pembangunan, dan menentukan rencana kerja tahunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sintang hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan langsung pada tahun 2024.
- (2) RPJMD Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. SKPD dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
 - b. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun KUA dan PPAS.

Pasal 3...

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sintang;
- b. sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Renstra SKPD, RKPD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam musrenbang daerah secara berjenjang.

Pasal 4

Penetapan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, bertujuan untuk :

- a. menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- b. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan dana yang bersumber baik dari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Sumber dana lainnya;
- c. mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan, baik antar SKPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat;
- d. menjadi tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sintang, swasta, dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) RPJMD memuat program pembangunan Daerah periode 2025-2029.
- (2) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
 - c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

(3) RPJMD ...

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. RKPD Tahap Pertama (Tahun 2026);
- b. RKPD Tahap Kedua (Tahun 2027);
- c. RKPD Tahap Ketiga (Tahun 2028);
- d. RKPD Tahap Keempat (Tahun 2029); dan
- e. RKPD Tahap Kelima (Tahun 2030).

Pasal 7

RPJMD mengacu pada RPJM Nasional yang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Daerah yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan, rencana kerja pendanaan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Perubahan atas indikator kinerja akibat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pada dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11...

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SINTANG,
GREGORIUS HERKULANUS BALA

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
KARTIYUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (3 / 2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

RPJMD Kabupaten Sintang berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang mengacu kepada RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana RPJPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 dan RPJMN tahun 2025-2029.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025- 2029 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah, yaitu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini memuat gambaran konkrit kondisi Kabupaten Sintang saat ini, serta acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan visi dan misi dan arah pembangunan Daerah di masa 5 (lima) tahun yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3...

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

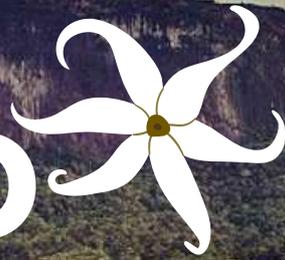
Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 3



RPJMD KABUPATEN SINTANG



TAHUN 2025 – 2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Periode 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Sintang ini disusun sebagai penjabaran dari misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berpedoman pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sintang dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, arah kebijakan, serta program prioritas Kepala Daerah dan program pembangunan daerah yang disertai dengan rencana kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan kaidah pelaksanaan yang memperhatikan karakteristik dan potensi khas Kabupaten Sintang.

RPJMD ini akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan berbagai dokumen perencanaan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sintang yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas dan berkelanjutan

Sintang, Agustus 2025

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4.1. Maksud.....	I-8
1.4.2. Tujuan.....	I-8
1.5. Sistematika Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029.....	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam	II-5
2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-10
2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-16
2.1.1.4.1. Ketahanan Energi	II-16
2.1.1.4.2. Ketahanan Air	II-20
2.1.1.4.3. Kemandirian Pangan	II-22
2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas.....	II-25
2.1.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-28
2.1.1.7. Demografi	II-31
2.1.1.7.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	II-31
2.1.1.7.2. Komposisi Umur Penduduk.....	II-32
2.1.1.7.3. Rasio Penduduk.....	II-33
2.1.1.7.4. Kepadatan Penduduk	II-34
2.1.1.7.5. Proyeksi Demografi Penduduk Tahun 2025-2029	II-35



2.1.1.8.	Telaahan RTRW	II-40
2.1.1.8.1	Struktur Ruang.....	II-40
2.1.1.8.2	Pola Ruang	II-42
2.1.1.8.3	Kawasan Strategis	II-47
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-49
2.1.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi	II-49
2.1.2.1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-49
2.1.2.1.2.	Laju Inflasi Kabupaten.....	II-52
2.1.2.1.3.	Indeks Gini	II-53
2.1.2.1.4.	Angka Kemiskinan	II-54
2.1.2.1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-54
2.1.2.1.6.	PDRB per Kapita.....	II-55
2.1.2.2.	Kesehatan Untuk Semua	II-56
2.1.2.2.1.	Indeks Kesehatan	II-57
2.1.2.3.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-59
2.1.2.3.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....	II-61
2.1.2.4.	Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	II-62
2.1.2.5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.....	II-63
2.1.2.5.1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-63
2.1.2.5.2.	Kerukunan Umat Beragama.....	II-65
2.1.2.6.	Keluarga Berkualitas, Ksetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-66
2.1.2.6.1.	Pembangunan Keluarga	II-66
2.1.2.6.2.	Perlindungan Anak.....	II-66
2.1.2.6.3.	Pemberdayaan Gender.....	II-66
2.1.2.6.4.	Indeks Ketimpangan Gender.....	II-67
2.1.2.6.5.	Indeks Pembangunan Pemuda	II-68
2.1.3.	Aspek Daya Saing Daerah	II-69
2.1.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-69
2.1.3.1.1.	Indeks Pembangunan Manusia.....	II-69
2.1.3.1.2.	Angka Literasi	II-71
2.1.3.1.3.	Angka Numerasi	II-72
2.1.3.1.4.	Indeks Literasi Digital.....	II-72



2.1.3.1.5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-73
2.1.3.1.6.	Angka Ketergantungan	II-74
2.1.3.2.	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	II-76
2.1.3.3.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II-77
2.1.3.4.	Transformasi Digital	II-77
2.1.3.5.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-82
2.1.3.6.	Perkotaan dan Perdesaan	II-82
2.1.3.6.1.	Indeks Infrastruktur	II-82
2.1.3.6.2.	Persentase Desa Mandiri	II-86
2.1.3.7.	Stabilitas Ekonomi Makro	II-87
2.1.4.	Aspek Pelayanan Umum	II-88
2.1.4.1.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-88
2.1.4.1.1.	Indeks Reformasi Birokrasi	II-88
2.1.4.1.2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-89
2.1.4.1.3.	Indeks Pelayanan Publik	II-89
2.1.4.1.4.	Indeks Inovasi Daerah	II-90
2.1.4.1.5.	Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	II-91
2.1.4.1.6.	Indeks Profesionalitas ASN	II-92
2.1.4.1.7.	Survey Kepuasan Masyarakat	II-92
2.1.4.1.8.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	II-93
2.1.4.2.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-94
2.1.4.2.1.	Indeks Demokrasi/Tingkat Partisipasi Pemilih	II-94
2.1.4.3.	Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakkan Hukum	II-96
2.1.4.3.1.	Indeks Rasa Aman	II-96
2.1.4.3.2.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	II-97
2.1.4.4.	Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	II-98
2.2.	Gambaran Keuangan Daerah	II-137
2.2.1.	Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir	II-137
2.2.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	II-137



2.2.1.2.	Neraca Daerah	II-140
2.2.1.3.	Proporsi Penggunaan Anggaran	II-142
2.2.1.3.1.	Pendapatan Daerah.....	II-142
2.2.1.3.2.	Belanja Daerah	II-143
2.2.1.4.	Analisis Pembiayaan Daerah	II-145
2.2.1.5.	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	II-147
2.2.2.	Proyeksi Keuangan Daerah.....	II-148
2.2.3.	Alternatif Pembiayaan Pembangunan	II-156
2.3.	Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah.....	II-161
2.3.1.	Permasalahan Pembangunan.....	II-161
2.3.1.1.	Infrastruktur.....	II-161
2.3.1.2.	Ekonomi.....	II-172
2.3.1.3.	Sumber Daya Manusia.....	II-176
2.3.1.4.	Politik dan Tata Kelola Pemerintahan	II-179
2.3.1.5.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	II-181
2.3.1.6.	Sosial budaya dan kehidupan beragama	II-186
2.3.1.7.	Ilmu Pengetahuan dan teknologi.....	II-186
2.3.2.	Isu Strategis Daerah.....	II-187

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH.....	III-1	
3.1.	Visi	III-1
3.2.	Misi	III-3
3.3.	Keselarasn Misi.....	III-3
3.4.	Tujuan dan Sasaran	III-10
3.5.	Strategi dan Arah Kebijakan	III-15
3.5.1.	Strategi dan arah kebijakan makro	III-15
3.5.2.	Pentahapan arah kebijakan	III-22
3.6.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-25



**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH.....IV-1**

4.1.	Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-28
4.2.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	IV-29
4.2.2.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).....	IV-30

BAB V PENUTUP V-1

5.1.	Pedoman Transisi	V-1
5.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	V-2
5.3.	Pengendalian dan Evaluasi	V-3



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sistematika Penulisan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029	I-8
Tabel 2.1. Luas dan Persentase terhadap Luas Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi dan Jagung di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-5
Tabel 2.3. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sayuran di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-5
Tabel 2.4. Produksi Buah-buahan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-6
Tabel 2.5. Produksi dan Luas Areal Tanam Komoditas Perkebunan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-6
Tabel 2.6. Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor Produksi Perikanan (ton) Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2.7. Jumlah Sarana Produksi Perikanan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2.8. Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2.9. Gambaran Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	II-10
Tabel 2.10. Jumlah Pelanggan Listrik, Besarnya Kapasitas Listrik PLN, Produksi Listrik PLN Dan Penjualan Daya Listrik di Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2024	II-16
Tabel 2.11. Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Barat 2023-2024	II-17
Tabel 2.12. Status Desa/Kelurahan Yang Beristriik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	II-17
Tabel 2.13. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Jumlah Konsumen Menggunakan Fasilitas Listrik di Kabupaten Sintang Tahun 2020 - 2024	II-18
Tabel 2.14. Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih di Kabupaten Sintang Tahun 2020 - 2024	II-19
Tabel 2.15. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/dan Lain-Lain di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023.....	II-20
Tabel 2.16. Kecukupan Energi dan Protein di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024.....	II-23



Tabel 2.17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2023	II-23
Tabel 2.18. Rasio Penanganan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk	II-26
Tabel 2.19. Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Sintang	II-27
Tabel 2.20. Kelas Kerentanan Bencana Multibahaya Kabupaten Sintang	II-27
Tabel 2.21. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2024	II-28
Tabel 2.22. Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2024	II-28
Tabel 2.23. Hasil Kajian Ketahanan Kabupaten Sintang	II-28
Tabel 2.24. Jumlah Penduduk, Distribusi, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-29
Tabel 2.25. Jumlah Penduduk Kab. Sintang Menurut Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2024	II-30
Tabel 2.26. Struktur Penduduk dan <i>Dependency Ratio</i> Kabupaten Sintang Tahun 2010, 2020 dan 2024	II-32
Tabel 2.27. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-33
Tabel 2.28. Distribusi Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Generasi Tahun 2025 dan 2029	II-35
Tabel 2.29. Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 – 2029 (dalam 000)	II-35
Tabel 2.30. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan Kabupaten Sintang tahun 2025-2029	II-38
Tabel 2.31. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sintang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024 (satuan %)	II-40
Tabel 2.32. Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten Tahun 2020-2023	II-47
Tabel 2.33. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sintang dan Unsur-Unsurnya Tahun 2023-2024	II-51
Tabel 2.34. Data Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Sintang, 2024	II-51
Tabel 2.35. Indikator Kebudayaan di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2022	II-53



Tabel 2.36. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang, Tahun 2024.....	II-54
Tabel 2.37. Cakupan Jaminan Kesehatan Tahun 2020-2024.....	II-55
Tabel 2.38. Data Jumlah Organisasi, Kegiatan dan Sarana prasarana Kepemudaaan dan Olahraga di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024.....	II-57
Tabel 2.39. Nilai IPM Kabupaten Sintang.....	II-59
Tabel 2.40. Kemampuan Literasi di Kabupaten Sintang.....	II-61
Tabel 2.41. Kemampuan Numerasi di Kabupaten Sintang.....	II-61
Tabel 2.42. Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Sintang.....	II-65
Tabel 2.43. Total Menara Telekomunikasi Swasta Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2020-2023.....	II-67
Tabel 2.44. Indikator Bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024.....	II-68
Tabel 2.45. Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024.....	II-69
Tabel 2.46. Karakteristik Pengguna Fasilitas Komunikasi dan atau Internet Tahun 2020 - 2024.....	II-70
Tabel 2.47. Indeks Infrastruktur Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024.....	II-72
Tabel 2.48. Persentase Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Sintang Tahun 2024.....	II-73
Tabel 2.49. Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sintang.....	II-75
Tabel 2.50. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sintang.....	II-75
Tabel 2.51. Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Sintang.....	II-76
Tabel 2.52. Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Sintang.....	II-77
Tabel 2.53. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sintang.....	II-77
Tabel 2.54. Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Sintang.....	II-78
Tabel 2.55. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sintang.....	II-79
Tabel 2.56. Opini BPK Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang....	II-80



Tabel 2.57. Aspek, Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Demokrasi Indonesia	II-80
Tabel 2.58. Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kalimantan Barat	II-81
Tabel 2.59. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Sintang (2015-2020)	II-82
Tabel 2.60. Jumlah Tindak Pidana Terbesar Menurut Jenis Tindak Pidana di Kabupaten Sintang Tahun 2024	II-84
Tabel 2.61. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Sintang	II-86
Tabel 2. 62. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024.....	II-125
Tabel 2. 63. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024	II-126
Tabel 2.64. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023	II-128
Tabel 2.65. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)	II-130
Tabel 2.66. Analisis Proporsi Belanja Pegawai di Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2.67. Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa di Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024.....	II-131
Tabel 2.68. Analisis Proporsi Belanja Modal di Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024	II-132
Tabel 2.69. Realisasi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2.70. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024.....	II-133
Tabel 2.71. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama di Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2.72. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024.....	II-135
Tabel 2.73. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2026-2030	II-136



Tabel 2.74. Proyeksi Pendapatan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2026-2030.....	II-139
Tabel 2.75. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sintang, Tahun 2026-2030	II-140
Tabel 2.76. Proyeksi Pembiayaan dan Total APBD Kabupaten Sintang, Tahun 2026-2030	II-141
Tabel 2.77. Kontribusi CSR Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024.....	II-146
Tabel 2.78. Perumusan Isu Strategis Kabupaten Sintang.....	II-176
Tabel 3.1. Keselarasan Misi RPJMD Sintang dengan RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Kalimantan Barat dan RPJPN	III-6
Tabel 3.2. Misi, Tujuan Serta Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029	III-11
Tabel 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029	III-15
Tabel 3.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-21
Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah dan Proyeksi Pendanaan	IV-3
Tabel 4.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sintang	IV-16
Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2030	IV-18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sintang	II-1
Gambar 2.2. Hubungan Dampak Ekosistem Berhutan dan Gambut terhadap Jasa Ekosistem di Kabupaten Sintang	II-15
Gambar 2.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/Dan Lain-Lain Kabupaten Sintang Tahun 2023	II-20
Gambar 2.4. Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan	II-21
Gambar 2.5. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-22
Gambar 2.6. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sintang	
Gambar 2.7 Kategori Pembangunan, kontribusi dan target CSR Kabupaten Sintang	II-147



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2023	II-24
Grafik 2.2. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Nasional Periode Tahun 2020 - 2023 (Dalam Persen). II-25	
Grafik 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2024	II-39
Grafik 2.4. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang,	II-39
Grafik 2.5. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang,	II-41
Grafik 2.6. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang,	II-42
Grafik 2.7. Tingkat Kemiskinan Di Kab. Sintang dan Prov. Kalimantan Barat ...	II-43
Grafik 2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka	II-44
Grafik 2.9. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah)	II-45
Grafik 2.10. Persentase Rumah Layak Huni	II-46
Grafik 2.11. Akses Terhadap Air Minum Layak	II-47
Grafik 2.12. Prevalensi Stunting	II-48
Grafik 2. 13. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2020-2024 di Kab.Sintang	II-49
Grafik 2. 14. Angka Partisipasi Murni Tahun 2020-2024 di Kab.Sintang	II-50
Grafik 2.15. Indeks Pemberdayaan Gender	II-56
Grafik 2.16. IPM Kabupaten Sintang dan Prov. Kalimantan Barat	II-58
Grafik 2.17. TPAK 2019-2024	II-62
Grafik 2.18. TPAK 2019-2024	II-64
Grafik 2.19. Rekapitulasi Jangkauan Telekomunikasi Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	II-69
Grafik 2.20. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang,	II-74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Proses tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan regional, nasional, dan global.

Perencanaan pembangunan baik di level pusat dan daerah merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan. Karena perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Agar perencanaan pembangunan dapat berkualitas dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka proses perencanaan pembangunan daerah semestinya dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sedang terus melakukan pembangunan di segala bidang agar kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera. Wilayah Kabupaten Sintang sangat luas, yaitu sekitar 21.196,73 Km² dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain wilayahnya yang luas, Kabupaten Sintang juga memiliki posisi geografis sangat strategis karena berbatasan dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia dan letaknya yang berada persis di tengah-tengah kabupaten lain yang ada di kawasan timur Kalimantan Barat. Artinya, dengan posisi geografis yang demikian, daerah ini sangat potensial dan strategis dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah di kawasan timur Kalimantan Barat, sekaligus sebagai gerbang



ekonomi keluar negeri melalui perbatasan darat dengan Negara Bagian Sarawak di Malaysia.

Upaya pemanfaatan posisi geografis yang sangat strategis tersebut sekaligus implementasi pendekatan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang membutuhkan proses perencanaan yang lebih terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu, antar kecamatan, dan antar level pemerintahan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah beserta evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah. RPJMD merupakan panduan panduan dalam mengambil kebijakan dan menetapkan prioritas pembangunan daerah pada jangka menengah, dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mencapai visi daerah. RPJMD juga berperan penting dalam menciptakan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Dengan berakhirnya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang periode tahun 2021 – 2026 dan terpilihnya Gregorius Herkulanus Bala dan Florensus Ronny yang dilantik dengan pelantikan kepala daerah baru untuk masa bakti 2025-2030 yang dilaksanakan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah Kabupaten Sintang menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan dari RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045 dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang “Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan”. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 41 huruf e.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyusunan RPJMD 2025 - 2029 sebagai salah satu tahap yang berpedoman dan memperhatikan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik



Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum terkait dengan Penyusunan Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;



- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2034;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2029;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2036;



- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2023 – 2053;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan aspek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. Selain itu juga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah serta dokumen Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJID).

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1) **RPJMD Kabupaten Sintang dan RPJMN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2029. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah kebijakan nasional dalam dokumen RPJMN tahun 2025 - 2029 agar pembangunan Kabupaten Sintang berjalan sinergis dengan pembangunan nasional



2) RPJMD Kabupaten Sintang dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2029. Oleh karena itu, dokumen RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2029 nantinya harus bisa menjabarkan misi pembangunan provinsi tersebut dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang.

3) RPJMD Kabupaten Sintang dan RPJPD Kabupaten Sintang

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 merupakan RPJMD periode tahun pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Sintang masa bakti tahun 2025 - 2029, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029.

4) RPJMD Kabupaten Sintang dan RTRW Kabupaten Sintang

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2036 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program prioritas unggulan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sintang.

5) RPJMD Kabupaten Sintang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sintang

Konsep pembangunan berkelanjutan yang tergambar dalam SDGs menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029. Pembangunan yang meminimalisir dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan kemanfaatan potensi Sumber Daya Kabupaten Sintang menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2029. Penandingan hasil rencana pembangunan dalam RPJMD akan berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2029. Sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan yang digaungkan di tingkat Kabupaten hingga nasional akan selaras.



6) RPJMD Kabupaten dan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJID)

RIPJPID menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan RPJMD, khususnya dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, harus selaras dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) serta berbagai kebijakan nasional dan provinsi. RIPJPID, sebagai bagian dari dokumen perencanaan daerah, memberikan arahan khusus terkait pengembangan iptek yang kemudian diintegrasikan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD

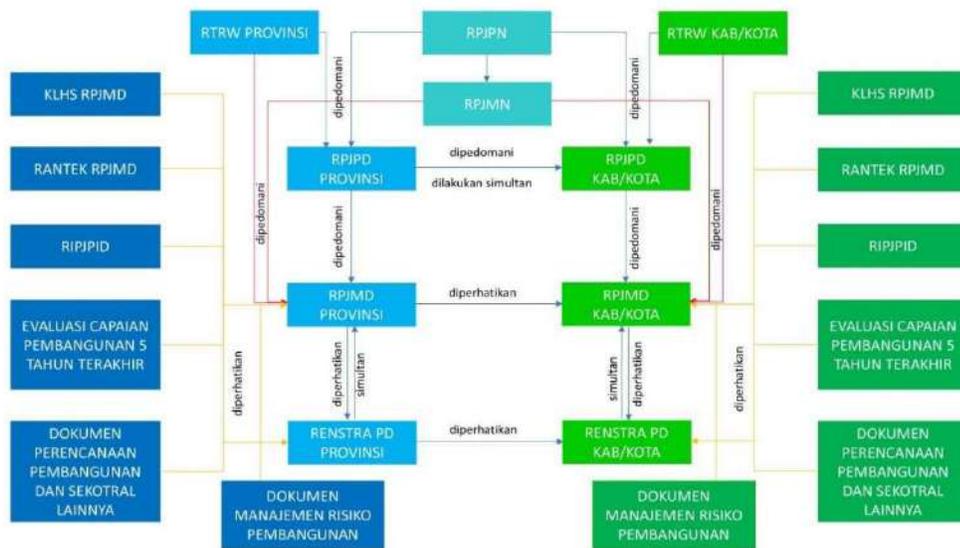
7) RPJMD Kabupaten dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang.

8) RPJMD Kabupaten Sintang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sintang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dapat disajikan atau dilihat pada Gambar 1.1. berikut ini.



Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tahun 2024

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah

- Sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan;
- Sebagai pedoman dalam menyusun RKPD Kabupaten Sintang pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD Kabupaten Sintang sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah

- Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dokumen ini juga bertujuan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
- Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan serta memberikan landasan dan arah bagi



seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Keberadaan dokumen ini akan menyediakan kerangka kebijakan pembangunan daerah yang komprehensif sebagai acuan dalam tahapan perencanaan pembangunan selanjutnya.

1.5. Sistematika Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Rancangan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sistematika Penulisan Rancangan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029

No. BAB	Isi Uraian
BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029.
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH
	Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Bab ini terdiri dari sub bab Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, Gambaran Keuangan Daerah, serta Permasalahan dan Isu Strategis
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



No. BAB	Isi Uraian
	Bab ini menguraikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045, RPJMN dan RPJMD Provinsi. Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dijabarkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai selama lima tahun serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pemerintah daerah selama lima tahun
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
	Bab ini menguraikan program dari seluruh perangkat daerah merujuk pada program prioritas Kepala Daerah dan sekaligus dengan proyeksi pendanaan yang dibutuhkan serta bab ini akan menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) selama periode 2025-2029.
BAB V	PENUTUP
	Bab ini berisi ringkasan dari keseluruhan dokumen RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029, serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan RPJMD. Pada bagian ini juga disampaikan kaidah pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan RPJMD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

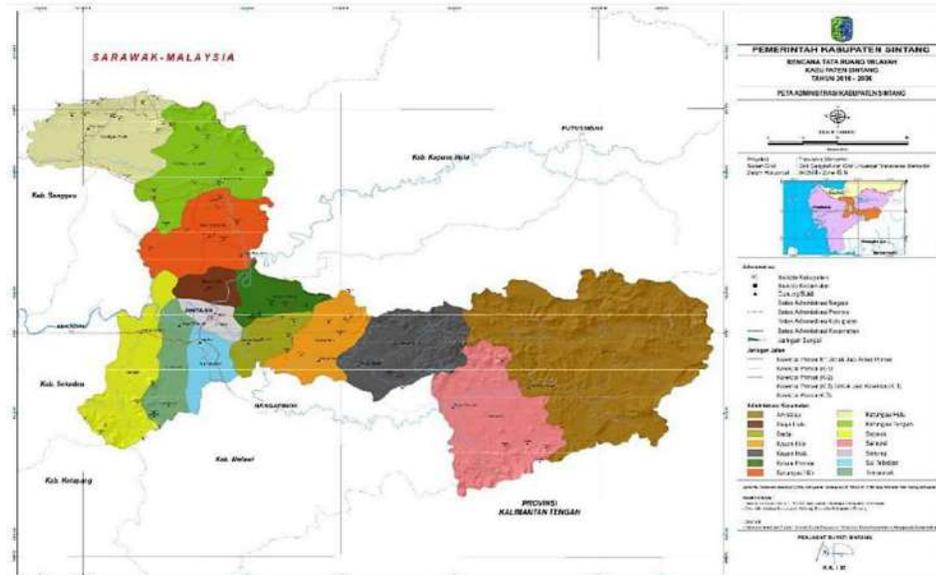
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05' LU serta 0°46' LS dan 110°50' BB serta 113°20' BT. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatulistiwa. Secara administratif, Kabupaten Sintang berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:

- | | | |
|---------|---|---|
| Utara | : | Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Sarawak). |
| Selatan | : | Prov. Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang. |
| Timur | : | Prov. Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. |
| Barat | : | Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sekadau. |



Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sintang
Sumber : BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, khususnya negara bagian Serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu. Wilayah Kabupaten Sintang memiliki luas sebesar 21.196,73 km² dan menjadikannya kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang. Jika dihitung jarak dari Kota Pontianak, ibukota provinsi, ke Kabupaten Sintang adalah sekitar 395 km². Kabupaten Sintang dibagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 391 desa. Nama kecamatan dan luas masing-masing akan disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Luas dan Persentase terhadap Luas Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2025

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Serawai	Nanga Serawai	2.537,08	11,52%
Ambalau	Nanga Kemangai	5.990,16	27,20%
Kayan Hulu	Nanga Tebidah	1.790,62	8,13%
Sepauk	Nanga Sepauk	1.513,99	6,87%
Tempunak	Nanga Tempunak	870,87	3,95%
Sungai Tebelian	Sungai Ukoi	597,91	2,71%
Sintang	Sintang	355,91	1,62%
Dedai	Nanga Dedai	601,69	2,73%
Kayan Hilir	Nanga Mau	1.057,96	4,80%
Kelam Permai	Kebong	641,94	2,91%
Binjai Hulu	Binjai	386,24	1,75%
Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	1.671,29	7,59%
Ketungau Tengah	Nanga Merakai	2.003,87	9,10%
Ketungau Hulu	Senaning	2.006,19	9,21%
Kabupaten Sintang		21.196,73	100%

Sumber: Peta Dasar Kab. Sintang, BIG 2024

Kabupaten Sintang terdiri dari daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 64,037% dari luas Kabupaten Sintang. Kabupaten



Sintang juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi berkisar pada 249,08 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari per bulan. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Kabupaten Sintang berada di daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi. Kabupaten Sintang memiliki Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau. Kabupaten Sintang memiliki beberapa potensi alam seperti air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 7 Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.

Jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Sintang adalah Tebidah Formation seluas 410.448,58 Ha atau mencapai 18,68% dari luas wilayah Kabupaten Sintang yang terdapat di Kecamatan Ambalau, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sepauk, Serawai, Sintang, Sungai Tebelian, dan Tempunak. Selanjutnya batuan dominan berikutnya adalah Mensibau Granodiorite yang mencapai 10,70% dari luas wilayah Kabupaten Sintang dan terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai. Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latosol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99% dari luas daerah. Selanjutnya tanah podsolik sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89% yang terhampar hampir di seluruh kecamatan. Jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08%.

Peran Kab. Sintang dilihat dari kontribusi ekonomi cukup strategis mengingat kontribusi PDRB Sintang terhadap PDRB Kalimantan Barat sebesar 6,87%. Kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, dengan 59% wilayahnya masih berupa kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi, serta memiliki areal yang menghasilkan karbon dan nilai konservasi tinggi. Kawasan konservasi seperti Taman Wisata Alam Bukit Kelam dan Taman Wisata Alam Hutan Baning menjadi ikon daerah yang berfungsi tidak hanya sebagai destinasi wisata lokal tetapi juga berpotensi menjadi objek wisata berskala nasional dan internasional.

Dari segi infrastruktur, meskipun Kabupaten Sintang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, PLBN Sungai Kelik yang direncanakan masih dalam



proses perencanaan pembangunan dan belum selesai dibangun. Kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang memiliki luas 4.320 kilometer persegi yang berada di dua kecamatan, yaitu Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu, dengan 58 desa, yang memiliki potensi ekonomi signifikan. Kabupaten ini memiliki banyak potensi di sejumlah sektor ekonomi meliputi perkebunan, pertambangan, pertanian, pariwisata, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Posisi geografis yang strategis ini menjadikan Sintang sebagai gerbang potensial bagi Kalimantan Barat ke luar negeri, dengan prospek pengembangan ekonomi lintas batas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan memperkuat peran Sintang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Kalimantan Barat.

Dalam lingkup infrastruktur regional, Kabupaten Sintang memiliki peran penting sebagai simpul penghubung antara kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat bagian timur. Sintang menjadi titik penghubung strategis yang menghubungkan Kabupaten Kapuas Hulu (Putussibau) di timur laut, Kabupaten Melawi (Nanga Pinoh) di tenggara, dengan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau di bagian barat. Jalan Lintas Selatan yang menghubungkan Kabupaten Sintang dengan kota Putussibau di Kapuas Hulu merupakan infrastruktur vital sebagai jalur transportasi utama antar wilayah. Selain jaringan jalan darat, Kabupaten Sintang juga terhubung dengan jalur Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia, yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau. Kondisi daerah aliran Sungai Kapuas ini sangat memengaruhi konektivitas antarkabupaten, terutama ketika terjadi bencana banjir yang bisa menerjang berbagai daerah termasuk Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, dan Sanggau.

Kabupaten Sintang dengan posisinya yang strategis di jalur Trans Kalimantan menjadi titik simpul dalam pengembangan ekonomi regional, mengingat infrastruktur yang ada tidak hanya memfasilitasi pergerakan orang dan barang antarwilayah, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi terintegrasi dan pemerataan pembangunan di kawasan timur Kalimantan Barat.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang beriklim tropis dan curah hujan tinggi serta sebagian besar wilayah berupa dataran rendah dengan area perbukitan, menyimpan potensi sumber daya alam yang besar. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Sintang berupa lahan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

1. Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Sintang cukup besar, meliputi padi dan jagung. Berikut data terkait luas panen, produksi dan produktivitas padi dan jagung di Kabupaten Sintang.

Tabel 2.2. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi dan Jagung di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen padi (ha)	8.507	8.853	11.241	9.101	10.431
2	Produksi padi (ton)	22.695	23.810	31.304	24.486	30.423
3	Produktivitas padi (ton/ha)	2,67	2,69	2,78	2,69	2,92
4	Luas panen jagung (ha)	2.824,92	672,89	1.047,00	552,00	N/A
5	Produksi jagung (ton)	9.342,00	3.750,00	1.248,80	1.573,00	N/A
6	Produktivitas jagung (kw/ha)	33,07	55,73	42,89	28,50	N/A

Sumber: BPS Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2025; Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2024

Komoditas sayuran utama di Kabupaten Sintang mencakup komoditas tanaman cabai rawit dan ketimun. Berikut data luas panen, produksi dan produktivitas sayuran di Kabupaten Sintang.

Tabel 2.3. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sayuran di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen cabai rawit (ha)	166,00	479,00	403,00	368,60	450,00
	Produksi cabai rawit (ton)	788,70	984,50	1.191,60	1.127,90	2.010,09
	Produktivitas cabai rawit (kw/ha)	47,50	20,60	29,60	30,60	44,67
2	Luas panen	296,00	410,50	241,00	332,05	365,40



No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	ketimun (ha)					
	Produksi ketimun (ton)	1.234,40	1.335,15	1.176,50	1.521,70	1.959,16
	Produktivitas ketimun (kw/ha)	41,70	32,50	48,80	45,83	53,62

Sumber: BPS Kabupaten Sintang dalam Angka Tahun 2021, 2022, 2023; BPS Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2024, 2025

Komoditas buah-buahan utama di Kabupaten Sintang yaitu Durian, Jeruk, Mangga, Pepaya, dan Pisang. Adapun produksi buah-buahan di Kabupaten Sintang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Produksi Buah-buahan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No.	Produksi Buah-buahan (ton)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Durian	3.206,00	1.125,80	3.387,40	60.255,00	28.485,50
2	Jeruk	301,20	167,60	124,70	328,00	331,90
3	Mangga	3.547,50	792,80	738,20	4.107,00	2.077,20
4	Pepaya	118,90	392,10	516,60	2.684,00	1.690,40
5	Pisang	3.523,80	2.154,30	2.598,00	16.243,00	11.816,30

Sumber: Kabupaten Sintang dalam Angka 2024, 2025

Potensi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Sintang cukup beragam dari jenis pangan, sayuran dan buah-buahan. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura terus meningkat setiap tahun, namun belum dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

2. Potensi Perkebunan

Potensi perkebunan di Kabupaten Sintang cukup besar, meliputi kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan kakao. Adapun luas areal dan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Produksi dan Luas Areal Tanam Komoditas Perkebunan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa Sawit	Luas areal tanam (ha)	194.305,97	194.305,97	202.748,38	221.346,64	240.300,17
		Produksi (ton)	323.703,89	194.305,97	772.401,78	858.138,65	951.044,75
2	Kelapa	Luas areal tanaman (ha)	1.326,95	1.316,70	1.335,70	577,60	1.076,85
		Produksi (ton)	309,4	1.316,7	329,60	265,50	267,80



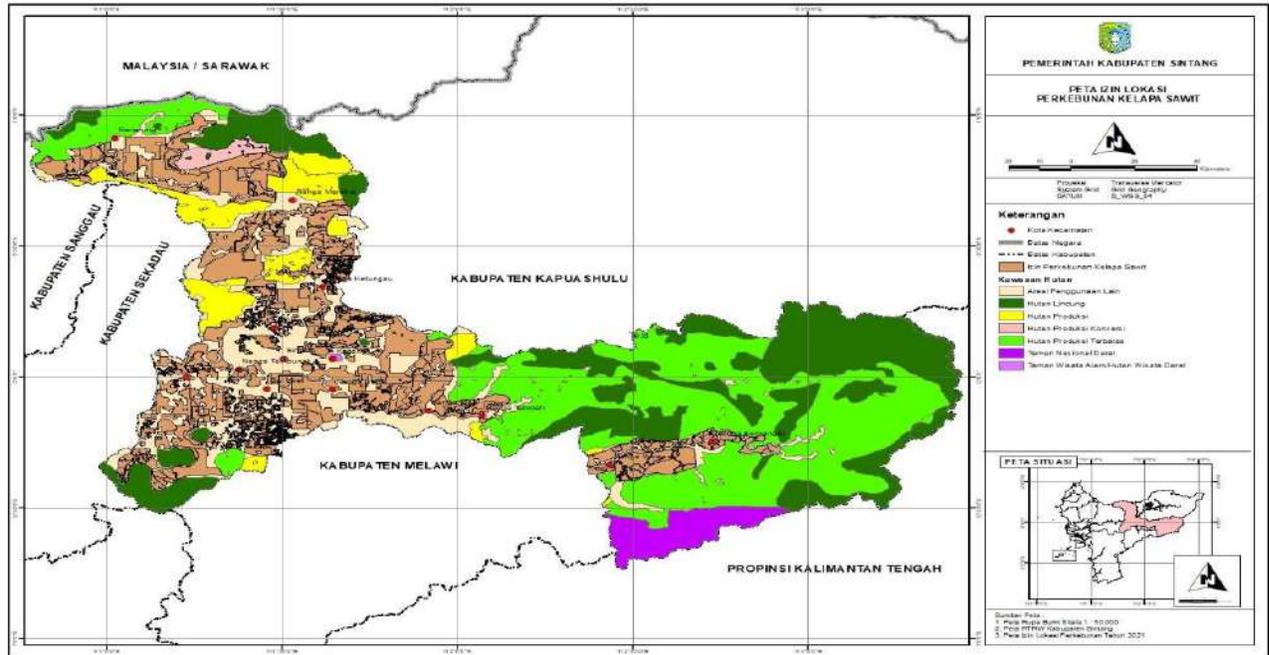
No	Komoditi	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
4	Karet	Luas areal tanaman (ha)	98.537	102.319	103.129,58	65.631,00	92.477,03
		Produksi (ton)	39.267	102.319	40.037,00	39.884,00	42.416,00
5	Kopi	Luas areal tanaman (ha)	346,50	352,50	352,50	146,00	326,40
		Produksi (ton)	83,07	352,50	64,97	76,10	76,10
6	Kakao	Luas areal tanaman (ha)	82,40	83,40	83,70	29,00	118,40
		Produksi (ton)	NA	83,40	83,40	29,00	4,50

Sumber: Kabupaten Sintang dalam Angka (2021, 2022, 2023, 2024, 2025), Dinas Pertanian dan Perkebunan 2025

Sektor perkebunan sawit menjadi primadona dan unggulan di Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang termasuk daerah yang memiliki lahan sawit terbesar ke 3 di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Sanggau. Namun demikian proporsi kebun sawit rakyat masih sangat kecil jika dibandingkan yang milik perusahaan di Kabupaten Sintang.

Tabel 2.6. Data Banding Luas, Produksi, dan Petani Komoditi Kelapa Sawit-TBS

No.	RECAMATAN	LUAS MENURUT KEDIPAN TANAMAN (Ha)									JUMLAH			PRODUKSI			RATA-RATA PRODUKSI (kg/ha/Th)	PETANI			KETERANGAN
		Tanaman Muda			Tanaman Menghasilkan			Tanaman Tua/Rusak			2023	2024	±1	2023	2024	±1		2023	2024	±1	
		2023	2024	±1	2023	2024	±1	2023	2024	±1											
1	SINTANG	158,00	66,47	(91,53)	10.416,00	4.866,50	(5.550,44)	-	-	-	10.584,00	4.033,03	-6.550,97	74.374,00	86.002,00	11.628,00	17.625	-	-	-	g0
2	TEMPUNAK	-	104,14	104,14	2.678,00	10.380,74	7.702,74	-	-	-	2.678,00	10.484,88	7.806,88	5.802,00	64.034,69	58.232,69	6.809	-	-	-	perusahaan
3	SEPAUK	1.414,00	1.108,25	(305,75)	15.032,00	14.518,89	(513,17)	-	-	-	16.446,00	15.627,08	-818,92	57.640,00	65.796,00	12.156,00	4.807	-	-	-	
4	KETUNGAU HILIR	20.700,00	15.518,33	(5.181,67)	40.430,00	39.063,57	(1.366,43)	-	-	-	61.130,00	54.581,90	-6.548,10	76.124,00	90.116,98	13.994,98	2.307	-	-	-	
5	KETUNGAU TENGAH	4.120,00	6.903,68	2.783,68	9.088,00	14.631,15	5.543,15	-	-	-	15.206,00	21.524,73	6.318,73	7.665,00	76.533,39	68.466,39	5.203	-	-	-	
6	KETUNGAU HULU	3.780,00	5.908,33	2.128,33	25.517,00	24.883,21	(633,79)	-	-	-	29.297,00	30.771,54	1.474,54	35.285,00	37.597,52	102.312,52	5.534	-	-	-	
7	DEDAI	-	104,00	104,00	5.975,65	3.724,73	(2.250,92)	-	-	-	5.975,65	2.828,73	-3.146,92	-	22.707,24	22.707,24	8.334	-	-	-	
8	KAYAN HILIR	803,00	1.482,81	679,81	8.514,00	9.468,40	954,40	-	-	-	9.317,00	10.951,27	1.634,27	8.919,00	86.114,00	77.185,00	9.095	-	-	-	
9	KAYAN HULU	1.799,00	1.097,51	(701,49)	4.871,00	2.734,84	(2.136,16)	-	-	-	6.970,00	3.743,35	-3.226,65	75.153,00	25.714,51	10.571,51	9.400	-	-	-	
10	SEPAWAI	1.250,00	1.250,00	-	1.987,00	3.573,78	1.586,78	-	-	-	3.237,00	4.823,78	1.586,78	1.829,00	5.747,70	3.818,70	1.608	-	-	-	
11	AAMBALAU	-	-	-	3.516,00	1.929,93	(1.586,07)	-	-	-	3.516,00	1.929,93	(1.586,07)	1.379,00	22.317,60	10.938,60	11.364	-	-	-	
12	SEI TEBELIAN	160,00	48,00	(112,00)	16.058,00	17.345,01	1.287,01	-	-	-	16.218,00	17.333,01	1.115,01	29.611,00	26.727,90	37.115,90	5.000	-	-	-	
13	KELAM PERMAI	575,00	365,29	(209,71)	12.637,00	73.395,69	55.758,69	-	-	-	13.411,00	73.761,98	55.350,98	21.900,00	65.255,69	43.355,69	4.871	-	-	-	
14	BINJAI HULU	-	1.477,48	1.477,48	7.033,00	10.414,48	5.381,48	-	-	-	7.033,00	14.841,96	7.808,96	13.415,00	61.753,44	48.338,44	4.974	-	-	-	
	KELAPA SAWIT-PBS	34.759,00	36.344,19	1.585,19	163.960,65	171.911,98	7.951,33	-	-	-	198.710,65	208.256,17	9.545,52	349.297,00	961.021,25	551.814,43	2.430	-	-	-	



Gambar 2.2. Peta Wilayah Perkebunan Sawit Kabupaten Sintang

Jika melihat perkembangan yang ada, perkebunan sawit semakin menjanjikan ke depan, karena komoditas sawit menghasilkan jumlah/jenis produk turunan yang dapat dihasilkan oleh industri dalam negeri sangat beragam yaitu sekitar 200 jenis di tahun 2024. Di samping itu, Indonesia juga tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan energi nabati dari kelapa sawit melalui B30 di dunia, dan akan terus ditingkatkan menjadi B40, bahkan B100 di masa yang akan datang. Oleh karenanya, industri sawit di Kabupaten Sintang akan menjadi penopang penguatan ekonomi bagi daerah serta dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi jika industri minyak sawit tersebut dapat menerapkan hilirisasi kelapa sawit yang bisa memperluas nilai tambah ekonomi bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang. Oleh karenanya, perlu sinergi dengan para stakeholder di tingkat daerah, mulai dari penyusunan kebijakan industri dan perdagangan, penguatan rantai pasok, pembinaan SDM, fasilitasi pembiayaan, hingga pengembangan riset dan teknologi industri sawit di Kabupaten Sintang.



3. Potensi Perikanan

Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Sintang berasal dari perairan umum dan perairan budidaya. Produksi perikanan di Kabupaten Sintang beserta jumlah sarana produksi perikanan disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.7. Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor Produksi Perikanan (ton) Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perairan Umum	833,06	583,61	289,91	920,42	928,41
Perairan Budidaya	428,80	119,51	426,05	188,97	113,30
TOTAL	1261,86	703,12	715,96	1109,39	1041,71

Sumber : Kabupaten Sintang dalam Angka (2025)

Tabel 2.8. Jumlah Sarana Produksi Perikanan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perairan Umum	969	969	969	866	773
Perairan Budidaya	3.722	3.722	18.376	901	1.076
TOTAL	4.691	4.691	19.345	1.767	1.849

Sumber: Kabupaten Sintang dalam Angka (2025)

4. Potensi Peternakan

Sub sektor peternakan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung kehidupan di Kabupaten Sintang. Populasi hewan ternak tertinggi di Kabupaten Sintang yaitu Ayam Ras Pedaging, diikuti ayam buras, babi dan sapi potong. Selengkapnya mengenai data populasi ternak dan unggas di Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.9. Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No	Populasi Hewan (ekor)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	6.756	6.839	5.512	5.022	5.021
2	Kerbau	69	88	88	88	59
3	Kambing	3.363	3.619	3.393	5.267	3.325
4	Babi	67.505	46.330	5.176	3.393	9.053
5	Ayam Buras	475.565	465.090	464.998	462.156	165.528
6	Ayam Ras	2.640.368	4.331.869	350.159	3.118.679	5.169.810



	Pedaging					
7	Itik	6.239	5.896	6.244	8.419	5.817

Sumber: Kabupaten Sintang dalam Angka (2025)

5. Potensi Kehutanan

Kawasan kehutanan di Kabupaten Sintang hingga tahun 2024 meliputi Hutan Lindung (455.986 Ha), Hutan Produksi Terbatas (604.651Ha), Hutan Produksi Tetap (138.247 Ha), Hutan produksi yanag dapat dikonversi (17.840 ha), Suaka Alam dan Pelestarian Alam (70.462Ha).

Sumber : Ranperda RTRW Tahun 2025

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang- Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup yaitu kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung perikehidupan manusia sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Berdasarkan hasil kajian, Kabupaten Sintang memiliki empat tipe jasa ekosistem dan sepuluh jenis jasa ekosistem terkait daya dukung lingkungan, yaitu:

- a. Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan (*Provisioning*): (1) Penyediaan Pangan dan (2) Penyediaan Air Bersih;
- b. Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan (*Regulating*): (3) Pengaturan Iklim, (4) Pengaturan Tata Aliran dan Banjir, (5) Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam: Kebakaran Lahan dan Sebaran Titik Api, (6) Pengolahan dan Penguraian Limbah; (7) Pengaturan Pengendalian Hama (rabies) dan Penyakit;
- c. Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya (Culture): (8) Tempat Tinggal dan Ruang Hidup, (9) Rekreasi dan Ekoturisme; serta
- d. Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung (Supporting): (10) Biodiversitas.

Mengenai gambaran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 2.10. Gambaran Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang**

Tipe Jasa Ekosistem	Jenis Jasa Ekosistem	Kondisi	Antisipasi
Penyediaan (Provisioning)	(1) Penyediaan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Sangat Rendah mendominasi luas jasa ekosistem penyediaan pangan, sebesar 39,16%. • Namun, sebesar 38,84% luas jasa ekosistem penyediaan pangan merupakan Indeks Tinggi. • Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan yang sangat rendah sebagian besar berada di Kecamatan Ambalau, Serawai dan Ketungau Hulu. 	Peningkatan Jasa Penyediaan Pangan akan menjadi kendala jika pengembangan tanaman pangan tidak menjadi perhatian masyarakat dan kebijakan pembangunan pertanian oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik.
	(2) Penyediaan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Sintang didominasi oleh indeks rendah yang mencakup sekitar 43,07% dari total luas wilayah Kabupaten Sintang. • Kemudian, indeks tinggi mencakup total luas sekitar 38,72% dari luas keseluruhan Kabupaten Sintang. • Jasa ekosistem penyediaan air bersih yang rendah tersebar dari Kecamatan Kayan Hilir hingga sebagian besar Kecamatan Ketungau Hilir. 	Kondisi ekoregion berupa tutupan lahan berhutan dan gambut. Selain itu juga perlu diperhatikan aspek tegakan pohon, kualitas dan jenis tanah, serta iklim.



Tipe Jasa Ekosistem	Jenis Jasa Ekosistem	Kondisi	Antisipasi
Pengaturan (Regulating)	(3) Pengaturan Iklim	<ul style="list-style-type: none">• Kondisi jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Sintang termasuk dalam kategori rendah 43,43%.• Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak memiliki keseimbangan ekosistem dalam jasa pengaturan iklim.• Sebesar 21,88% termasuk luas jasa ekosistem dengan indeks tinggi dan 18,87% merupakan luas wilayah dengan indeks sangat tinggi.• Sebagian besar wilayah dengan indeks tinggi dan sangat tinggi berada di Kecamatan Ambalau dan Serawai.	Letak wilayah Kabupaten Sintang berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh curah hujan, kekuatan angin dan suhu. Selanjutnya, tingginya jasa ekosistem pengaturan iklim disebabkan bahwa sebagian besar wilayahnya masih terdiri dari hamparan hutan alam, hutan tanaman, perkebunan karet dan hutan riparian sungai.
	(4) Pengaturan Tata Aliran dan Banjir	<ul style="list-style-type: none">• Hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang terindikasi rawan banjir dengan persentase yang sangat tinggi yaitu > 80% dari total luas wilayah.	Siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air.



Tipe Jasa Ekosistem	Jenis Jasa Ekosistem	Kondisi	Antisipasi
	(5) Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam: Kebakaran Lahan dan Sebaran Titik Api	<ul style="list-style-type: none">• 61,11% luas wilayah Kabupaten Sintang merupakan Jasa ekosistem pengaturan terhadap bencana dengan kategori tinggi.• Penurunan gambut akibat alih fungsi lahan dan terbukanya lahan gambut sangat berpotensi menurunkan kemampuan jasa ekosistem pengaturan terhadap bencana.• Sebaran wilayah dengan indeks tinggi yaitu dari sebagian Kecamatan Ketungau Hilir hingga Ambalau	Kerusakan ekosistem gambut dan kawasan berhutan yang terbuka dapat memicu terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, lahan gambut yang sudah terdegradasi serta kawasan bervegetasi jarang pohon akan lebih rawan longsor.
	(6) Pengolahan dan Penguraian Limbah	<ul style="list-style-type: none">• Jasa ekosistem pengaturan terhadap bencana di Kabupaten Sintang di dominasi oleh kategori sangat tinggi yang mencakup 721.785 Ha atau sekitar 33,36% dari total luas wilayah.• Sungai Kapuas yang melewati wilayah Kota Sintang, Desa Belitang dan Nanga Sepauh telah melewati daya tampung beban pencemaran parameter BOD.• Sumber pencemar terbesar di	<ul style="list-style-type: none">• Perlu ada tindakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran, baik terhadap industri pengolahan kelapa sawit, maupun hotel dan rumah sakit yang memiliki IPAL.



Tipe Jasa Ekosistem	Jenis Jasa Ekosistem	Kondisi	Antisipasi
		Kabupaten Sintang adalah dari industri (78%) dan domestik (11%).	
	(7) Pengaturan Pengendalian Hama (rabies) dan Penyakit (Stunting)	<ul style="list-style-type: none">• Luas jasa ekosistem pengendalian rabies termasuk kategori sangat tinggi di Kabupaten Sintang yaitu 64%.• Rata-rata distribusi jasa ekosistem pengendalian stunting berada di kategori Tinggi.	
Budaya (Culture)	(8) Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	<ul style="list-style-type: none">• Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Sintang didominasi pada kategori sedang 34,56 % dan tinggi 29,47 %.• Namun, kondisi tempat tinggal dengan kualitas yang sangat rendah juga cukup besar, yaitu 25,77 %.	Ketersediaan sumber daya alam dan fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan fungsional suatu wilayah.
	(9) Rekreasi dan Ekoturisme	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan jasa budaya rekreasi dan ecotourism di Kabupaten Sintang termasuk dalam kategori sangat rendah, rendah dan sedang mendominasi seluruh wilayah kecamatan.	Jasa ekosistem rekreasi dan ekoturisme belum dibangun secara optimal dan merata.



Tipe Jasa Ekosistem	Jenis Jasa Ekosistem	Kondisi	Antisipasi
Pendukung (Supporting)	(10) Biodiversiti	<ul style="list-style-type: none">• Secara umum Kabupaten Sintang bentang alamnya menyediakan Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) kategori rendah hingga sangat rendah yaitu 57,67 % dari total luas wilayahnya.• Sebaliknya, kondisi biodiversitas berkualitas tinggi hingga sangat tinggi mencapai 42 %.	Perlunya upaya pengelolaan kekayaan alam tersebut agar tidak terjadi degradasi yang semakin berlebihan untuk pemanfaatan oleh manusia secara keberlanjutan. Tindakan pengelolaan dapat dilakukan dengan menekan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Sintang

Berdasarkan sepuluh jasa ekosistem tersebut, terdapat parameter utama yang memberikan pengaruh dan dampak nyata terhadap hampir keseluruhan jasa ekosistem tersebut. Secara teori, kondisi kualitas suatu kawasan berhutan tentunya akan berkorelasi lurus dengan jasa ekosistem: ketersediaan pangan, air bersih, pengaturan iklim, pengaturan tata aliran dan banjir, pengolahan dan penguraian limbah, tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan ekoturisme, serta biodiversitas. Sebaliknya, degradasi lahan berhutan dan bergambut akan meningkatkan probabilitas kebakaran lahan dan sebaran titik api.



Gambar 2.2 Hubungan Dampak Ekosistem Berhutan dan Gambut terhadap Jasa Ekosistem di Kabupaten Sintang

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029

Kenyataannya, di Kabupaten Sintang ada beberapa jasa ekosistem yang berbanding terbalik dengan kondisi idealnya, yaitu jasa ekosistem pangan, rekreasi dan ekoturisme, serta jasa ekosistem rabies (rabies) dan stunting. Kondisi ini dapat diakibatkan karena faktor kondisi alam yang terbatas atau tidak merata akan kualitas dan kuantitas yang baik mengenai infrastruktur jalan raya, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.4.1. Ketahanan Energi

Ketahanan energi di Kabupaten Sintang akan dikembangkan melalui penguatan tiga aspek utama, yaitu ketersediaan sumber energi, keterjangkauan pasokan energi, dan kemajuan pengembangan energi baru terbarukan. Sebagai salah satu kabupaten terlama di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang memiliki potensi sumber daya energi yang perlu dikelola secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan infrastruktur penyediaan energi menjadi prioritas program yang akan dikembangkan dalam periode perencanaan mendatang.

Terdapat tiga parameter penting pada sisi supply dari fasilitas listrik yaitu daya terpasang dan produksi dan distribusi listrik. Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang.



Pada tahun 2023, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Sintang adalah sebanyak 109.975 konsumen, jumlah ini meningkat dari konsumen tahun 2022 yaitu sebanyak 101.580 konsumen, dan lebih meningkat lagi dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 93.597 konsumen. Sampai dengan tahun 2022 layanan penggunaan fasilitas listrik masyarakat di Kabupaten Sintang masih sebagian besar menggunakan listrik dari sumber PLN yaitu sebesar 86,67%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 70,21%.

Tabel 2.11. Jumlah Pelanggan Listrik, Besarnya Kapasitas Listrik PLN, Produksi Listrik PLN Dan Penjualan Daya Listrik di Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024*
1	Jumlah Pelanggan Listrik	Jumlah	86.957	93.597	101.580	109.975	110.124
2	Daya Terpasang	KW	2.850	-	11.460	159.278.650	N/a
3	Produksi Listrik	KWh	3.990.979	-	5.004.042	210.924.836	N/a
4	Listrik Yang Terjual	KWh	-	-	4.624.981	180.487.576	N/a
5	Dipakai Sendiri	KWh	20.263	-	327.846	1.979.448	N/a
6	Susut /Hilang	KWh	-	-	51.215	21.771.016	N/a
7	Tenaga Yang Dibangkitkan	KWh	157.514.275	16.445.028	5.004.042	210.924.835	N/a
8	Tenaga Yang Terjual	KWh	155.858.064	13.112.155	4.624.981	180.487.575	N/a
9	Pemakaian	KWh	155.858.064	127.422	327.846	1.979.448	N/a
10	Hilang Pada Transmisi	KWh	1.656.211	1.772.440	51.212	21.771.018	N/a

Catatan: data 2024 tidak dikeluarkan oleh PLN Regional V Sintang

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020 – 2024

Rasio Elektrifikasi (RE) merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik dengan jumlah rumah tangga pada satuan wilayah tertentu. Berdasarkan tabel yang disajikan, Kabupaten Sintang menunjukkan perkembangan dalam capaian elektrifikasi. Pada tahun 2023, Kabupaten Sintang memiliki 101.368 rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan 13.364 rumah tangga yang menggunakan listrik non-PLN, dengan total 114.732 rumah tangga berlistrik. Hal ini menghasilkan Rasio Elektrifikasi PLN sebesar 88,35% dan Rasio Elektrifikasi Total sebesar 99,99%.



Tabel 2.12. Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Barat 2023-2024

NO	PROVINSI / KABUPATEN	REALISASI TAHUN 2023					REALISASI TAHUN 2024				
		JML PLG RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA NON PLN	JML PLG RMH TANGGA TOTAL	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)	JML PLG RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA NON PLN	JML PLG RMH TANGGA TOTAL	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
	KALIMANTAN BARAT	1,394,596	80,056	1,474,652	94,42	99,84	1,483,201	87,358	1,570,559	94,3	99,85
1	KAB. MEMPAWAH	79,817	460	80,277	99,42	99,99	81,889	460	82,349	99,44	99,99
2	KAB. LANDAK	70,424	7,439	77,863	90,44	99,99	75,275	8,741	84,016	89,59	99,99
3	KAB. KUBU RAYA	213,551	1,991	215,542	99,07	99,99	228,096	1,991	230,087	99,13	99,99
4	KOTA PONTIANAK	200,212	203	200,415	99,89	99,99	210,313	203	210,516	99,89	99,99
5	KAB. SAMBAS	173,233	3,104	176,337	98,23	99,99	182,422	3,104	185,526	98,32	99,99
6	KAB. BENGKAYANG	61,734	5,545	67,279	91,75	99,99	65,559	5,545	71,104	92,2	99,99
7	KOTASINGKAWANG	71,115	761	71,876	98,93	99,99	74,671	761	75,432	98,98	99,99
8	KAB. SANGGAU	113,417	14,819	128,236	87,79	99,26	122,763	14,819	137,582	88,62	99,31
9	KAB. SINTANG	101,368	13,364	114,732	88,35	99,99	110,214	15,775	125,989	87,47	99,99
10	KAB. KAPUAS HULU	59,444	6,502	65,946	90,13	99,99	64,827	7,514	72,341	89,61	99,99
11	KAB. SEKADAU	46,679	5,594	52,273	88,87	99,32	49,878	5,594	55,472	89,51	99,55
12	KAB. MELAWI	45,191	7,385	52,576	85,95	99,99	48,740	9,883	58,623	83,14	99,99
13	KAB. KETAPANG	130,754	12,335	143,089	90,69	99,24	139,890	12,414	152,304	91,24	99,34
14	KAB. KAYONG UTARA	27,657	554	28,211	98,03	99,99	28,664	554	29,218	98,1	99,99

Sumber : PLN Kalimantan Barat, 2025

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan di mana jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN bertambah menjadi 110.214 dan pengguna listrik non-PLN menjadi 15.775, dengan total 125.989 rumah tangga berlistrik. Rasio Elektrifikasi PLN tahun 2024 sedikit menurun menjadi 87,47%, namun Rasio Elektrifikasi Total tetap stabil di 99,59%. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang menempati posisi ke-9 dalam hal Rasio Elektrifikasi PLN pada tahun 2024, di bawah kabupaten-kabupaten seperti Mempawah (99,44%), Kubu Raya (99,13%), dan Kota Pontianak (99,89%). Data ini menunjukkan bahwa meskipun akses listrik total di Sintang sudah hampir mencapai 100%, masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal perluasan jaringan listrik PLN di wilayah tersebut.



Tabel 2.13. Status Desa/Kelurahan Yang Berlistrik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DESA DAN KELURAHAN	DATA DESA/KELURAHAN			RASIO DESA BERLISTRIK	KETERANGAN
			BERLISTRIK PLN	BERLISTRIK NON-PLN	BELUM BERLISTRIK		
1	KOTA PONTIANAK	29	29	0	0	100.0%	Tidak tercapai wif administrasi desa
2	KAB. KUBU RAYA	123	119	2	2	96.4%	Desa Sungai Nibung (belum berlistrik) masuk dalam kawasan HL dan 1 desa lainnya direncanakan akan dilistriki oleh PLN (peta jalan tidak PLN)
3	KAB. MENPAWAH	67	67	0	0	100.0%	
4	KAB. LANDAK	189	142	6	6	84.8%	3 Desa belum berlistrik berada di dalam kawasan CA dan 4 desa lainnya direncanakan akan dilistriki dalam roadmap PLN tahun berikutnya
5	KOTA SINGKAWANG	26	26	0	0	100.0%	
6	KAB. SAMBAS	195	195	0	0	100.0%	
7	KAB. BENGKAYANG	124	109	10	5	96.0%	Desa Klung sedang dalam proses pembangunan jaringan listrik mobilisasi material, dan 4 desa lainnya direncanakan akan dilistriki dalam roadmap PLN tahun berikutnya
8	KAB. SANGRAU	169	169	0	0	100.0%	masih terdapat wilayah rawan (desa berlistrik) yang belum dilistriki
9	KAB. SEKADAU	94	86	2	7	92.6%	3 Desa sedang dalam proses pembangunan jaringan listrik PLN (konstruksi dan mobilisasi material), dan 4 desa lainnya akan direncanakan di listriki dan roadmap PLN tahun berikutnya
10	KAB. MELAWI	169	114	4	51	69.8%	Desa Desa Latah Laga dan Desa Kayu Bunga berada di sekitar kawasan HL dan 40 desa lainnya direncanakan akan di listriki berdasarkan roadmap listrik PLN
11	KAB. SINTANG	600	269	40	107	73.6%	17 desa sedang dalam tahapan pembangunan jaringan listrik PLN (konstruksi dan mobilisasi material), 17 desa masuk dalam rencana peta jalan listrik PLN dan tercapai dalam kawasan HL serta CA
12	KAB. KAPILAS HULU	262	249	16	26	99.6%	6 desa dalam tahapan pembangunan jaringan listrik PLN (konstruksi dan mobilisasi material), 17 desa masuk dalam rencana peta jalan listrik PLN dan tercapai dalam kawasan HL serta CA
12	KAB. KETAPANG	262	219	23	23	91.2%	6 desa dalam tahapan pembangunan jaringan listrik PLN (konstruksi dan mobilisasi material), 18 desa masuk dalam rencana peta jalan listrik PLN
14	KAB. KAYONG UTARA	43	38	1	4	96.7%	2 desa masuk dalam kawasan CA, 2 desa masuk dalam rencana peta jalan listrik PLN
JUMLAH		2.145	1.803	104	233	89.1%	RASIO DESA BERLISTRIK

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, masih terdapat desa yang belum menggunakan listrik untuk penerangannya, dimana hanya Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi masih di dibawah 90% desa yang teraliri listrik.

Tabel 2.14. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Jumlah Konsumen Menggunakan Fasilitas Listrik di Kabupaten Sintang Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	% Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	71,55	64,20	92,85	90,20	94,68	N/a
2	Jumlah Konsumen Menggunakan Fasilitas Listrik PLN	Jumlah	78.695	86.957	93.597	101.580	109.975	N/a

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019 – 2023;BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020 - 2024



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 – 2023 mengalami fluktuasi. Peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Sintang mencapai 30,48% dengan rata-rata total pertumbuhan selama 4 (empat) tahun terakhir sebesar 15,58%. Sedangkan dengan periode yang sama, peningkatan jumlah konsumen yang menggunakan listrik bersumber dari jaringan listrik PLN di Kabupaten Sintang mencapai 23.018 konsumen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,14%.

Dari hasil penjelasan dapat disimpulkan bahwa meningkatnya persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Sintang ini, menggambarkan bahwa kebutuhan akan penerangan dan listrik pada masyarakat Kabupaten Sintang sudah dilayani dengan baik, meskipun belum terpenuhi secara merata ke seluruh masyarakat.

2.1.1.4.2. Ketahanan Air

Air menjadi kebutuhan hidup yang diperlukan oleh seluruh makhluk hidup. Khususnya bagi kehidupan manusia air diperlukan untuk berbagai keperluan seperti mandi, cuci, masak, minum hingga mendukung kelestarian alam dan keindahan lingkungan. Kebutuhan air bersih di Kabupaten Sintang dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sintang Tahun 2024, dijelaskan bahwa pada tahun 2024 terdapat 33,74 persen sumber air yang digunakan untuk mandi/cuci/dan lain-lain yang berasal dari air permukaan (Sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan dan lain-lain.

Berdasarkan kondisi eksisting dan capaian yang ada, persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sintang selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif seperti tergambar pada tabel berikut ini.

air adalah adanya zat atau senyawa kimia berupa Chemical Oxygen Demand (COD) dan Zinc (Zn).

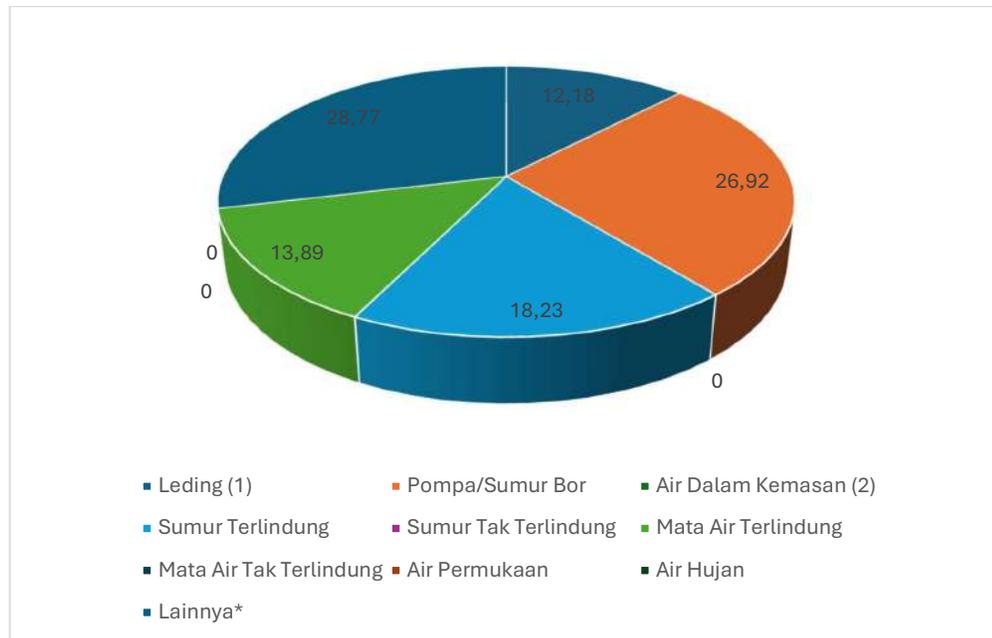
Tabel 2.15. Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih di Kabupaten Sintang Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	14,92	29,59	24,75	10,09	10,09
2	Konsumen Menggunakan Air Bersih Yang Diproduksi Oleh PDAM	Jumlah	9.854	9.941	11.439	13.387	13.030

Sumber:

1. Dokumen RKPD Kab. Sintang Tahun 2024.
2. Dokumen Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045.
3. Kabupaten Dalam Angka, BPS Tahun 2025

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sintang pada tahun 2023 bergantung pada ketersediaan air utama untuk kebutuhan rumah tangga yang sumbernya berasal dari air lainnya, yaitu sebesar 28,77 persen. Sementara itu, penggunaan sumur bor/pompa sebagai air utama untuk kebutuhan rumah tangga, adalah sebesar 26,92 persen. Kemudian, sebesar 18,23 persen bersumber dari Sumur terlindung/tak terlindung, sebesar 13,89 persen berasal dari mata air terlindung/tak terlindung, dan sisanya sebesar 12,18 persen menggunakan air leding.



Gambar 2.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/Dan Lain-Lain Kabupaten Sintang Tahun 2023

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 (Hasil Susenas)

Berikut ini akan disajikan informasi distribusi persentase rumah tangga di Kabupaten Sintang menurut sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk Mandi/Cuci/dan Lain-Lain tahun 2019 – 2023 pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/dan Lain-Lain di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023

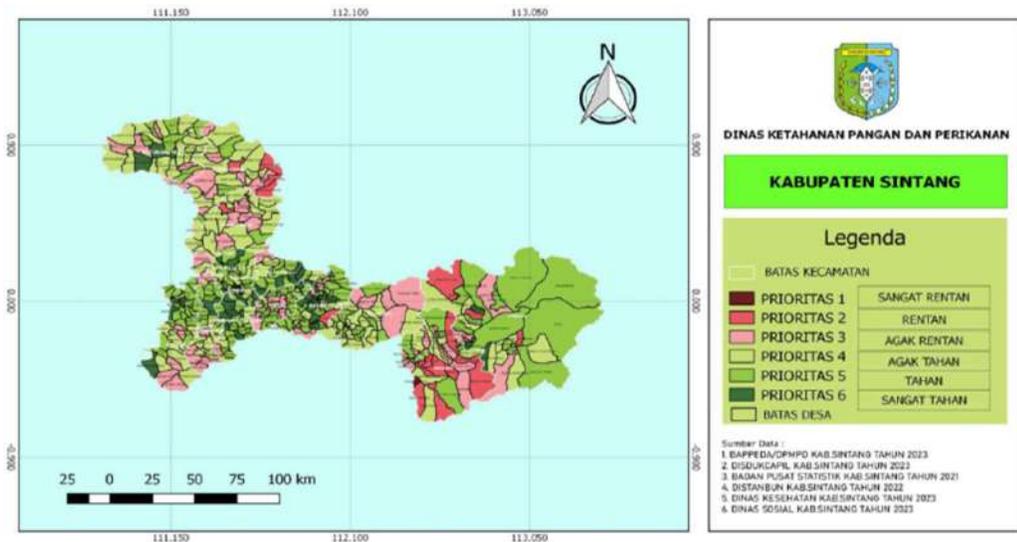
No	Sumber Air Utama	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Leding ⁽¹⁾	6,52	3,21	5,43	9,71	12,18	12,56	
2	Air Dalam Kemasan ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Pompa/Sumur Bor	21,70	24,14	26,04	30,31	26,92	49,60	
4	Sumur Terlindung	-	-	-	-	18,23		
5	Sumur Tak Terlindung	-	-	-	-			
6	Mata Air Terlindung	19,63	18,80	10,80	17,59	13,89		
7	Mata Air Tak Terlindung	14,39	11,00	12,20	38,65			
8	Air Permukaan	-	-	-	-	-		
9	Air Hujan	-	-	-	-	-		
10	Lainnya*	37,77	42,85	45,53	33,74	28,77		37,84
Jumlah Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00

Catatan : *Lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan leding meteran dan leding eceran. Air kemasan bermerek dan air isi ulang
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023, diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional

Penyediaan air bersih di Kabupaten Sintang sebagian besar dilaksanakan oleh BUMD yaitu PDAM Tirta Senentang. Sebagai satu-satunya BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sintang, Perumdum Tirta Senentang diharapkan dapat mempertahankan tingkat kesehatan perusahaan dengan kategori Sehat dan kehilangan air (Nonrevenue Water) di bawah standar nasional 25%. Dengan perluasan cakupan layanan setidaknya sebesar 12% terlayani, kualitas air yang diproduksi memenuhi syarat air bersih (MSAB), kuantitas di atas Standar Pelayanan Minimal Kementerian Pekerjaan Umum, jam pelayanan dapat maksimal yaitu 24 jam dan tarif yang dikenakan telah Full Cost Recovery (tarif yang dikenakan dapat menutup biaya produksi) sehingga secara konsisten dapat membantu Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan air bersih.

2.1.1.4.3. Kemandirian Pangan

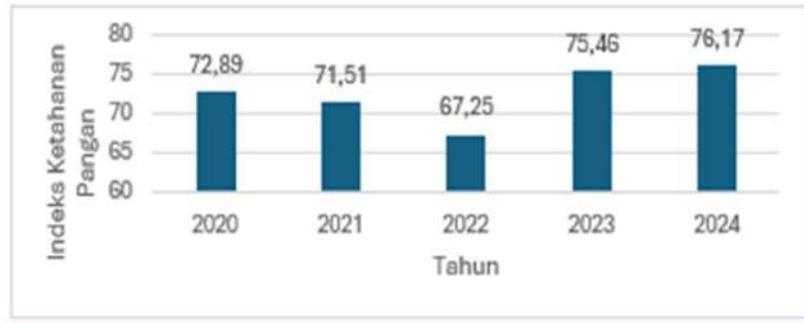
Kemandirian Pangan merupakan kemampuan suatu wilayah atau daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri tanpa bergantung pada impor atau sumber daya eksternal. Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin.



Gambar 2.4. Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan

Sumber : Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Sintang, 2024

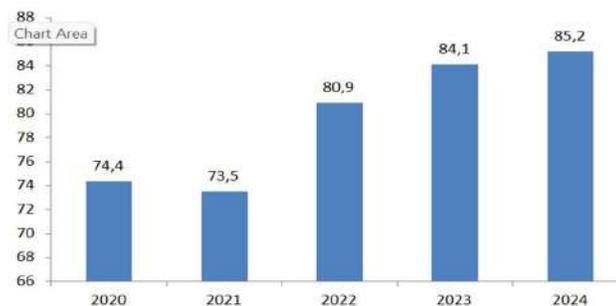
Dalam mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian berupa Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Nilai IKP Kabupaten Sintang berdasarkan Buku Indeks Ketahanan Pangan dari tahun 2020 yaitu 72.89, pada tahun 2021 hingga tahun 2022 menurun mejadi 67.25, namun pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 76,17. Data IKP di Kabupaten Sintang selengkapnya disajikan dalam grafik berikut ini.



Gambar 2.5. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

Sumber : Buku Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2020-2024

Pola Pangan Harapan atau *Desirable Dietary Pattern* merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Data Skor PPH tahun 2020-2024 di Kabupaten Sintang disajikan dalam grafik berikut ini.



Gambar 2.6. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2024

Sumber: Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan, Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024, Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat

Skor pola pangan harapan yang ada di Kabupaten Sintang cenderung naik dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang lebih baik dalam mencapai Pola Pangan Harapan yang sesuai dengan pedoman gizi dan kesehatan, serta sejalan dengan tujuan Misi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kedua, yaitu Zero Hunger. Kecukupan energi dan protein di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan. Selengkapnya mengenai data kecukupan energi dan protein di Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel 2.17.



Tabel 2.17. Kecukupan Energi dan Protein di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Beras (kg/kapita/tahun)	89,8	93,6	101,0	94,9	104,6
Angka Kecukupan Energi (%)	84,30	87,40	91,70	90,50	93,50
Angka Kecukupan Protein (%)	88,60	91,70	98,90	99,60	100,8

Sumber: Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan, Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023,

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

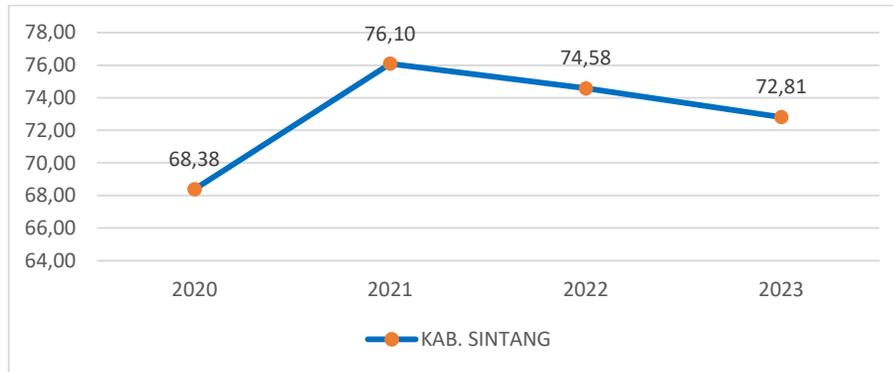
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator Indeks Kualitas Air (IKA) (7 parameter yaitu TSS, BOD, COD, DO, Total fosfat sebagai P, Total Coliform, dan Total Colitinja), Indeks Kualitas Udara (IKU) (2 parameter NO₂ dan SO₂), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (parameter yang diukur luas tutupan hutan). Perhitungan IKLH berdasarkan data hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup.

Berikut ini akan disajikan nilai IKA, IKU, IKLH Kabupaten Sintang tahun 2020-2023.

Tabel 2.18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2023

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kriteria
2020	45,93	91,70	63,79	68,38	Baik
2021	63,33	95,30	62,50	76,10	Baik
2022	60,00	94,49	62,80	74,58	Baik
2023	54,62	95,43	62,23	72,81	Baik
2024				70,63	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Tahun 2021 – 2023, Laporan IKLH Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023



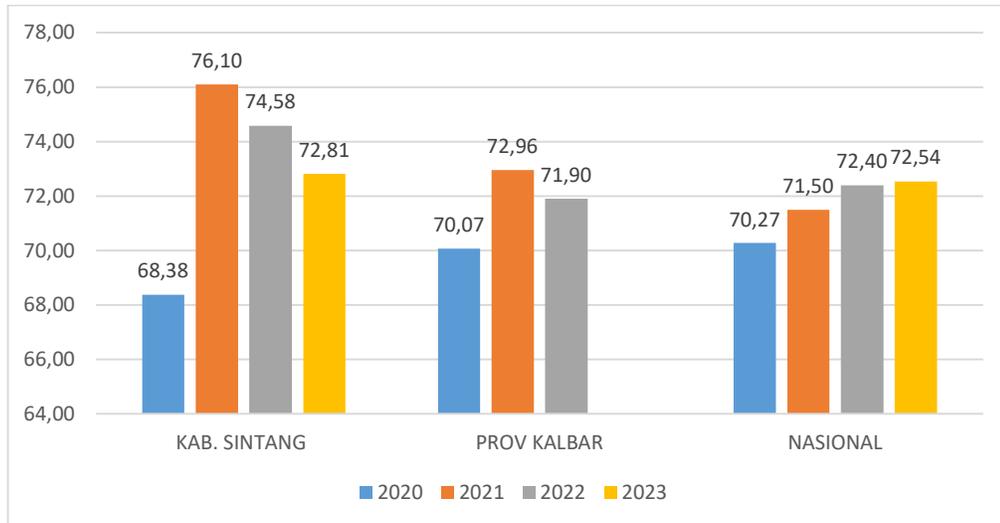
Grafik 2.1 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2023 – 2024

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa pada tahun 2021 - 2024 nilai IKLH Kabupaten Sintang masuk kategori “Baik”. Namun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, nilai IKLH Kabupaten Sintang mengalami penurunan sampai di angka 70,63% tahun 2024. Nilai IKLH Kabupaten Sintang pada Tahun 2023 berada pada peringkat 83 dari 514 Kabupaten/Kota dan peringkat ke 3 dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Peningkatan nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh faktor status nilai IKU Kabupaten Sintang yang tergolong tinggi.

Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, selama kurun waktu tahun 2021 – 2024 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir masih lebih baik atau lebih tinggi walaupun nilainya terus menurun. Secara keseluruhan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang selama periode 2020 - 2024 mengalami penurunan sebesar 4,43 poin dengan rata-rata penurunan pertumbuhan total sebesar 0,07% per tahun.

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2020 - 2023 adalah sebagai berikut.



Grafik 2.2. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Nasional Periode Tahun 2020 - 2023 (Dalam Persen)

*Sumber: Dokumen dan Publikasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang, Tahun 2024
Dokumen RPPLH Kabupaten Sintang, Tahun 2023 -2053 Satu Data Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2024 Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian
Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Tahun 2024*

Hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Sintang adalah capaian realisasi IKLH dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang menurun. Diketahui bahwa pada tahun 2021 - 2023 nilai IKLH Kabupaten Sintang masih masuk dalam kategori “Baik”. Selain IKLH indikator lain yang menjadi tolak ukur pengelolaan lingkungan hidup yaitu penurunan gas emisi rumah kaca, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari bussines as usual pada tahun 2030. Sebagai tindak lanjut, maka pemerintah daerah kabupaten Sintang melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyusunan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) kabupaten Sintang dengan sumber data tahun 2022-2023.

Perhitungan emisi GRK yang dilaporkan terdiri dari 4 (empat) sektor, dimana sektor IPPU dinilai sebagai sektor yang tidak terdapat di Kabupaten Sintang. Secara umum hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022, yaitu 224.751 Gg CO₂ pada tahun 2022 menjadi 230.661 Gg CO₂ pada tahun 2023. Hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 untuk sektor



energi dan kekhutan, tetapi mengalami kenaikan pada sektor limbah dan pertanian

A. Rasio Penanganan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Hampir setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sampah dapat dalam bentuk padat, cair, atau gas. Sampah terbentuk dari berbagai sumber, salah satunya dari konsumsi manusia sebagai pengguna barang. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sintang berpengaruh juga kepada gaya hidup sehingga berpengaruh pada meningkat jumlah dan banyaknya sampah. Rasio Penanganan Sampah di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.19. Rasio Penanganan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk

No	INDIKATOR	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah TPS	unit	84	85	86	11	8
2	Volume Sampah TPS	M ³	164	170	186	186	186
3	Daya Tampung TPS Persatuan Penduduk	M ³	0,391	0,2	0,202	0,026	0,018
4	Rasio TPS Terhadap Jumlah Penduduk	TPS/Jiwa	1 : 4.889	1 : 4.992	1 : 4.992	1 : 4.992	1 : 5.420
5	Jumlah timbulan sampah / Hari Kabupaten	M ³ /Hari	1.039	1.061	1.066	1.073	1.091
6	Jumlah timbulan sampah/Tahun Kabupaten	M ³ /Tahun	379.174,78	387.195,65	389.104,60	391.788,26	398.170,29
7	Kenaikan Timbulan Sampah Tahunan	M ³ /Tahun	6.507,04	8.020,87	9.929,82	4.592,61	6.382,03
8	Persentase Kenaikan Timbulan Sampah	%	1,72	2,07	2,55	1,17	1,6
9	Kenaikan Timbulan Sampah Tahunan	M ³ /Hari	374,87	370,55	427,03	589,1	633,9
10	Jumlah Sampah tertangani Kabupaten / masuk TPA	M ³ /Tahun	136.827,55	135.250,00	155.865,95	215.021,50	231.373,50
11	Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Sintang (Masuk TPA)	%	36,09	34,93	40,06	54,88	58,11

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Kenaikan Timbulan Sampah dari Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan rata-rata 1,82 %. Dengan peningkatan terbesar di tahun 2022 dengan persentase 2,55 % atau dengan jumlah kenaikan timbulan sampah mencapai 9.929,82 M³/Tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan berkurangnya jumlah TPS yang di Tahun 2024 terdapat 8 TPS. Jumlah Sampah tertangani Kabupaten / masuk TPA

mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 dengan rata-rata penanganan sampah di TPA sekitar 44,81 %. Penanganan Sampah di TPA tertinggi pada tahun 2024 mencapai 231.373,50 M³/Tahun atau 58,11%.

2.1.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Ketangguhan dalam menghadapi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan aspek krusial dalam perencanaan pembangunan daerah berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang telah mengalami berbagai kejadian bencana yang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan infrastruktur wilayah. Fenomena banjir yang terjadi secara periodik, tanah longsor di beberapa titik rawan, serta kebakaran hutan dan lahan gambut menjadi ancaman bencana yang memerlukan penanganan sistematis dan terintegrasi. Sejalan dengan itu, perubahan pola cuaca dan peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrem sebagai manifestasi perubahan iklim global turut memperbesar risiko bencana di Kabupaten Sintang.

Risiko bencana adalah penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah. Tingkat risiko bencana di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20. Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Sintang

Jenis Bahaya		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
2	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
3	Gempa Bumi	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
5	Kekeringan	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
6	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029

Tabel 2.21. Kelas Kerentanan Bencana Multibahaya di Kabupaten Sintang

	Jenis Bencana	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
2	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	-	Rendah
3	Gempa Bumi	Tinggi	Rendah	-	Rendah
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5	Kekeringan	-	Tinggi	Tinggi	Rendah
6	Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sintang Tahun 2025– 2029

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sintang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024, dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021 (131,60). Meskipun terjadi peningkatan dan penurunan nilai IRB, Kabupaten Sintang tetap berada pada kriteria kelas risiko "Sedang" selama periode tersebut.

Peningkatan nilai IRB yang signifikan pada tahun 2021 terutama disebabkan oleh meningkatnya kejadian banjir akibat curah hujan yang tinggi. Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang dilalui oleh sungai besar beserta anak-anak sungainya menjadikan wilayah ini rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko banjir adalah degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan berkurangnya area resapan air akibat perubahan tata guna lahan.

**Tabel 2.22. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sintang
Tahun 2020 – 2024**

Kabupaten Sintang	Capaian (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	106,67	131,60	114,89	114,89	123,96
Kriteria Kelas Risiko	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: INARISK, BNPB Tahun 2024

Selain Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Berdasarkan sumber dari Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana diperoleh informasi bahwa terdapat 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Sintang yang belum melakukan pelaporan serta pemenuhan 71 indikator Indeks Ketahanan Daerah yang targetkan oleh BNPB pada tahun 2024.

Tabel 2.23. Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2024

Kabupaten Sintang	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	N/A	0,20	0,25	N/A	0,49
Kriteria Penilaian	-	Rendah	Rendah	-	-

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Deputi Bidang Sistem dan Strategi, 2024

Sedangkan, berdasarkan skor prioritas terhadap indeks ketahanan daerah di Kabupaten Sintang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24. Hasil Kajian Ketahanan Kabupaten Sintang

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,96	0,53	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,77		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,80		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,59		
6	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,52		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,55		

Sumber: Dokumen KRB Kab. Sintang Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan hasil kajian ketahanan Kabupaten Sintang, diketahui kelas ketahanan Kabupaten Sintang dikategorikan sedang dengan indeks 0,49. Secara umum hal tersebut diartikan bahwa Kabupaten Sintang telah melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Hasil ketahanan daerah tersebut menentukan arah kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

2.1.1.7. Demografi

2.1.1.7.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 421.306 jiwa. Empat tahun kemudian, menurut estimasi BPS berdasarkan hasil SP 2020, penduduk Kabupaten Sintang pada

tahun 2024 berjumlah 443.684 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun Kabupaten Sintang tergolong rendah, yakni 1,30 persen. LPP tertinggi terjadi di Kecamatan Sintang (2,45%). LPP terendah terjadi di Kecamatan Ambalau (0,16%), lihat Tabel 2.38, Pertambahan penduduk Kabupaten Sintang dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi bersih.

Tabel 2.25. Jumlah Penduduk, Distribusi, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Distribusi Penduduk	LPP per tahun (%) 2000-2024
1.	Serawai	22.985	5,18	0,23
2.	Ambalau	13.342	3,01	0,16
3.	Kayan Hulu	22.994	5,18	0,26
4.	Sepauk	55.864	12,59	1,20
5.	Tempunak	31.379	7,07	0,99
6.	Sungai Tebelian	36.895	8,32	1,56
7.	Sintang	85.167	19,20	2,45
8.	Dedai	31.011	6,99	0,73
9.	Kayan Hilir	28.728	6,47	1,04
10.	Kelam Permai	19.717	4,44	1,70
11.	Binjai Hulu	14.978	3,38	1,87
12.	Ketungau Hilir	25.488	5,74	1,41
13.	Ketungau Tengah	31.488	7,10	0,87
14.	Ketungau Hulu	23.648	5,33	1,18
Kabupaten Sintang		443.684	100,00	1,30

Sumber : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat, 2025

Jumlah penduduk tersebar di 14 Kecamatan dan persebaran penduduk di Kabupaten Sintang belum merata antar kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sintang yakni 85.167 jiwa (19,20%) dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ambalau yakni 13.342 jiwa atau 3,01%.

2.1.1.7.2. Komposisi Umur Penduduk

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (228.753 jiwa) lebih banyak dari penduduk perempuan (214.931 jiwa). Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan Sex Ratio (SR) melebihi angka 100, tepatnya 106, lihat Tabel dibawah

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah terbanyak penduduk Kabupaten Sintang berada pada kelompok umur 0-4 tahun (39.647 jiwa atau 8,94%) dan terendah pada kelompok umur 75 tahun lebih sebanyak 6.367 jiwa atau 1,43%.

Jumlah penduduk laki-laki melebihi penduduk perempuan, terjadi pada setiap kelompok umur.

Tabel 2.26. Jumlah Penduduk Kab. Sintang Menurut Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2024

Umur (tahun)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Lk + Pr (jiwa)	Persentase
0-4	20.266	19.381	39.647	8,93
5-9	19.000	18.586	37.586	8,47
10-14	19.192	18.511	37.703	8,50
15-19	19.553	18.220	37.773	8,51
20-24	18.717	17.151	35.868	8,08
25-29	18.910	17.557	36.467	8,22
30-34	19.003	18.049	37.052	8,35
35-39	18.562	17.396	35.958	8,10
40-44	16.765	15.766	32.531	7,33
45-49	15.441	14.467	29.908	6,74
50-54	12.742	11.567	24.306	5,47
55-59	10.213	9.272	19.485	4,39
60-64	7.842	7.101	14.943	3,36
65-69	5.587	5.258	10.845	2,44
70-74	3.694	3.551	7.245	1,63
75+	3.266	3.101	6.367	1,43
Total	228.753	214.931	443.684	100,00

Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat, 2025

Selama periode 2010-2020, telah terjadi pergeseran struktur umur penduduk di Kabupaten Sintang dari penduduk usia muda menuju usia tua. Pergeseran ini tampak dari menurunnya proporsi usia muda non produktif (0-14 tahun) dari 34,28% tahun 2010 menjadi 27,09% tahun 2020 dan meningkatnya proporsi usia tua non produktif (65 tahun lebih) dari 3,04% menjadi 4,66%. Pada periode yang sama, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat dari 62,68% menjadi 68,25%, lihat pada Tabel 2.39

Perubahan struktur penduduk ini dikarenakan peningkatan pembangunan parameter demografi dan sosial ekonomi yang pada gilirannya mengundang migrasi masuk ke Kabupaten Sintang. Pertambahan penduduk lansia erat

kaitannya dengan perbaikan status sosial ekonomi rumah tangga teknologi kesehatan.

2.1.1.7.3. Rasio Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020, proporsi penduduk usia non produktif (0-14) tahun berkurang 5,68% dan usia 65 tahun keatas bertambah 1,66%. Proporsi penduduk usia 15-64 tahun bertambah 4,02%. Perbandingan penduduk usia non produktif dengan usia produktif yang disebut *Dependency Ratio* (DR) atau Rasio Beban Ketergantungan (RBK) menurun dari 55,55 tahun 2010 menjadi 46,39 tahun 2020. Empat tahun kemudian proporsi penduduk usia 0-14 tahun semakin berkurang menjadi 25,9%. Kemudian penduduk usia 15 - 64 tahun meningkat menjadi 68,58% serta penduduk usia 65+ tahun semakin bertambah menjadi 5,52. Pada gilirannya angka DR semakin mengecil hingga mencapai 45,82 di tahun 2024. Penurunan ini merupakan dampak dari keberhasilan dan kesadaran masyarakat menjalankan program KB. Rasio beban ketergantungan yang semakin kecil pertanda baik bagi daya saing daerah.

Angka DR kurang dari 50, menandakan Kabupaten Sintang telah masuk dalam era bonus demografi dan ini merupakan kesempatan emas (gold opportunity) bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kualitas SDM guna percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi yang terjadi di era digitalisasi ditandai dengan perubahan generasi dari Generasi X (kelahiran 1965-80) ke Generasi Milenial (kelahiran 1981-96); Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Post Z (kelahiran 2013). Potensi Generasi Milenial, Generasi Z dan Generasi Post Z yang jumlahnya relatif besar (hampir 71,2% dari 421.306 jiwa penduduk Kabupaten Sintang) harus ditingkatkan kualitasnya dalam konteks percepatan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 2.27. Struktur Penduduk dan *Dependency Ratio* Kabupaten Sintang Tahun 2010, 2020 dan 2024

Umur (tahun)	2010		2020		2024		Dependency Ratio (DR)		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	2010	2020	2024
0 - 14	119.270	32,7	113.825	27,02	114.936	25,9			
15 - 64	234.496	64,29	287.801	68,31	304.291	68,58	55,55	46,39	45,82
65+	10.993	3,01	19.680	4,67	24.457	5,52			
Total	364.759	100,00	421.306	100,00	443.684	100,00			

Sumber : Sensus Penduduk, Tahun 2010, 2020 dan Sintang Dalam Angka 2025



2.1.1.7.4. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Sintang termasuk daerah berpenduduk jarang, dengan kepadatan penduduk rendah, yakni 20 jiwa/km² di tahun 2024. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sintang (239 jiwa/km²), sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Ambalau (2 jiwa/km²). Di antara 14 kecamatan, terdapat enam kecamatan yang kepadatannya kurang dari 20 jiwa/km², yaitu Kecamatan Ketungau Tengah (16 jiwa/km²); Ketungau Hilir (16 jiwa/km²); Kayan Hulu (13 jiwa/km²); Ketungau Hulu (12 jiwa/km²); Serawai (10 jiwa/km²) dan Kecamatan Ambalau (2 jiwa/km²).

Tabel 2.28. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Serawai	22.985	10
2.	Ambalau	13.342	2
3.	Kayan Hulu	22.994	13
4.	Sepauk	55.864	37
5.	Tempunak	31.379	36
6.	Sungai Tebelian	36.895	62
7.	Sintang	85.167	239
8.	Dedai	31.011	52
9.	Kayan Hilir	28.728	27
10.	Kelam Permai	19.717	31
11.	Binjai Hulu	14.978	40
12.	Ketungau Hilir	25.488	16
13.	Ketungau Tengah	31.488	16
14.	Ketungau Hulu	23.648	12
Kabupaten Sintang*		443.684	10

Sumber : Profil kependudukan tahun 2024

2.1.1.7.5. Proyeksi Demografi Penduduk Tahun 2025-2029

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.



A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, jumlah penduduk Kabupaten Sintang tahun 2029 sebanyak 469.880 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 228.640 jiwa dan perempuan sebanyak 241.240 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sintang bertambah sebanyak 20.670 jiwa dibanding tahun 2025 (449.210 jiwa). Laju Pertumbuhan Penduduk 0,92% per tahun. Angka Sex Ratio cenderung tidak berubah yakni di kisaran 105 dimana jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Jika luas wilayah Kabupaten Sintang tidak mengalami perubahan (tetap 21.638 km²), maka kepadatan penduduk akan meningkat dari 20,76 jiwa/km² tahun 2025, menjadi 21,72 jiwa/km² tahun 2029.

B. Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Sintang diproyeksi bertambah setiap tahunnya dari 308.310 jiwa pada tahun 2025, menjadi 322.280 jiwa tahun 2029 atau bertambah sebanyak 13.970 jiwa dalam tempo 5 tahun. Secara kuantitatif, jumlah penduduk usia produktif relatif tersedia cukup untuk berperan dalam pembangunan daerah. Secara kualitatif, penduduk usia produktif masih harus terus ditingkatkan guna mengantisipasi perubahan pasar kerja yang memasuki era ekonomi digital dan perubahan struktur pembangunan (transformasi pembangunan) dari berbasis pertanian menuju basis industri dan digital.

Sesuai prediksi dan analisis berbagai kalangan, Indonesia tengah berada pada periode yang dinamakan sebagai Bonus Demografi, termasuk Kabupaten Sintang. Menariknya, hasil SP 2020 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2029 yang sebagian besar berasal dari Generasi Z/Gen Z (23,94%), yaitu generasi yang lahir pada antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Generasi Milenial yang digadang-gadang menjadi motor pergerakan masyarakat saat ini, jumlahnya berada sedikit di bawah Gen Z, yaitu sebanyak 23,12% dari total penduduk Kabupaten Sintang, Ini artinya, keberadaan Gen Z memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Kabupaten Sintang saat ini dan nanti.

Di banyak analisis, para ahli menyatakan bahwa Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (*boundary-less generation*). Satu hal yang menonjol, Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam



berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alaminya layaknya mereka bernafas.

Tabel 2.29. Distribusi Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Generasi Tahun 2025 dan 2029

Kelompok Generasi	2025		2029	
	Jumlah (jiwa)	Persentase	Jumlah (jiwa)	Persentase
Post Gen Z (Kelahiran 2013)	77,56	17,27	78,30	16,66
Generasi Z (Kelahiran 1997-2012)	111,53	24,83	112,49	23,94
Generasi Milenial (Kelahiran 1981-1996)	109,63	24,40	108,64	23,12
Generasi X (Kelahiran 1965-1980)	109,07	24,28	120,24	25,59
Baby Boomer (1946-1964)	34,62	7,71	41,16	8,76
Post Boomer (kelahiran sebelum 1946)	6,81	1,52	9,05	1,93
Total	449,22	100,00	469,88	100,00

Sumber : Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat 2020-2045

Tabel 2.30. Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 – 2029 (dalam 000)

Laki-Laki

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	20,47	20,29	20,13	19,98	19,84
5–9	19,00	19,34	19,64	19,90	20,13
10–14	19,05	18,97	18,93	18,92	18,93
15–19	19,63	19,59	19,47	19,30	19,12
20–24	18,77	18,89	19,08	19,28	19,44
25–29	18,85	18,78	18,70	18,64	18,63
30–34	18,96	18,92	18,88	18,84	18,80
35–39	18,79	18,91	18,95	18,92	18,87
40–44	17,00	17,31	17,67	18,05	18,37



Umur	2025	2026	2027	2028	2029
45-49	15,78	16,03	16,20	16,33	16,49
50-54	13,19	13,67	14,15	14,62	15,03
55-59	10,58	10,96	11,35	11,75	12,16
60-64	8,18	8,50	8,83	9,16	9,49
65-69	5,83	6,09	6,38	6,67	6,97
70-74	3,89	4,07	4,25	4,42	4,60
75+	3,45	3,66	3,89	4,13	4,37
Total	231,41	233,98	236,48	238,89	241,24

Sumber: Hasil Analisis Data Olahan, Tahun 2023

Perempuan

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-4	19,63	19,47	19,32	19,17	19,04
5-9	18,46	18,71	18,91	19,09	19,29
10-14	18,48	18,49	18,52	18,55	18,53
15-19	18,40	18,48	18,50	18,46	18,41
20-24	17,20	17,34	17,56	17,82	18,06
25-29	17,41	17,27	17,14	17,04	17,02
30-34	17,98	17,88	17,75	17,60	17,44
35-39	17,64	17,80	17,89	17,90	17,88
40-44	15,95	16,22	16,55	16,91	17,23
45-49	14,88	15,16	15,33	15,44	15,56
50-54	12,03	12,55	13,11	13,67	14,16
55-59	9,66	10,05	10,43	10,82	11,24
60-64	7,43	7,77	8,13	8,50	8,88
65-69	5,50	5,76	6,03	6,31	6,60
70-74	3,79	4,01	4,22	4,42	4,62
75+	3,36	3,66	3,98	4,32	4,68
Total	217,80	220,60	223,34	226,03	228,64

Sumber: Hasil Analisis Data Olahan, Tahun 2023



Laki-Laki + Perempuan

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-4	40,10	39,76	39,45	39,15	38,88
5-9	37,46	38,05	38,55	38,99	39,42
10-14	37,53	37,46	37,45	37,47	37,46
15-19	38,03	38,07	37,97	37,76	37,53
20-24	35,97	36,23	36,64	37,10	37,50
25-29	36,26	36,05	35,84	35,68	35,65
30-34	36,94	36,80	36,63	36,44	36,24
35-39	36,43	36,71	36,84	36,82	36,75
40-44	32,95	33,53	34,22	34,96	35,60
45-49	30,66	31,19	31,53	31,77	32,05
50-54	25,22	26,22	27,26	28,29	29,19
55-59	20,24	21,01	21,78	22,57	23,40
60-64	15,61	16,27	16,96	17,66	18,37
65-69	11,33	11,85	12,41	12,98	13,57
70-74	7,68	8,08	8,47	8,84	9,22
75+	6,81	7,32	7,87	8,45	9,05
Total	449,21	454,58	459,82	464,92	469,88

Sumber: Hasil Analisis Data Olahan, Tahun 2023

C. Angka Ketergantungan

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur mengalami pergeseran dari penduduk muda tahun 2020 menjadi penduduk tua tahun 2045. Pergeseran ini ditandai dengan berkurangnya proporsi penduduk kelompok umur 0-4 tahun dari 25,62% tahun 2025 menjadi 24,64% tahun 2029. Di sisi lain, proporsi penduduk kelompok tua (65+ tahun) bertambah dari 5,75% tahun 2025 menjadi 6,78% tahun 2029. Proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) juga menunjukkan kecenderungan menurun dari 68,63% tahun 2025 menjadi 68,59% tahun 2029. Dengan komposisi pergeseran proporsi jumlah penduduk tersebut, Angka Ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Sintang berada di bawah 50, tepatnya 45,70 tahun 2025 dan 45,80 tahun 2029. Angka ketergantungan kurang dari 50 menandakan bahwa sejak tahun 2020 Kabupaten Sintang telah memasuki era bonus demografi hingga tahun 2045 dengan Angka Ketergantungan sebesar

47,43. Era bonus demografi yang relatif panjang ini merupakan kesempatan emas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan dan pemberdayaan SDM berkualitas yang jumlahnya relatif banyak.

Tabel 2.31. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan Kabupaten Sintang tahun 2025-2029

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-14	25,62	25,36	25,10	24,87	24,64
15-64	68,63	68,65	68,64	68,62	68,59
65+	5,75	5,99	6,25	6,51	6,78
DR	45,70	45,67	45,68	45,72	45,80

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat, 2024

D. Penduduk Usia Lanjut

Seiring dengan kemajuan pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang ditandai dengan pemerataan persebaran ketersediaan sarana dan prasarana hingga ke pedesaan dan peningkatan pendapatan per kapita, jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk usia lanjut tahun 2025 sebanyak 25.820 jiwa (5,75%) dan bertambah terus setiap tahunnya hingga mencapai 31.840 jiwa (6,78%) tahun 2029.

2.1.1.8. Telaahan RTRW

2.1.1.8.1. Struktur Ruang

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi: peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah dan peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana permukiman dan prasarana Wilayah lainnya di seluruh Wilayah.

Dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sintang sistem pusat permukiman meliputi:



- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, yaitu PKW Sintang di Kecamatan Sintang dan Kecamatan Sintang Barat.
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara, yaitu PKSN Jasa (dalam Draf RTRWN: Sungai Kelik) di Kecamatan Ketungau Hulu.
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan, meliputi: PKL Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah; PKL Nanga Sepauk di Kecamatan Sepauk; PKL Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir; dan PKL Nanga Serawai di Kecamatan Serawai.
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan, meliputi: PPK Sungai Pisau di Kecamatan Ketungau Hulu; PPK Binjai Hulu di Kecamatan Binjai Hulu; PPK Sungai Ukoi di Kecamatan Sei Tebelian; PPK Kebong di Kecamatan Kelam Permai; dan PPK Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau.
- Kawasan Transmigrasi (KT); RPJMN 2025-2029 menetapkan Kecamatan Ketungau hulu sebagai Kawasan Transmigrasi

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, meliputi: PPL Empura di Kecamatan Ketungau Hulu; PPL Wana Bhakti di Kecamatan Ketungau Tengah; PPL Panggi Agung di Kecamatan Ketungau Tengah; PPL Semubuk di Kecamatan Ketungau Hilir; PPL Nanga Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir; PPL Sekubang di Kecamatan Sepauk; PPL Nanga Tempunak di Kecamatan Tempunak; PPL Kuala Tiga di Kecamatan Tempunak; PPL Bonet Lama di Kecamatan Sei Tebelian; PPL Nanga Dedai-Penyak Lalang di Kecamatan Dedai; PPL Emparu Baru di Kecamatan Dedai; PPL Kempas Raya di Kecamatan Kayan Hilir; PPL Nanga Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu; PPL Tontang di Kecamatan Serawai; PPL Nanga Sake di Kecamatan Ambalau; dan PPL Buntut Sabon di Kecamatan Ambalau



2.1.1.8.2. Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Kawasan Lindung meliputi: badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan hutan adat dan kawasan cagar budaya.

1. Badan air meliputi Badan Air di dalam kawasan hutan dan Badan Air di luar kawasan hutan seluas kurang lebih 16.571 ha, terdapat di: Kecamatan Ketungau Hulu; Kecamatan Ketungau Tengah; Kecamatan Ketungau Hilir; Kecamatan Binjai Hulu; Kecamatan Sepauk; Kecamatan Tempunak; Kecamatan Sintang; Kecamatan Kelam Permai; Kecamatan Dedai; Kecamatan Kayan Hilir; Kecamatan Kayan Hulu; Kecamatan Serawai; dan Kecamatan Ambalau.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung. Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 455.986 ha, terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu; Kecamatan Ketungau Tengah; Kecamatan Sepauk; Kecamatan Tempunak; Kecamatan Kelam Permai; Kecamatan Kayan Hilir; Kecamatan Kayan Hulu; Kecamatan Serawai; dan Kecamatan Ambalau.
3. Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan, seperti sempadan sungai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan meliputi: kawasan danau lindung; kawasan rimba gupung; dan ABKT.
 - Kawasan danau lindung berupa sempadan danau, meliputi: Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu; sungai (Ds Nanga Bugau); Danau di Kecamatan Ketungau Tengah; sungai (Sumber Sari); Danau di Kecamatan Ketungau Tengah; Tirta Karya, Wirayuda, Nanga Sepakat; Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah; Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah; Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir; Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir; Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir; Danau Mensiku di Kecamatan Binjai Hulu; Danau di Kecamatan Sintang; dan Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak; Danau Guci - Balai Angin,



- Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang; Danau Sijab di Kecamatan Binjai Hulu.
- Kawasan rimba gupung meliputi: Munguk Munyuan yang merupakan bagian dari Rimba Kalungtap Desa Betung Permai di Kecamatan Ketungau Hilir; Tawang Pumpung yang merupakan bagian dari Rimba Kalungtap Desa Betung Permai di Kecamatan Ketungau Hilir; Mungguk Panjai yang merupakan bagian dari Rimba Mensiku Lestari Desa Mensiku di Kecamatan Binjai Hulu; Rimba Seringin Desa Sepulut di Kecamatan Sepauk; Rimba Sungai Lalau Desa Balai Harapan di Kecamatan Tempunak; Rimba Sungai Nis Desa Balai Harapan di Kecamatan Tempunak; Rimba Hulu Berbatak Desa Sungai Buluh di Kecamatan Tempunak; Rimba Bukit Liang Desa Pelimping di Kecamatan Kelam Permai; Rimba Bukit Liang Desa Sungai Pukat di Kecamatan Kelam Permai; Rimba Perauh Desa Gempa Raya di Kecamatan Kelam Permai; Rimba Tawang Selubang Desa Merpak di Kecamatan Kelam Permai; Rimba Tawang Mersibung Desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai; Rimba Tawang Sebesai Desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai; Rimba Tawang Semilas Desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai; Rimba Tawang Sepayan Desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai; Rimba Tawang Serimbak Desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai; Geruguk Hulu Tepelang – Selat yang merupakan bagian dari Pendam Tembawang Geruguk Desa Kempas Raya di Kecamatan Kayan Hilir; Karah – Topolangan Kabeu yang merupakan bagian dari Kolahkak Himba Mosuang Desa Mensuang di Kecamatan Ambalau; dan Korong Duhung yang merupakan bagian dari Kolahkak Himba Mosuang Desa Mensuang di Kecamatan Ambalau.
4. Kawasan konservasi berupa Kawasan Pelestarian Alam seluas kurang lebih 70.462 ha, meliputi: Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya seluas kurang lebih 69.131 ha yang berada di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau; Taman Wisata Alam Baning seluas 203 ha yang berada di Kecamatan Sintang; Taman Wisata Alam Gunung Kelam seluas 1.128 ha yang berada di Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai.



5. Kawasan Hutan Adat seluas 9.395 ha meliputi: Hutan adat Dayak Seberuang Kampung Silit di Desa Nanga Pari di Kecamatan Sepauk dengan luas 4.276 ha; Hutan adat Dayak Seberuang Kampung Ansok di Desa Benua Kencana di Kecamatan Tempunak dengan luas 1.110 ha; dan Hutan adat Dayak Seberuang Kampung Silit Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak di Desa Riam Batu di Kecamatan Tempunak dengan luas 4.009 ha.
6. Kawasan cagar budaya meliputi: Rumah Betang Lubuk Pantak Desa Sebetung Paluk di Kecamatan Ketungau Hulu; Makam Panggi Ruguk di Desa Panggi Agung Kecamatan Ketungau Tengah; Makam Aji Melayu, Batu Lingga Yoni, dan Batu Nandi di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk; Batu Lingga Yoni Desa Bernayau di Kecamatan Sepauk; Sumur Garam Dusun Suak Desa Manis Raya di Kecamatan Sepauk; Sumur Asu Desa Manis Raya di Kecamatan Sepauk; Arca Gusar Putung Kempat Desa Sungai Segak di Kecamatan Sepauk; Masjid Jami' Sultan Nata di Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang; Kompleks Istana Al-Mukarramah Kesultanan Sintang di Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang (Istana Al-Mukarramah Sintang, Makam Djubair/Ade Irawan II, Makam Panembahan Ade Muhammad Djoen dan Batu Kundur, Makam Sultan Nata Muhammad Syamsuddin di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Makam Raja-Raja Sintang di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Rumah Eks Asisten Residen (rumah jabatan Bupati Sintang) di Kelurahan Tanjung Puri di Kecamatan Sintang, Kerkhof Sintang Kelurahan Tanjung Puri di Kecamatan Sintang, Makam Kapitan Kwee Jiu Hoi di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Rumah Betang Ensaid Panjang di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai, Makam Pangeran Kuning di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu, Makam Apang Semangai di Desa Riam Panjang Kecamatan Kayan Hulu, Empagu' Keramat Desa Lintang Tambuk di Kecamatan Kayan Hulu, Batu Lingga Yoni Dara Muning di Desa Muara Kota, Kecamatan Serawai, Prasasti Batu Harimau / Arca Totem di Desa Korong Daso (desa pemekaran dari Tanjung Andan) Kecamatan Ambalau, Rumah Betang Dusun Posuk Desa Deme di Kecamatan Ambalau; dan Tojohan (tempat untuk hajatan) Nokan Nayan di Kecamatan Ambalau.



7. Kawasan budi daya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, Kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energi; kawasan peruntukan industry; kawasan pariwisata ; kawasan permukiman; kawasan transportasi dan kawasan pertahanan dan keamanan.
8. Kawasan Hutan Produksi seluas 760.737 ha, meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 604.651 ha berada di: Kecamatan Ketungau Hulu; Kecamatan Ketungau Tengah; Kecamatan Tempunak; Kecamatan Sungai Tebelian; Kecamatan Kelam Permai; Kecamatan Kayan Hilir; Kecamatan Kayan Hulu; Kecamatan Serawai; dan Kecamatan Ambalau.
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 138.247 ha, berada di: Kecamatan Ketungau Hulu; Kecamatan Ketungau Tengah; Kecamatan Ketungau Hilir; Kecamatan Binjai Hulu; Kecamatan Sepauk; Kecamatan Tempunak; Kecamatan Sungai Tebelian; Kecamatan Kayan Hilir; Kecamatan Kayan Hulu; dan Kecamatan Serawai.
 - Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas kurang lebih 17.840 ha, berada di: Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah.
 - Kawasan pertanian seluas kurang lebih 896.597 ha, terdiri atas: kawasan tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan perkebunan; dan kawasan peternakan.
 - Kawasan tanaman pangan berada di: Kecamatan Ketungau Hulu; Kecamatan Ketungau Tengah; Kecamatan Ketungau Hilir; Kecamatan Binjai Hulu; Kecamatan Sepauk; Kecamatan Tempunak; Kecamatan Sungai Tebelian; Kecamatan Dedai; Kecamatan Kelam Permai; Kecamatan Kayan Hilir; Kecamatan Kayan Hulu; dan Kecamatan Serawai.
 - Kawasan hortikultura berada di: Kecamatan Binjai Hulu; Kecamatan Sungai Tebelian; Kecamatan Sintang; Kecamatan Kelam Permai; dan Kecamatan Dedai.
 - Kawasan perkebunan berada di seluruh Kecamatan.



- Kawasan peternakan berada di: Kecamatan Sepauk; Kecamatan Tempunak; dan Kecamatan Dedai.
- Kawasan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budi daya.
 - Kawasan perikanan tangkap berada di: Kecamatan Ketungau Hulu; Kecamatan Ketungau Tengah; Kecamatan Ketungau Hilir; Kecamatan Binjai Hulu; Kecamatan Sepauk; Kecamatan Tempunak; Kecamatan Sintang; Kecamatan Dedai; Kecamatan Kelam Permai; Kecamatan Kayan Hilir; Kecamatan Kayan Hulu; Kecamatan Serawai; dan Kecamatan Ambalau.
 - Kawasan perikanan budi daya seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektare yang berada di Kecamatan Sungai Tebelian.
- Kawasan pertambangan dan energi berupa: kawasan pertambangan mineral dan Kawasan pembangkitan tenaga Listrik.
 - Kawasan pertambangan mineral berupa: kawasan pertambangan mineral logam; dan kawasan peruntukan pertambangan batuan.
 - Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di: Kecamatan Ketungau Tengah; Kecamatan Ketungau Hilir; Kecamatan Sepauk; Kecamatan Tempunak; Kecamatan Sungai Tebelian; Kecamatan Sintang; Kecamatan Kelam Permai; dan Kecamatan Dedai.
 - Kawasan peruntukan pertambangan batuan berada di Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai.
 - Kawasan pembangkitan listrik berupa Kawasan PLTU Sungai Ringin di Kecamatan Sintang.
- Kawasan peruntukan industri berada di : Kecamatan Ketungau Hilir; Kecamatan Binjai Hulu; Kecamatan Sungai Tebelian; Kecamatan Kelam Permai; dan Kecamatan Kayan Hilir.
- Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 80 ha yang berada di: Kecamatan Tempunak; Kecamatan Sintang; dan Kecamatan Kelam Permai.



- Kawasan permukiman seluas kurang lebih 13.697 ha yang terdiri atas Kawasan permukiman perkotaan dan Kawasan permukiman perdesaan.
 - Kawasan permukiman seluas kurang lebih 2.536 ha terdapat di seluruh Kecamatan.
 - Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 11.161 ha terdapat di seluruh Kecamatan.
- Kawasan transportasi seluas kurang lebih 172 ha yang meliputi: Kawasan Bandar Udara Tebelian di Kecamatan Sungai Tebelian, Kawasan Terminal Penumpang Sungai Ukoi di Kecamatan Sungai Tebelian; dan Kawasan Pelabuhan Sintang di Kecamatan Sintang.
- Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 48 ha, meliputi: Korem 121/ABW Sintang di Kecamatan Sintang; Kodim 1205 Sintang di Kecamatan Sintang; Yonif-642/Kapuas di Kecamatan Sintang; dan Kompi Bantuan Yonif-642/Kapuas di Kecamatan Sintang; Polres Sintang di Kecamatan Sintang; Batalyon C Pelopor Brimob Sintang di Kecamatan Sungai Tebelian.
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan meliputi: Pos Pamtas Yonarmed 10/Bradjamusti Enteli (Desa Neraci Jaya) di Kecamatan Ketungau Hulu; Pos Muakan (Desa Muakan Petinggi) di Kecamatan Ketungau Hulu; Pos Kout (Komando Utama) Senaning Satgas Yonzipur 5/ABW di Kecamatan Ketungau Hulu; Pos Riam Sejawak di Kecamatan Ketungau Hulu; Pos Kampung Jasa (Desa Jasa) di Kecamatan Ketungau Hulu; Pos Gunung Sepan (Desa Jasa) di Kecamatan Ketungau Hulu; Pos Sei Kelik di Kecamatan Ketungau Hulu; Pos Nanga Bayan di Kecamatan Ketungau Hulu; Pos Semareh di Kecamatan Ketungau Tengah; Pos Tanjung Lesung (Desa Nanga Kelapan) di Kecamatan Ketungau Tengah; dan Pos Nanga Seran (Desa Wana Bhakti) di Kecamatan Ketungau Tengah.

2.1.1.8.3. Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten.



Tujuan utama dari penetapan kawasan strategis adalah untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, kawasan strategis juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah. mewujudkan keseimbangan perkembangan antarwilayah. menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara.

Rencana Kawasan Strategis di Kabupaten terdiri atas Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten.

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) meliputi: Kawasan Perbatasan Negara yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, meliputi Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah. Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kecamatan Ambalau, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Kayan Hilir. Serta kawasan transmigrasi yang ditetapkan dalam RPJMN yaitu di kecamatan Ketungau Hulu
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah Kawasan Perhuluan DAS Pawan-Sekadau-Pinoh yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang berada di Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak, dan Kecamatan Sungai Tebelian.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
 - Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Binjai Hulu – Ketungau Hilir dan sekitarnya yang berada di Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Binjai Hulu, dan Kecamatan Kelam Permai.
 - Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Ekosistem *Muller* dan sekitarnya yang berada di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.
 - Tujuan pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Binjai Hulu – Ketungau Hilir dan sekitarnya meliputi: pengembangan



kawasan peruntukan industri yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana wilayah, permukiman, serta perdagangan dan jasa dan pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta pengembangan dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas

Tujuan pengembangan Kawasan Ekosistem *Muller* dan sekitarnya meliputi: pemantapan Kawasan Lindung dan pengelolaan kawasan hutan produksi secara lestari dalam rangka meminimalkan dampak bencana banjir terutama di bagian hilir Sungai Melawi dengan tetap meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman ke PKW Sintang dan pengembangan energi hijau disertai dengan perluasan jangkauan pelayanan telekomunikasi dalam rangka memacu pengembangan kawasan pariwisata.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

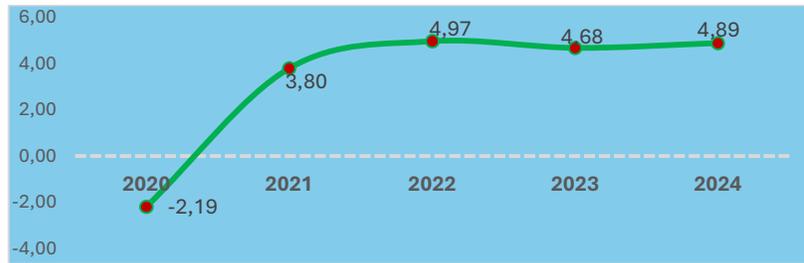
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan indikator makroekonomi daerah, perkembangan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum dapat dilihat di antaranya dari capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Berikut diuraikan beberapa aspek yang menggambarkan capaian tingkat kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Sintang.

2.1.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan angka PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Terkait analisis makroekonomi daerah, perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB ADHK karena telah menghilangkan pengaruh inflasi. Apabila angka PDRB dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat, demikian pula sebaliknya.

Selama periode 2020-2024, secara umum capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang relatif cukup tinggi. Perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi bergerak secara fluktuatif.

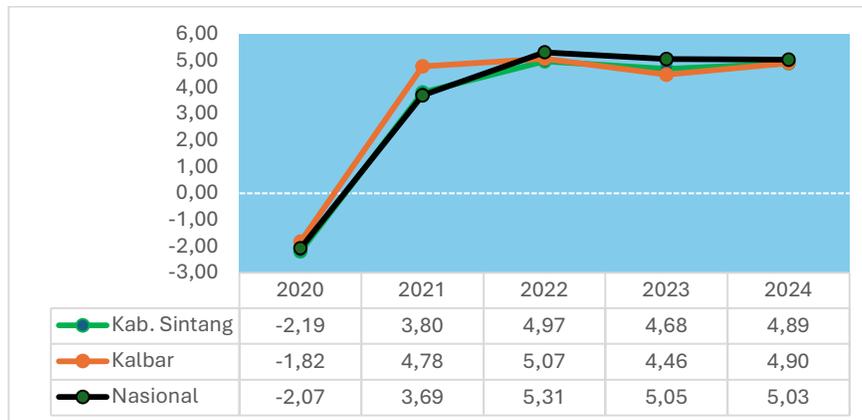


Grafik 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kab. Sintang Dalam Angka), Tahun 2020-2025 (diolah)

Pada tahun 2020 di saat terjadi pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Sintang tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar 2,19%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat (-1,82%). Kemudian pada tahun 2021, kembali mencapai pertumbuhan ekonomi positif, yakni sebesar 3,80%. Pada tahun 2024, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang capaiannya sebesar 4,68%.

Secara komparatif, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2020-2024 dibandingkan dengan capaian Kalimantan Barat dan Nasional, disajikan pada grafik berikut ini.



Grafik 2.4. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%), Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka) Tahun 2020-2025) dan BPS Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat Dalam Angka) Tahun 2020-2025 (data diolah)

Meskipun pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang 2020-2024 relatif mirip dengan Kalimantan Barat dan Nasional (kecuali tahun 2021), namun harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang dalam tiga tahun terakhir (2022-2024) tidak mengalami fluktuasi yang terlalu tinggi.

**Tabel 2.32. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sintang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024 (satuan %)**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,76	3,12	4,33	2,48	3,41
B	Pertambangan & Penggalian	3,88	2,75	1,86	-4,01	2,69
C	Industri Pengolahan	-1,94	4,68	10,76	3,27	3,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,49	1,35	4,24	7,33	7,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3,83	5,00	5,00	6,19	6,38
F	Konstruksi	-8,59	5,44	1,38	5,12	4,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-10,60	2,21	7,03	6,30	7,50
H	Transportasi & Pergudangan	-8,52	-7,15	10,65	5,27	8,09
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	-18,79	7,85	8,59	9,31	8,71
J	Informasi dan Komunikasi	7,37	5,33	7,52	8,52	8,14
K	Jasa Keuangan & Asuransi	-1,25	4,31	-0,11	5,73	2,20
L	Real Estat	0,41	1,79	2,29	5,12	-5,00
M, N	Jasa Perusahaan	-4,32	0,31	4,64	8,18	5,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,06	1,94	-2,54	5,59	8,61
P	Jasa Pendidikan	-6,61	2,05	2,38	6,17	3,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	26,01	23,86	9,37	15,93	5,80
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-17,68	0,88	7,57	13,33	7,00
Pertumbuhan PDRB		-2,19	3,80	4,97	4,68	4,89

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2021-2025)

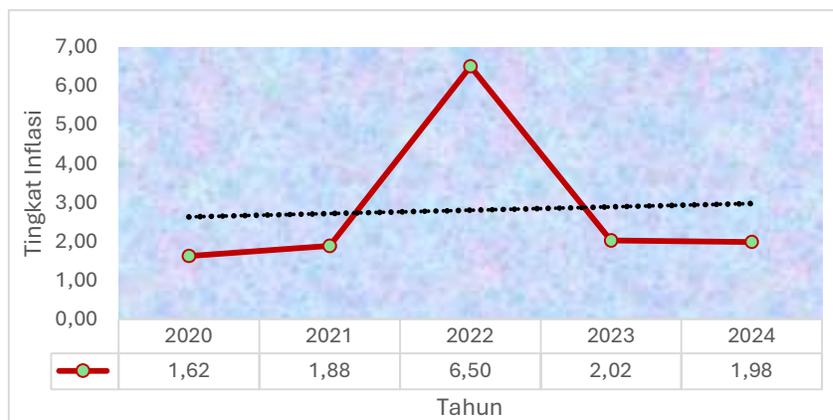
Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di sektor sektor Penyediaan akomodasi dan Makan minum, Jasa lainnya, dan Perdagangan besar dan eceran, Konstruksi, Jasa lainnya, Jasa pendidikan, Transportasi dan pergudangan, Jasa perusahaan, serta Jasa keuangan dan asuransi. Sebaliknya pandemi Covid-19 seperti turat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor Pengadaan Air dan pengolahan sampah, dan sektor Administrasi pemerintahan, yang masing-masing tumbuh 3,83% dan 1,06%. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif, tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2024, terdapat lima sektor yang mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2023, yaitu sektor Real estat, Jasa kesehatan, Jasa lainnya; Jasa perusahaan, serta Jasa pendidikan. Sedangkan sebagian besar sektor sekunder mengalami peningkatan

pertumbuhan yang cukup signifikan. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang ke depan (2026-2030). Sedangkan pada tahun 2023, terdapat lima sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2022, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran, serta sektor Transportasi dan pergudangan. Sedangkan sebagian besar sektor jasa (sektor tertier) mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang ke depan.

2.1.2.1.2. Laju Inflasi Kabupaten

Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat.



Grafik 2.5. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan, 2021-2025 (data diolah)

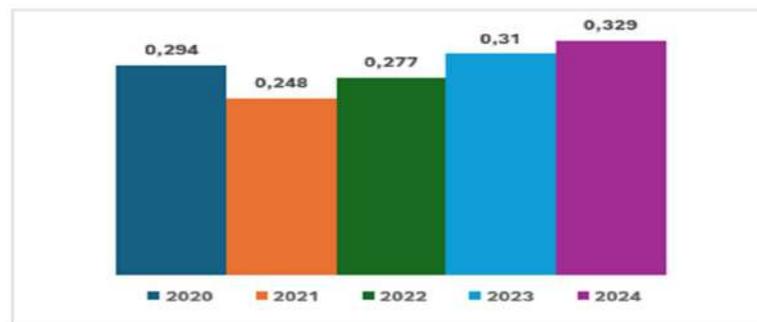
Secara umum, inflasi di Kabupaten Sintang selama tahun 2023-2024 menunjukkan trend penurunan. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 (6,50%), dan terendah pada tahun 2020 (1,62%). Bila dicermati dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Sintang relatif terkendali setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2022. Bila dikaji secara mendalam, tingkat inflasi tahun 2020 s/d 2024 sudah sejalan dengan asumsi makro yang

mentargetkan inflasi maksimum 3 persen +/- 1 persen. Dengan kata lain, kondisi perekonomian terutama daya beli masyarakat Sintang relatif stabil.

2.1.2.1.3. Indeks Gini

Indeks Gini (*gini ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Koefisien Gini memiliki indeks yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Distribusi pendapatan suatu daerah dikatakan sangat timpang bila angka koefisien gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif merata bila angka Koefisien Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35.

Secara umum, ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sintang yang ditunjukkan dengan Indeks Gini selama periode 2019-2024, menunjukkan bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2019, Indeks Gini sebesar 0,271 ; kemudian turun menjadi 0,248 pada tahun 2021. Pada tahun 2022-2023, kembali Indeks Gini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, yakni 0,277 dan 0,310. Sedangkan ditahun 2024 naik kembali ke angka 0,329 Secara rinci perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 2.6. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2024

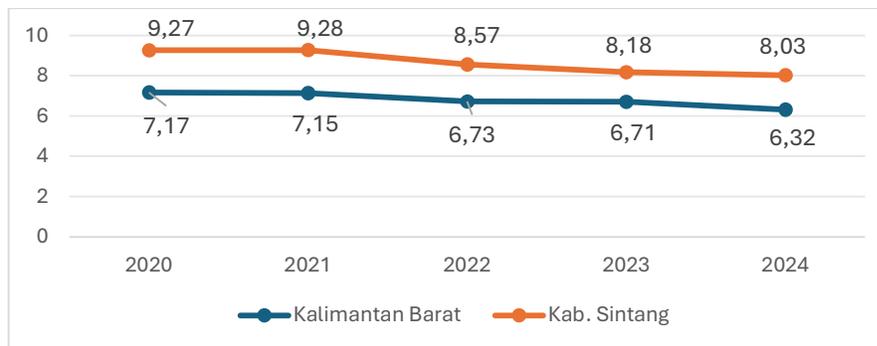
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan, 2020-2024 (data diolah)

Jika diasumsikan sebagian besar penduduk Kabupaten Sintang bercirikan perdesaan, dan mengacu pada Indeks Gini di daerah perkotaan di Kalimantan Barat pada September 2023 yang sebesar 0,334 dan Indeks Gini di daerah perdesaan 0,264; maka Indeks Gini Kabupaten Sintang tahun 2024 berada di atas rata-rata angka rata-rata Indeks Gini Provinsi yaitu diangka . Namun mengingat angka Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35, menunjukkan bahwa

distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Sintang relatif merata. Meski ketimpangan pendapatan relatif rendah, namun upaya pembangunan yang diprioritaskan pada daerah pedesaan yang relatif tertinggal tetap terus dilakukan terutama dalam hal penyediaan pelayanan publik agar ketimpangan pendapatan tidak semakin meningkat di Kabupaten Sintang.

2.1.2.1.4. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin tergolong tinggi di Kabupaten Sintang. Sepanjang proses pembangunan yang berlangsung, proporsi kemiskinan bervariasi pada angka 8 - 12 persen sejak tahun 2009-2024. Dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan bergerak menurun dari 9,27% (2020) hingga mencapai 8,08% (2023), namun capaian ini masih tergolong tinggi, tertinggi kelima di antara 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Angka kemiskinan di Kabupaten Sintang masih lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat.

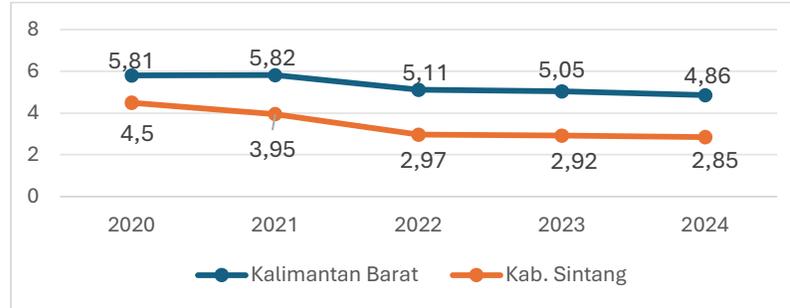


Grafik 2.7. Tingkat Kemiskinan Di Kab. Sintang dan Prov.Kalimantan Barat

2.1.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2023 jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas tercatat sebanyak 324.099 orang. Tujuh puluh empat persen (240.231 orang) diantaranya merupakan angkatan kerja, selebihnya (26 persen) disebut bukan angkatan kerja. Dari 240.231 orang angkatan kerja ini, 97,08 persen diantaranya sudah bekerja, selebihnya (2,92%) tidak bekerja alias menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sintang selama periode 2009-2024 tergolong rendah dengan variasi 1,90 – 2,85 persen.

Dalam lima tahun terakhir, TPT di Kabupaten Sintang cenderung menurun dari 4,50% (2020) menjadi 2,85% (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sintang jauh lebih rendah dari rata-rata TPT Provinsi Kalimantan Barat (4,86% tahun 2024).



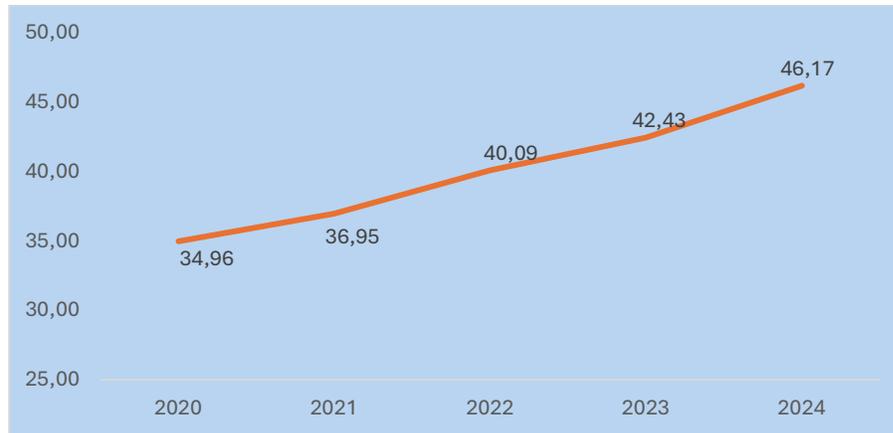
Grafik 2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran di Kabupaten Sintang didominasi oleh kaum perempuan (2,15%). Pengangguran laki-laki sebanyak 3,32% pada tahun 2024. Latar belakang pendidikan angkatan kerja yang menganggur sebagian besar (62,52%) berpendidikan SMA/SMK dan berpendidikan tinggi (22,32%). Selebihnya berpendidikan SMP (9,20%) dan SD (10,92%). Keadaan ini mengindikasikan bahwa lapangan kerja yang digeluti oleh angkatan kerja di Kabupaten Sintang adalah lapangan kerja yang mengandalkan fisik. Misalnya bekerja sebagai petani dan buruh tani, buruh perkebunan, nelayan, lapangan kerja sektor informal.

Hasil pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Sintang menunjukkan keadaan anomali, terutama kemiskinan dan pengangguran. Di tahun 2024, capaian kemiskinan tergolong tinggi (8,06%) dan tingkat pengangguran relatif rendah (2,85%) Keadaan anomali yang tergambar dari tingkat pengangguran terbuka rendah, tetapi tingkat kemiskinan tinggi, memberi makna bahwa angkatan kerja yang bekerja memperoleh penghasilan yang nilainya di bawah garis kemiskinan dan kebanyakan terserap di sektor informal.

2.1.2.1.6. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan PDRB per Kapita. Tinggi rendahnya PDRB per Kapita sangat tergantung pada keberhasilan daerah untuk mendorong perkembangan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE) dan mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP). Sepanjang LPE lebih besar dari LPP, maka PDRB per Kapita cenderung akan meningkat.



Grafik 2.9. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Kab. Sintang (*Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020-2024*)
(data diolah)

Selama periode 2020-2024, PDRB per Kapita Kabupaten Sintang menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020. Penurunan PDRB per Kapita pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang berkontraksi sebesar -2,19%. PDRB per Kapita Kabupaten Sintang pada tahun 2020 sebesar Rp 34,96 juta dan meningkat menjadi Rp 46,17 juta pada tahun 2024 atau meningkat rata-rata sebesar 5,10%.

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan kesehatan termasuk prioritas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan di bidang kesehatan saat ini diarahkan pada penyediaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi bangunan fisik (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Poliklinik) serta pengadaan tenaga kesehatan yang terampil. Pada tahun 2024, fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sintang terdiri dari 5 Rumah Sakit Umum, 2 Rumah Sakit Bersalin, 19 puskesmas rawat inap, 4 Poliklinik, 1 puskesmas non-rawat inap, dan 88 puskesmas pembantu.

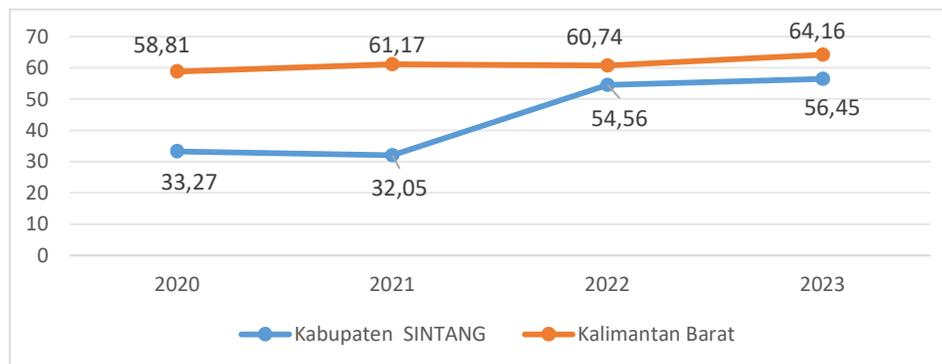
Jumlah tenaga kesehatan yang bertugas melayani kesehatan terdiri dari 88 orang tenaga medis, 980 orang tenaga keperawatan, 578 orang tenaga kebidanan, 60 orang tenaga kefarmasian, 38 orang tenaga kesehatan masyarakat, 30 orang tenaga kesehatan lingkungan dan 44 orang tenaga gizi. Pembangunan kesehatan di kabupaten Sintang ditandai dengan keberhasilan meningkatkan status kesehatan masyarakat. Angka Kematian Ibu



(AKI) dan Angka Kematian Bayi semakin menurun. AKI menurun dari 331 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2010 menjadi 201 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2023. Meskipun menurun, AKI di Kabupaten Sintang masih tergolong tinggi. Masuk dalam lima besar tertinggi di Kalimantan Barat. AKB juga menurun dari 30 per 1000 kelahiran hidup tahun 2010 menjadi 16,5 per 1000 kelahiran hidup tahun 2022 (hasil Long Form SP 2020). Sementara itu, Prevalensi Stunting di Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dari angka 33,15% tahun 2018 menjadi 31,0% tahun 2024.

2.1.2.2.1. Indeks Kesehatan

Keluarga Sehat dapat diukur dari kondisi rumah, akses terhadap Air Minum Layak dan Akses terhadap sanitasi Layak serta Prevalensi Stunting. Indeks Kesehatan Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir meningkat dari 0,80 tahun 2020 menjadi 0,84 tahun 2024. Dalam empat tahun terakhir, berdasarkan data Susenas 2020, 2021, 2022 dan 2023, persentase rumah layak huni meningkat setiap tahunnya namun masih di bawah capaian propinsi. Pada tahun 2020, persentase rumah layak huni baru mencapai 33,27% (terendah di Kalimantan Barat). Kemudian, pada tahun 2023 meningkat menjadi 56,45% tahun 2023.

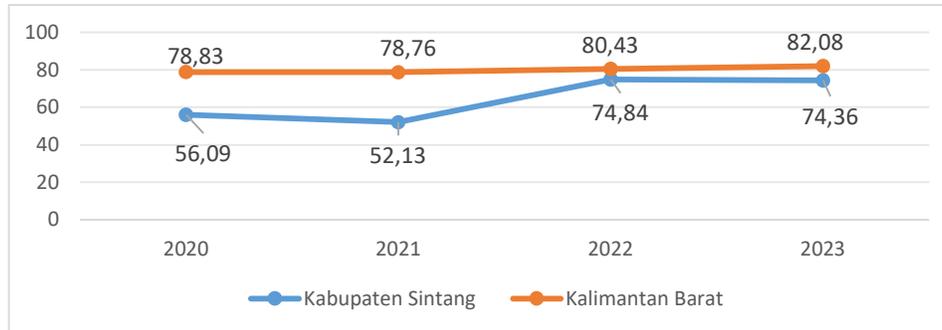


Grafik 2.10. Persentase Rumah Layak Huni

Sumber : <https://siperindu.online/data/aksi.php>

Air minum layak merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Air minum relatif banyak, namun air minum yang layak hidup ketersediannya terbatas. Akses terhadap air minum layak di Kabupaten Sintang masih terbatas, baru mencapai 56,06% di tahun 2020. Tiga tahun berikutnya, akses air minum layak meningkat menjadi 74,36%. Namun peningkatan ini masih di bawah capaian rata-

rata provinsi Kalimantan Barat, yakni 82,08% tahun 2023. Akses tertinggi terhadap air minum layak terjadi di Kabupaten Kayong Utara, yakni 98,62% tahun 2023.



Grafik 2.11. Akses Terhadap Air Minum Layak

Sumber : <https://siperindu.online/data/aksi.php>

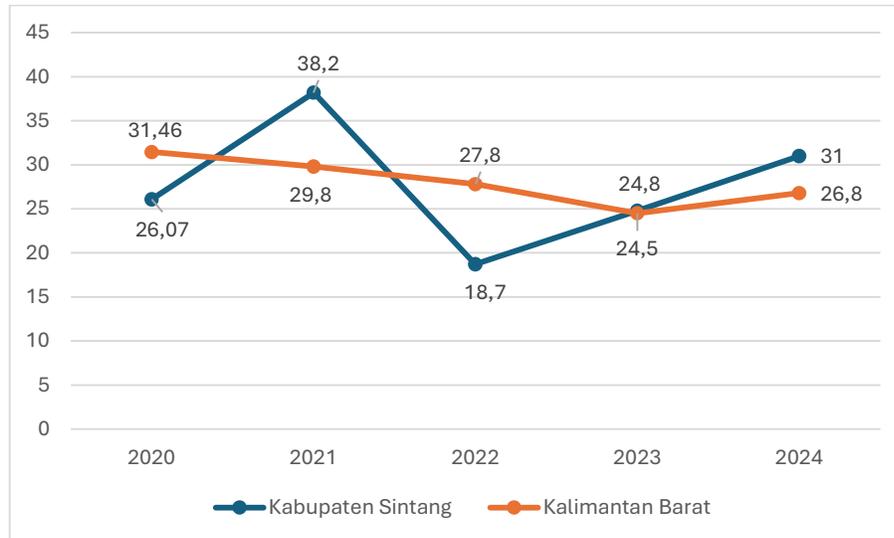
Capaian yang sama juga terjadi pada akses terhadap sanitasi layak. Pada tahun 2020 akses terhadap sanitasi layak baru mencapai 56,09% dan lebih rendah dari capaian rata-rata provinsi Kalimantan Barat (75,81%). Akses terhadap sanitasi layak huni semakin meningkat hingga mencapai 78,91% tahun 2023, sedikit dibawah capaian provinsi (79,89%). Akses tertinggi terhadap sanitasi layak terdapat di Kota Pontianak yakni 98,06% tahun 2023.

Tabel 2.32. Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten Tahun 2020-2023

Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sintang	56,09	65,33	73,63	78,91	NA
Kalimantan Barat	75,81	78,39	77,41	79,89	NA

Sumber : <https://siperindu.online/data/aksi.php>

Warga (penduduk) yang tidak memiliki rumah layak huni minum akses terhadap Air minum layak dan Sanitasi Layak adalah rentannya fisik terhadap berbagai penyakit, termasuk stunting. Prevalensi Stunting di Kabupaten Sintang tidak stabil atau turun naik. Naik dari 26,07% (2020) menjadi 38,2% (2021), kemudian turun menjadi 18,7% dan naik lagi menjadi 24,8% (2023). Capaian Prevalensi tahun 2023 ini lebih tinggi dari rata-rata Prevalensi propinsi (24,5%) tahun 2023.



Grafik 2.12. Prevalensi Stunting
Sumber : <https://siperindu.online/data/aksi.php>

Berdasarkan keempat indikator yang telah dijelaskan, dapat dinyatakan bahwa hingga tahun 2023 pencapaian keluarga sehat di Kabupaten Sintang semakin membaik namun belum optimal.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pelayanan pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul yang kemudian mampu bersaing di era globalisasi dan mampu bersikap kritis dalam perkembangan jaman saat ini. Oleh karenanya, pembangunan pendidikan selalu menjadi prioritas pembangunan yang meliputi beberapa aspek pokok seperti sarana dan prasarana, kualitas guru, partisipasi siswa, kurikulum, teknologi pendidikan dan sebagainya.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai tentunya akan menjadi salah satu faktor penunjang terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni. Jumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sintang pada tahun 2024/2025 adalah sebanyak 458 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 50.737 siswa dan 3.777 guru. Rasio murid terhadap guru untuk jenjang sekolah dasar (SD) adalah sebesar 13,43 yang artinya 1 guru mendampingi 13–14 murid.

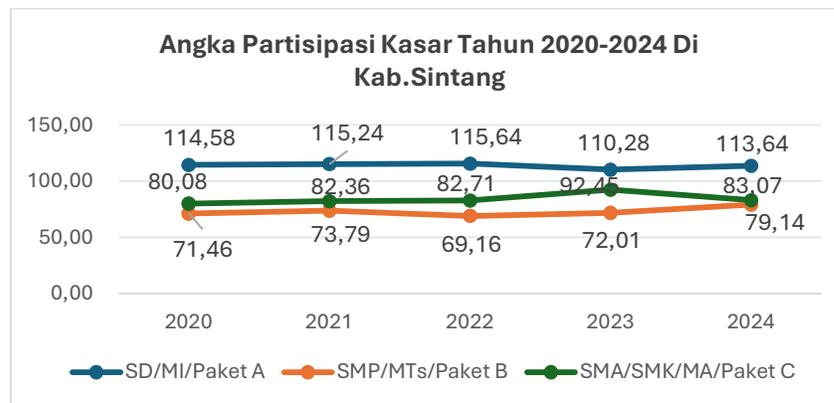
Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlah sekolah pada tahun ajaran 2024/2025 adalah sebanyak 130 sekolah. Jumlah guru untuk jenjang menengah pertama sebanyak 1.598 guru, sedangkan jumlah siswa SMP pada tahun ajaran 2024/2025 sebanyak 21.335 siswa. Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlah sekolah pada tahun ajaran 2024/2025 adalah sebanyak 42 sekolah

dengan jumlah guru sebesar 749 guru dan jumlah murid sebanyak 10.382 siswa.

Di Kabupaten Sintang terdapat 7 (tujuh) Perguruan Tinggi yaitu: Universitas Kapuas dengan mahasiswa pada tahun 2024 sebanyak 2.339 orang, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) dengan mahasiswa pada tahun 2024 sebanyak 1.931 orang, Sekolah Tinggi Theologi Khatulistiwa (STTK) dengan mahasiswa pada tahun 2024 sebanyak 5 orang, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif (STAIMA) dengan mahasiswa pada tahun 2024 sebanyak 372 orang, STIKES Kapuas Raya, Sekolah Tinggi Theologi Imanuel dengan mahasiswa pada tahun 2024 sebanyak 428 orang, dan Universitas Muhammadiyah Kampus Sintang dengan mahasiswa pada tahun 2024 sebanyak 30 orang.

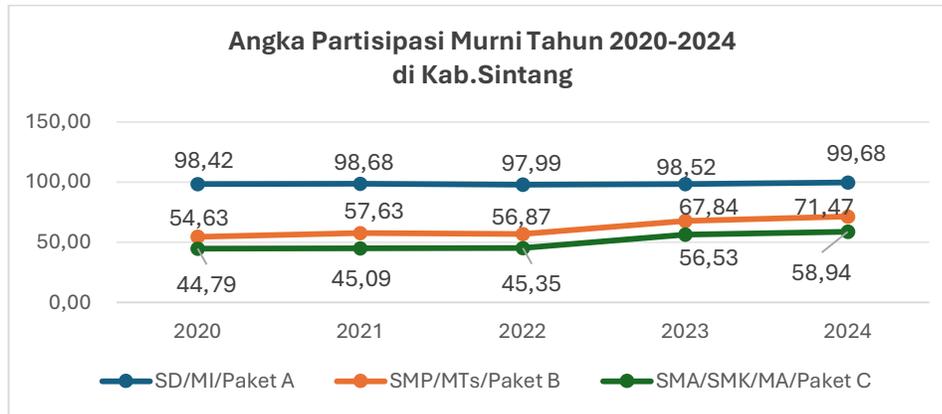
Hingga tahun 2024, pembangunan pendidikan di Kabupaten Sintang belum dapat mentuntaskan permasalahan buta huruf. Masih ada penduduk Buta Huruf sebanyak 5,85%. Kebanyakan perempuan (6,48%) dibanding laki-laki (5,25%).

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar di Kabupaten Sintang selama periode 2020-2024 tergolong tinggi. Capaiannya melebihi 100% untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan melebihi 80% untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B.



Grafik 2. 13. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2020-2024 di Kab.Sintang

Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Sintang kecenderungannya sama dengan APK, yaitu cenderung naik pada periode yang sama. APM SD/MI/Paket A naik dari 98,42% tahun 2020 menjadi 99,68% tahun 2024. Demikian juga APM SMP/MTs/Paket B naik 17,44% dari 54,03% tahun 2020 menjadi 71,47% tahun 2024. APM SMA/SMK/MA/Paket C, meskipun naik namun capaiannya masih terbilang rendah (< 60%), lihat Gambar 2.18



Grafik 2. 14. Angka Partisipasi Murni Tahun 2020-2024 di Kab.Sintang

2.1.2.3.1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran sejauh mana pemerintah daerah membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar. IPLM dapat digunakan untuk a) Mengetahui tingkat literasi masyarakat, b) Mengevaluasi upaya pemerintah daerah dalam membina perpustakaan, c) Membandingkan tingkat literasi antar daerah, dan d) Memantau perkembangan literasi masyarakat dari waktu ke waktu.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) terdiri dari 7 (tujuh) unsur utama, yang disebut Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM). UPLM ini meliputi pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga, tingkat kunjungan masyarakat, perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi, dan jumlah anggota perpustakaan.

Capaian IPLM Kabupaten Sintang dalam dua tahun terakhir semakin menurun dan tergolong sedang. IPLM Kabupaten Sintang menurun dari 51,35 (2023) menjadi 50,64 (2024). Penurunan ini dikarenakan penurunan 3 dari 7 unsur PLM. Ketiga unsur tersebut adalah (1) Pemerataan Layanan Perpustakaan dari 0,459 menjadi 0,451; (2) kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari dari 0,024 menjadi 0,004 ; (3) keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dari 1,000 menjadi 0,182.

Tabel 2.33. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sintang dan Unsur-Unsurnya Tahun 2023-2024

Tahun	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Pemera-taan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibangun sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan	Ranking IPLM
2023	51,35	0,4594	0,3372	0,3928	0,0235	0,3816	1	1	14
2024	50,64	0,4516	0,4739	0,4338	0,0041	1	0,1817	1	11

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2023 dan 2024

Meskipun capaian IPLM menurun, namun posisi Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat semakin meningkat dari ranking 14 tahun 2023 menjadi ranking 11 tahun 2024.

Tingkat Literasi Masyarakat dengan target 47,39 dan realisasi 47,39 sehingga menghasilkan capaian 100%, serta dengan target jangka menengah 57,33 maka menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 82,66%. Sedangkan tingkat kemajuan 90,92% jika dibandingkan dengan perubahan atas target tahun 2025. Indikator ini mendapatkan dukungan dari program pembinaan perpustakaan dengan kegiatan diantaranya: Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial adaptif adalah program yang membantu masyarakat menghadapi berbagai krisis, seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan pandemi. Perlindungan sosial adaptif dapat memperkuat ketahanan rumah tangga dan mengurangi kerentanan masyarakat. Secara umum, ada 5 komponen tema yang menjadi prioritas utama ketika berbicara tentang perlindungan sosial adaptif, yaitu: 1) Menurunkan Angka Kemiskinan; 2) Meningkatkan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 3) Meningkatkan Cakupan Penyandang Disabilitas Yang Bekerja di Sektor Formal; 4) Meningkatkan Akses Terhadap Rumah Layak Huni; dan terakhir aspek manajemen yaitu 5) Pemanfaatan dan Pemutakhiran Data Regsosek.

**Tabel 2.34. Data Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) di
Kabupaten Sintang, 2024**

No	Penyanggand Cacat	Jumlah
1	Cacat Tubuh	1500
2	Cacat Mental	918
3	Cacat Ganda	51
4	Lansia Tidak Potensial	731
5	Eks Napi	13
6	Komunitas Adat Terpencil	35 KK
7	WTS	59
8	Waria	54

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2025

Berdasarkan data tahun 2024, persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Sintang yang tertangani sebesar 60,72% dan Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 18,69%. Penanganan PPKS di Kabupaten Sintang tahun 2024, juga dilakukan melalui program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT). Dalam rangka pengentasan kemiskinan juga melaksanakan program kementerian sosial yang disalurkan lewat Dinas Sosial di Kabupaten untuk melaksanakan program-program, seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Objek pemajuan kebudayaan dapat dikategorikan ke dalam tiga kegiatan utama, yaitu tradisi lisan, adat istiadat, dan ritus. Indeks pembangunan kebudayaan (IPK) adalah instrument untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan memiliki 8 dimensi, yaitu:

1. Dimensi Ekonomi Budaya (1 indikator) Bidang kebudayaan
2. Dimensi Pendidikan (6 Indikator) pada Bidang Pendidikan
3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (8 Indikator) Bidang kesbangpol
4. Dimensi Warisan Budaya (6 Indikator) Bidang kebudayaan
5. Dimensi Ekspresi Budaya (4 Indikator) Bidang kebudayaan
6. Dimensi Budaya Literasi (3 Indikator) Bidang arsip dan perpustakaan
7. Dimensi Gender (3 Indikator) Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



8. Dimensi Tata Kelola Budaya.

Dari aspek budaya, berdasarkan data Dinas Pendidikan pada tahun 2024, perkembangan jumlah group Kesenian dan budaya dan di Kabupaten Sintang belum terlalu berkembang secara signifikan. Sampai saat ini saja misalnya, dari jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Sintang yang berjumlah 40 grup yang aktif hanya 30 grup dan belum didukung oleh ketersediaan gedung kesenian yang memadai.

Tabel 2.35. Indikator Kebudayaan di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2024

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Jumlah Situs/ tempat bersejarah yang terawat dengan baik	15	15	15	9	9
2	Jumlah penetapan situs BCB	25	25	25	25	25
3	Jumlah Peta Budaya	6	6	6	0	0
4	Jumlah Sanggar Seni	40	40	40	75	75
5	Jumlah Sanggar seni yang aktif	30	30	30	30	30
6	Jumlah Festival yang dilaksanakan	10	10	10	1	1
7	Jumlah dialog budaya	5	5	5	5	5
8	Jumlah gelar budaya	10	10	10	14	14
9	Jumlah adat budaya yang dilestarikan	3	3	3	6	7
10	Jumlah pentas seni dan budaya daerah	3	3	3	3	3
11	Jumlah budaya. adat istiadat dan kearifan lokal yang di revitalisasi	3	3	3	6	7
12	Jumlah budaya tari tradisional yang di revitalisasi	4	4	4	5	5
13	Jumlah film tentang budaya dan kearifan local	3	3	3	17	5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang, Tahun 2024

Sampai dengan tahun 2024, kebijakan dan program yang terkait dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan sudah dilakukan secara berkelanjutan. Begitu juga terkait dengan pelestarian kesenian tradisional atau tradisi budaya lokal telah dilakukan oleh Dinas terkait, walaupun memang pelestarian sejarah dan pengembangan budaya belum sepenuhnya optimalnya. Sedangkan terkait dengan penetapan Cagar Budaya sampai dengan tahun 2024 berjumlah 25 unit.

2.1.2.5.2. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama adalah terciptanya suatu kondisi sosial yang harmonis dan dinamis ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Indeks Kerukunan Umat Beragama dibentuk berdasarkan tiga dimensi



utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Dimensi toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, dan menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas.

Sampai saat ini kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Sintang sangat baik, hal ini terlihat dari hasil kajian Balitbang agama Kementerian Agama pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pada dimensi toleransi skornya 80,2 (kategori sangat tinggi), dimensi kesetaraan skornya 82,7 (kategori sangat tinggi), dan dimensi kerjasama antar umat beragama skornya 77,83 (kategori tinggi).

Indikator aspek pelayanan umum di bidang sosial keagamaan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu jumlah rumah ibadah, serta jumlah rumah tangga yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial. Jika dijumlahkan, total rumah ibadah di Kabupaten Sintang berjumlah 1.683 unit. Sebaran rumah ibadah berdasarkan agama yang dianut tersebar di beberapa kecamatan. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang, Tahun 2024

Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
Serawai	16	6	28	30	-	1
Ambalau	2	-	20	34	-	-
Kayan Hulu	13	6	60	24	-	1
Sepauk	41	38	45	92	-	1
Tempunak	23	19	33	47	-	1
Sungai Tebelian	43	36	31	35	-	2
Sintang	65	113	54	14	-	3
Dedai	34	5	16	41	-	1
Kayan Hilir	10	4	49	59	-	1
Kelam Permai	16	17	23	58	-	1
Binjai Hulu	14	6	14	8	-	1
Ketungau Hilir	11	7	49	43	-	1
Ketungau Tengah	6	1	71	44	-	1
Ketungau Hulu	7	5	52	33	-	1
Kabupaten Sintang	301	293	545	562	-	16

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2025



2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1. Pembangunan Keluarga

Kualitas keluarga tampak dari ukuran indeks pembangunan keluarga (Ibangga). Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Sintang pada tahun 2022 mencapai 52,71. Angka ini semakin meningkat menjadi 61,07 pada tahun 2023. Jaminan kesehatan yang merupakan bagian dari indeks pembangunan keluarga berperan penting dalam mendukung pembangunan keluarga. Cakupan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sintang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.37. Cakupan Jaminan Kesehatan Tahun 2020-2024

Daerah	2020	2021	2022	2023	2024*
Kabupaten Sintang	N/a	56,02	52,25	57,14	62,57
Kalimantan Barat	N/a	63,83	59,83	63,8	60,65

Catatan : * data belum tersedia di siperindu

Sumber : <https://siperindu.online/data/aksi.php>

2.1.2.6.2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA merupakan satu-satunya indeks yang menggambarkan capaian perlindungan anak di Indonesia baik di Tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

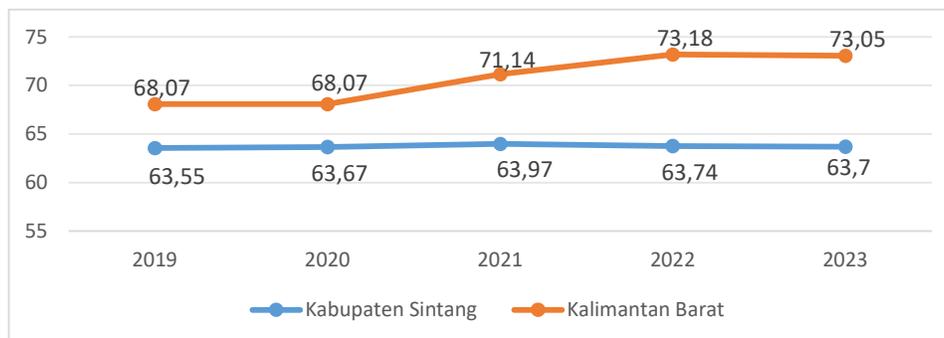
Laporan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 30 kasus kekerasan pada anak. Sebagian besar (80%) terjadi pada anak perempuan berusia 12-17 tahun dengan tingkat pendidikan SLTP. Jenis kekerasan adalah kekerasan seksual (70%). Tempat kejadian kebanyakan di rumah tangga. Selain kekerasan seksual, ada juga kekerasan fisik, psikis, penelantaran, dan pencurian anak.

2.1.2.6.3. Pemberdayaan Gender

Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Selama periode 2019-2023, persentase perempuan anggota legislatif menunjukkan angka yang stagnan yaitu 12,50%. Kondisi ini merepresentasikan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan yang semakin setara.

Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas selama kurun waktu yang sama juga meningkat, baik laki-laki maupun perempuan. Persentase penduduk laki-laki pada tahun 2019 sebesar 30,75 persen meningkat menjadi 32,82 persen pada tahun 2023 (meningkat 2,07 persen poin), sementara persentase penduduk perempuan meningkat dari 24,50 persen pada tahun 2019 menjadi 29,03 persen pada tahun 2023 (meningkat 4,47 persen poin). Peningkatan pendidikan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki membuat tingkat pendidikan antara perempuan dan laki-laki menjadi lebih setara.

Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Di Kabupaten Sintang, selama tahun 2018-2022 TPAK laki-laki dan perempuan berfluktuatif. TPAK laki-laki pada tahun 2018 sebesar 86,40 persen turun selama empat tahun menjadi 84,55 persen pada tahun 2022, sementara TPAK perempuan meningkat selama periode yang sama, dari 56,34 persen pada tahun 2018 menjadi 61,09 persen pada tahun 2023, dan naik menjadi 61,9 pada tahun 2024. Peningkatan TPAK perempuan dan penurunan TPAK laki-laki membuat terjadinya berkurangnya ketimpangan pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki, (peran perempuan semakin meningkat).



Grafik 2.15. Indeks Pemberdayaan Gender



2.1.2.6.4. Indeks Ketimpangan Gender

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tingkat kabupaten/kota selama kurun waktu 2019-2023 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Di Kabupaten Sintang angka IKG semakin menurun dari 0,621 (2019) menjadi 0,591 (2023) dan menjadi 0,561 pada tahun 2024. Penurunan ini pertanda meningkatnya kesetaraan laki-laki dalam pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Sintang.

2.1.2.6.5. Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Kabupaten Sintang dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Adapun tolak ukur Indeks Pembangunan Pemuda ada 5 domain dimana masing-masing domain mempunyai indikator yang dapat menentukan Indeks Pembangunan Pemuda. Kelima belas indikator yang dibagi dalam 5 domain itu adalah :

1. Domain Pendidikan ada 3 indikator yaitu rata-rata sekolah pemuda, APK Sekolah Menengah dan APK Perguruan Tinggi
2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan ada 4 indikator yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok serta persentase remaja perempuan yang sedang hamil/
3. Domain Kesempatan dan lapangan kerja ada 2 indikator, persentase pemuda wirausaha kerah putih dan TPT pemuda.
4. Domain kepemimpinan dan partisipasi ada 3 indikator yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.
5. Domain gender dan diskriminasi terbagi dalam 3 indikator diantaranya angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

**Tabel 2.38. Data Jumlah Organisasi, Kegiatan dan Sarana prasarana
Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024**

NO	NAMA PROGRAM	SATUAN	2021	2022	2023	2024*
1	Jumlah organisasi pemuda	orang	52	53	38	38
2	Jumlah organisasi olahraga	orang	37	37	39	39
3	Jumlah kegiatan Kepemudaan	kegiatan	40	35	5	5
4	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	9	8	13	26
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	bangunan	5	5	5	5
6	Lapangan olahraga	unit	409	409	411	411

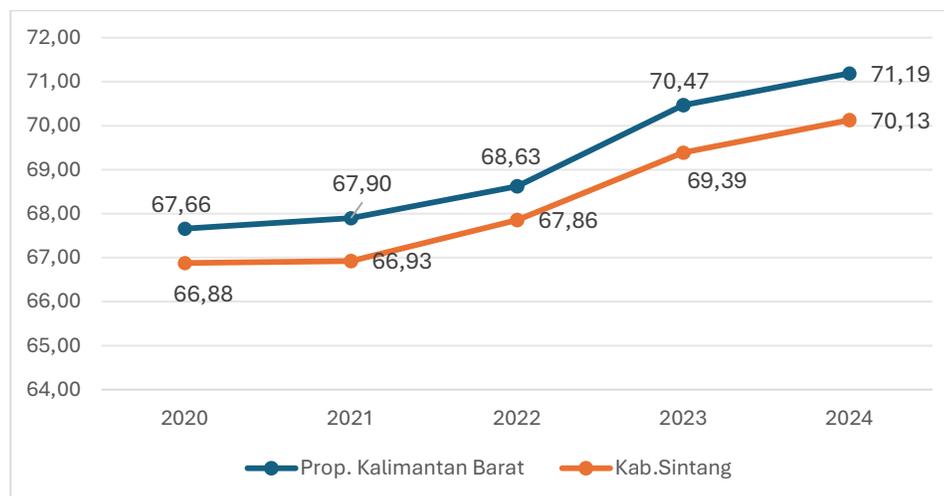
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2020-2024

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah. IPM diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selama periode 2020-2024 IPM Kabupaten Sintang bergerak naik namun sangat lambat dari angka 66,88 tahun 2020 menjadi 70,13 tahun 2024. IPM Sintang sebesar 70,13 masih lebih rendah dari rata-rata IPM provinsi (71,19), ranking 7 dari 14 Kabupaten/Kota. Laju Pertumbuhannya tergolong rendah, yakni 1,21% per tahun.



Grafik 2.16. IPM Kabupaten Sintang dan Prov. Kalimantan Barat

Penyebab utama lambatnya pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sintang adalah dimensi pendidikan dan ekonomi. Pada

dimensi pendidikan dan ekonomi, capaiannya masih lebih rendah dari capaian rata-rata provinsi. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 sebesar 7,65 tahun, belum menggembirakan dan masih lebih rendah dari RLS provinsi (7,78 tahun) dan berada di ranking 6 dari 14 kabupaten/kota. Demikian juga halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS sebesar 12,32 tahun masih lebih rendah dari HLS Provinsi (12,68 tahun), berada di ranking 7 dari 14 Kabupaten.

Pengeluaran per kapita per bulan tahun 2023 Rp. 9,657 juta, lebih rendah dari pengeluaran per kapita provinsi sebesar Rp. 10,321 juta. Rendahnya pengeluaran per kapita Kabupaten Sintang terkait erat dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang relatif banyak (35.180 jiwa atau 8,03%). Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akan mengalami kesulitan meningkatkan partisipasi sekolah anak ke jenjang yang lebih tinggi. Akibat kemiskinan, terjadi putus sekolah. Jumlah anak yang putus sekolah terjadi pada semua jenjang pendidikan, terbanyak pada jenjang SD (98 orang). Dampak ikutannya adalah tidak maksimalnya capaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/Paket C yang masih sekitar 60%. Keadaan ini pada gilirannya akan berpengaruh pada percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah atau kenaikan IPM melambat.

Dimensi kesehatan, perkembangannya cukup menggembirakan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2023 sebesar 74,07 tahun, lebih tinggi dari UHH provinsi (73,71 tahun) dan berada pada rangking 4 di antara 14 kabupaten/kota. Mencermati ke empat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa perlambatan peningkatan IPM tahun 2023 disebabkan indikator kinerja pendidikan dan perekonomian sebagai akibat pandemic covid-19.

Tabel 2.39. Nilai IPM Kabupaten Sintang

Indikator IPM	Tahun					Rank
	2020	2021	2022	2023	2024	
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,71	71,84	72,12	74,07	74,35	4
Rata2 Lama Sekolah (tahun)	7,07	7,08	7,36	7,64	7,65	6
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,03	12,04	12,29	12,30	12,32	7
Pengeluaran/kapita/thn (Rp.000)	8.728	8.708	8.858	9.128	9.657	8

Sumber : BPS, 2024

Jumlah tenaga kesehatan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023 terdapat 1.902 tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan



di Kabupaten Sintang yang terdiri dari dokter (dokter umum dan spesialis), dokter gigi (dokter gigi dan dokter spesialis gigi), perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan ahli teknologi laboratorium medik. Tenaga kesehatan di Sintang masih didominasi oleh perawat yaitu sebanyak 980 orang, bidan sebanyak 587 orang sedangkan dokter sebanyak 76 orang.

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sintang paling banyak adalah posyandu sejumlah 513 posyandu. Jumlah Klinik Pratama, Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas Rawat Inap, dan Rumah Sakit Umum secara berturut-turut adalah 28, 1, 19, 5 unit.

Ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Sintang, khususnya dokter, masih kurang. Rasio dokter dengan jumlah penduduk tahun 2023 masih tergolong kecil yakni 0,17 per 1000 penduduk.

2.1.3.1.2. Angka Literasi

Angka literasi SD/SMP mengacu pada persentase siswa sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki kemampuan membaca dan menulis sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan mereka. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas sistem pendidikan dasar dan menengah dalam mengajarkan keterampilan literasi dasar kepada siswa.

Komponen penting dalam angka literasi SD/SMP adalah:

1. Kemampuan membaca/menulis untuk mengukur seberapa baik siswa/i dapat membaca dan menulis teks yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka.
2. Standar pendidikan merupakan kemampuan literasi dinilai berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kurikulum nasional atau regional
3. Kelompok usia merupakan rentang usia tertentu yang sesuai dengan Tingkat SD atau SMP

Dengan demikian, angka literasi (SD/SMP) merupakan alat penting untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua siswa/i mendapatkan keterampilan literasi yang mereka butuhkan untuk sukses dimasa depan. berikut disajikan jumlah sekolah menurut kemampuan literasi di Kabupaten Sintang.

Hingga tahun 2024, kemampuan literasi penduduk Kabupaten Sintang jenjang pendidikan SD sebanyak 477 unit tergolong pada kategori sedang dan baik (64,78%). Kemampuan literasi dikategorikan atas baik (31,24%), sedang (33,54%)

dan kurang baik (31,03% dan capaian tidak tercapai (4,19%). Demikian juga kemampuan literasi jenjang pendidikan SMP (N=159), tergolong kategori baik (33,62); sedang (40,25%), kurang (16,35%) dan capaian tidak tercapai (3,77%).

Tabel 2.40. Kemampuan Literasi di Kabupaten Sintang

Jumlah SD Menurut Kemampuan Literasi		Jumlah SMP Menurut Kemampuan Literasi-1		Jumlah SMA Menurut Kemampuan Literasi	
A.1 Kemampuan literasi	Jumlah SD sederajat	A.1 Kemampuan literasi	Jumlah SMP sederajat	A.1 Kemampuan literasi	Jumlah SMA Sederajat
Baik	149	Baik	63	Baik	36
Capaian Tidak Tersedia	20	Capaian Tidak Tersedia	6	Capaian Tidak Tersedia	8
Kurang	148	Kurang	26	Kurang	14
Sedang	160	Sedang	64	Sedang	23
Total Keseluruhan	477	Total Keseluruhan	159	Total Keseluruhan	81

2.1.3.1.3. Angka Numerasi

Angka numerasi merupakan persentase populasi yang memiliki kemampuan dasar dalam memahami dan menggunakan konsep serta operasi matematika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Numerasi mencakup kemampuan untuk melakukan perhitungan dasar, memahami angka dan hubungan antar angka, serta menerapkan pengetahuan matematika dalam situasi nyata. Angka numerasi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pendidikan matematika, memastikan bahwa populasi memiliki ketrampilan numerasi yang diperlukan oleh siswa/i. Berikut disajikan data jumlah sekolah menurut kemampuan numerasi di Kabupaten Sintang tahun 2024.

Hingga tahun 2024, kemampuan numerasi penduduk Kabupaten Sintang jenjang pendidikan SD sebanyak 477 unit tergolong pada kategori sedang dan baik (50,11%). Kemampuan literasi dikategorikan atas baik (19,08%), sedang (31,03%) dan kurang baik (45,70% dan capaian tidak tercapai (4,19%). Demikian juga kemampuan numerasi jenjang pendidikan SMP (N=159), tergolong kategori baik (35,85); sedang (45,28%), kurang (15,09%) dan capaian tidak tercapai (3,77%).

Tabel 2.41. Kemampuan Numerasi di Kabupaten Sintang

Jumlah SD Menurut Kemampuan Numerasi		Jumlah SMP Menurut Kemampuan Numerasi		Jumlah SMA Menurut Kemampuan Numerasi	
A.2 Kemampuan numerasi	Jumlah SD sederajat	A.2 Kemampuan numerasi	Jumlah SMP sederajat	A.2 Kemampuan numerasi	Jumlah SMA Sederajat
Baik	91	Baik	57	Baik	20
Capaian Tidak Tersedia	20	Capaian Tidak Tersedia	6	Capaian Tidak Tersedia	8
Kurang	218	Kurang	24	Kurang	13
Sedang	148	Sedang	72	Sedang	40
Total Keseluruhan	477	Total Keseluruhan	159	Total Keseluruhan	81

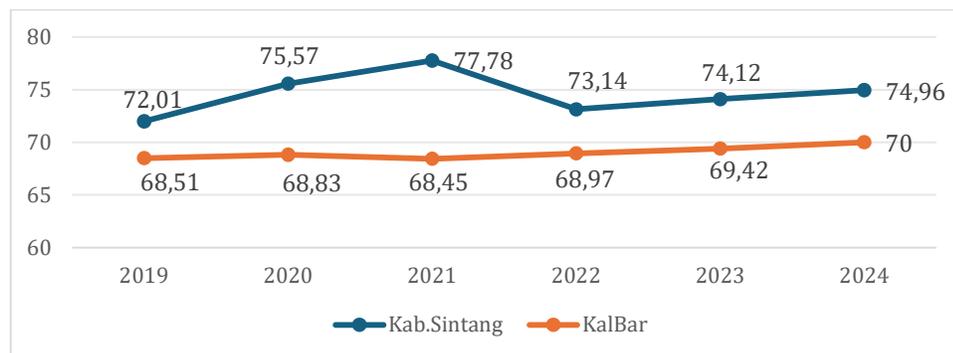
2.1.3.1.4. Indeks Literasi Digital

Indeks literasi digital merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan efisien. Indeks ini mencakup berbagai aspek keterampilan yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan perangkat digital dan internet, serta kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi dan menggunakan informasi digital. Untuk mengukur indeks literasi digital digunakan menggunakan empat indikator yaitu, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital.

Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas di Kabupaten Sintang yang menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel untuk Keperluan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir 2024 sudah mencapai 80,91%. Sementara itu yang menggunakan Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp) baru mencapai 72,24%. Media yang digunakan dalam mengakses internet sebagian besar (99,38%) adalah HP/ponsel.

2.1.3.1.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Angkatan Kerja aktif dalam bekerja dan mencari pekerjaan. TPAK di Kabupaten Sintang periode 2019-2024 cenderung meningkat dari 72,01 (2019) menjadi 74,96 (2024). Capaian TPAK ini melebihi rata-rata TPAK Kalbar dalam periode yang sama. Hingga tahun 2024, berdasarkan jenis kelamin, TPAK Laki-laki (85,87) masih lebih tinggi dari TPAK Perempuan (63,22). Hal ini sejalan dengan peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Selain itu, selain menjadi ibu rumah tangga, kaum perempuan cenderung bersekolah hingga perguruan tinggi daripada menikah. TPAK Kabupaten Sintang saat ini merupakan yang tertinggi di Kalimantan Barat.





Grafik 2.17. TPAK 2019-2024

2.1.3.1.6. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan (AK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan 65+ tahun dengan penduduk usia 15-64 tahun. Selama periode 2019-2023, nilai AK di Kabupaten Sintang semakin berkurang dari 50,43 (2019) menjadi 45,90 (2023). Sejak tahun 2020, AK Kabupaten Sintang kurang dari 50,00 dan menjadi awal memasuki era bonus demografi. Era bonus demografi di Kabupaten Sintang diperkirakan akan berakhir tahun 2045.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta inovasi memainkan peran strategis dalam pembangunan daerah sebagai pendorong utama produktivitas ekonomi di Kabupaten Sintang. Perkembangan IPTEK dan inovasi terlihat dari beberapa indikator utama seperti Rasio PDRB Industri Pengolahan yang menunjukkan tingkat industrialisasi dan penerapan teknologi dalam proses produksi. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Sintang masih dalam tahap pengembangan dengan kontribusi terhadap PDRB yang relatif terbatas. Hal ini menandakan adanya ruang yang luas untuk peningkatan adopsi teknologi dalam transformasi bahan baku lokal menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.

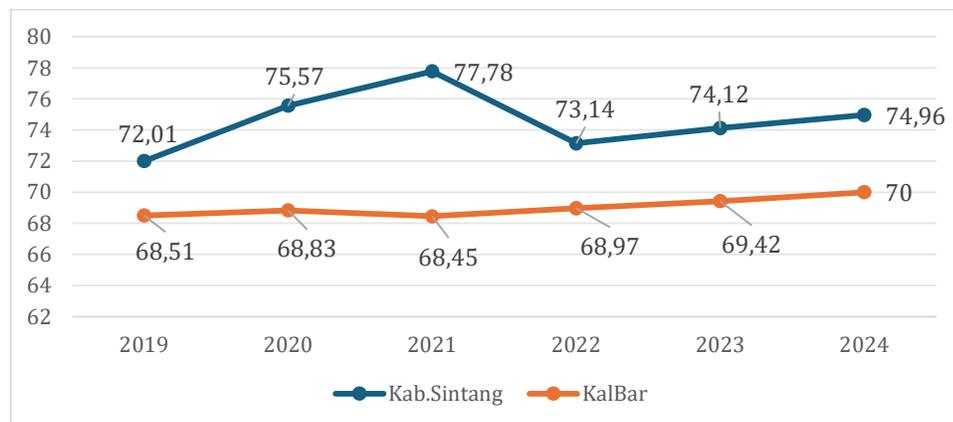
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum mencerminkan perkembangan sektor jasa dan pariwisata yang semakin berbasis teknologi. Di Kabupaten Sintang, sektor ini menunjukkan perkembangan yang potensial terutama didorong oleh meningkatnya mobilitas dan konektivitas wilayah. Perkembangan platform digital dan aplikasi pelayanan turut mendorong inovasi dalam sektor ini meskipun penetrasinya masih perlu ditingkatkan.

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif menjadi indikator lain yang menggambarkan kontribusi aktivitas ekonomi berbasis kreativitas, keterampilan, dan bakat individu yang berpotensi menciptakan kesejahteraan melalui eksploitasi kekayaan intelektual. Di Kabupaten Sintang, ekonomi kreatif mulai berkembang terutama dalam subsektor kuliner, kerajinan, dan seni pertunjukan yang berbasis kearifan lokal. Namun, kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil dan memerlukan dukungan ekosistem inovasi yang lebih terintegrasi.

Rasio Kewirausahaan sebagai indikator tingkat aktivitas kewirausahaan di masyarakat, menunjukkan perkembangan yang positif di Kabupaten Sintang dengan munculnya berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah yang

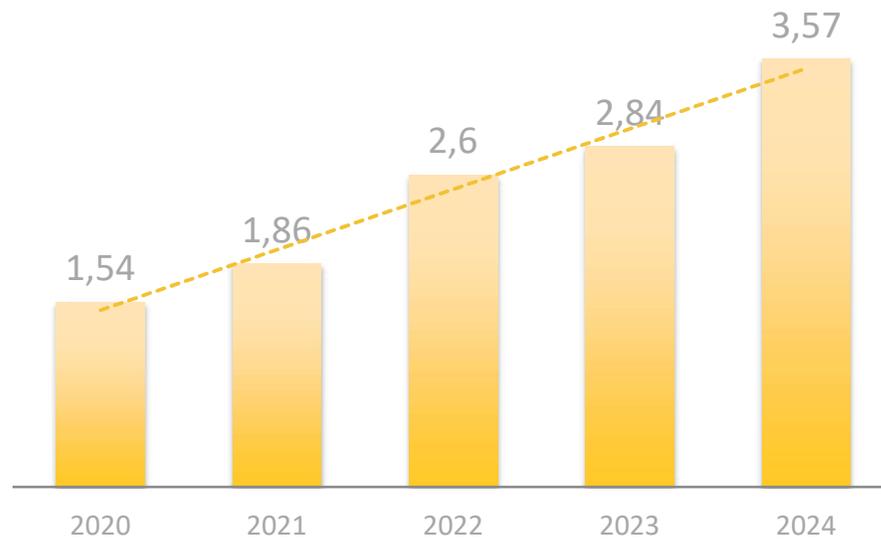
memanfaatkan teknologi digital dalam operasionalnya. Peningkatan kapasitas kewirausahaan berbasis teknologi menjadi prioritas untuk mendorong tumbuhnya wirausaha inovatif yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Angkatan Kerja aktif dalam bekerja dan mencari pekerjaan. TPAK di Kabupaten Sintang periode 2019-2024 cenderung meningkat dari 72,01 (2019) menjadi 74,96 (2024). Capaian TPAK ini melebihi rata-rata TPAK Kalbar dalam periode yang sama. Hingga tahun 2024, berdasarkan jenis kelamin, TPAK Laki-laki (85,87) masih lebih tinggi dari TPAK Perempuan (63,22). Hal ini sejalan dengan peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Selain itu, selain menjadi ibu rumah tangga, kaum perempuan cenderung bersekolah hingga perguruan tinggi daripada menikah. TPAK Kabupaten Sintang saat ini merupakan yang tertinggi di Kalimantan Barat



Grafik 2.18. TPAK 2019-2024

Salah satu indikator untuk mengukur kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu dengan melihat pencapaian Indeks Daya Saing Daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indikator yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), adapun nilai IDSD Kabupaten Sintang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.19. IDSD 2020-2024

Daya saing kabupaten sintang selalu mengalami peningkatan pertahun dengan rata-rata 0,5/tahun

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Kabupaten Sintang berkomitmen untuk mengembangkan pola pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penerapan konsep ekonomi hijau dan biru. Dalam implementasi ekonomi hijau dan biru, terdapat beberapa indikator yang menjadi parameter utama untuk mengukur keberhasilannya di Kabupaten Sintang, antara lain:

1. Indeks Ekonomi Hijau - parameter ini mengukur tingkat keberhasilan implementasi praktik ekonomi berkelanjutan yang rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial. Indeks ini mencakup aspek emisi karbon, pemanfaatan lahan berkelanjutan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penciptaan lapangan kerja hijau. Saat ini, data terukur untuk Indeks Ekonomi Hijau di Kabupaten Sintang belum tersedia secara komprehensif dan sistematis, sehingga menjadi agenda prioritas untuk pengembangan sistem pengukuran dan pemantauan di periode perencanaan mendatang.
2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia - indikator ini mengukur pemanfaatan sumber daya perairan dan kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi. Di Kabupaten Sintang yang memiliki potensi sungai dan perairan darat yang luas, pengukuran indeks ini dapat memberikan gambaran tentang



keberlanjutan pengelolaan sumber daya air. Hingga saat ini, pengukuran Indeks Ekonomi Biru Indonesia untuk tingkat kabupaten termasuk Kabupaten Sintang belum tersedia dan masih dalam tahap pengembangan metodologi di tingkat nasional.

3. Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer - parameter ini menunjukkan persentase pemanfaatan energi terbarukan dibandingkan dengan total energi yang digunakan. Kabupaten Sintang memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan seperti tenaga air mini/mikro hidro, bioenergi, dan tenaga surya. Namun, data terukur mengenai porsi EBT dalam bauran energi primer di Kabupaten Sintang belum tersedia secara spesifik dan terperinci, sehingga diperlukan kajian komprehensif untuk mengidentifikasi kondisi eksisting dan potensi pengembangannya.

Keterbatasan data terukur untuk ketiga indikator tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Sintang untuk mengembangkan sistem pengukuran yang terintegrasi dan komprehensif.

2.1.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses perubahan fundamental dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) mengukur tiga dimensi utama yaitu infrastruktur dan akses TIK, penggunaan TIK, serta keterampilan TIK di masyarakat.

Perkembangan IP-TIK di Kabupaten Sintang menunjukkan tren peningkatan meskipun masih terdapat kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pembangunan infrastruktur TIK di Kabupaten Sintang terus dikembangkan melalui perluasan jaringan telekomunikasi dan internet. Penetrasi telepon seluler telah mencapai sebagian besar wilayah, namun akses internet berkecepatan tinggi masih terbatas di pusat-pusat ekonomi dan perkotaan. Peningkatan infrastruktur jaringan fiber optik dan Base Transceiver Station (BTS) menjadi prioritas untuk menjembatani kesenjangan akses digital di wilayah-wilayah terpencil.

Tabel berikut menyajikan total menara telekomunikasi swasta di Kabupaten Sintang tahun 2020 sampai 2024 menurut kecamatan.



**Tabel 2.43. Total Menara Telekomunikasi Swasta Kabupaten Sintang
Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024**

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Kecamatan Ambalau	1	1	1	1	1
Kecamatan Binjai Hulu	3	3	3	3	3
Kecamatan Dedai	5	6	6	6	6
Kecamatan Kayan Hilir	4	4	4	4	4
Kecamatan Kayan Hulu	1	2	2	2	2
Kecamatan Kelam Permai	4	5	6	6	6
Kecamatan Ketungau Hilir	4	4	4	4	4
Kecamatan Ketungau Tengah	5	5	5	5	5
Kecamatan Ketungau Hulu	2	2	2	2	2
Kecamatan Sepauk	18	18	18	18	18
Kecamatan Serawai	4	4	4	4	4
Kecamatan Sintang	42	40	41	41	41
Kecamatan Sungai Tebelian	19	22	22	22	22
Kecamatan Tempunak	10	11	12	12	12
Kabupaten Sintang	119	128	130	130	130

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2024

Dari tabel diatas, diketahui menara telekomunikasi di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan, dari tahun 2020 berjumlah 119 meningkat menjadi 130 setelah tiga tahun kemudian. Meningkatnya jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Sintang menandakan perkembangan pesat dalam sektor telekomunikasi. Hal ini mencerminkan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas komunikasi.

Begitu pula dengan perkembangan warnet yang terus bertambah di pusat kota dan beberapa kecamatan lainnya serta jaringan 3G yang dapat mengakses internet terus mengalami perluasan di Kabupaten Sintang sangat mempermudah hubungan komunikasi dan proses pertukaran informasi baik secara personal

maupun kelembagaan. Selain itu terjadinya peningkatan jumlah website milik pemerintah daerah yang harus diiringi dengan peningkatan kualitas website menandakan upaya yang kuat dalam pemberdayaan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Selengkapnya mengenai data indikator bidang komunikasi dan informasi Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.44. Indikator Bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Warnet Terhadap Penduduk	%	2	2	0,475	0,454	0,4482
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Buah	92	91	41	57	88
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	Buah	7	1	2	2	5
Website Milik Pemerintah Daerah	Web	27	27	27	29	24

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Sebagian besar Satuan Kerja yang terdapat di pemerintah Kabupaten Sintang telah memanfaatkan sarana telekomunikasi dan teknologi informasi tersebut. Selain berimplikasi pada peningkatan sumber daya aparatur daerah, kondisi ini juga bermanfaat dalam kinerja pelayanan dan publikasi serta perencanaan di Kabupaten Sintang karena mudah dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan. Peluang dan iklim investasi akan sangat terdukung dengan pemanfaatan sarana komunikasi yang baik dan lancar karena akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan fungsi manajemen baik bagi pihak investor maupun kelembagaan pemerintahan. Setidaknya terdapat tiga tabel yang dapat memberikan gambaran kondisi komunikasi dan informasi di Kabupaten Sintang, yaitu jumlah kantor pos pembantu, jangkauan telekomunikasi dan karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet yang disajikan.

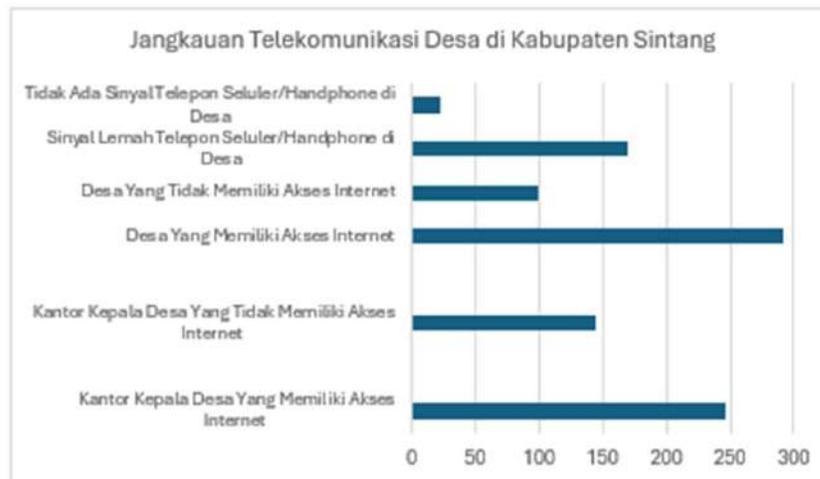
Dalam kurun waktu empat tahun, jumlah Kantor Pos Pembantu di beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang tidak mengalami perubahan, tetap berjumlah 7 unit. Konsistensi jumlah kantor pos ini mencerminkan stabilitas layanan pos di wilayah tersebut, yang berfungsi untuk mendukung distribusi surat, paket, serta layanan keuangan bagi masyarakat.

Tabel 2.45. Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Serawai	1	1	1	1	1
2	Ambalau	0	0	0	0	0
3	Kayan Hulu	0	0	0	0	0
4	Sepauk	1	1	1	1	1
5	Tempunak	0	0	0	0	0
6	Sungai Tebelian	1	1	1	1	1
7	Sintang	2	2	2	2	2
8	Dedai	0	0	0	0	0
9	Kayan Hilir	0	0	0	0	0
10	Kelam Permai	1	1	1	1	1
11	Binjai Hulu	1	1	1	1	1
12	Ketungau Hilir	0	0	0	0	0
13	Ketungau Tengah	0	0	0	0	0
14	Ketungau Hulu	0	0	0	0	0
Kabupaten Sintang		7	7	7	7	7

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2025

Di Kabupaten Sintang, tantangan akses komunikasi ini juga masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Pada tahun 2023, dari total desa yang ada, sebanyak 197 desa atau 50,51% memiliki sinyal telepon seluler kuat, 169 desa atau 43,34% memiliki sinyal telepon seluler lemah, dan 23 desa atau 6,15% tidak memiliki sinyal sama sekali. Untuk lebih jelasnya, kondisi ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Grafik 2.19. Rekapitulasi Jangkauan Telekomunikasi Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Sumber: Sata Data Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar), Tahun 2024

Sedangkan untuk melihat gambaran kondisi informasi dan komunikasi di Kabupaten Sintang, yaitu jangkauan telekomunikasi dan karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode tahun 2019 – 2023 akan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46. Karakteristik Pengguna Fasilitas Komunikasi dan atau Internet Tahun 2020 - 2024

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)					Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Jenis Kelamin KRT									
Laki-laki	71,65	71,28	78,9	80,16	81,34	44,39	57,58	67,34	73,01
Perempuan	56,13	67,92	75,76	73,72	74,08	51,67	51,15	56,35	58,86
Kuintil Pengeluaran									
40 Persen Terbawah	51,6	59,01	65,86	75,42	74,08	32,98	39,69	58,02	64,12
40 Persen Tengah	78,57	73,51	84,61	80,37	81,71	47,14	65,09	67,76	72,49
20 Persen Teratas	89,8	89,68	91,38	86,81	92,37	64,26	74,63	80,91	87,08
Pendidikan Tertinggi ART									
SD ke bawah	59,59	64,05	71,48	68,03	69,58	35,21	44,41	49,06	56,43
SMP ke atas	88,55	82,61	86,8	94,69	95,53	61,23	71,5	89,09	92,55
Kab. Sintang	70,29	71,01	78,67	79,8	80,94	44,97	57,12	66,73	72,24

Sumber: Kabupaten Sintang dalam Angka, BPS, Tahun 2025

Terjadinya peningkatan persentase rumah tangga pengguna telepon atau handphone di Kabupaten Sintang selama 5 (lima) tahun terakhir menggambarkan bahwa adanya upaya atau usaha dari pemerintah Kabupaten Sintang untuk melayani kebutuhan akan layanan komunikasi serta jaringan infrastruktur internet pada masyarakat Kabupaten Sintang. Hal ini juga diperkuat pada penjelasan sebelumnya bahwa sampai dengan tahun 2023 jumlah desa dengan sinyal telepon seluler/handphone kuat berjumlah 197 desa atau mencakup 50,51% walaupun terjadi penurunan dari tahun 2019 dengan jumlah desa dengan sinyal telepon seluler/handphone kuat berjumlah 203 desa atau mencakup 52,05%.



2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Untuk mengukur tingkat integrasi ekonomi domestik dan global di Kabupaten Sintang, beberapa indikator utama dapat dijadikan parameter, antara lain:

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - indikator ini menggambarkan aktivitas investasi dalam bentuk aset tetap yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah. PMTB menjadi cerminan tingkat kepercayaan investor dan potensi peningkatan kapasitas produksi masa depan. Peningkatan PMTB menunjukkan adanya penguatan integrasi ekonomi melalui aliran modal investasi. Meskipun data spesifik untuk PMTB di Kabupaten Sintang belum tersedia secara komprehensif, pengembangan sistem pendataan dan pengukuran indikator ini menjadi prioritas untuk perencanaan ekonomi yang lebih efektif di masa mendatang.
2. Ekspor Barang dan Jasa - parameter ini mengukur tingkat partisipasi ekonomi daerah dalam perdagangan internasional. Nilai dan volume ekspor menjadi indikator penting untuk menilai daya saing produk lokal di pasar global dan tingkat integrasi dalam rantai nilai global. Kabupaten Sintang memiliki potensi ekspor terutama dari komoditas perkebunan dan hasil hutan, namun data terperinci mengenai nilai dan volume ekspor langsung dari wilayah Kabupaten Sintang belum tersedia secara sistematis. Pengembangan sistem pendataan ekspor yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung perencanaan strategi peningkatan ekspor di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen untuk mengembangkan sistem pengukuran dan pendataan yang komprehensif untuk indikator-indikator integrasi ekonomi, termasuk PMTB dan Ekspor Barang Jasa. Upaya ini akan menjadi landasan untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendorong integrasi ekonomi domestik dan global yang berkelanjutan dan inklusif.

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan

2.1.3.6.1. Indeks Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pembangunan yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Peran infrastruktur bagi masyarakat sangat penting karena berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Infrastruktur yang baik dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang

berupaya membangun dan meningkatkan infrastruktur dalam kondisi baik dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan.

Adapun capaian realisasi indeks infrastruktur di Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.47. Indeks Infrastruktur Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No.	Uraian Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Yang Baik	58,26	67,09	67,09	65,56	11,73
2	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih	14,92	29,59	24,75	10,09	52,54
3	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi	65,5	75,31	67,67	78,91	68,94
4	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses/Pengguna Listrik	64,2	92,85	90,2	94,68	62,61
5	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses/Pengguna Telepon/HP	70,29	71,01	78,67	79,8	N/A
Indeks Infrastruktur		54,7	54,63	67,17	66,87	48,95

Sumber: Dokumen dan Publikasi

1. BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2020 - 2024
2. BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023
3. Dokumen RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2022 – 2025
4. Data Diolah, Tahun 2024

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang per tahun 2024 adalah sepanjang 1.787,960 kilometer. Panjang jalan menurut status kewenangan pemerintahan di daerah Kabupaten Sintang pada tahun 2020 – 2024 dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2024

No	Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Negara	73,5	129,80	136,32	136,32	136,32
2	Provinsi	193,97	135,27*	135,27*	239,47**	239,47
3	Kabupaten/Kota	2.289,62	2.289,62	2.289,62	2.289,62	1.787,960



Jumlah/Total	2.557,09	2.554,69	2.561,21	2.425,94	2.163,750
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2025

*) Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 505/DINAS-PU/2016

***) Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1470/DPUPR/2022

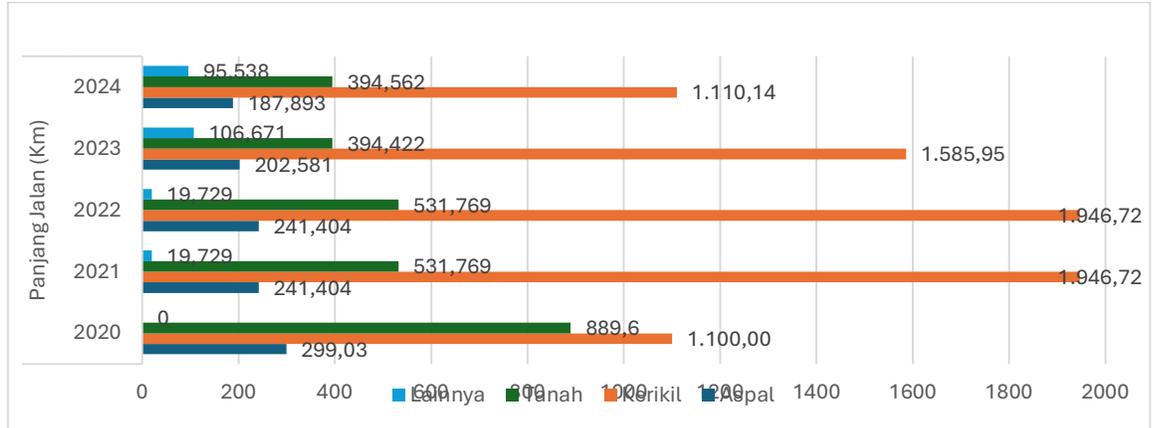
Berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 600.1.7.2/1221/KEP-DPU/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut status dan fungsinya sebagai jalan Kabupaten di Kabupaten Sintang, dengan penambahan ruas jalan baru sebanyak 69 ruas baru dan penghapusan 42 ruas jalan dari SK jalan sebelumnya, sehingga terjadi selisih sebesar 507,24 km dari total panjang SK jalan sebelumnya. Perubahan ini karena terjadi pada perubahan ruas jalan pada nama desa dan dusun. Perubahan panjang menyesuaikan panjang ruas jalan dan penyesuaian trase ruas apabila terdapat pemecahan ruas jalan.

Sampai dengan tahun 2025, panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang sepanjang 1.787,960 kilometer, di mana permukaan jalan 10,51 persen jalan beraspal, 62,09 persen jalan kerikil, 22,07 persen jalan tanah dan 5,34 persen lainnya. Ditinjau dari kondisinya 6,51 persen dalam kondisi baik, 5,21 persen sedang, 24,23 persen ringan dan 64,05 persen rusak berat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7. Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sintang, Tahun 2020 - 2024

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aspal	299,03	241,404	241,404	202,581	187,893
2	Kerikil	1.100,00	1.946,72	1.946,72	1.585,95	1.110,14
3	Tanah	889,6	531,769	531,769	394,422	394,562
4	Lainnya	-	19,729	19,729	106,671	95,538
Total		2.289,62	2.289,62	2.289,62	2.289,62	1.787,96

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2025



Grafik 2.1. Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 – 2024

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2025

Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang di Kabupaten Sintang menunjukkan dinamika yang signifikan selama periode 2020-2024. Berdasarkan data, pada tahun 2020, jalan dalam kondisi baik mencapai 10,8% dari total panjang jalan, dengan jalan dalam kondisi sedang sebesar 47,4%. Pada tahun 2021-2022, terjadi penurunan jalan dalam kondisi baik menjadi 4,7%, sementara jalan dalam kondisi sedang meningkat menjadi 59,5%, menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur jalan berada pada kondisi menengah. Tren serupa berlanjut di tahun 2023, dengan persentase jalan baik sebesar 4,3% dan jalan sedang meningkat menjadi 61,3%.

Tabel 2.8. Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi per kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Ruas	Panjang Jalan (km)	Kondisi Baik (km)	Kondisi Sedang (km)	Kondisi Rusak Ringan (km)	Kondisi Rusak Berat (km)
1	Sintang	79	119.86	44.01	25.37	37.73	12.75
2	Tempunak	12	125.30	1.14	15.41	12.54	96.22
3	Sepauk	16	172.00	16.94	8.40	36.71	109.95
4	Ketungau Hilir	9	125.60	0.60	0.50	41.80	82.70
5	Ketungau Tengah	17	193.50	1.88	4.16	49.07	138.41
6	Ketungau Hulu	17	126.80	0.10	2.81	33.50	90.39
7	Dedai	20	151.25	2.76	7.24	16.78	124.47
8	Kayan Hilir	18	181.55	3.90	3.11	26.10	148.45
9	Kayan Hulu	17	163.85	6.07	10.61	1.43	145.75
10	Serawai	8	137.90	1.00	1.23	47.86	87.81
11	Ambalau	2	9.30	1.85	0.00	0.00	7.45
12	Kelam Permai	11	102.10	23.93	2.82	23.94	51.41
13	Sungai Tebellan	19	151.35	11.40	11.38	95.16	33.41
14	Binjai Hulu	3	27.60	0.87	0.20	10.59	15.95
TOTAL PANJANG JALAN KABUPATEN		248	1,787.96	116.43	93.22	433.20	1,145.10
		%	100.0%	6.51%	5.21%	24.23%	64.05%

Pada tahun 2024, dengan total panjang jalan yang berkurang, terjadi perubahan signifikan di mana jalan dalam kondisi baik meningkat menjadi 6,5%, namun jalan dalam kondisi sedang menurun drastis menjadi hanya 5,2%. Perubahan ini mencerminkan adanya penyesuaian dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang, di mana fokus pemeliharaan dialihkan pada peningkatan kualitas jalan dari kondisi rusak ringan menjadi baik. Konektivitas dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Sintang.

2.1.3.6.2. Persentase Desa Mandiri

Pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan menjadi topik penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tanpa merusak sumber daya alam. Pembangunan pedesaan diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu merupakan indeks komposit yang mengukur perkembangan kemandirian desa berdasarkan tiga aspek, yaitu: Ketahanan sosial (IKS), Ketahanan ekonomi (IKE), Ketahanan ekologi/lingkungan (IKL).

Tabel 2.48. Persentase Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Sintang Tahun 2025

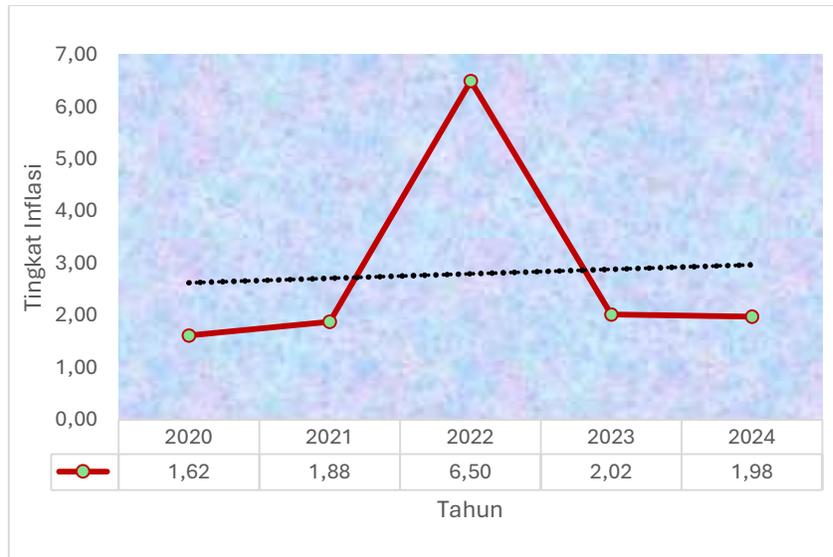
No	Status Indeks Desa Membangun	Tahun 2025	
		Jumlah	Persentase (%)
1	Desa Mandiri	143	36,66
2	Desa Maju	100	25,64
3	Desa Berkembang	147	37,69
4	Desa Tertinggal	0	0,00
5	Desa Sangat Tertinggal	0	0,00
Jumlah Desa		390	100,00

Berdasarkan tabel tersebut, sudah tidak ada lagi desa dengan status Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. Jumlah desa dengan status berkembang sebanyak 147 desa atau mencapai 37,69 persen. Sebanyak 100 desa dengan status Desa Maju, atau mencapai 25,64 persen. Dan 143 desa berstatus Desa Mandiri, atau mencapai 36,66 persen.

Peningkatan jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Sintang menjadi indikator penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan capaian peningkatan Indeks Desa Membangun dengan pendekatan berbasis data, akan memungkinkan pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong transformasi Pembangunan desa yang berkelanjutan.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat.



Grafik 2.20. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan, 2021-2025 (data diolah)

Secara umum, inflasi di Kabupaten Sintang selama tahun 2023-2024 menunjukkan trend penurunan. Bila dikaji secara mendalam, tingkat inflasi tahun 2020 s/d 2024 sudah sejalan dengan asumsi makro yang menargetkan inflasi maksimum 3 persen +/- 1 persen. Dengan kata lain, kondisi perekonomian terutama daya beli masyarakat Sintang relatif stabil.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pilar utama dalam pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Terdapat lima prinsip tata kelola pemerintahan, yakni; transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan epektifitas, partisipasi publik, serta Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelima prinsip tersebut yang kemudian diukur dalam bentuk indeks untuk menilai sejauh mana penilaian tata kelola pemerintahan yang baik atau

good governance yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.49. Data Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tahun 2022 sd 2024

NO	Jenis Regulasi	2022	2023	2024
1.	Peraturan Daerah	3	13	9
2.	Peraturan Bupati	116	122	127
3.	SK Bupati	1420	1395	1741

Dari data diatas dapat dipahami bahwa pada periode 2022 s.d 2024 produktifitas daerah dalam menyusun regulasi dapat dikategorikan cukup baik serta mencerminkan peningkatan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun produk hukum daerah.

2.1.4.1.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pelaksanaan evaluasi terhadap kondisi birokrasi di Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). Adapun Indeks Reformasi Kabupaten Sintang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49. Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sintang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Reformasi	CC (Cukup)	CC (Cukup)	CC (Cukup)	B (Baik)	B (Baik)

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sintang rentang waktu 2020-2024 semakin membaik. Hal ini menunjukkan hasil maksimal diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan ke depan patut untuk ditingkatkan hingga mencapai predikat yang semakin baik lagi.

2.1.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merujuk pada penggunaan teknologi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik, memfasilitasi interkasi antara pemerintah dan warga negara, serta mengelola berbagai proses administratif dengan lebih efisien. Adapun Indeks SPBE Kabupaten Sintang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sintang

No	Indeks SPBE	Tahun Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai	N/a	1,51	1,03	1,89	2,3
2	Predikat	N/a	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Dari Tabel tersebut terlihat terjadi peningkatan skor indeks tepatnya pada tahun 2023 dengan nilai yang diperoleh Pemkab Sintang adalah sebesar 1,89 sehingga menaikkan predikatnya menjadi “Cukup” dan tahun 2024 predikat “Cukup” dengan kenaikan nilai 2,3.

2.1.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Pelaksanaan fungsi Pelayanan publik oleh pemerintah daerah dikur dari sebuah Indeks Pelayanan Publik (IPP). Evaluasi terhadap pelayanan publik yang diberikan harus meliputi aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sumber daya manusia, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi pelayanan. Adapun Indeks SIPP Kabupaten Sintang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51. Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Sintang

No	Indeks Pelayanan Publik	Tahun Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat	B-	B-	B-	B	A (3,61)

Sumber : KEMENPAN-RB

Dari tabel tersebut tergambar bahwa Pada tahun 2020, penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mendapat predikat B- (Baik dengan Catatan). Hasil serupa juga didapatkan di tahun 2021 dan 2022 dengan predikat sama yaitu B- (Baik dengan Catatan). Terjadi peningkatan yang cukup maksimal pada tahun 2023 karena Pemkab Sintang pada akhirnya berhasil memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,78 dengan predikat B (Baik).

2.1.4.1.4. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sebuah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Kegiatan



ini dimaksudkan untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dengan hasil ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.52. Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Sintang

Tahun Capaian	Skor Indeks	Predikat
2020	45	Kurang Inovatif
2021	41,57	Inovatif
2022	9,5	Kurang Inovatif
2023	36,22	Inovatif
2024	41,85	Inovatif

Sumber: KEMENDAGRI

Perkembangan Inovasi Daerah tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya perbaikan predikat IID di Pemerintah Kabupaten Sintang. Capaian tersebut terus dipertahankan hingga tahun 2024. Dengan hasil tersebut tentu saja harus menjadi acuan dan motivasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang agar terus mempertahankan bahkan meningkatkan skor Indeks Inovasi Daerah di tahun-tahun mendatang.

2.1.4.1.5. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP yang diwujudkan dalam bentuk "Indeks SAKIP" menjadi hasil penilaian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya dalam hal ini adalah pemerintah daerah dengan mengintegrasikan penilaian terhadap sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan.

Tabel 2.53. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sintang

Indikator	Tahun Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SAKIP	CC	CC	CC	B	B

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2020-2024 menunjukkan perbaikan predikat SAKIP Pemerintah Kabupaten Sintang berhasil mendongkrak nilai atas evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) sehingga secara keseluruhan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam ruang lingkup reformasi birokrasi mendapatkan predikat B (Baik). Capaian tersebut berlanjut pada tahun 2024, meski target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sintang yakni capaian predikat BB.

2.1.4.1.6. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan ukuran statistik yang menggambarkan dan menjelaskan kualitas dari Aparatur Sipil Negara berdasarkan dari kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ditujukan agar dapat menjadi standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah secara sistematis, berkesinambungan, dan terukur. Indeks Profesionalitas ASN ini didasarkan pada landasan hukum yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Tabel 2.54. Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Sintang

Indeks Profesionalitas ASN	Tahun Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	N/a	50,33	N/a	N/a	N/a
Predikat	N/a	Sangat Rendah	N/a	N/a	N/a

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan penilaian terhadap kualitas ASN di Kabupaten Sintang pada tahun 2021 yang menghasilkan skor indeks yang hanya



50,33 dari 100 poin dengan predikat “Sangat Rendah” menunjukkan bahwa masih banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang terkait pengembangan kualitas ASN-nya. Penempatan yang sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi yang memadai dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan mereka secara spesifik harus dilakukan perbaikan secara maksimal agar dapat meningkatkan skor Indeks Profesionalitas ASN pada tahun mendatang.

2.1.4.1.7. Survey Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menghasilkan nilai berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memuat data dan informasi terkait tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dengan metode pengukuran kualitatif dan kuantitatif atas pengakuan masyarakat setelah mereka mendapatkan pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Rentang nilai yang menjadi standar Indeks Kepuasan Masyarakat dibagi menjadi empat yaitu dengan predikat Tidak Baik (25,00 - 64,99), Kurang Baik (65 – 76,60), Baik (76,61- 88,30), dan Sangat Baik (88,31 – 100).

Tabel 2.55. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sintang

No	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tahun Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat	B	N/a	A	B	N/a
2	Nilai	-	N/a	90	87,5	N/a

Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan Dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2025, nilai IKM dari keseluruhan instansi dan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang pada tahun 2020 berhasil mendapatkan predikat B (Baik). Kemudian pada tahun 2022, hasil yang sangat maksimal diperoleh dengan mendapatkan skor indeks sebesar 90,00 sehingga predikatnya naik menjadi A (Sangat Baik). Kemudian setahun setelahnya yaitu pada 2023, terjadi penurunan skor indeks ke angka 87,5 dengan predikat sama seperti tahun 2020 menjadi B (Baik).



2.1.4.1.8. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan pertanggungjawaban atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan upaya dari untuk melaksanakan fungsi transparansi penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Laporan yang dibuat oleh masing-masing pemda ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang nantinya akan menilai dan memberikan pendapat/opini kewajaran yang terdiri dari TW (Tidak Wajar), TMT (Tidak Memberikan Pendapat), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sudah dimulai sejak tahun 2007. Adapun hasil penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang periode 2020-2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56. Opini BPK Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang

No	Tahun	Opini BPK
1	2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2	2021	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3	2022	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	2023	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
5	2024	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dokumen RPJMD Kabupaten Sintang

Hasil penilaian WTP yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Sintang yang mengedepankan profesionalitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1. Indeks Demokrasi/Tingkat Partisipasi Pemilih

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan atas 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator. Indikator-indikator tersebut dinilai dengan melihat Dokumen dan Surat Kabar, melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam. Hingga saat ini penilaian IDI di Indonesia baru di level provinsi sedangkan di level kabupaten/kota belum dilakukan. Adapun aspek, variabel dan indikator IDI dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.57. Aspek, Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Demokrasi Indonesia

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul	2 Indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 Indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 Indikator
	4. Kebebasan Dari Diskriminasi	3 Indikator
Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 Indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintah	2 Indikator
Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 Indikator
	8. Peran DPRD	3 Indikator
	9. Peran Partai Politik	2 Indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 Indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 Indikator

Sumber: Diolah Tim Peneliti

Salah satu aspek penyusun Indeks Demokrasi Indonesia adalah keberadaan hak-hak politik masyarakat Indonesia yang didalamnya terdapat variabel yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Berikut rekapitulasi partisipasi pemilih per Kabupaten di kalbar termasuk di Kabupaten Sintang sebagai salah satu variabel yang digunakan dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia.

Tabel 2.58. Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Partisipasi Pemilih Pemilu 2024			
		PPWP	DPR RI	DPD	DPRD PROV
1	Sambas	74,57	74,44	74,45	74,33
2	Mempawah	78,49	78,19	78,23	78,09
3	Sanggau	82,04	81,65	81,89	81,61
4	Ketapang	77,69	77,35	77,37	77,24
5	Sintang	88,06	87,91	87,97	87,89
6	Kapuas Hulu	86,03	85,81	85,89	85,81
7	Bengkayang	72,45	72,33	72,35	72,26
8	Landak	90,78	90,68	90,69	90,61
9	Sekadau	88,39	88,3	88,33	88,28
10	Melawi	95,6	95,5	95,42	95,5
11	Kayong Utara	82,97	82,59	82,64	82,34
12	Kubu Raya	85,14	84,92	84,98	84,74
13	Kota Pontianak	81,07	80,66	80,77	80,43
14	Kota Singkawang	73,83	73,51	73,61	73,04
Rata-Rata Kal-Bar		82,65	82,42	82,47	82,3

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 menempati urutan

keenam kabupaten/kota tertinggi di Kalimantan Barat pada Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah sebanyak 304.776 orang. Dari keseluruhan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang terdaftar, persentase realisasi suara yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Sintang adalah 86,48 persen, tertinggi ke tiga di Kalimantan Barat. Capaian tersebut melebihi target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU RI pada angka 81,69 persen, dan perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan baik oleh Pemerintah Daerah, maupun pihak penyelenggara pemilu.

Partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Umum dari tahun 2004 hingga 2019 sudah dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan sejak kontentasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten Sintang 2009 hingga 2019 selalu mendapatkan persentase diatas 80 persen. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, tingkat partisipasi tertinggi berhasil di raih pada saat Pemilu serentak tahun 2019 dengan persentase sebesar 86,70% dengan jumlah suara yang digunakan sebanyak 264.236 suara. Pada tiga kali masa Pemilihan Umum sejak 2009 sampai 2019, partisipasi tertinggi dalam pemilihan legislatif di tingkat kabupaten terjadi pada Pemilihan Legislatif 2019 dengan partisipasi pemilih yang hampir sama dengan Pemilihan Presiden yaitu sebanyak 86,5 persen. Artinya, lebih dari 4/5 masyarakat yang menjadi DPT memberikan hak suara untuk para wakil rakyat di Kabupaten Sintang. Sedangkan pada pemilu pada tahun 2024, tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami peningkatan menjadi 87%, dengan DPT sebesar 318.891 pemilih.

Tabel 2.59. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Sintang (2015-2024)

No	Indikator	Tahun		
		2015	2020	2024
1	Jumlah DPT	303.591	293.942	320.813
2	Pengguna Hak Pilih	229.685 (75,66%)	243.231 (82,75%)	256.767 (79,66%)
3	Tidak Gunakan Hak Pilih	73.906	50.711	64.046

Sumber: KPU dan BPS Kabupaten Sintang

Berdasarkan data pelaksanaan pesta demokrasi pada ranah lokal di Kabupaten Sintang sejak 2015 hingga 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Secara khusus penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2024 tersebut memang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Meski menjadi catatan secara nasional, kondisi tersebut tentu juga harus menjadi perhatian



Pemerintah Kabupaten Sintang dan pihak terkait untuk mengevaluasi penyebab pemilih banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya Pada Pilkada Kabupaten Sintang. Hasil evaluasi tersebut menjadi penting sehingga dapat diambil langkah selanjutnya untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemilihan umum selanjutnya.

2.1.4.3. Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakkan Hukum

2.1.4.3.1. Indeks Rasa Aman

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Menjadi sangat mustahil jika memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan mengesampingkan masalah keamanan. Adapun indikator untuk mengukur indeks rasa aman tersebut mencakup 4 aspek, yaitu:

1. Jumlah Penurunan Pelanggaran Perkada. Tahapan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang masih dilakukan secara parsial serta belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA), namun demikian, walaupun dengan keterbatasan yang ada selama tahun 2024 persentase penegakkan PERDA telah mencapai target 100%;
2. Jumlah masyarakat yang terlayani dalam penegakan Perkada.
3. Jumlah masyarakat terdampak akibat pelayanan perkada.
4. Jumlah masyarakat yang dilakukan penyuluhan Perkada.

Secara umum untuk situasi Kamtibmas di Kabupaten Sintang cenderung stabil. Namun demikian, perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perkembangan global, nasional dan perubahan sosial politik di daerah yang membawa implikasi pada kehidupan masyarakat.

2.1.4.3.2. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Kondisi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sintang dapat ditelusuri dari beberapa indikator, antara lain adalah jumlah aparat ketertiban dan perlindungan masyarakat, jumlah sarana dan prasarana keamanan, dan jumlah kendaraan operasional. Secara umum tindak kriminal yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Sintang Sintang pada tahun 2024 yang terbanyak adalah kasus curat yaitu sebanyak 18 kasus dan diikuti oleh curanmor 15 kasus,



penggelapan 15 kasus, penganiayaan biasa, dan perlindungan anak. Berdasarkan jenis tindak pidana di Kabupaten Sintang yang terbesar adalah Curat dan Curanmor. Berdasarkan Jenis Kelamin untuk tahun 2024, Jenis kelamin Laki-laki merupakan pelaku kriminal terbanyak yaitu 134 orang diikuti Wanita 5 orang.

Tabel 2.60. Jumlah Tindak Pidana Terbesar Menurut Jenis Tindak Pidana di Kabupaten Sintang Tahun 2024

No	Tingkat Pidana Terbesar	Jumlah
1	Curat	18
2	Curanmor	15
3	Penganiayaan	10
4	Minerba (PETI)	1
5	Perjudian	6
6	Pengeroyokan	2
7	Karhutla	-
8	Penggelapan	15
9	Perlindungan Anak	7
10	KDRT	5

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan memperhatikan perkembangan situasi ketenteraman dan ketertiban saat ini banyaknya keluhan masyarakat berkenaan dengan aktifitas usaha Hiburan Malam, Diskotik, Permainan Ketangkasan, Karaoke dan Usaha Cafe di Kabupaten Sintang. Dalam upaya menjaga kondusifitas ketenteraman dan ketertiban di daerah maka pemerintah daerah telah melakukan penertiban atura usaha hiburan malam, diskotik, permainan ketangkasan, dan karaoke yang terkadang memicu masalah sosial dan hukum.

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Setiap daerah otonom menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terbagi ke dalam dua kategori utama: Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembagian urusan ini menjadi landasan fundamental dalam penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencerminkan kinerja komprehensif penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sistem pengukuran kinerja ini memungkinkan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk melakukan evaluasi komprehensif, mengidentifikasi capaian dan kesenjangan, serta merancang intervensi strategis dalam setiap urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dihasilkan bukan sekadar



instrumen administratif, melainkan panduan dinamis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Evaluasi RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 menunjukkan berbagai capaian dan tantangan dalam pembangunan daerah. Sistem pengukuran kinerja memungkinkan Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan evaluasi komprehensif, mengidentifikasi capaian dan kesenjangan, serta merancang intervensi strategis dalam setiap urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi sebagai panduan dinamis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan data, terdapat beberapa capaian penting seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 3,80% pada 2021 menjadi 4,68% pada 2023 (melebihi target 4,25%), peningkatan PDRB per kapita dari Rp36,94 juta pada 2021 menjadi Rp42,43 juta pada 2023 (melebihi target Rp41,25 juta), dan meningkatnya jumlah Desa Mandiri dari 65 desa pada 2022 menjadi 113 desa pada 2023. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, di antaranya nilai Indeks Gini yang meningkat menjadi 0,31 pada 2023 (melebihi target 0,25), pembangunan sumber daya manusia dengan IPM sebesar 69,39 (berada di urutan ke-7 dari 14 Kabupaten/Kota), dan persentase penduduk miskin yang masih tinggi (8,18% pada 2023). Dalam aspek pelayanan publik, beberapa indikator menunjukkan capaian positif seperti Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,5% pada 2023, Opini BPK dengan predikat WTP, dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan peringkat B. Diperlukan upaya peningkatan capaian indikator kinerja utama melalui pengadaan Bank Data lintas sektoral dan evaluasi rutin untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya.

Berikut Indikator Kinerja Kunci yang merupakan kinerja urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.

Tabel 2.61. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Sintang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	3,63	4,96	4,25	4,68	5,1	4,89
2.	PDRB per kapita	Rp. (Juta)	39,04	40,641	41,25	42,433	43,12	46,169
3.	Indeks Gini	Skor	0,26	0,277	0,25	0,31	0,25	0,329
4.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	91,81	91,43	92,35	91,82	92,89	91,97
5.	Indeks Pembangunan Manusia	%	68,02	67,86	68,54	69,39	69,08	70,13
6.	Angka Melek Huruf	%	93,47	92,18	93,9	90,43	94,33	93,90
7.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,22	7,36	7,29	7,64	7,37	7,65
8.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,16	72,12	72,31	72,41	72,47	72,72
9.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	2,78	3,14%	2,53	3,10	2,28	2,14
10.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,49	73,14	76,94	74,12	77,4	74,96
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,69	2,97	3,29	2,92	2,88	2,85
12.	Rasio Penduduk yang bekerja	%	96,31	97,03	96,71	97,08	97,12	71,96
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82	90	83	87,5	84	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
14.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	7	11,16	7,5	9,17	8	8,34
15.	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
16.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	79,2	81	82,1	84,1	85	85,2
17.	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	75	68,323	85	61,693	95	99,871
18.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	29,59	23,35	29,87	23,59	30,21	24,47
21.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	10,5	9,13	10,8	8,28	11,1	8,04
22.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Rp.	226jt	388jt	230jt	427.5jt	235jt	427.5jt
23.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	16,69	15,49	16,85	16,08	17,04	16,28
24.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	9,17	9,55	9,21	9	9,23	8,95
26.	Pertumbuhan Industri	%	3,63	64,39	3,72	58,72	3,89	17,8
27.	Inflasi	%	4,5	6,5	4,4	2,02	4,3	1,98
28.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,51	12,29	12,74	12,3	12,98	12,32
29.	Konflik Antar Pemeluk Agama		0	0	0	0	0	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
30.	Indeks Kerukunan Umat Beragama		74,5	79,11	75,5	79,01	76,55	
31.	Angka Kemiskinan		8,19	8,57	7,65	8,18	7,11	8,03
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Juta Rp	13,86	12,73	14,39	13,23	16,25	
2.	Pengeluaran konsumsi non pangan Perkapita	Juta Rp	8,41	8,86	9,06	9,13	9,54	9,657
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	PENDIDIKAN							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	90	78,38	95	81,58	100	89,03
1.1.1	Jumlah waega Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	%	68,86	68,64	68,78	68,86	100	73,27
1.2.	pendidikan dasar							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.2.1	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	%	95,52	95,79	98,26	96,56	100	96,62
1.3.	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)							
1.3.1	Angka partisipasi kasar	%	5	5,63	5,63	5,62	100	7,29
1.4.								
1.4.1.	Angka partisipasi kasar SD/MI	%	110,58	115,64	106,3	110,28	103,2	98,2
1.4.2.	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	%	74,52	69,16	78,72	72,01	77,72	83,24
1.4.3.	Angka Pendidikan yang ditamatkan	%	82,18	18,23	84,68	16,61	87,18	16,43
1.5.	Angka Partisipasi Murni							
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,23	99,85	98,73	98,52	99,23	86,11
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	57,63	56,87	59,13	67,85	62,63	65,74
1.6.	Angka Partisipasi Sekolah							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.6.1	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,57	99,18	97,47	99,72	99,6	99,43
1.6.2	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	62,76	89,78	64,76	89,76	66,76	84,33
1.7.	Angka Putus Sekolah :							
1.7.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,1	0,74	0,1	0,21	0	
1.7.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	2,98	1,18	2,48	0,14	1,98	
1.8.	Angka Kelulusan:							
1.8.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	
1.8.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	
1.9.	Angka Melanjutkan (AM):							
1.9.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	93	84,23	95	87,2	97	97,51
1.9.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SM	%	92,31	88,10	93,31	90,39	94,81	90,98
1.10	Fasilitas Pendidikan							
1.10.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	90	97,72	95	97,98	100	97,94

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.10.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	90	89,87	95	94,44	100	99,29
1.11.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	%	176	137	176	135	176	126
1.12.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	%	28	362	28	326	28	321
1.13.	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar	%	18	17	18	16	19	13
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	44	60	44	60	44	78
1.15.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jiwa	5.095	5.180	5.195	5.206	5.295	5210
2.	KESEHATAN							
2.1.	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kh	10	4	9	10	8	12
2.2.	Angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup	Per 100.000 kh	196	145	195	186	194	176



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.3.	Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 balita	1,15	2,73	1,15	1,89	1,15	2,89
2.4.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	22,25	63,55	22,3	34,70	22,35	31,55
2.5.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	1,16	1,41	1,14	1,37	1,12	1,58
2.6	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	27,5	32,1	29,0	29,7	30,5	34,0
2.7.	Rasio para medis per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	83,48	354,11	83,52	362,77	84	409,75
2.8.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	71,352	100	74,764	100	78,176	100
2.9.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kelembagaan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	83,5	72,61	84	72,63	84,75	80,72
2.10.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	87	67,32	88	28,4	89	26,04
2.11.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.12.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	2,78	3,14	2,53	3,10	2,28	2,14
2.13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	74,91	68,01	78,68	67,18	82,46	80,84
2.14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100
2.15.	Cakupan kunjungan bayi	%	87,32	93,05	88,24	94,91	88,86	97,01
2.16.	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat Miskin	%	79.49	66,86	80	20,97	80,5	57,37
2.17.	Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M.Djoen	Tipe	Baik	Baik/Tipe C	Baik	Baik	Baik	
2.18.	Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Ade M.Djoen	Tipe	Madya	Dasar	Madya	Madya	Madya	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1.	Pekerjaan Umum :							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.1.1.	Proporsi embaga jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	61,75	64,46	62,99	65,56	64	11,73
3.1.2.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Km	545,71	120.575	592,1	98,532	642,43	116,434
		%	24,81	5,27	26,92	5,84	29,21	6,51
3.1.3.	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	%	42,21	67,67	44,32	68,56	46,98	68,94
3.1.4.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	22,13	9,38	29,73		37,12	
3.1.5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%				21,752		22,547
3.1.6.	Rasio jaringan irigasi	%	51,27	0,0364	51,65	0,0051	52,04	0,0092
3.1.7.	Persentase Penduduk berakses Air minum	6	35,9	59,02	39,3	63,64	42,88	65,07
3.1.8.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	7	47,42	7,49	51,13	7,97	52,28
3.1.9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		3,8	3,87	3,9	3,91	4	
3.1.10		%	43,2	20,22	49,63	39,28	54,63	45,33

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan Beton	Unit	121	198	139	229	153	259
3.1.11	Proporsi Panjang Jembatan Kayu dalam kondisi baik dan sedang	%	61,14	77,63	61,05	60	60,75	56
3.1.12	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	5.430	383,51	5.470	53,73	5.510	96,39
3.1.13	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	50	59,02	55	63,64	60	65,07
3.1.14	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	70	67,67	75	68,56	80	68,94
3.2.	Penataan Ruang :							
3.2.1.	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	30	30	30	30	30	30
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	%	81	100	82	82,5	83	85
3.2.3	Luas wilayah produkti	Ha	893.017,48	206.400,37	893.017,48	207.322,99	893.017,48	211.675,27

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.2.4	Luas wilayah industry	Ha	313,26	3.151,09	3.151,09	3.151,09	3.151,09	3.151,09
3.2.5	Luas wilayah perkotaan	Ha	63.727,3 2	3.151,09	63.727,3 2	4.074	63.727,32	8425,99
3.2.6	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	ada	Ada	ada	Ada	Ada
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Unit	0	0	6	6	50	213
4.2.	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten /Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Unit	48	0	50	63	55	0
4.3.	Rasio rumah layak huni	%	85	93,19	85	93,24	85	93,26
4.4.	Rasio pemukiman layak huni	%	88	99	88	93,24	88	
4.5.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	40	0	40	37,1	40	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.6.	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	27	27	27	10,82	27	0
4.7.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	25	0	25	14,76	25	0
4.8	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	82	0	82	78,15	82	0
4.9	Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)	%	8,5	8,21	8,78	10,09	8,97	10,09
4.10	Rumah Tangga Bersanitasi	%	67,21	67,67	69.32	68,56	71,98	68,94
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
5.1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/kota (SPM)	Orang	15	15	20	20	25	40
5.2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	KK	19		25		30	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	KK	19	19	25	55	30	85
5.4.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	Jiwa	214.679	214.679	214.679	20	214.679	
5.5.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	Jiwa	572	572	572		572	
5.6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	90	100	93	100	95	100
5.7.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	12	15	5,4	15	5
5.8.	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100
5.9.	Konflik antar pemeluk agama	Kasus	0	0	0	0	0	0
5.10.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jmlh Ormas	130	84	135	166	135	141

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.11.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Org	2560	937	2590	2058	2630	6753
5.12.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		1	7	1	6	1	6
5.13.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		60	85	65	82	70	81
5.14.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
5.15.	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Unit	1		1		1	
5.16.	Cakupan petugas Satpol PP		399	315	420	282	425	276
5.17.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	90	100	93	100	95	100
5.18.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Org	420	3619	440	3619	460	3618
5.19.	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pemeriksaan	%	95	100	100	100	100	100



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.20.	Prosentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	%	95	50,98	100	100	100	100
5.21.	Respon Rate Time Kebakaran dan Bencana Daerah (Menit)	Menit	15	60	15	5,4	15	5
5.22.	Indeks Resiko Bencana	Angka	122,03	133,84	120,79	130,94	119,56	123,96
6.	Sosial							
6.1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti (SPM)	%	1.500	1.393	568	10	450	17
6.2.	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	%	50	41	450	1	300	2
6.3.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	%	739	641	240	1	100	3



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6.4.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM)	%	4	4	0	0	5	1
6.5.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. (SPM)	%	110	23697	110	0	110	911
6.6.	Jumlah PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jiwa	136.748	90.014	129.910	233.777	116.919	197311
6.7.	Persentase PMKS yang tertangani	%	14.51	100	15	58	15.75	60,72
6.8.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	35.02	20,04	35.5	54,43	36	18,69
6.9.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	75	100	75	0	75	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6.10.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	85	0	85	0	85	0
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1.	Tenaga Kerja							
1.1.	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jiwa	92,08	221	92,25	25,89	92,5	20,00
1.2.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	80	54,74	80,5	60,39	81	81,56
1.3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	89,58	100	89,75	100	89,8	100
1.4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	%	96	100	97	100	97,5	100
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	2.894	2.878	2.944	2.944	2.994	
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%		12,5		12,5		12,5
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	28.980	90.707	29.080	29.080	29.180	
2.6.	Partisipasi angkatan kerja Perempuan	Orang	104.812	101.918	109.447	109.447	114.082	
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	80	75	100	150	100	98,61
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	85	80	100	52,5	100	70,83

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	85	80	100	85	100	100
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	75	70	100	63	100	100
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	75	70	100	100	100	100
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	80	75	100	84	100	60



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi embag bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	80	75	100	64	100	60
3.	Pangan							
3.1	Ketersediaan pangan utama	%	100	100	100	100	100	-
3.2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	73	100	73	75	73	75
3.3	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	75	66,32	85	61,69	95	99,871
3.4	Percepatan Penganeka-ragaman Konsumsi Pangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari	Desa	15	27	15	7	15	-
3.5	Desa Mandiri Pangan (diintervensi bantuan Pemerintah)	Desa	5	0	5	0	5	-
3.6	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	79,2	66,26	82,1	84,1	85	85,2
4.	Pertanahan							
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	M ²	30.000	21.110	40.000	35.359	50.000	48.627,46

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.2.	Penyelesaian konflik kasus tanah	Kasus	10	1	20	1	30	0
4.3.	Penyelesaian izin Lokasi	Izin Lokasi	7	7	18	50	25	56
5.	Lingkungan Hidup							
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/kota	Ada / tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/kota	Ada / tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/kota	Ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.4.	Indeks kualitas Air	Angka	46,03	60	46,13	54,62	46,23	50
5.5.	Indeks kualitas Udara	Angka	91,8	94,49	91,92	95,83	92,03	94,8
5.6.	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	65,17	62,8	66,56	62,22	67,94	61,35
5.7.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	26	2,14	21	18,68	22	19,67
5.8.	Persentase cakupan area pelayanan	%	74	8,6	73	55	72	55
5.9.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	83	40,09	50	54,98	55	58,11

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.10	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan enanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	%	73	69,77	75	61,5	75	65,97
5.11	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izn PPLH dan PUULH yang di tangani	%	75	100%	80	100	80	100
5.12	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	%	87	87	89	89	91	90
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Kepemilikan KTP Elektronik	Jiwa	344.317	300.628	368.419	310.297	394.208	317.533
6.2	Kepemilikan Kartu Keluarga	Jiwa	302.864	136.775	327.093	140.750	353.260	142.323
6.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jiwa	331.860	108.237	346.793	193.924	362.398	203.034
6.4	Kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	6.457	2.188	7.490	8.208	8.688	15.185
6.5	Kepemilikan Akta Perkawinan	Jiwa	13.102	69.019	16.770	69.027	21.465	79.635



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6.6	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jiwa	20.000	21.780	25.000	24.110	28.000	29.451
6.7	Ketersediaan database kependudukan yang akurat dan terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.8	Ketersediaan sarana pelayanan langsung (<i>direct service</i>)	Unit	2	35	3	4	3	3
6.9	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87	88,27	88	88,38	88	89,63
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	90	100	90	100	95	99,48
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	107		114		125	
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Tim Rak (%)	407	3230	500	3246	500	8754
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	9,08		9,67		10,61	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7.6.	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	75,42
7.7.	Persentase Posyandu aktif	%	100	43,9	100	43,9	100	57,54
7.8	Desa Mandiri	Jumlah	81	65	101	113	121	146
7.9	Rasio Desa Tertinggal Wilayah Perbatasan	%	10,34	5,17	8,62	0	5,17	N/A
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,16	1,4	1,16	1,4	1,16	1,3
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	%	10,14	2,4	10,14	2,28	10,14	2,21
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	27	70,73	27	70,73	27	46,34
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	23	30	23	30	23	30
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur	instansi	2	2	2	3	2	3

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk							
8.7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kecamatan	14	14	14	14	14	14
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jiwa	2,3	2,7	2,2	1,38	2,1	1,3
8.9.	Rasio akseptor KB	%	77,75	74,89	78	75,14	78,25	
9.	Perhubungan							
9.1	Persentase Konektivitas Transportasi	%	18	28	19	30	20	39
9.2	Rasio Kepadatan Lalulintas	%	0,70	0,48	0,68	0,54	0,65	0,54
10.	Komunikasi dan Informatika							
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	14,6	64	33,3	71	50	71

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	254	84,40%	287	-	350	53,8
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	72	-	75	59,59	77	-
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	45	-	65	14,68	81	-
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	72	-	75	9,09	77	-
10.6	Jumlah jaringan komunikasi		131	329	135	-	137	219
10.7	Rasio warnet terhadap Penduduk	%	0,0010004	4,74714E-09	0,0010004	4,53916E-09	0,0010004	4,48179E-08
10.8	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	Unit	15	41	15	57	16	88
10.9	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Unit	11	2	12	2	12	5
10.10	Website milik pemerintah daerah	Ada	27	27	30	29	33	24
10.11	Pameran/Expo	Ada	3	1	5	1	5	1
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	52	55,1	52,02	47,61	52,6	48,41

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
12.	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah Realisasi Investasi	Rupiah	1.934.032 .420.015,-	1.934.032.4 20.015	1.837.500.0 00.000,-	1.699.039.3 41.982,00	1.929.375.000 .000,-	1.281.237.038.6 03
12.2	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	90	90	88	88,9	88	89,22
							2	
13.	Kepemudaan dan Olahraga							
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	67	18.75	70	18.75	70	18.75
13.2.	Persentase wirausaha muda	%	1,7	31	1,8	29	1,9	29
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%	44,4	60	46,6	12	48,8	12
13.4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	21,5	60	22,5	26	23,5	26
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	20	40	22,2	17	24,4	17
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Org	10	150	12	31	14	19
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	5	33	6	3	8	4
13.8.	Jumlah Klub Olahraga	Klub	458	458	460	458	465	458

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
13.9.	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	26	26	26	26	26	26
13.10.	Jumlah organisasi olahraga	Unit	53	53	55	53	55	53
13.11.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	70	20	70	20	75	20
13.12.	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	50	60	55	60	55	60
13.13.	Gelandang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	9	3	10	3	10	3
13.14.	Lapangan olahraga	Lapangan	448	452	450	452	453	455
14.	Statistik							
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2.	Buku 'Kabupaten Dalam Angka'	Buku	21	Ada	21	Ada	21	Ada
14.3.	Buku 'PDRB'	Buku	1	1	1	1	1	1
15.	Kebudayaan							
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan Budaya	Event	2	2	2	2	2	2
15.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	15	15	25	25	25	25



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
15.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	1	1	2	2	3	3
15.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	9	9	9	9	9	9
16.	Perpustakaan							
16.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Org	2.800	48.614	2.850	57.141	2.900	40.534
16.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	32.000	159.933	32.000	181.609	32.200	215.830
16.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,04	0,001	0,04	0,001	0,05	0,001
16.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Org	2.218	13.195	2.218	15.655	2.218	11.105
16.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	11.257	159.933	11.257	181.609	11.257	215.830
16.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Org	1	1	1	1	1	1
16.7.	Jumlah perpustakaan	Unit	66	339	67	443	67	467
16.8.	Indeks Pembangunan Listerasi Masyarakat	%	7,5	80,7	8	41,65	8,5	47,39

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
17.	Kearsipan							
17.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	95		95		95	
17.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	95		95		95	
17.3.	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	42	44,66	44	28,77	46	40,99
	Layanan Urusan Pilihan							
1.	Pariwisata							
1.1.	Kunjungan wisata	Orang	5.200	54.209	5.630	78.638	5.815	36.859
1.2.	Lama kunjungan wisata	Hari	4	3	8	3	10	3
1.3.	PAD sektor pariwisata	%	29,17	3.94	29,17	4,1	29,17	3,79
1.4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rp.	226jt	388jt	230jt	427.5jt	235jt	427.5jt
2.	Pertanian							
2.1.	Kontribusi Sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	29,59	23,35	29,87	23,59	30,21	24,47

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	322	2,78	327	2,70	330	
2.3.	Cakupan bina kelompok petani	Poktan	1964	2368	1970	1970	1974	
2.4.	Persentase rasio luas areal persawahan yang mendapatkan pengairan dengan memadai/ cukup	%	60,1	61,1	60,54	59,6	60,98	
2.5.	Tingkat Penggunaan Benih Unggul Kelapa Sawit rakyat	%	83	90	85	95	88	97
2.6.	Produksi Padi	Ton/Thn	89.243	31.303,8	91.122	24.149,95	92.554	30.423
2.7.	Produksi Jagung	Ton/Thn	3.745	4.990	3.876	0	3.989	
2.8.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	29,59	23,35	29,87	23,59	30,21	24,47
2.9.	Produksi Karet	Ton/Thn	83.732	40.874	86.345	39.869	89.643	39.733
2.10.	Produksi Kelapa Sawit	Ton/Thn	364.235	879.618,37	379.253	936.041,00	382.234	947.473,25
2.11.	Produksi Lada	Ton/Thn	875	1.022,0	912,0	961,0	943,00	960,70
2.12.	Tingkat Penggunaan Benih Unggul Karet	%	92	92	93	92	94,00	90

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.13	Tingkat Penggunaan Benih Unggul Kelapa Sawit rakyat	%	83	90	85	95	88,00	97
2.14	Produksi Kakao	Ton/Thn	34,5	8	36,5	5	39	4,50
2.15	Produksi Kopi	Ton/Thn	124	88	127	76	131	76,10
2.16	Produksi peternakan	Ton/Thn	5.410	6.799	5.512	5.851	5645	5.718
2.17	Luas Kebun Karet	Ha	97.674	103.171	98.256	92.848	98935	91.285
2.18	Luas Kebun Kelapa Sawit	Ha	267.246	207.486,43	271.156	235.083	279756	237.938,17
2.19	Luas Kebun Lada	Ha	2.212	2.405	2.415	1.820	2515	1820
2.20	Luas Kebun Kakao	Ha	680	84	720	117	760	118,40
2.21	Luas Kebun Kopi	Ha	650	341	690	293	730	332,40
2.22	Rasio luas areal persawahan yang mendapatkan pengairan	%	60,25	61,1	60,5	59,7	60,75	
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.1.	Persentase rumah tangga yang pengguna listrik	%	62,96	73,15	65,94	80,84	67,68	
3.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	%	86,06		89,07		91,74	
3.3.	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan PLTS	Unit	300		350		400	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.	Perdagangan							
4.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	1	1	1	1	1	1
4.2	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	%	16,69	15,49	16,85	16,08	17,04	16,28
5.	Perindustrian							
5.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	3,2	60	3,64	28,57	4,02	35,71
5.2	Kontribusi sector industry terhadap PDRB	%	9,17	9,55	9,21	9,00	9,23	8,95
5.3	Pertumbuhan Industri	%	3,63	64,39	3,72	58,72	3,89	17,8
6.	Kelautan dan Perikanan							
6.1.	Produksi perikanan	Ton	2.996,83	941,75	3.146,67	1.247,42	3.304,00	1.198,43
6.2.	Konsumsi ikan	Kg/ksp/th	39,35	48,23	39,35	52,45	39,55	-
6.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0,1		0,1		0,1	
6.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	866,72	289,91	884,05	920,42	901,73	270,02

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Ton	86,67		88,4		90.17	
1.	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	81	84,71	83	85,35	85	85,35
1.3	Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	83	100,75	85	102,24	87	99,26
2.	Keuangan							
	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat Waktu					
2.2.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	57,7	57,7	62,4	27,8	67,1	27,6
3.2.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	28	36	28	36	28	36
3.3.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	564	165	564	174	564	180
3.4.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3443	4522	3443	4463	3443	5383
4.	Penelitian dan Pengembangan							
4.1.	Indeks inovasi daerah.	Nilai	Inovatif	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
5.	Pengawasan							
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	95	92	100	81,98	100	81,73
5.2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peringkat	B	CC	B	B	BB	B

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	Sekretariat Daerah							
6.1	Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standart Pelayanan Publik	Nilai	85	73,06	88	84,1	90	89,14
6.2	Indeks Kematangan Organisasi	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	n/a
6.3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	n/a
7.	Sekretariat Dewan							
7.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
7.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)							
7.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.4	Rasio Perda yang ditetapkan	%	75	83,33	80	66,67	85	64,29
8.	Kecamatan							
8.1	Nilai AKIP (14 Kecamatan)	Nilai	C	C	C	C	CC	



2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah menjadi faktor strategis dan berperan penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sejalan dengan prinsip, asas, dan landasan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, menuntut Pemerintah Daerah untuk menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Sintang mengalami peningkatan cukup signifikan, dari Rp 1.890,24 Milyar tahun 2020 meningkat menjadi Rp 2.004,69 Milyar pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan tahun 2021, menjadi Rp 1.780,02 Milyar. Pada tahun 2023 dan 2024 kembali meningkat, dan volume APBD pada tahun 2024 mencapai Rp 2.088,20 Milyar. Meskipun secara keseluruhan APBD mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 dan tahun 2022 menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Daerah cenderung lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan Belanja Daerah. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Sintang harus menggali sumber pembiayaan yang relatif cukup besar untuk menutupi kekurangan pendapatan (defisit), dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 2020-2024 rata-rata 2,62% per tahun (Tabel 2.55). Dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 8,20% per tahun. Peningkatan PAD relatif cukup tinggi dikontribusi oleh pertumbuhan penerimaan



yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, rata-rata 2,57% per tahun.

Tabel 2.62. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata2 Pertumbuhan (%)
I. PENDAPATAN DAERAH	1.890.236.926.993,01	2.004.696.822.617,10	1.780.017.927.520,58	2.036.118.435.271,19	2.088.202.517.860,10	2,62
1.PAD	134.829.357.444,01	176.520.346.650,22	162.366.717.402,46	172.973.442.067,93	179.044.685.320,10	8,20
1.1. Pajak Daerah	31.116.170.028,75	44.901.339.051,50	41.665.868.567,10	57.669.571.965,50	46.470.313.743,50	12,34
1.2. Retribusi Daerah	3.073.655.170,00	3.165.373.258,40	3.511.868.658,24	3.590.851.183,59	90.934.121.621,85	714,63
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	11.702.168.825,00	10.862.613.298,00	10.709.858.275,00	12.595.209.012,00	12.903.763.064,00	2,57
1.4. Lain-lain PAD Yang Sah	88.937.363.420,26	117.591.021.042,32	106.479.121.902,12	99.117.809.906,84	28.736.486.890,75	-16,92
2.PENDAPATAN TRANSFER	1.656.923.932.149,00	1.720.340.627.820,57	1.611.647.646.318,12	1.842.521.467.603,26	1.899.124.430.540,00	3,65
1.1. Transfer Pemerintah Pusat	1.592.771.682.503,00	1.643.139.650.149,00	1.532.112.089.170,00	1.751.080.672.016,06	1.811.243.316.259,00	3,43
a. Dana Perimbangan	1.194.279.447.503,00	1.287.092.362.149,00	1.178.604.716.170,00	1.382.926.838.146,06	1.461.797.611.489,00	5,60
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	32.087.845.631,00	99.191.749.524,00	62.593.895.269,00	152.999.611.417,00	150.646.169.000,00	92,37
1.1. DBH-Pajak	24.283.180.144,00	69.057.394.705,00	46.478.342.269,00	44.928.876.504,00		-25,00
1.2. DBH-SDA	7.804.665.487,00	30.134.354.819,00	16.115.553.000,00	108.070.734.913,00		-25,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	843.500.665.000,00	837.189.641.000,00	836.375.896.418,00	891.428.076.000,00	980.036.044.000,00	4,05
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	318.690.936.872,00	350.710.971.625,00	279.634.924.483,00	338.499.150.729,06	331.115.398.489,00	0,97
3.1. DAK Fisik					72.498.543.566,00	0,00
3.2. DAK Non Fisik					258.616.854.923,00	0,00
b. Dana Insentif Daerah (DID)	49.887.973.000,00	7.519.190.000,00	10.663.906.000,00	26.486.795.000,00	7.206.801.000,00	0,00
c. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Dana Desa (DD)	348.604.262.000,00	348.528.098.000,00	342.843.467.000,00	341.667.038.870,00	342.238.903.770,00	-0,46
1.2. Transfer Antar Daerah	64.152.249.646,00	77.200.977.671,57	79.535.557.148,12	91.440.795.587,20	87.881.114.281,00	9,25
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.152.249.646,00	77.200.977.671,57	79.535.557.148,12	91.440.795.587,20	87.881.114.281,00	9,25
b. Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	98.483.637.400,00	107.835.848.146,31	6.003.563.800,00	20.623.525.600,00	10.033.402.000,00	22,37
1. Hibah	94.372.910.000,00	40.000.000,00	4.020.000.000,00	4.500.000.000,00	10.033.402.000,00	49,86
2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Lain-lain Pendapatan	4.110.727.400,00	107.795.848.146,31	1.983.563.800,00	16.123.525.600,00	0,00	0,00
II. BELANJA DAERAH	1.984.874.355.086,01	1.860.072.209.709,20	1.802.487.215.771,31	1.949.532.102.216,71	2.098.139.780.434,13	1,43
1. Belanja Operasi	1.170.632.004.594,61	1.109.822.778.027,28	1.137.829.897.279,31	1.178.950.289.290,20	1.344.059.953.683,13	3,70
1.1. Belanja Pegawai	723.115.459.122,00	648.859.358.337,00	627.666.020.862,56	638.321.734.870,00	772.452.411.709,00	1,71
1.2. Belanja Barang dan Jasa	344.909.108.196,61	395.694.786.136,28	472.573.551.860,75	484.836.213.436,20	517.175.253.996,13	12,49
1.3. Belanja Subsidi	522.218.276,00	0,00	753.471.164,00	800.015.581,00	800.015.581,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	100.658.219.000,00	64.288.633.554,00	34.080.803.392,00	54.652.743.403,00	53.282.272.397,00	-11,77
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1.427.000.000,00	980.000.000,00	2.756.050.000,00	339.582.000,00	350.000.000,00	-18,87
2. Belanja Modal	301.828.705.830,40	273.150.664.287,00	189.346.459.659,00	292.311.838.674,51	277.808.922.412,00	-1,99
3. Belanja Tak Terduga	15.721.145.361,00	2.345.211.737,92	1.800.779.284,00	6.794.761.004,00	912.920.000,00	-23,55
4. Belanja Transfer	496.692.499.300,00	474.753.555.657,00	473.510.079.549,00	471.475.213.248,00	475.357.984.339,00	-1,07
SURPLUS/(DEFISIT)	-94.637.428.093,00	144.624.612.907,90	-22.469.288.250,73	86.586.333.054,48	-9.937.262.574,03	-22,37
III. PEMBIAYAAN	140.767.983.297,03	46.130.555.204,03	181.255.717.936,13	148.286.429.685,40	223.372.762.739,88	14,67
1. Penerimaan Pembiayaan	144.867.983.297,03	46.130.555.204,03	190.755.717.936,13	158.786.429.685,40	234.872.762.739,88	15,53
1.1. SILPA tahun sebelumnya	144.567.983.297,03	46.130.555.204,03	190.755.717.936,13	158.786.429.685,40	234.872.762.739,88	15,62
1.2. Pencairan Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan KDYD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinj. Daerah & Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	4.100.000.000,00	0,00	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	11.500.000.000,00	45,12
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal Daerah	4.100.000.000,00	0,00	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	11.500.000.000,00	45,12
2.3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	140.767.983.297,03	46.130.555.204,03	181.255.717.936,13	148.286.429.685,40	223.372.762.739,88	14,67
3.3. Sisa Lbh Pembiay. Anggaran (SILPA)	46.130.555.204,03	190.755.168.111,93	158.786.429.685,40	234.872.762.739,88	213.435.500.165,85	90,67

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2020-2024 (diolah)



Pertumbuhan Pendapatan Transfer periode 2020–2024 rata-rata 3,65% per tahun. Adapun dilihat dari komponennya, penerimaan Transfer Pusat mengalami rata-rata pertumbuhan 3,43% per tahun, sedangkan penerimaan Transfer Antar Daerah mengalami pertumbuhan relatif cukup tinggi yakni rata-rata 9,25% per tahun. Khusus untuk penerimaan Dana Perimbangan, pertumbuhan positif dikontribusi oleh penerimaan Dana Bagi Hasil yakni rata-rata 92,37% per tahun, sedangkan pertumbuhan penerimaan Dana Alokasi Umum rata-rata 4,05% per tahun, serta pertumbuhan penerimaan Dana Alokasi Khusus rata-rata 0,97% per tahun.

Selanjutnya, pertumbuhan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama periode 2020-2024 rata-rata sebesar 22,37% per tahun. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan tertinggi yang bersumber dari penerimaan Hibah, yakni rata-rata 49,86% per tahun.

Rasio efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang selama periode 2020-2024 menunjukkan pencapaian yang belum optimal, rata-rata 77,19% per tahun. Kinerja Rasio Efektivitas perlu untuk terus menerus ditingkatkan, karena fluktuasinya relatif tinggi pada kisaran 81,03% s/d 118,90%. Untuk memperoleh rasio efektivitas yang cenderung linier, perlu langkah sistematis untuk meningkatkan kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dengan fokus pada upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah yang basis pajak dan potensinya relatif cukup besar.

**Tabel 2.63. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024**

TAHUN	TARGET		REALISASI		Rasio Efektivitas (%)
	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	
2020	150.447.932.881,98	-15,44	134.829.357.444,01	-21,74	89,62
2021	148.459.419.502,00	-1,32	176.520.346.650,22	30,92	118,90
2022	200.370.858.275,00	34,97	162.366.717.402,46	-8,02	81,03
2023	179.403.714.301,00	-10,46	172.973.442.067,93	6,53	96,42
2024	170.260.193.064,00	-5,10	179.044.685.320,10	3,51	105,16

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2020-2024 (diolah)



2.2.1.2. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 *tentang* Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Selama kurun waktu 2019-2023, pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Sintang mencapai 6,05% per tahun, yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Sintang mengalami peningkatan relatif stabil. Pertumbuhan Aset dengan trend yang positif ini menunjukkan bahwa aset Pemerintah Kabupaten Sintang periode 2019-2023 dalam kondisi sehat.

Aset daerah tersebut berupa Aset Lancar (uang Kas, Piutang, dan Penyisihan); Investasi Jangka Panjang; Aset Tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya); dan Aset Lainnya, yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sintang.

**Tabel 2.64. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sintang,
Tahun 2019-2023**

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas	145.003.864.134,00	46.144.678.627,03	190.755.168.111,93	158.786.429.685,40	235.006.266.393,88	
Kas di Kas Daerah	116.759.133.104,58	36.961.788.974,32	141.163.661.750,97	119.518.395.629,83	192.487.447.739,90	
Kas di Bendahara Penerimaan	-	24.460.000,00	19.957.500,00	15.110.850,00	-	
Kas di Bendahara Pengeluaran	318.492.008,00	125.759.848,00	35.822.368,00	16.416.564,00	121.131.950,00	
Kas di BLDD	9.902.283.494,78	7.064.550.938,30	47.967.173.096,98	37.776.389.687,56	37.509.943.592,22	
Kas di Bendahara FKTP	-	-	18.491.000,00	63.926.200,00	-	
Kas di Bendahara BOS	-	-	1.550.062.395,98	1.396.190.754,01	-	
Kas Lainnya	18.023.955.526,64	1.968.118.866,41	-	-	4.220.153.857,00	
Kas Dana BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
Piutang	-	-	-	-	-	
Piutang Pajak Daerah	8.978.787.943,60	9.857.168.054,10	11.475.858.221,10	12.760.957.498,10	14.489.165.641,60	
Piutang Retribusi Daerah	12.676.026,00	41.812.965,00	160.837.425,00	109.734.225,00	996.728.945,00	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	10.709.858.275,00	-	-	
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	-	-	32.676.912.323,43	10.608.656.692,89	17.001.833.330,41	
Piutang Transfer	-	-	4.025.799.217,12	12.807.053.377,20	9.596.197.951,00	
Piutang Lainnya	36.123.722.854,63	27.060.324.185,49	1.055.236.614,19	997.424.698,57	1.064.666.870,69	
Penyisihan Piutang	(10.220.338.319,95)	(11.314.876.974,65)	(12.358.852.699,50)	(13.241.996.712,12)	(13.892.001.589,82)	
Bagian Lancar	1.134.158.120,04	1.135.730.123,17	-	-	-	
Beban Dibayar Dimuka	3.096.788.259,67	2.317.803.745,90	9.140.450.822,04	30.152.054,79	3.023.743.373,82	
Persediaan	14.750.536.055,14	37.411.510.719,88	46.373.142.253,80	37.568.784.131,18	50.118.436.398,38	
JUMLAH ASET LANCAR	198.880.195.073,13	112.652.151.445,92	294.014.410.564,11	220.427.195.651,01	317.405.037.314,96	14,90
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	
Inv.jk Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-	
Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	
Dana Bergulir	-	-	-	-	-	
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
Jumlah Investasi Jk. Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-	-	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	130.536.487.247,84	132.554.536.258,71	137.858.647.077,05	138.035.560.374,75	144.728.076.827,18	
Investasi Permanen Lainnya	300.000.000,00	-	-	-	-	
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	130.836.487.247,84	132.554.536.258,71	137.858.647.077,05	138.035.560.374,75	144.728.076.827,18	2,65
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	130.836.487.247,84	132.554.536.258,71	137.858.647.077,05	138.035.560.374,75	144.728.076.827,18	2,65
ASET TETAP						
Tanah	1.392.856.638.450,93	1.394.117.215.840,93	1.396.702.204.020,93	1.958.349.574.833,73	1.970.483.815.834,73	
Peralatan dan Mesin	530.635.886.427,87	639.558.971.240,63	711.433.112.673,61	771.140.705.376,93	775.595.086.438,33	
Gedung dan Bangunan	1.352.209.700.912,93	1.428.026.362.270,92	1.455.239.479.202,32	1.519.936.667.357,11	1.644.798.092.064,86	
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.871.425.141.192,42	1.977.810.000.322,30	2.097.313.682.205,59	2.348.788.049.614,46	2.491.230.092.942,31	
Aset Tetap Lainnya	73.228.614.388,67	82.856.353.687,98	92.210.305.830,98	101.110.951.016,77	110.312.266.577,77	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	85.780.628.685,40	86.992.378.314,06	122.675.724.941,85	44.097.055.120,14	70.962.907.674,47	
Akumulasi Penyusutan	(1.457.415.578.374,70)	(1.659.670.140.905,45)	(1.893.280.582.871,71)	(2.175.478.910.696,56)	(2.380.417.325.119,77)	
JUMLAH ASET TETAP	3.848.721.031.683,52	3.949.691.140.771,37	3.982.293.926.003,57	4.567.944.092.622,58	4.682.964.936.412,70	5,42
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA						
Ta'ghiban Jangka Panjang	3.191.043.022,50	2.630.827.706,37	2.468.880.115,35	2.176.984.630,97	1.887.032.983,85	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
Aset Tidak Berwujud	15.362.309.462,11	15.798.767.752,11	16.307.656.752,11	16.307.656.752,11	16.307.656.752,11	
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.229.113.658,77)	(13.733.045.222,89)	(14.981.603.082,13)	(15.609.343.718,10)	(16.180.434.502,10)	
Aset Lain-lain	1.733.785.694,02	1.680.270.577,46	1.690.629.710,88	1.560.691.227,92	2.260.277.783,96	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-	
Dana Transfer <i>Treasure Deposit Facility</i>	-	-	-	23.954.469.567,00	38.185.644.000,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	8.058.024.519,86	6.376.820.813,05	5.485.563.496,21	28.390.458.459,90	42.460.177.017,82	106,73
JUMLAH ASET	4.186.495.738.524,35	4.201.274.649.289,05	4.419.652.547.140,94	4.954.797.307.108,24	5.187.558.227.572,66	5,98
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	163.675.253,49	14.123.423,00	-	-	133.503.654,00	
Utang Bunga	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	16.765.977,00	8.581.011,29	176.885.582,39	74.512.278,81	40.502.922,90	
Utang Belanja	32.084.696.328,55	30.381.482.033,98	42.302.539.394,00	18.848.101.448,00	28.093.403.921,25	
Utang Jangka Pendek Lainnya	215.655.499,00	17.690.900,00	-	5.320.667.000,00	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	32.480.793.058,04	30.421.877.368,27	42.479.424.976,39	24.243.280.726,81	28.267.410.498,15	(3,24)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	32.480.793.058,04	30.421.877.368,27	42.479.424.976,39	24.243.280.726,81	28.267.410.498,15	(3,24)
EKUITAS						
EKUITAS	4.154.014.945.466,31	4.170.852.771.920,78	4.377.173.122.164,55	4.930.554.026.381,43	5.159.290.817.074,51	6,05
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.186.495.738.524,35	4.201.274.649.289,05	4.419.652.547.140,94	4.954.797.307.108,24	5.187.558.227.572,66	5,98

Sumber: Neraca Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2019-2023 (diolah)



Aset Lancar dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,90% per tahun. Investasi Jangka Panjang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,65% per tahun, sedangkan Aset Tetap tumbuh rata-rata 5,42% per tahun. Komponen Aset Lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata 106,73% per tahun.

Dalam hal kewajiban daerah, baik Kewajiban Jangka Pendek maupun Kewajiban Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Sintang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023) selalu dapat diselesaikan. Pada 2019, Kewajiban Jangka Pendek Rp 32.480.793.058,04 dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi Rp 42.479.424.976,39. Namun kewajiban jangka pendek mengalami penurunan pada tahun 2023, menjadi Rp 28.267.410.498,15. Pemenuhan akan kewajiban jangka pendek selama periode 2019-2023 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang selama kurun waktu tersebut dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu.

Ekuitas dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2019-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,05% per tahun, yang berarti bahwa ekuitas dana yang dimiliki relatif cukup tinggi.

2.2.1.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

2.2.1.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Sintang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



**Tabel 2.65. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang,
Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata2
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1. PAD	134.829.357.444,01	176.520.346.650,22	162.366.717.402,46	172.973.442.067,93	179.044.685.320,10	
Proporsi (%)	7,13%	8,81%	9,12%	8,50%	8,57%	8,43%
2. PENDAPATAN TRANSFER	1.656.923.932.149,00	1.720.340.627.820,57	1.611.647.646.318,12	1.842.521.467.603,26	1.899.124.430.540,00	
Proporsi (%)	87,66%	85,82%	90,54%	90,49%	90,95%	89,09%
3. LAIN2 PENDPTN DAERAH YANG SAH	98.483.637.400,00	107.835.848.146,31	6.003.563.800,00	20.623.525.600,00	10.033.402.000,00	
Proporsi (%)	5,21%	5,38%	0,34%	1,01%	0,48%	2,48%
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.890.236.926.993,01	2.004.696.822.617,10	1.780.017.927.520,58	2.036.118.435.271,19	2.088.202.517.860,10	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 8,43% per tahun. Proporsi terbesar Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Transfer, yakni rata-rata 89,09% per tahun. Sedangkan proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 2,48% per tahun.

Tingginya proporsi pendapatan transfer dalam struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2020-2024 ditopang oleh penerimaan yang relatif besar dari transfer Pemerintah Pusat, yakni rata-rata 95,42%, sedangkan penerimaan dari transfer Antar Daerah rata-rata 4,58% per tahun.

2.2.1.3.2. Belanja Daerah

Selama periode tahun 2020-2024, proporsi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sintang (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) yaitu rata-rata sebesar 35,01% per tahun. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 36,62%, hal ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan rutin berupa belanja gaji dan tunjangan.

**Tabel 2.66. Analisis Proporsi Belanja Pegawai di Kabupaten Sintang,
Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Belanja Pegawai (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Presentase (%)
2020	723.115.459.122,00	1.988.974.355.086,01	36,36%
2021	648.859.358.337,00	1.860.072.209.709,20	34,88%
2022	627.666.020.862,56	1.811.987.215.771,31	34,64%



Tahun	Jumlah Belanja Pegawai (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Presentase (%)
2023	638.321.734.870,00	1.960.032.102.216,71	32,57%
2024	772.452.411.709,00	2.109.639.780.434,13	36,62%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Relatif tingginya proporsi belanja pegawai dalam struktur belanja daerah dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah. Pada tahun 2020-2024, rata-rata proporsi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sintang (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah sebesar 22,79%.

Tabel 2.67. Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa di Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase (%)
2020	344.909.108.196,61	1.988.974.355.086,01	17,34%
2021	395.694.786.136,28	1.860.072.209.709,20	21,27%
2022	472.573.551.860,75	1.811.987.215.771,31	26,08%
2023	484.836.213.436,20	1.960.032.102.216,71	24,74%
2024	517.175.253.996,13	2.109.639.780.434,13	24,51%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Proporsi Belanja Barang dan Jasa cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Realisasi Belanja Barang dan Jasa terendah terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 17,34%, dan tertinggi pada tahun 2022 yakni sebesar 26,08%.

**Tabel 2.68. Analisis Proporsi Belanja Modal di Kabupaten Sintang,
Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Belanja Modal (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase (%)
2020	301.828.705.830,40	1.988.974.355.086,01	15,18%
2021	273.150.664.287,00	1.860.072.209.709,20	14,68%
2022	189.346.459.659,00	1.811.987.215.771,31	10,45%
2023	292.311.838.674,51	1.960.032.102.216,71	14,91%
2024	277.808.922.412,00	2.109.639.780.434,13	13,17%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Selama periode tahun 2020-2024, rata-rata proporsi Belanja Modal dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sintang (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah sebesar 13,68%. Proporsi belanja modal terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 sebesar 15,18%, kemudian turun menjadi 13,17% pada tahun 2024.

2.2.1.4. Analisis Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan, komponen yang dimasukkan dalam penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Adapun Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran yang perlu dibayar dan akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi penerimaan daerah), Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 apabila *performance budgeting* memperlihatkan defisit, maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut, yaitu : a) SiLPA; b) Pencairan Dana Cadangan; c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d) Penerimaan Pinjaman Daerah; e) Penerimaan



Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan f) Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan bila terjadi surplus anggaran daerah maka akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah, berupa: a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal pemerintah daerah; c. Pembayaran pokok utang; d. Pemberian pinjaman daerah.

Adapun perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang pada periode 2020-2024 disajikan berikut ini.

Tabel 2.69. Realisasi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024

PEMBIAYAAN	2020	2021		2022		2023		2024		Rata ² (%)
	Rp. M	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN										
a. Sisa Lebih Perhit. Anggaran (SiLPA)	144,57	46,13	-68,09	190,76	313,53	158,79	-16,76	234,87	47,91	69,15
b. Pinjaman Daerah	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,30	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	-25,00
JUMLAH PENERIMAAN	144,87	46,13	-168,1	190,76	313,53	158,79	-16,76	234,87	47,91	44,15
PENGELUARAN PEMBIAYAAN										
a. Penyertaan Modal Daerah	4,10	0,00	-100,00	9,50	0,00	10,50	100,00	11,50	200,00	50,00
b. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN	4,10	0,00	-100,00	9,50	0,00	10,50	100,00	11,50	200,00	50,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Pada tabel tersebut, tampak bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah rata-rata 44,15% per tahun, dengan kontribusi terbesar dari Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sebaliknya, Pengeluaran Pembiayaan Daerah rata-rata 50,00% per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Penyertaan Modal Daerah.

Secara keseluruhan, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sintang periode 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.70. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024

No	URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.890.236.926.993,01	2.004.696.822.617,10	1.780.017.927.520,58	2.036.118.435.271,19	2.088.202.517.860,10
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.984.874.355.086,01	1.860.072.209.709,20	1.802.487.215.771,31	1.949.532.102.216,71	2.098.139.780.434,13
	Surplus (Defisit)	-94.637.428.093,00	144.624.612.907,90	-22.469.288.250,73	86.586.333.054,48	-9.937.262.574,03
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	144.867.983.297,03	46.130.555.204,03	190.755.717.936,13	158.786.429.685,40	234.872.762.739,88
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.100.000.000,00	0,00	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	11.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	140.767.983.297,03	46.130.555.204,03	181.255.717.936,13	148.286.429.685,40	223.372.762.739,88
5	Sisa Lebih Pemb. Anggaran (SiLPA)	46.130.555.204,03	190.755.168.111,93	158.786.429.685,40	234.872.762.739,88	213.435.500.165,85

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2020-2024 (diolah)



Pada tabel 2.72 tersebut tampak bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2019 mencapai Rp 144,84 Milyar, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi menjadi Rp 213,4 Milyar.

2.2.1.5. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Tabel 2.71. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama di Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata2 Pertumbuhan (%)
A. BELANJA OPERASI	1.170.841.420.318,61	1.109.822.778.027,28	1.137.076.426.115,31	1.178.150.273.709,20	1.344.059.953.683,13	3,70
1. Belanja Pegawai	723.115.459.122,00	648.859.350.337,00	627.666.020.862,56	638.321.734.070,00	772.452.411.709,00	1,71
2. Belanja Barang dan Jasa	344.909.108.196,61	395.694.786.136,28	472.573.551.860,75	484.836.213.436,20	517.175.253.996,13	12,49
3. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Belanja Subsidi	522.218.276,00	0,00	753.471.164,00	800.015.581,00	800.015.581,00	0,00
5. Belanja Hibah	100.658.219.000,00	64.288.633.554,00	34.080.803.392,00	54.652.743.403,00	53.282.272.397,00	-1,77
6. Belanja Bantuan Sosial	1.427.000.000,00	980.000.000,00	2.756.050.000,00	339.582.000,00	350.000.000,00	-18,87
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.106.000.000,00	0,00	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	11.500.000.000,00	45,12
1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Daerah	4.100.000.000,00	0,00	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	11.500.000.000,00	45,12
3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A+B)	1.174.941.420.318,61	1.109.822.778.027,28	1.146.576.426.115,31	1.188.650.273.709,20	1.355.559.953.683,13	3,84

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada belanja operasi tumbuh rata-rata 3,70% per tahun, sedangkan pengeluaran pembiayaan tumbuh rata-rata 45,12% per tahun. Dengan demikian, diperoleh pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tumbuh rata-rata 3,84% per tahun.

Selanjutnya, perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung total penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.



Tabel 2.72. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2020-2024

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata2 Pertumbuhan (%)
1. Pendapatan	1.890.236.926.993,01	2.004.696.822.617,10	1.780.017.927.520,58	2.036.118.435.271,19	2.088.202.517.860,10	2,62
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	144.567.983.297,03	46.130.555.204,03	190.755.717.936,13	158.706.429.685,40	234.872.762.739,88	15,62
Total Penerimaan (1+2+3)	2.034.804.910.290,04	2.050.827.377.821,13	1.970.773.645.456,71	2.194.904.864.956,59	2.323.075.280.599,98	3,54
<i>Dikurangi:</i>						
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	1.174.941.420.318,61	1.109.822.778.027,28	1.146.576.426.115,31	1.188.650.273.709,20	1.355.559.953.683,13	3,84
Kapasitas Riil Kemampuan Keu. Daerah	859.863.489.971,43	941.004.599.793,85	824.197.219.341,40	1.006.254.591.247,39	967.515.326.916,85	3,13

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Sintang tahun 2020 sebesar Rp 859,86 Milyar, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 967,52 Milyar atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,13% per tahun.

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah

Proyeksi keuangan daerah Kabupaten Sintang tahun 2026-2030 dilakukan berdasarkan beberapa faktor yang akan berpengaruh antara lain rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan, kebijakan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.73. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Sintang,
Tahun 2026-2030**

KODE	URAIAN	APBD 2024	PROYEKSI APBD 2026	PROYEKSI APBD 2027	PROYEKSI APBD 2028	PROYEKSI APBD 2029	PROYEKSI APBD 2030	RATA-RATA PERTUMBUHAN
4	PENDAPATAN DAERAH	2.018.323.024.970,00	2.318.704.585.336,00	2.440.997.445.984,40	2.565.995.111.981,12	2.696.918.520.571,01	2.834.586.946.999,71	5,56
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.429.252.000,00	207.581.159.367,00	218.860.446.700,00	231.927.907.857,50	245.225.007.089,71	259.276.753.984,34	6,23
4.1.01	Pajak Daerah	76.577.000.000,00	91.459.159.367,00	96.955.000.000,00	102.820.000.000,00	109.044.950.000,00	115.619.950.000,00	6,60
4.1.02	Retribusi Daerah	3.672.832.000,00	97.646.500.000,00	102.469.218.200,00	108.661.051.150,00	114.667.997.470,00	121.019.817.412,00	5,98
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.500.000.000,00	13.000.000.000,00	13.500.000.000,00	14.000.000.000,00	4,17
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.179.420.000,00	6.475.500.000,00	6.936.228.500,00	7.446.856.707,50	8.012.059.619,71	8.636.986.572,34	8,34
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.842.893.772.970,00	2.089.847.825.969,00	2.194.340.217.284,40	2.304.057.228.123,62	2.419.260.089.481,30	2.540.223.094.015,37	5,39
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.774.234.775.000,00	2.037.077.393.000,00	2.138.931.262.667,35	2.245.877.825.775,72	2.358.171.717.016,00	2.476.080.302.926,80	5,39
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil		168.821.298.000,00	177.262.362.900,00	186.125.481.045,00	195.431.755.097,25	205.203.342.852,11	5,39
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum		1.128.307.632.000,00	1.184.723.013.617,35	1.243.959.164.273,22	1.306.157.122.438,38	1.371.464.978.620,30	5,39
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus Fisik		88.613.383.000,00	93.044.052.150,00	97.696.254.757,50	102.581.067.495,38	107.710.120.870,14	5,39
4.2.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik		319.456.629.000,00	335.429.460.450,00	352.200.933.472,50	369.810.980.146,13	388.301.529.153,43	5,39
4.2.01.05	Dana Desa		331.878.451.000,00	348.472.373.550,00	365.895.992.227,50	384.190.791.838,88	403.400.331.430,82	5,39
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.658.997.970,00	52.770.432.969,00	55.408.954.617,05	58.179.402.347,90	61.088.372.465,30	64.142.791.088,56	5,39
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	21.275.600.000,00	27.796.782.000,00	30.009.976.000,00	32.433.424.000,00	35.087.099.000,00	16,23

KODE	URAIAN	APBD 2024	PROYEKSI APBD 2026	PROYEKSI APBD 2027	PROYEKSI APBD 2028	PROYEKSI APBD 2029	PROYEKSI APBD 2030	RATA-RATA PERTUMBUHAN
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	21.275.600.000,00	23.296.782.000,00	25.509.976.000,00	27.933.424.000,00	30.587.099.000,00	10,94
	Jumlah Pendapatan	2.018.323.024.970,00	2.318.704.585.336,00	2.440.997.445.984,40	2.565.995.111.981,12	2.696.918.520.571,01	2.834.586.946.999,71	27,84
5	BELANJA DAERAH	2.068.660.938.232,00	2.306.329.585.336,00	2.428.622.445.984,40	2.482.936.098.813,90	2.610.325.306.779,37	2.822.211.946.999,70	5,59
5.1	BELANJA OPERASI	1.340.842.741.677,00	1.352.643.936.888,00	1.285.184.306.483,32	1.314.430.513.594,30	1.328.435.414.311,30	1.371.024.644.859,91	0,34
5.1.01	Belanja Pegawai	807.243.194.879,00	794.275.708.568,00	732.299.233.795,32	769.798.533.594,30	809.075.556.171,30	850.376.084.099,91	1,77
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.735.489.920,00	504.423.596.459,00	498.512.068.388,00	493.657.200.000,00	471.735.817.900,00	473.622.761.000,00	(1,53)
5.1.04	Belanja Subsidi	800.015.581,00	4.120.000.000,00	4.243.600.000,00	4.370.908.000,00	4.502.035.240,00	4.637.622.760,00	3,14
5.1.05	Belanja Hibah	52.714.041.297,00	48.368.479.511,00	48.658.690.400,00	45.118.451.000,00	41.622.005.000,00	40.872.900.000,00	(3,87)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	350.000.000,00	1.456.152.350,00	1.470.713.900,00	1.485.421.000,00	1.500.000.000,00	1.515.277.000,00	1,02
5.2	BELANJA MODAL	252.908.492.133,00	466.655.615.232,00	639.298.255.793,08	646.339.241.186,60	740.817.154.007,69	890.258.683.090,37	22,69
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.625.000.000,00	2.756.250.000,00	2.894.062.500,00	3.038.765.625,00	5,39
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.896.785.923,00	37.918.238.000,00	39.814.149.900,00	41.804.857.395,00	43.895.100.264,75	46.089.855.277,99	5,39
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.397.496.229,00	71.958.848.640,00	75.556.791.072,00	79.334.630.625,60	83.301.362.156,88	87.466.430.264,72	5,39
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.914.185.700,00	342.902.311.992,00	509.357.287.391,08	509.901.224.364,50	597.557.236.344,49	739.835.769.544,01	28,94
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.570.614.281,00	11.094.416.600,00	11.649.137.430,00	12.231.594.301,50	12.843.174.016,58	13.485.332.717,40	5,39
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	129.410.000,00	281.800.000,00	295.890.000,00	310.684.500,00	326.218.725,00	342.529.661,25	5,39

KODE	URAIAN	APBD 2024	PROYEKSI APBD 2026	PROYEKSI APBD 2027	PROYEKSI APBD 2028	PROYEKSI APBD 2029	PROYEKSI APBD 2030	RATA-RATA PERTUMBUHAN
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.173.703.874,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.173.703.874,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
5.4	BELANJA TRANSFER	466.736.000.548,00	484.030.033.216,00	501.139.883.708,00	519.166.344.033,00	538.072.738.460,38	557.928.619.049,42	3,82
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.024.983.200,00	9.455.282.968,00	9.971.210.910,00	10.574.052.557,50	11.185.647.373,50	11.831.988.370,60	6,28
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	458.711.017.348,00	474.574.750.248,00	491.168.672.798,00	508.592.291.475,50	526.887.091.086,88	546.096.630.678,82	3,77
	Total Surplus/(Defisit)	(50.337.913.262,00)	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	83.059.013.167,22	86.593.213.791,64	12.375.000.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN	61.837.913.262,00						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.837.913.262,00	-	-	-	-	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.837.913.262,00	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	11.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.500.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.500.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.337.913.262,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	-	(12.375.000.000,00)	(12.375.000.000,00)	(12.375.000.000,00)	(12.375.000.000,00)	(12.375.000.000,00)	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		-	0,00	-	-	0,00	0,00
	TOTAL APBD	2.080.160.938.232,00	2.318.704.585.336,00	2.440.997.445.984,40	2.565.995.111.981,12	2.696.918.520.571,01	2.834.586.946.999,71	5,56

Dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan untuk setiap komponen pendapatan daerah dan sejalan dengan asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, maka pendapatan daerah Kabupaten Sintang pada waktu 2026-2030 diprediksikan meningkat, dari Rp. 2.318,7 milyar pada tahun 2026 menjadi Rp. 2.834,5 milyar pada tahun 2030.

Berdasarkan hasil proyeksi keuangan daerah Kabupaten Sintang, selanjutnya disajikan tentang proyeksi pembiayaan pembangunan daerah selama tahun 2026-2030. Proyeksi pembiayaan pembangunan daerah merupakan penjumlahan dari proyeksi total Pendapatan Daerah dengan proyeksi total Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Tabel 2.74. Proyeksi Pendapatan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2026-2030

KODE	URAIAN	APBD 2024	PROYEKSI APBD 2026	PROYEKSI APBD 2027	PROYEKSI APBD 2028	PROYEKSI APBD 2029	PROYEKSI APBD 2030	RATA-RATA PERTUMBUHAN
4	PENDAPATAN DAERAH	2.018.323.024.970,00	2.318.704.585.336,00	2.440.997.445.984,40	2.565.995.111.981,12	2.696.918.520.571,01	2.834.586.946.999,71	5,56
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.429.252.000,00	207.581.159.367,00	218.860.446.700,00	231.927.907.857,50	245.225.007.089,71	259.276.753.984,34	6,23
4.1.01	Pajak Daerah	76.577.000.000,00	91.459.159.367,00	96.955.000.000,00	102.820.000.000,00	109.044.950.000,00	115.619.950.000,00	6,60
4.1.02	Retribusi Daerah	3.672.832.000,00	97.646.500.000,00	102.469.218.200,00	108.661.051.150,00	114.667.997.470,00	121.019.817.412,00	5,98
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.500.000.000,00	13.000.000.000,00	13.500.000.000,00	14.000.000.000,00	4,17
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.179.420.000,00	6.475.500.000,00	6.936.228.500,00	7.446.856.707,50	8.012.059.619,71	8.636.986.572,34	8,34
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.842.893.772.970,00	2.089.847.825.969,00	2.194.340.217.284,40	2.304.057.228.123,62	2.419.260.089.481,30	2.540.223.094.015,37	5,39
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.774.234.775.000,00	2.037.077.393.000,00	2.138.931.262.667,35	2.245.877.825.775,72	2.358.171.717.016,00	2.476.080.302.926,80	5,39
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	-	168.821.298.000,00	177.262.362.900,00	186.125.481.045,00	195.431.755.097,25	205.203.342.852,11	5,39
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	-	1.128.307.632.000,00	1.184.723.013.617,35	1.243.959.164.273,22	1.306.157.122.438,38	1.371.464.978.620,30	5,39
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus Fisik	-	88.613.383.000,00	93.044.052.150,00	97.696.254.757,50	102.581.067.495,38	107.710.120.870,14	5,39
4.2.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	319.456.629.000,00	335.429.460.450,00	352.200.933.472,50	369.810.980.146,13	388.301.529.153,43	5,39
4.2.01.05	Dana Desa	-	331.878.451.000,00	348.472.373.550,00	365.895.992.227,50	384.190.791.838,88	403.400.331.430,82	5,39
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.658.997.970,00	52.770.432.969,00	55.408.954.617,05	58.179.402.347,90	61.088.372.465,30	64.142.791.088,56	5,39
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	21.275.600.000,00	27.796.782.000,00	30.009.976.000,00	32.433.424.000,00	35.087.099.000,00	16,23
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	21.275.600.000,00	23.296.782.000,00	25.509.976.000,00	27.933.424.000,00	30.587.099.000,00	10,94
	Jumlah Pendapatan	2.018.323.024.970,00	2.318.704.585.336,00	2.440.997.445.984,40	2.565.995.111.981,12	2.696.918.520.571,01	2.834.586.946.999,71	27,84

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Sintang tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.75. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Sintang, Tahun 2026-2030**

KODE	URAIAN	APBD 2024	PROYEKSI APBD 2026	PROYEKSI APBD 2027	PROYEKSI APBD 2028	PROYEKSI APBD 2029	PROYEKSI APBD 2030	RATA-RATA PERTUMBUHAN
5	BELANJA DAERAH	2.068.660.938.232,00	2.306.329.585.336,00	2.428.622.445.984,40	2.482.936.098.813,90	2.610.325.306.779,37	2.822.211.946.999,70	5,59
5.1	BELANJA OPERASI	1.340.842.741.677,00	1.352.643.936.888,00	1.285.184.306.483,32	1.314.430.513.594,30	1.328.435.414.311,30	1.371.024.644.859,91	0,34
5.1.01	Belanja Pegawai	807.243.194.879,00	794.275.708.568,00	732.299.233.795,32	769.798.533.594,30	809.075.556.171,30	850.376.084.099,91	1,77
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.735.489.920,00	504.423.596.459,00	498.512.068.388,00	493.657.200.000,00	471.735.817.900,00	473.622.761.000,00	(1,53)
5.1.04	Belanja Subsidi	800.015.581,00	4.120.000.000,00	4.243.600.000,00	4.370.908.000,00	4.502.035.240,00	4.637.622.760,00	3,14
5.1.05	Belanja Hibah	52.714.041.297,00	48.368.479.511,00	48.658.690.400,00	45.118.451.000,00	41.622.005.000,00	40.872.900.000,00	(3,87)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	350.000.000,00	1.456.152.350,00	1.470.713.900,00	1.485.421.000,00	1.500.000.000,00	1.515.277.000,00	1,02
5.2	BELANJA MODAL	252.908.492.133,00	466.655.615.232,00	639.298.255.793,08	646.339.241.186,60	740.817.154.007,69	890.258.683.090,37	22,69
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.625.000.000,00	2.756.250.000,00	2.894.062.500,00	3.038.765.625,00	5,39
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.896.785.923,00	37.918.238.000,00	39.814.149.900,00	41.804.857.395,00	43.895.100.264,75	46.089.855.277,99	5,39
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.397.496.229,00	71.958.848.640,00	75.556.791.072,00	79.334.630.625,60	83.301.362.156,88	87.466.430.264,72	5,39
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.914.185.700,00	342.902.311.992,00	509.357.287.391,08	509.901.224.364,50	597.557.236.344,49	739.835.769.544,01	28,94
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.570.614.281,00	11.094.416.600,00	11.649.137.430,00	12.231.594.301,50	12.843.174.016,58	13.485.332.717,40	5,39
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	129.410.000,00	281.800.000,00	295.890.000,00	310.684.500,00	326.218.725,00	342.529.661,25	5,39
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.173.703.874,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.173.703.874,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
5.4	BELANJA TRANSFER	466.736.000.548,00	484.030.033.216,00	501.139.883.708,00	519.166.344.033,00	538.072.738.460,38	557.928.619.049,42	3,82
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.024.983.200,00	9.455.282.968,00	9.971.210.910,00	10.574.052.557,50	11.185.647.373,50	11.831.988.370,60	6,28
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	458.711.017.348,00	474.574.750.248,00	491.168.672.798,00	508.592.291.475,50	526.887.091.086,88	546.096.630.678,82	3,77
	Total Surplus/(Defisit)	(50.337.913.262,00)	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	83.059.013.167,22	86.593.213.791,64	12.375.000.000,00	0,00

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Selanjutnya, perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi Pendapatan Daerah ditambah dengan Pembiayaan Netto, pembiayaan netto merupakan selisih dari Pendapatan Pembiayaan yang biasanya bersumber dari Silpa dikurang dengan Pengeluaran Pembiayaan yang biasanya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah.

Perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Sintang tahun 2026-2030 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.76. Proyeksi Pembiayaan dan Total APBD Kabupaten Sintang,
Tahun 2026-2030**

KODE	URAIAN	APBD 2024	PROYEKSI APBD 2026	PROYEKSI APBD 2027	PROYEKSI APBD 2028	PROYEKSI APBD 2029	PROYEKSI APBD 2030	RATA-RATA PERTUMBUHAN
6	PEMBIAYAAN							
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.837.913.262,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.837.913.262,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	61.837.913.262,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.500.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	.
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.500.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	.
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.500.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	12.375.000.000,00	.
	Pembiayaan Netto	50.337.913.262,00	(12.375.000.000,00)	(12.375.000.000,00)	(12.375.000.000,00)	(12.375.000.000,00)	(12.375.000.000,00)	.
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	.	.	0,00	.	.	0,00	0,00

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa total APBD Kabupaten Sintang tahun 2026 sebesar Rp 2.318,7 Milyar, dan tahun 2030 meningkat menjadi Rp 2,834 Milyar atau tumbuh rata-rata sebesar 5,56% per tahun.

Mengacu pada hasil proyeksi keuangan daerah, proyeksi pembiayaan pembangunan, proyeksi pengeluaran wajib, mengikat dan prioritas utama, serta perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah maka perlu disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang periode 2026-2030 yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang, prioritas kebijakan Pendapatan Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengefektifkan dan mengotimalkan penerimaan Pajak Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
 - Penyajian secara terinci mengenai target dan realisasi masing-masing jenis Pajak Daerah, terutama pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam PAD Kabupaten Sintang.
 - Memperbaharui sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah.



- Intensifikasi Pajak Daerah dengan melakukan pendataan basis pajak dan potensi pajak secara berkelanjutan.
 - Melakukan pemutakhiran data objek pajak sesuai dengan nama wajib Pajak yang tertera dalam surat kepemilikan tanah dan atau bangunan.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang pendapatan melalui pelatihan/bimbingan teknis.
 - Mengadakan sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha.
 - Melakukan pendekatan persuasif dan pemberian sanksi berupa denda kepada wajib pajak yang lalai.
 - Meningkatkan intensitas waktu pemungutan pajak.
 - Merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi.
2. Mengefektifkan pungutan Retribusi Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Mengoptimalkan pemungutan retribusi, dikarenakan penerimaannya yang cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
 - Membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti reklame dan persetujuan bangunan gedung (PBG).
 - Peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetorannya.
3. Meningkatkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kontribusi maksimal kepada Pemerintah Daerah.
 - Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD.
3. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Melaksanakan koordinasi dengan Bank dimana dana Pemerintah Daerah ditempatkan untuk peningkatan jasa giro dan deposito.
 - Mengoptimalkan pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional dalam rangka peningkatan PAD.
4. Meningkatkan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.



- Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Koordinasi antara Pemerintah Daerah penghasil sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah/Kementerian terkait.
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengenai penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan, dan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja daerah tahun 2026-2030 diarahkan pada peningkatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dampak, serta manfaatnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Belanja daerah tahun 2026-2030 dilakukan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan Belanja Daerah tahun anggaran 2026-2030 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

- Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja daerah dialokasikan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sintang.
- Mengalokasikan belanja barang dan jasa yang akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman.



- Mengalokasikan belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang yang terdiri dari urusan wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar), urusan pilihan, dan urusan penunjang.
- Mengalokasikan belanja modal dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, berupa: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya, dengan kriteria digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan.
- Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian/perkebunan, peternakan, dan perikanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan.
- Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa dalam rangka mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang



dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara proporsional untuk menunjang kegiatan operasionalisasi Pemerintah Desa, dan bantuan keuangan yang bersifat umum baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Untuk kebijakan Pembiayaan Daerah, dari aspek penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk:

- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebagai sumber penerimaan pada APBD.
- Penggunaan pinjaman, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya.
- Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
- Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan.
- Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah pada masa mendatang diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

- Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah daerah Kabupaten Sintang.
- Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.

2.2.3. Alternatif Pendanaan Pembangunan

Merujuk pada tantangan luas wilayah, keterbatasan kewenangan, anggaran dan sumber daya manusia di Kabupaten Sintang, Pemerintah Kabupaten Sintang berupaya memaksimalkan alternatif selain APBD melalui kolaborasi penta helix dengan melibatkan berbagai Mitra Pembangunan yang terdiri dari pemerintah, badan usaha/swasta, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan media dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama



daerah. Sebagai pedoman pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan/badan usaha Pemerintahan Kabupaten Sintang menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Kolaboratif sebagai panduan kolaborasi penta helix di Kabupaten Sintang.

Adapun realisasi kontribusi CSR badan usaha/perusahaan dan proyek mitra pembangunan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

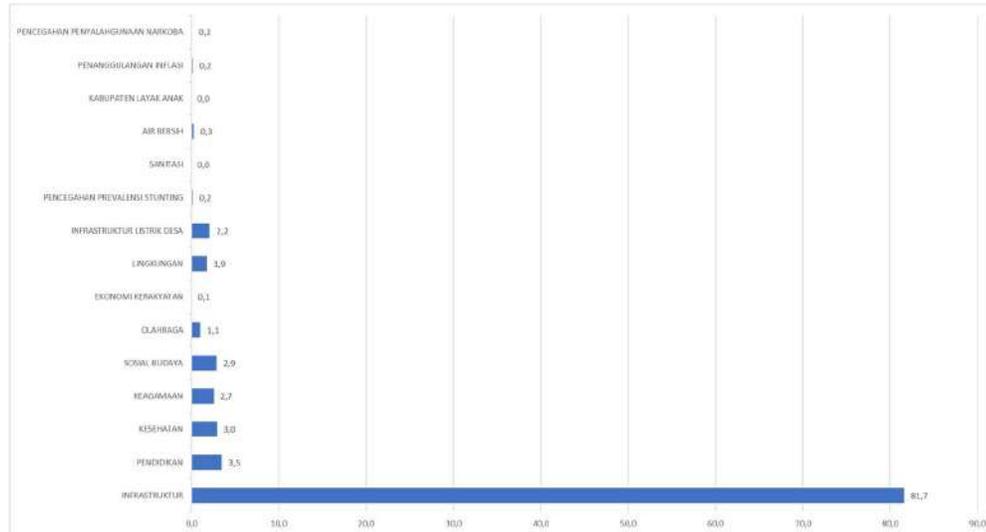
Tabel 2.77. Kontribusi CSR Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No	Tahun	Kontribusi CSR/Project Mitra Pembangunan	Jumlah Mitra Pembangunan
1	2020	Rp. 18.325.615.826,00	35 Perusahaan Perkebunan, 4 Bank, 1 CU
2	2021	Rp. 21.062.865.425,00	40 Perusahan Perkebunan, 3 BUMN, 1 BUMD, 3 CU
3	2022	Rp. 33.903.414.774,00	41 Perusahaan Perkebunan, 3 Bank, 1 BUMN, 1 BUMD, 4 CU
4	2023	Rp. 32.771.185.272,00	42 Perusahaan Perkebunan, 1 Bank, 1 BUMD, 4 CU
		Rp.21.080.911.225,00	32 Mitra Pembangunan
5	2024	Rp. 34.087.132.777,00	41 Perusahaan Perkebunan, 1 BUMN, 1 BUMD, 3 Bank, 4 CU
		Rp. 35.185.167.417,00	41 Mitra Pembangunan

Keterlibatan Mitra Pembangunan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sintang menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 -2022 pelibatan dalam ajang CSR Awards baru melibatkan perusahaan perkebunan, perbankan, BUMN, BUMD, dan Credit Union (CU), sedang tahun 2023 dan 2024 kolaborasi pembangunan diperluas dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan/ Non-Government Organization (NGO). Total realisasi kontribusi CSR dari kelompok badan



usaha/perusahaan pada tahun 2024 mencapai Rp. 34.087.132.777,00 yang tersebar ke beberapa kategori dengan persentase sebagai berikut:



NO	KONTRIBUSI	BASE LINE	TAHUN				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Badan Usaha/ Perusahaan	Rp 34.087.132.777	Rp 35.109.746.760	Rp 36.163.039.163	Rp 37.247.930.338	Rp 38.365.368.248	Rp 39.516.329.296
2	Mitra Pembangunan- NGO	Rp 35.185.167.417	Rp 36.240.722.440	Rp 37.327.944.113	Rp 38.447.782.436	Rp 39.601.215.909	Rp 40.789.252.386
JUMLAH		Rp 69.272.300.194	Rp 71.350.469.200	Rp 73.490.983.276	Rp 75.695.712.774	Rp 77.966.584.157	Rp 80.305.581.682

Gambar. 2.7. Kategori Pembangunan, kontribusi dan Target CSR Kabupaten Sintang

Sebagian besar realisasi CSR badan usaha/perusahaan masih terfokus kepada pemeliharaan infrastruktur yaitu sebesar 81,7% diikuti oleh bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial budaya dan beberapa kategori lainnya. Sedangkan proyeksi kontribusi pembiayaan alternatif selain APBD dari tahun 2025-2029 diprediksi tetap positif namun tidak signifikan mengingat faktor eksternal berupa dinamika ekonomi dunia serta kebijakan luar negeri beberapa negara eropa dan amerika yang menjadi donor bagi kegiatan proyek mitra pembangunan yang pendanaan bersumber dari pembiayaan luar negeri.

Selain CSR, pembiayaan pembangunan kabupaten sintang juga menyediakan ruang sebesar-besarnya untuk alternatif pembiayaan lainnya antara lain mekanisme pembiayaan kreatif dengan melibatkan sinergisitas



pihak ketiga Adapun potensi kegiatan prioritas yang dapat dibiayai dengan mekanisme CSR dan pembiayaan kreatif antara lain:

1. Program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan.
2. Program perberdayaan masyarakat desa
3. Program peningkatan pendidikan dan kesehatan
4. Program penelitian dan pengembangan
5. Program pendampingan penyusunan dokumen perencanaan
6. Program pelestarian lingkungan hidup

2.3. Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

2.3.1.1. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur sebagai *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan.

Oleh karena hal itu diperlukan beberapa permasalahan daerah yang dapat dilihat dari bidang sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut:

A. Bidang Jalan

permasalahan yang terkait dengan bidang jalan adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya pembangunan Infrastruktur, jalan yang kurang baik dan memadai dapat menghambat aktivitas dan pergerakan masyarakat serta perkembangan ekonomi di suatu kecamatan atau desa yang memiliki jalan yang tidak baik.
- Mutu jalan yang masih rendah; dengan dukungan program dan alokasi dana untuk pemeliharaan secara teratur dan berkala terutama pengurangan persentase jalan dengan kondisi rusak berat yang memiliki persentase sebesar 19,77 % dari panjang total jalan dan juga peningkatan



mutu jalan tanah dengan rasio 17,23% yang harus ditingkatkan menjadi jalan kerikil atau telford;

- Perbaikan dan peningkatan jalan di kawasan desa terisolir dan terpencil perlu dilakukan agar jalan-jalan yang mendukung akses banyak desa serta kecamatan dan juga ada yang merupakan lokasi prioritas perbatasan.
- Belum maksimalnya Peningkatan Jalan dan status Jalan untuk penghubung konektivitas antar desa dan kecamatan sangat diperlukan agar mendukung alur transportasi darat yang lebih baik untuk meningkatkan roda perekonomian di Kabupaten Sintang;
- Terdapat beberapa daerah yang kualitas infrastrukturnya menurun yang disebabkan oleh buruknya drainase, kemudian overload muatan kendaraan yang mengangkut hasil perkebunan dan mobilisasi alat berat untuk pengerjaan proyek.
- Pertumbuhan penduduk yang tinggi ke depannya dapat menyebabkan peningkatan volume kendaraan yang sangat pesat setiap tahunnya dan kapasitas jalan harus memadai karena lebar jalan yang tidak sesuai dengan volume kendaraan akan mengakibatkan kemacetan.

B. Bidang Jembatan

Permasalahan yang terkait dengan bidang jembatan adalah sebagai berikut:

- Masih banyak jenis jembatan di wilayah Kabupaten Sintang yang memiliki jenis konstruksi kayu, balok T serta kayu beton yang dapat diperkirakan jika rusak dapat menghambat tingkat mobilitas dari pergerakan orang dan barang di kawasan Kabupaten Sintang.
- Perlunya peningkatan jembatan konstruksi kayu, balok T menjadi jembatan rangka baja dan beton. Adapun jumlah persentase banyaknya jembatan rangka baja dan beton adalah sebesar 20,22% tahun 2022 dengan jumlah sebesar 198 unit mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 72,2% dengan jumlah sebesar 199 unit.
- Kurangnya kegiatan rehabilitasi jembatan yang masih rawan dan mengalami kerusakan ringan dengan minimal pengurangan persentase jembatan rusak berat.
- Terbatasnya pendanaan terhadap pembuatan teknis database jalan dan jembatan.



C. Bidang Perhubungan

Permasalahan yang terkait dengan bidang perhubungan adalah sebagai berikut:

- Tingginya Kecelakaan lalu lintas, yang salah satu faktornya adalah kondisi jalan yang rusak.
- Rendahnya pelayanan angkutan umum; karena kondisi dan kinerja angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.
- Belum terdapat sistem transportasi barang dengan jaringan yang sesuai dengan pola distribusi angkutan barang; salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.
- Masih belum standarnya perlengkapan jalan seperti marka, rambu, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan/vandalism.
- Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya) dinilai tidak cukup nyaman.
- Untuk di bidang angkutan sarana dan penyeberangan pada alur pelayaran sungai, Pemerintah Kabupaten Sintang perlu menyiapkan sarana dan prasarana steigher atau dermaga.
- Kurang tersedianya pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan serta prasarana jalan di Kabupaten Sintang.
- Belum tercukupinya sumber daya manusia bidang Perhubungan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Perhubungan Darat.
- Pengembangan terminal tipe C dan terminal internasional untuk mendukung transportasi di dalam kota dan antar negara di wilayah perbatasan.
- Pemenuhan sarana transportasi untuk mendukung fasilitas keselamatan untuk arus orang dan barang.



- Perlunya peningkatan akses transportasi serta kualitas angkutan umum di daerah Kecamatan yang jauh jaraknya dari daerah ibukota Kabupaten Sintang, seperti Kecamatan Ambalau, Serawai, Kayan Hulu serta Ketungau Hulu;

D. Bidang Pariwisata

Permasalahan yang terkait dengan bidang pariwisata adalah sebagai berikut

- Masih terbatasnya infrastruktur penunjang sehingga diperlukan peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata di daerah yang menjadi akses pariwisata di Kabupaten Sintang.
- Perlu adanya sosialisasi dalam pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan pariwisata di daerah Kabupaten Sintang.
- Perlunya keselarasan dalam pemanfaatan pariwisata di Kabupaten Sintang antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sintang.

E. Bidang Sumber Daya Air

Permasalahan yang terkait dengan bidang sumber daya air adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya ketersediaan air baku di Kabupaten Sintang
- Penurunan kualitas dan ketersediaan air baku akibat pencemaran air, aktivitas manusia, sedimentasi sungai dan perubahan iklim.

F. Bidang Perumahan dan Permukiman

Permasalahan yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait dalam bidang penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian untuk perumahan dan permukiman.
- Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman.
- Perlunya peningkatan rasio rumah layak huni dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dalam upaya mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan memastikan keamanan serta kesejahteraan penduduk. Upaya untuk menjaga konsistensi dalam peningkatan kualitas perumahan dan aksesibilitas perumahan yang terjangkau adalah langkah yang penting untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat di masa depan.



G. Bidang Bangunan Gedung

Permasalahan yang terkait dengan bidang bangunan gedung adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Bangunan Lingkungan.
- Masih banyaknya Bangunan Gedung dan Rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- Masih banyaknya bangunan gedung yang tidak sesuai dengan ketentuan
- Belum optimalnya penertiban bangunan gedung yang tidak sesuai ketentuan

H. Bidang Drainase

permasalahan yang terkait dengan bidang drainase adalah sebagai berikut:

- Banyaknya sedimentasi endapan berupa produksi sampah akibat dari banyaknya penduduk dapat menghambat aliran air drainase.
- Kurangnya pembangunan resapan air terutama di daerah dataran rendah serta wilayah padat penduduk.
- Peningkatan drainase di wilayah Kabupaten Sintang tidak terlalu signifikan di setiap tahunnya.
- Perlunya peningkatan persentase drainase baik di kawasan permukiman untuk meminimalisir genangan air.
- Perlunya penambahan anggaran yang memadai dan memfokuskan penganggaran untuk program/kegiatan drainase yang bersumber dari APBD Kabupaten serta mengusulkan program/kegiatan drainase melalui APBD Propinsi maupun APBN mengingat ke depannya pertambahan jumlah penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran penduduk yang tidak merata serta luasnya wilayah drainase yang ditangani.

I. Bidang Irigasi

permasalahan yang terkait dengan bidang irigasi adalah sebagai berikut

- Kondisi irigasi di wilayah Kabupaten Sintang memang sudah mengalami peningkatan, namun bergerak melambat dalam peningkatan di setiap tahunnya. Untuk meningkatkan kondisi irigasi dalam kondisi baik, perlu dilakukan pendekatan terpadu dan terkoordinasi antar sektor dan multipihak.



- Masih terdapat sekitar 49% rasio jaringan irigasi dalam kondisi yang tidak baik di Kabupaten Sintang. Hal ini tentunya dapat menyebabkan bahaya bencana banjir di sekitaran lahan perairan sawah, sehingga akan menyebabkan berkurangnya hasil dan kualitas tanaman pertanian.
- Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi di Kabupaten Sintang.
- Perlunya kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap rasio panjang jaringan irigasi dalam kondisi yang baik dan juga perlunya pengadaan kegiatan proyek peningkatan jaringan pengairan.
- Perlunya Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dan Rawa yang merupakan Daerah Pertanian Masyarakat, memperbaiki serta membangun Infrastruktur Irigasi dan Rawa yang mendukung pertanian masyarakat.

J. Bidang Pengolahan Air Limbah

permasalahan yang terkait dengan bidang pengolahan air limbah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah di Kabupaten Sintang masih rendah yaitu hanya sebesar 67,67% (data terakhir tahun 2022) dari capaian SPM terutama pada akses pengolahan air limbah domestik, kualitas pelayanan air limbah domestik, sub sistem pengolahan setempat, sub sistem pengangkutan, sub sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan pengolahan lumpur tinja (IPAL). Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Air yang tercemar limbah akan meresap ke dalam tanah, menyebabkan asam. Apabila mengalir ke aliran sungai, akan mematikan biota di dalamnya. Jika kondisi tidak segera ditangani, maka bisa masuk meresap ke air tanah. Padahal air tanah ini banyak dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan konsumsi, dan tentunya sangat berbahaya.
- Belum adanya dokumen perencanaan SPAL Regional di Kabupaten Sintang.
- Kondisi geografis atau topografi di Kabupaten Sintang yang berbukit bukit, menyulitkan Pemerintah Daerah untuk membangun sambungan saluran air limbah.
- Perlunya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten Sintang (Pembangunan/Penyediaan Sistem



Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman, Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT).

K. Bidang Air Bersih dan Air Minum

permasalahan yang terkait dengan bidang air minum dan air bersih adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya Penyediaan kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Sintang, walau sudah menunjukkan peningkatan akan tetapi masih terdapat beberapa daerah yang belum tercukupi kebutuhan air minum atau air bersih.
- Kondisi geografis atau topografi di Kabupaten Sintang yang berbukit bukit, menyulitkan Pemerintah Daerah untuk membangun sambungan saluran air bersih.
- Begitu maraknya aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan di wilayah Kabupaten Sintang dapat mengakibatkan degradasi penurunan terhadap kualitas air bersih.
- Menurunnya persentase indikator air bersih di Kabupten Sintang pada tahun 2023 (10,09%) sejalan dengan penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sintang tahun 2023 sebesar 54,62% status mutu air. Hal ini disebabkan karena terdapat 14 sungai di Kabupaten Sintang mengalami penurunan kualitas air di beberapa sungai yang sudah mulai tercemar yang ditandai dengan kandungan pH air yang setiap tahun menurun, terdapat peningkatan pencemaran yang diakibatkan oleh peningkatan konsentrasi pencemar yang masuk ke badan sungai.
- Keterbatasan anggaran untuk pembiayaan dalam pengelolaan air bersih dapat mempengaruhi kualitas standar air minum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- Pertambahan penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran penduduk yang tidak merata, luasnya wilayah yang ditangani dan kurangnya tenaga teknis. Untuk mengejar ketertinggalan dalam pencapaian yang ditargetkan secara nasional diharapkan adanya penambahan tenaga teknis dan penambahan anggaran biaya baik yang bersumber dari APBD Kabupaten juga diperlukan subsidi dari APBD Provinsi maupun APBN



- Perlunya dilakukan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Sintang untuk meningkatkan sumber air baku dan Updating Pembaharuan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Sintang secara berkala.

L. Bidang Pertanahan

permasalahan yang terkait dengan bidang pertanahan adalah sebagai berikut:

- Konflik agraria akibat kegagalan beberapa perusahaan perkebunan dalam mengelola usaha dan pembagian hasil usaha perkebunan kepada masyarakat.
- Masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat Hak Milik Tanah.
- Lahan milik masyarakat yang berada dalam kawasan Hutan.

M. Kawasan Perbatasan

Permasalahan yang terkait dengan bidang kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

- Kawasan perbatasan yang selalu dikatakan sebagai daerah tertinggal harusnya menjadi perhatian yang lebih serius bagi pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan saat ini cenderung menjadikan kawasan perbatasan hanya difungsikan sebagai sabuk keamanan.
- Secara geografis kawasan perbatasan merupakan daerah yang sangat luas. Di Kalimantan Barat saja panjang garis perbatasan 966 km, sehingga cukup menyulitkan dalam penanganan terutama ditinjau dari aspek rentang kendali pelayanan, kebutuhan dana, dan kebutuhan aparatur. Kondisi ini semakin diperparah oleh kondisi infrastruktur jalan yang relatif sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya.
- Ketidakjelasan wewenang dan koordinasi penanganan masalah di kawasan perbatasan membutuhkan landasan hukum yang tegas, komprehensif dan mampu mengikat semua pihak. Salah satunya adalah kejelasan wewenang dan jalur koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Tidak jarang masing-masing level pemerintahan berebut pengaruh di perbatasan ketika ada potensi penerimaan dan lepas tanggung jawab pada saat timbul masalah.



- Kawasan perbatasan yang kaya dengan sumber daya alam dan letaknya mempunyai akses ke pasar (Serawak), tetapi terdapat sekitar 45% desa miskin dengan jumlah penduduk miskin sekitar 35%. Jika dibandingkan dengan penduduk Malaysia tampak adanya ketimpangan pendapatan yang besar sekali. Akibatnya penduduk di kawasan perbatasan tidak memiliki posisi tawar yang sebanding dalam kegiatan ekonomi di perbatasan. Akibat lainnya adalah mendorong masyarakat semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhannya.
- Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintah di kawasan perbatasan dan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan.
- Belum selesainya proses penyelesaian dan penegasan batas negara.
- Belum optimalnya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas;
- Belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas negara;
- Pada aspek pertahanan keamanan, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan keadaman dan penegakan hukum di batas wilayah negara.
- Aspek sarana dan prasarana lintas batas negara adalah belum optimalnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana lintas batas CIQS (Custom: Bea Cukai, Imigration: Imigrasi, Quarantine: Karantina, dan Security: Keamanan: serta belum optimalnya aspek pengawasan di pintu perbatasan akibat lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas.
- Aspek ekonomi lintas batas terdapat isu, yaitu belum optimalnya nilai tambah produksi di lokasi prioritas (Lokasi Prioritas (Lokpri)) terhadap negara tetangga maupun PKSN;
- Belum efektifnya kerja sama perdagangan antar negara; adanya ketergantungan masyarakat di Lokasi Prioritas (Lokpri) terhadap negara tetangga;
- Belum terbangunnya regulasi pengelolaan lintas batas terkait kebijakan ASEAN Economic community.
- Maraknya kegiatan ilegal di Lokasi Prioritas (Lokpri) akibat lemahnya pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan darat.



- belum optimalnya pencatatan penduduk terkait fenomena pencampuran penduduk (satu rumpun) di Lokasi Prioritas (Lokpri); serta adanya hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan.
- Masih rendahnya pelayanan infrastruktur transportasi regional (koneksi terhadap PKSN dan pusat pertumbuhan) dan lokal di kawasan perbatasan.
- Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan nilai tambah potensi SDN di Lokasi Prioritas.
- Peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di Lokasi Prioritas (Lokpri),
- Lemahnya sistem regulasi (akses permodalan, koperasi dan UMKM) yang mendukung penguatan ekonomian kerakyatan.
- lemahnya sistem regulasi yang mampu mendorong investasi (insentif investasi) di kawasan perbatasan;
- minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai di Lokasi Prioritas (Lokpri).
- Minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di Lokasi Prioritas (Lokpri).
- Rendahnya sumber daya manusia di Lokasi Prioritas (Lokpri) akibat belum optimalnya upaya pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lokasi Prioritas (Lokpri) akibat belum optimalnya pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Belum mantapnya sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan.
- Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan.
- belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program perbatasan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- Belum efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan dengan negara tetangga
- Terbatasnya sumber daya sarana, prasarana pendukung serta SDM lembaga pengelola perbatasan.



- Perlunya atau pentingnya penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan serta penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas.
- Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- Perlunya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
- Belum optimalnya pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara.

N. Wilayah dan Tata Ruang

Perkembangan suatu wilayah termasuk sektor perekonomian berupa investasi yang masuk ke Kabupaten Sintang akan berpotensi menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Disini peran aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi: Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi.

Selain itu juga belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan belum lengkapnya dokumen turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan Sistem Drainase Perkotaan.

Dari seluruh wilayah Kabupaten Sintang yang memiliki luas sekitar 2,1 juta hektar atau 21.000 km persegi. Tiga persen diantaranya merupakan taman nasional dan 21 persen lainnya adalah hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Langkah kedepan yang akan diteruskan penyesuaian status kawasan lindung yang terdiri dari cagar alam menjadi taman nasional atau taman wisata alam (TWA). Langkah strategis selanjutnya yang akan dilakukan adalah memperkuat sinergitas dan kerjasama antar instansi/lembaga dengan pemangku kawasan konservasi untuk kawasan taman nasional bersinergi dengan balai taman nasional, untuk kawasan cagar alam bersinergi dengan Kementerian



Lingkungan Hidup dan BKSDA hutan lindung bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

2.3.1.2. Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Sintang masih berhadapan dengan beberapa persoalan transformasi struktural yang belum optimal. Struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sebaliknya, kontribusi sektor industri pengolahan masih di bawah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor konstruksi.

Selain persoalan struktural, dinamika perekonomian Kabupaten Sintang juga masih dihadapkan pada kondisi berupa belum meluasnya kegiatan ekonomi produktif, dan relatif terbatasnya akses permodalan usaha. Disamping itu, kondisi perekonomian daerah juga masih berhadapan dengan persoalan pengembangan produk unggulan, pengembangan ekonomi kreatif termasuk usaha skala mikro, kecil dan menengah akibat ekosistem inovatif yang masih rendah, lambannya peningkatan kegiatan penanaman modal/investasi dikarenakan belum dipromosikan secara optimal potensi daerah serta insentif bagi investor, belum optimalnya hilirisasi industri dengan memanfaatkan hasil produksi sektor pertanian, perikanan dan perkebunan serta pertambangan dan penggalian, serta rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri dikarenakan persoalan jaringan distribusi dan rantai pasok yang kurang mendukung.

Berdasarkan kondisi umum yang dipaparkan tersebut, maka secara ringkas permasalahan pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Lambannya transformasi struktur ekonomi dan kurangnya hilirisasi industri yang mengolah hasil produksi pertanian, perkebunan, dan pertambangan.
2. Belum menguatnya basis ekonomi daerah dalam upaya memberikan daya ungkit bagi mempercepat dinamika perekonomian daerah.
3. Terbatasnya sektor-sektor unggulan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi.
4. Lambannya pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah dari hasil pertanian, perikanan dan perkebunan, serta belum berkembangnya kegiatan perdagangan dalam lingkup usaha perdagangan skala menengah/besar.



5. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya memperkuat kemitraan antara pelaku usaha menengah/besar dengan pelaku usaha kecil termasuk koperasi dan UMKM.
6. Belum tercapainya indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat, antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran terbuka.

A. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian di Kabupaten Sintang menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat perkembangan dan keberlanjutannya. Adapun yang menjadi permasalahan bidang pertanian di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan strategis seperti padi, jagung, dan kedelai
2. Belum optimalnya sarana dan prasana yang mendukung sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura
3. Belum optimalnya kelembagaan petani, hal ini menyebabkan terhambatnya akses petani dalam pemasaran, pengolahan hasil, peningkatan sumber daya, dan bantuan yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
4. Tingkat harga produk pertanian belum menjamin kelayakan usaha di bidang pertanian pangan
5. Tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk, dan pestisida, menjadi beban yang cukup berat bagi petani.
6. Belum ada jaminan pemasaran produk pertanian
7. Tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman serta anomali iklim terus mengancam.
8. Ketersediaan benih/bibit unggul dan bersertifikat, serta sarana produksi, pengolahan hasil, dan alat mesin pertanian yang belum optimal.
9. Sebaran wilayah yang luas dan kondisi geografis juga dapat menyulitkan upaya peningkatan akses sumber daya pertanian. Masalah lainnya termasuk penanganan pra dan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian yang masih rendah, harga produk yang tidak stabil, pengelolaan usaha pertanian yang konvensional, serta inovasi teknologi produksi, pengolahan, dan pemasaran yang belum optimal.
10. Belum dioptimalkan potensi lahan produktif menggambarkan bahwa potensi



pertanian dan lahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sintang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

11. Minat, Pengetahuan dan Implementasi pertanian organik yang masih rendah.

B. Bidang Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah sektor andalan di Kabupaten Sintang. Ada beberapa komoditas tanaman perkebunan utama yang ada di Kabupaten Sintang, seperti : kelapa sawit, karet,, kelapa dalam, dan kopi. Namun dalam pengembangannya sektor perkebunan di Kabupaten Sintang masih dihadapkan pada beberapa masalah seperti :

1. Rendahnya produktivitas perkebunan rakyat
2. Kurang stabilnya harga karet serta adanya kecenderungan tingkat harganya dibawah kelayakan usaha
3. Belum terjaminnya mutu, ketersediaan, dan akses benih tanaman perkebunan
4. Masih tingginya potensi serangan hama penyakit tanaman perkebunan
5. Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan rakyat
6. Belum optimalnya kelembagaan petani perkebunan
7. Belum optimalnya kemitraan petani, lembaga pemasaran, dan industry
8. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasara pendukung pembangunan perkebunan
9. Rendahnya perkebunan sawit milik masyarakat.

C. Bidang Peternakan

Bidang peternakan merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan merupakan komponen penting dalam pertanian dan penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pengembangannya diantaranya:

1. Masih rendahnya produksi dan produktivitas peternakan yang mencerminkan rendahnya hasil yang diperoleh dari kegiatan peternakan.
2. Minimnya sarana dan prasarana di bidang peternakan mengacu pada kekurangan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan peternakan, termasuk kandang, gudang penyimpanan pakan, atau jaringan transportasi.



3. Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan peternak dalam penerapan inovasi teknologi menghambat kemajuan sektor peternakan karena peternak tidak memanfaatkan teknologi dan praktik terbaru dalam pengelolaan hewan.
4. Belum optimalnya penerapan teknologi peternakan menunjukkan bahwa meskipun teknologi tersedia, penerapannya belum mencapai potensi maksimal dalam mengurangi efisiensi dan produktivitas peternakan.
5. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit hewan menular strategis merujuk pada kegagalan dalam mencegah atau mengendalikan penyebaran penyakit sehingga menyebabkan kerugian besar dalam peternakan. Dibutuhkan tindakan lebih baik dalam pemantauan dan manajemen penyakit hewan menular.
6. Belum optimalnya penerapan teknologi pembuatan pakan ternak dengan memanfaatkan bahan-bahan local.

D. Bidang Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan yang mencukupi, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat merupakan elemen esensial dalam menjaga kualitas hidup. Untuk meningkatkan standar hidup yang lebih baik, diperlukan upaya penyediaan pangan yang memadai. Namun, di Kabupaten Sintang terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Kurangnya ketersediaan pangan mengacu pada keterbatasan pasokan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
2. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan, keamanan pangan dan panganekaragaman konsumsi pangan
3. Kurangnya kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat yang merujuk pada tantangan dalam menjaga pasokan gizi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sintang yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, aksesibilitas, dan ketidaksetaraan. Selain itu, akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bermutu sering kali terhambat, baik karena faktor geografis maupun sosial.
4. Perubahan pola konsumsi pangan menuju makanan yang kurang sehat juga menjadi masalah yang mengganggu kesehatan masyarakat. Peningkatan mutu dan keamanan pangan perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman, bergizi, dan memenuhi standar kesehatan.



5. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan dalam hal pemanfaatan bahan local untuk pemenuhan gizi Masyarakat (protein, karbohidrat, dan vitamin).

E. Bidang Perikanan

Sektor perikanan adalah sektor yang penting dalam menyerap tenaga kerja, sumber pendapatan, dan sumber pangan bagi masyarakat. Namun didalam pengembangannya terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan perikanan, serta mempengaruhi ketersediaan hasil tangkapan ikan. Adapun yang menjadi permasalahan bidang kelautan perikanan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Menurunan produksi ikan budidaya..
2. Minimnya sarana dan prasarana perikanan mencakup kurangnya fasilitas untuk mendukung kegiatan perikanan.
3. Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya perikanan dalam penerapan inovasi teknologi yang dapat menghambat kemajuan sektor perikanan karena pembudidaya yang tidak memanfaatkan teknologi dan praktek terbaru dalam budidaya ikan.

2.3.1.3. Sumber Daya Manusia

A. Kuantitas

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang terus bertambah hingga mencapai 538.480 jiwa pada tahun 2045 dengan komposisi proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih banyak dibanding usia non produktif. Masa bonus demografi akan berakhir setelah 2045 (*sumber : proyeksi penduduk pada dokumen RPJPD Kabupaten Sintang periode 2025-2045*). Jika Pemerintah tidak serius memanfaatkan era bonus demografi secara komprehensif dan terencana, maka jumlah penduduk pasca era bonus demografi akan membebani pembangunan. Jumlah penduduk lansia bertambah banyak karena adanya kesadaran pola hidup sehat di masa muda dan meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kesehatan. Penduduk lansia ini menjadi beban pembangunan/negara di masa yang akan datang jika tidak memiliki pekerjaan di masa usia produktif dan menjadi “tua sebelum kaya” atau “miskin di masa tua”. Penyediaan fasilitas untuk kebutuhan lansia (seperti panti jompo) harus diperbanyak termasuk sumber daya pengelolanya.



Pertambahan penduduk disebabkan perubahan parameter kependudukan yaitu jumlah kelahiran lebih banyak dari kematian dan migrasi masuk lebih banyak dari migrasi keluar. Pertambahan penduduk ini perlu dikendalikan/ditata dan persebarannya belum merata antar kecamatan. Di sisi lain, pertambahan penduduk lansia cenderung membebani pembangunan (pengeluaran) daerah, jika tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk kegiatan produktif.

Program KB terkait penggunaan kontrasepsi modern dan jangka panjang belum mencapai target. Masih terdapat penduduk usia di bawah 15 tahun yang menikah dan melahirkan. Selain kebutuhan alat KB yang belum terpenuhi (*unmeet need*), target realisasi pencapaian akseptor KB baru tergolong rendah. Kepadatan penduduk semakin meningkat disertai dengan persebaran penduduk yang tidak merata (cenderung ke daerah yang maju/berkembang), jika tidak diantisipasi dengan terencana, akan menimbulkan permasalahan lingkungan (seperti sampah, polusi udara, air).

B. Kualitas

Permasalahan kualitas sumberdaya manusia hingga tahun 2045 masih tetap berkaitan dengan dimensi pendidikan dan kesehatan. Dimensi pendidikan dan kesehatan merupakan indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan bidang pendidikan dan keterampilan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kontribusi dimensi pendidikan terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Sintang tergolong rendah dibandingkan dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi.

Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan yang perlu dibenahi dan diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat penduduk buta huruf dan putus sekolah
2. Capaian APM SMP/MTs masih di bawah rata-rata provinsi
3. Jumlah sekolah vokasi masih terbatas;
4. Adanya sekolah dengan kondisi ruang kelas yang rusak berat dan rusak total pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.
5. Jumlah guru belum mencukupi dan masih ada guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.
6. Kurikulum berbasis digital sejak PAUD hingga SMA belum berkembang.
7. Rendahnya kualitas literasi berbasis masyarakat



Permasalahan pembangunan urusan Kesehatan di Kabupaten Sintang adalah:

1. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah, ditandai dengan kasus ibu melahirkan dan kematian bayi yang cenderung meningkat.
2. Status gizi masyarakat masih rendah, ditandai dengan pertambahan jumlah bayi lahir BBLR dan gizi buruk. Bayi lahir BBLR dan gizi buruk berpengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan fisik yaitu sangat pendek dan pendek (stunting). Prevalensi stunting masih tergolong tinggi.
3. Tenaga medis (terutama dokter spesialis dan dokter gigi) masih kurang untuk melayani kesehatan masyarakat.
4. Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal.
5. Masih kurangnya pemerataan sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan.

Permasalahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang terkait erat dengan kualitas tenaga kerja. Sebagian besar (55,2%) berlatar belakang pendidikan rendah (SMP ke bawah) dan sebagian besar terserap di sektor Pertanian, Perkebunan, Perburuan dan Perikanan (57,31%). Perencanaan tenaga kerja merespon era digitalisasi kini dan masa datang belum tersedia, terutama dalam memanfaatkan era bonus demografi yang ditandai dengan peralihan generasi penduduk usia kerja dari generasi X ke generasi Millenial, Generasi Z, dan Generasi Post Z. Timpangnya TPAK laki-laki dengan TPAK Perempuan disertai TPT Perempuan yang lebih tinggi menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja. Diversifikasi penyediaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia yang berkebutuhan khusus perlu dilaksanakan.

Di banyak analisis, para ahli menyatakan bahwa Generasi Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (boundary-less generation). Satu hal yang menonjol, Generasi Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alamnya layaknya mereka bernafas. Terkait dengan sifat dan karakteristik Generasi Z yang mampu memanfaatkan perubahan teknologi, perlu diantisipasi perkembangan fisik anak agar terhindar dari egoisme dan kurang peduli terhadap lingkungan sosial.



C. Kesejahteraan (Kemiskinan dan Pengangguran)

Secara kuantitatif, kemiskinan dan pengangguran diperkirakan akan tuntas dalam pembangunan jangka panjang yang akan datang. Tingkat kemiskinan yang saat ini sekitar 8%, akan berkurang menuju 0 (nol) persen pada tahun 2030 (sesuai target SDGs) dan kesempatan kerja akan mencapai kondisi full employment. Namun secara kualitatif, diharapkan upah yang diperoleh pekerja dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Upah yang diterima pekerja saat ini belum mencapai KHL, baru sebatas upah minimum. Penduduk yang tidak bekerja di Kabupaten Sintang (pengangguran) sebagian besar berpendidikan SMA/SMK dan berpendidikan tinggi

Kualitas penduduk dari sisi indeks kualitas sehat indeks kualitas keluarga belum optimal, khususnya kepemilikan rumah layak huni, akses terhadap air minum layak dan terhadap sanitasi layak.

2.3.1.4. Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam bidang politik, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang dimaksud tidak sekedar dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilu, tapi juga lebih kepada bagaimana memwadahi proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik bertujuan guna menumbuhkan serta membentuk orientasi politik pada individu, yang kemudian akan berdampak kepada masyarakat, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, tidak hanya dalam penyelenggaraan pemilu, tapi lebih jauh dalam proses pengambilan keputusan, dan pengawasan penyelenggaraan politik dan pemerintahan.

Pemasalahan utama bidang politik di Kabupaten Sintang lebih kepada meningkatkan trend partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sudah positif. Jika melihat tingkat partisipasi politik Pemilihan Umum tahun 2024 yang mencapai 88% dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sintang, tingkat partisipasi pemilih terus mengalami kenaikan. Tantangan kedepan yang perlu juga menjadi perhatian dengan menjaga agar tidak terjadi penurunan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Mengingat kedepan jumlah pemilih pemula jumlahnya semakin mendominasi, pemilih pemula



didominasi kalangan anak muda yang melek teknologi, namun memiliki apatisme politik yang tinggi. Artinya perlu adanya kegiatan pembinaan politik daerah yang rutin dilakukan, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, maupun Lembaga penyelenggara pemilihan umum seperti KPU dan Bawaslu, namun juga bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Sintang yang sudah banyak terdaftar.

Sejak tahun 2008 telah dilakukan Kajian Akademis Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembentukan Provinsi Kapuas Raya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Kemudian di dalam kajian Grand Design Daerah Otonom Baru, dijelaskan bahwa alasan untuk pemekaran daerah otonom baru di wilayah timur didasarkan pada pertimbangan kondisi geografis, bahwa luas wilayah Kalimantan Barat mencapai 7,53% dari luas Indonesia, rentang kendali pemerintahan yang begitu luas wilayah dan dari aspek pertahanan dan keamanan beberapa kabupaten di wilayah di wilayah timur (Kapuas Hulu, Sintang dan Sanggau) berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Namun hingga saat ini, pemekaran Provinsi Kapuas Raya belum terwujud dikarenakan adanya kebijakan moratorium.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan sebuah pemerintahan daerah yang sesuai dengan mandat dan harapan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun permasalahan yang terkait dengan bidang pemerintahan yang dimaksud meliputi: Partisipasi, Akuntabilitas, Transparan, Responsif, Efektif dan Efisiensi, Perlakuan Sama, serta Kebijaksanaan. Adapun permasalahan dalam bidang tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik;
- Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung;
- Efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
- Belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
- Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2023 memperoleh predikat B (Baik) yang menunjukkan masih banyak yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk dapat



meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik;

- Masih belum optimalnya kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab ASN di Pemerintah Kabupaten Sintang sehingga berbanding lurus dengan capaian dalam penilaian profesionalitas dari ASN pada tahun 2024 yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan;
- Masih belum optimalnya upaya pengelolaan domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, dan yang terakhir domain layanan SPBE sehingga capaian nilai SPBE Kabupaten Sintang masih diangka 1,89 dengan predikat cukup;
- Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan belum menunjukkan prestasi yang membanggakan. Berdasarkan Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang hanya mendapat predikat B- (baik dengan catatan); dan Pemerintah Kabupaten Sintang juga belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam pembaruan sistem pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan predikat kurang inovatif membuktikan sistem pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Sintang belum mengalami digitalisasi.

2.3.1.5. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat berpotensi menurunkan produktivitas sumber daya alam secara berkelanjutan serta dapat merusak keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan kebijakan yang strategis dalam mewujudkan Sintang yang Maju dan Lestari. Tekanan ekonomi dapat menyebabkan terjadinya konversi kawasan hutan yang tidak terkendali, eksploitasi pertambangan, penangkapan ikan berlebihan dan lain-lain, hal tersebut dapat berpotensi menurunkan kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu investasi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Namun dalam pembangunannya terdapat permasalahan yang harus dihadapi diantaranya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, peternakan, serta dalam bidang lingkungan hidup.



A. Bidang Kehutanan

Kehutanan adalah salah satu aset penting yang tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem melainkan juga dalam menyediakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia. Namun di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sintang, permasalahan serius dalam sektor kehutanan telah muncul yang mengancam keberlanjutan hutan dan lingkungan. Permasalahan dalam sektor kehutanan yaitu:

1. Keberlanjutan hutan terancam oleh tindakan ilegal seperti illegal logging dan perambahan yang merusak ekosistem hutan dan mengganggu keseimbangan alam. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang seringkali disebabkan oleh aktivitas manusia dapat mengancam keberlanjutan hutan dan berdampak pada emisi gas rumah kaca.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memulihkan fungsi ekosistem hutan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan hutan.
3. Penegakan hukum yang masih lemah dalam sektor kehutanan merujuk pada masalah dalam menegakkan aturan dan peraturan yang mengatur aktivitas hutan.
4. Tata kelola dan pengelolaan yang masih lemah dalam kawasan hutan sehingga mengakibatkan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, termasuk penggundulan hutan yang merugikan lingkungan dan ekosistem, serta berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya alam.

B. Bidang Lingkungan Hidup

Kelestarian lingkungan hidup adalah aspek kritis dalam memastikan kelangsungan hidup manusia. Namun, saat ini masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam kualitas lingkungan hidup. Permasalahan bidang lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup menunjukkan ketidakcukupan dalam upaya melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan.
2. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam mengacu pada kebutuhan untuk mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam dan keragaman hayati.



3. Belum terkoordinasi sistem penegakan hukum Lingkungan yang baik menunjukkan perlunya peningkatan dalam penegakan hukum yang efektif untuk melindungi lingkungan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan menunjukkan tantangan dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan yang merusak lingkungan.
5. Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan, menekankan perlunya manajemen sampah yang lebih baik.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi volume sampah yang berasal dari rumah tangga, usaha rumah makan dan limbah pasar.
7. Menurunnya kualitas lingkungan akibat berbagai kegiatan seperti penambangan tanpa izin dan pembakaran lahan yang memperburuk keadaan lingkungan.

C. Bencana Alam

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Beberapa jenis bencana merupakan suatu peristiwa alam yang dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, diantaranya adalah bahaya bencana banjir dan longsor ini bisa terjadi akibat kurangnya tutupan lahan dan kondisi topografis yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS), kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) inilah yang menyebabkan banjir dan tanah longsor terjadi sehingga diperlukan penanganan yang tepat untuk penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena apabila Daerah Aliran Sungai ini tidak lagi mampu menyerap atau menampung curah hujan sehingga air yang diterima sebagian besar langsung dialirkan melalui permukaan tanah, maka ancaman bencana banjir dan tanah longsor besar kemungkinan akan terjadi.

Dapat dilihat pada tahun 2023 berdasarkan data dari DIBI BNPB, untuk Kabupaten Sintang bencana banjir yang terjadi sebanyak 8 kali kejadian ini sendiri dapat memberikan dampak yang luar biasa di beberapa kecamatan Kabupaten Sintang dengan menelan korban 3 orang meninggal, 1 orang hilang dan 7.754



orang terdampak. Sepanjang tahun 2023, berdasarkan data dari DIBI BNPB, di wilayah Kabupaten Sintang terdapat 19 kali kejadian bencana alam yang mayoritas adalah 8 kali kejadian bencana banjir, 1 kali kejadian tanah longsor dan 10 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Permasalahan pada bidang bencana alam di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- Tingkat risiko bencana di Kabupaten Sintang masuk dalam kategori kelas risiko “tinggi” dengan kriteria penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) Kabupaten Sintang yang masih “sedang” menandakan bahwa kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sintang dalam implementasi penerapan penanggulangan bencana pada fase perencanaan, sebelum terjadi bencana, pelaksanaan, saat terjadi bencana, pasca terjadi bencana serta rehabilitasi serta rekonstruksi pemulihan bencana masih dikategorikan kemampuan daerah untuk menghadapi bahaya bencana sudah cukup baik, namun penyelenggaraan penanggulangan bencana belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
- Penyelenggaraan penanganan bencana belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan : Koordinasi, Komando dan Pelaksanaan dengan OPD lainnya.
- Masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dalam pengurangan resiko bencana serta kesiapsiagaan menghadapi bencana belum optimal.
- Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana.
- Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
- Masih terbatasnya sarana prasarana serta anggaran dalam kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.



- Kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara, kerusakan lahan, berkurangnya resapan air, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
- Perlu dilakukan penataan dan perencanaan yang memiliki upaya mengantisipasi hidrometeorologi yang merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan (oseanografi). Bencana-bencana tersebut ialah seperti angin kencang, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta kualitas udara buruk.

D. Bidang Persampahan

Permasalahan yang terkait dengan bidang persampahan adalah sebagai berikut:

- Pemerintah daerah belum mampu untuk melakukan cara pengelolaan sampah yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan belum optimal.
- Perlunya peningkatan atau penambahan fasilitas pengolahan, sara dan prasarana persampah di lokasi-lokasi strategis.
- Jumlah armada persampahan yang tidak mengalami penambahan sedangkan jumlah timbulan sampah dan wilayah pelayanan persampahan terus bertambah.
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Sintang masih menjadi open dumping.
- Pertumbuhan populasi yang besar akan berdampak pada peningkatan volume sampah dan permintaan tempat pembuangan sampah yang lebih banyak yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan.
- Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti kendaraan pengangkut sampah, kontainer, tempat penampungan sampah sementara (TPS), Tempat Pengelolaan sampah dan lain-lain.
- Jumlah tenaga teknis dan petugas persampahan yang masih terbatas.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang perlu memprioritaskan dan mengoptimalkan wilayah pelayanan yang memiliki jumlah timbulan sampah yang besar.
- Perlunya peremajaan armada persampahan yang sudah tua atau yang sudah lama masa umur pemakaiannya.
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.



2.3.1.6. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Adapun yang menjadi permasalahan sosial dan kehidupan beragama yang masih mengemuka di Kabupaten Sintang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih cukup tingginya angka kemiskinan yaitu mencapai 8,03%, masih di atas persentase angka kemiskinan Kalimantan Barat sebesar 6,32%.
2. Masih belum optimalnya pemberdayaan bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil.
3. Masih rendahnya kualitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Masih belum tersedianya fasilitas rumah singgah untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS.
5. Masih belum optimalnya akses pelayanan sosial dasar.
6. Masih belum optimalnya penataan kawasan budaya.
7. Belum optimalnya peningkatan pelestarian cagar budaya daerah.
8. Masih terbatasnya kelembagaan seni dan belum optimalnya pagelaran seni budaya daerah.
9. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.
10. Masih belum optimalnya pemanfaatan museum.
11. Semakin rendahnya minat generasi muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah.
12. Masih terbatasnya jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian.
13. Masih minimnya kegiatan festival seni dan budaya di Kabupaten Sintang.
14. Masih terbatasnya sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah.

2.3.1.7. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran yang krusial dalam kemajuan manusia dan peradaban. Ilmu pengetahuan membuka jalan bagi penemuan baru, inovasi, dan solusi untuk berbagai tantangan yang ada. Di sisi lain, teknologi memungkinkan penerapan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup.

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan, energi, dan



lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan dan investasi dalam bidang ini sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat kemajuan dan keberlanjutan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Sintang, di antaranya:

1. Keterbatasan Akses Internet di Kantor Desa: Banyak kantor kepala desa di Kabupaten Sintang belum memiliki fasilitas internet, yang mengakibatkan keterbatasan akses informasi dan komunikasi. Hal ini dapat menghambat efisiensi dalam administrasi desa, pengambilan keputusan, dan respons terhadap situasi darurat. Selain itu, pembangunan dan inovasi desa juga terhambat, mengingat internet berperan penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kolaborasi dengan berbagai instansi
2. Terhambatnya Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Terbatasnya akses internet di Kabupaten Sintang ditandai dengan masih banyaknya warga desa yang tidak memiliki akses internet. Hal ini mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kunci untuk perkembangan desa. Internet penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, inovasi ekonomi, dan kolaborasi dengan berbagai entitas.
3. Desa-Desa "*Blank Spot*": Masih terdapat desa-desa di Kabupaten Sintang yang tidak memiliki sinyal telepon seluler, mengakibatkan literasi digital rendah. Hal ini mempersulit akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan layanan digital lainnya.

Dengan demikian, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan akses internet dan teknologi di Kabupaten Sintang agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah tersebut.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan hasil pembahasan dan identifikasi isu strategis dari berbagai permasalahan bidang pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut disajikan tabel perumusan isu strategis yang komprehensif untuk Kabupaten Sintang. Tabel ini merangkum seluruh isu strategis yang telah diidentifikasi pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, sosial budaya dan kehidupan beragama, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, ekonomi, politik dan tata kelola pemerintahan, hukum dan HAM, wilayah dan tata ruang, serta kebencanaan. Perumusan isu strategis ini



mempertimbangkan potensi daerah, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan isu-isu lingkungan yang relevan bagi pembangunan berkelanjutan Kabupaten Sintang. Tabel ringkasan berikut akan menjadi dasar bagi perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sintang periode 2025-2029.

Tabel 2.78. Perumusan Isu Strategis Kabupaten Sintang

NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1.	Posisi strategis sebagai jalur penghubung antar kabupaten di Kalimantan Barat; Potensi sumber daya alam melimpah yang dapat dioptimalkan melalui pengembangan infrastruktur yang tepat; tingginya penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja;	Terdapat Panjang jalan dengan kondisi tidak mantap mencapai 89%; belum semua rumah tangga memiliki akses air minum layak serta sanitasi yang baik, belum semua wilayah terakses internet, belum semua rumah teraliri listrik.	Tanpa Kemiskinan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera;	Industri, Inovasi dan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Layak Energi Bersih dan Terjangkau Kota dan Pemukiman Berkelanjutan Penanganan Perubahan Iklim	Misi pembangunan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung konektivitas nasional dan peningkatan pemerataan ekonomi antar wilayah.	Disparitas pembangunan infrastruktur antar wilayah di ASEAN; Tingkat aksesibilitas infrastruktur dasar Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan yang terintegrasi dan terstandarisasi
2.	Demografi penduduk muda yang adaptif terhadap teknologi digital; Peluang pengembangan ekonomi digital berbasis produk lokal unggulan daerah	Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Teknologi Informasi di Kabupaten Sintang	Pendidikan Berkualitas Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Industri, Inovasi dan Infrastruktur Pendidikan Berkualitas Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Program transformasi digital nasional untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan daya saing dalam era ekonomi digital.	Kesenjangan digital ASEAN yang menghambat integrasi ekonomi dan sosial; Tingkat adopsi teknologi digital Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya	Belum terwujudnya akselerasi transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur TIK yang merata, peningkatan literasi digital, dan



NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
							optimalisasi teknologi untuk pelayanan publik dan ekonomi hijau
3.	Ketersediaan lahan yang luas (2,1 juta hektar) dengan 24% merupakan kawasan konservasi; Posisi strategis di kawasan perbatasan yang dapat dikembangkan sebagai PKSN	Belum Optimalnya Penataan Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Sintang	Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS); Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan); Konektivitas antar OPD dalam kebijakan lingkungan.	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan Ekosistem Daratan; Penanganan Perubahan Iklim	Kebijakan tata ruang nasional yang mengedepankan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk pembangunan wilayah yang berkelanjutan.	Kurangnya harmonisasi perencanaan tata ruang lintas wilayah di kawasan ASEAN; Tingginya laju konversi lahan untuk kegiatan ekonomi di kawasan perbatasanwilayah	Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan dan penguatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang
4.	Kabupaten Sintang memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam dan didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.	Belum optimalnya pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah	Kurangnya hilirisasi produk dan rendahnya tata niaga komoditas hasil pertanian dan perkebunan	Tujuan pembangunan berkelanjutan 1, 2, 3, 8, 9 dan 10 Mengakhiri Kemiskinan Mengakhiri Kelaparan	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi ekonomi Indonesia: peningkatan pembangunan dan pemerataan ekonomi	Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang relatif baik kurang diikuti dengan ketimpangan pendapatan	Belum optimalnya transformasi ekonomi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan



NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
				Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Meningkatkan Infrastruktur dan Inovasi Mengurangi Ketidaksetaraan			kesejahteraan Masyarakat
5.	Kabupaten Sintang memiliki sumber daya air yang besar dan distribusi yang cukup besar yaitu 39,59% Kabupaten Sintang memiliki agroekosistem yang cocok untuk pengembangan pangan	Rendahnya produktivitas pangan, serta penanganan alih fungsi lahan serta pengendalian lingkungan hidup	Ekosistem daratan; Kerawanan Keanekaragaman Hayati; Konflik Lahan; Karhutla, Pertanian Berkelanjutan;	krisis pangan global, kelaparan, ketahanan pangan, dan dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan	ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas sistem pangan	Rentannya Ketahanan Pangan	Belum tercapainya kemandirian pangan daerah
6.	Kabupaten Sintang berada dalam era bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif melebihi 65% hingga tahun 2045	Rendahnya Kualitas SDM Kabupaten Sintang yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan	Kemiskinan; Kehidupan sehat dan sejahtera; Pendidikan Berkualitas; Kesejahteraan Gender; Pengangguran;	Tanpa Kemiskinan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesejahteraan Gender, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi,	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi sosial Indonesia: kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan	Rendahnya produktivitas Indonesia (di bawah rata-rata negara ASEAN); IPM Indonesia di urutan ke 6 di ASEAN	Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing dan berkarakter dan belum tuntasnya



NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
				Berkurangnya Ketimpangan/Kesenjangan	perlindungan sosial yang adaptif.		pengentasan kemiskinan
7.	Kabupaten Sintang termasuk Kabupaten termaju di wilayah Timur Kalbar dengan infrastruktur sosial yang masih cukup baik dalam mengatasi masalah sosial yang muncul ditengah masyarakat.	Belum optimalnya kesadaran bermasyarakat yang ditandai dengan rendahnya indeks toleransi diangka 75,5	Penguatan Ketahanan Bencana Daerah	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkata	Membangun kebudayaan dan karakter bangsa Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi & kerukunan	Kemiskinan, perlindungan sosial, pelestarian kebudayaan lokal dan konflik sosial	Belum optimalnya Pelestarian Budaya,dan Kearifan Lokal, kerukunan bermasyarakat
8.	Kabupaten Sintang telah memiliki regulasi yang mengatur tentang pemerintahan secara elektronik, regulasi pemerintahan yang	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang berbasis Teknologi Informasi dan pemenuhan	Penerapan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam mendukung	Meningkatkan Infrastruktur dan Inovasi Membangun Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi tata kelola pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya:	Rendahnya adaptasi yang dilakukan pemerintah dalam mengadopsi kemajuan	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan



NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	kolaboratis, dan didukung Sumber Daya Aparatur yang memadai.	elayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).	Pembangunan Kabupaten Sintang yang berkelanjutan (Sintang Lestari).	Meningkatkan Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat Meningkatkan Kerja Sama dan Partnerships untuk Pembangunan Berkelanjutan	Penyederhanaan Prosedur, penyelenggaraan <i>e-government</i> , dan reformasi birokrasi pelayanan publik.	teknologi yang seharusnya sudah menjadi kebutuhan dalam pelayanan publik.	
9.	Kearifan lokal masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan; Topografi dan ekosistem yang dapat dikelola untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana; tersedianya lahan untuk pengelolaan persampahan	Tingginya Risiko dan Rendahnya Ketahanan Bencana di Kabupaten Sintang Dan masih belum optimalnya pengelolaan persampahan yang mneyebabkan kerusakan lingkungan	Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) Konektivitas antar OPD dalam kebijakan lingkungan	Penanganan Perubahan Iklim; Kota dan Pemukiman Berkelanjutan; Ekosistem Daratan, perairan dan udara	Komitmen nasional untuk memperkuat ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.	Tingkat kerentanan kawasan ASEAN terhadap bencana alam yang semakin meningkat; Dampak perubahan iklim yang semakin terasa di kawasan Kalimantan	Belum optimalnya pelestarian lingkungan hidup pada seluruh aspek untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana



Berdasarkan analisa perumusan isu strategis diatas, maka dapat disimpulkan Isu Strategis Kabupaten Sintang untuk RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan yang terintegrasi dan terstandarisasi
2. Belum terwujudnya akselerasi transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur TIK yang merata, peningkatan literasi digital, dan optimalisasi teknologi untuk pelayanan publik dan ekonomi digital
3. Belum optimalnya Peningkatan Pemanfaatan dan penguatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang
4. Belum optimalnya transformasi ekonomi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat
5. Belum tercapainya kemandirian pangan daerah
6. Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing dan berkarakter dan belum tuntasnya pengentasan kemiskinan.
7. Belum optimalnya Pelestarian Budaya,dan Kearifan Lokal, kerukunan bermasyarakat
8. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
9. Belum optimalnya pelestarian lingkungan hidup pada seluruh aspek untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana



BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholders di daerah. Landasan dalam merumuskan visi pembangunan didasarkan pada gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan.

3.1. Visi

Perumusan visi pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 didasarkan pada kondisi gambaran daerah, isu-isu strategis pembangunan daerah serta berbagai peluang dan tantangan pembangunan daerah yang telah dan akan dihadapi. Berdasarkan pertimbangan berbagai faktor tersebut, maka visi RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2029 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU,
SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN”**

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 yaitu: Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

- 1) **Maju**, terciptanya pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah, termasuk jalan, jembatan, irigasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Kemajuan ini ditandai dengan terpenuhinya layanan dasar masyarakat di semua wilayah sehingga tercipta konektivitas yang baik antar daerah, memudahkan mobilitas penduduk, arus barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Infrastruktur yang maju juga mencakup penyediaan fasilitas publik yang memadai seperti pasar, terminal, dan fasilitas pendukung lainnya yang sesuai dengan perencanaan tata ruang daerah.
- 2) **Sejahtera**, terciptanya kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.



Kesejahteraan ekonomi ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan per kapita, produktivitas sektor ekonomi, dan berkembangnya UMKM serta koperasi yang berdaya saing. Fokus utama kesejahteraan adalah terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat, terciptanya lapangan kerja yang layak, terjaminnya ketahanan pangan, dan terdistribusinya hasil pembangunan secara merata sehingga kesenjangan ekonomi antarwilayah dapat diminimalisir. Kesejahteraan juga tercermin dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan kualitas yang baik.

- 3) **Berkualitas**, terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Kualitas SDM dibangun melalui sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu, pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau, serta pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Berkualitas juga didukung oleh tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta birokrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik. SDM berkualitas menjadi modal utama dalam menghadapi persaingan global dan mendorong inovasi pembangunan daerah.
- 4) **Berkelanjutan**, pembangunan yang dilaksanakan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial untuk generasi saat ini dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, penerapan ekonomi hijau, dan pengurangan emisi karbon. Aspek berkelanjutan juga mencakup pengembangan ketahanan dan resistensi daerah terhadap bencana alam dan perubahan iklim melalui mitigasi risiko bencana, adaptasi lingkungan, dan penguatan sistem peringatan dini serta kapasitas tanggap darurat. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berbasis mitigasi bencana menjadi prioritas untuk meminimalkan dampak negatif dari bencana alam, memastikan keamanan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa



yang harus dilakukan sesuai tugas-tugas dan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal-internal daerah, serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2029, diperlukan misi yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran, dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang
2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis
4. Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menuju Ekonomi Hijau

3.3. Keselarasan Misi

Keselarasn misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang 2025-2030 memiliki peran strategis sebagai penjabaran tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang. Sub bab ini menguraikan bagaimana misi-misi yang dirumuskan dalam RPJMD memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai implementasi tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Sintang, RPJMD ini menerjemahkan visi jangka panjang daerah ke dalam langkah-langkah



strategis untuk periode lima tahun pertama. Keselarasan misi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa langkah awal ini berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Sintang, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan provinsi dan nasional.

Analisis keselarasan ini akan menunjukkan bagaimana setiap misi RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2030 merupakan operasionalisasi dari arah pembangunan jangka panjang daerah, dan pada saat yang sama selaras dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJPN. Melalui keselarasan ini, pembangunan Kabupaten Sintang tidak hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Dengan memahami posisi RPJMD sebagai tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Sintang, perumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan dapat diarahkan untuk memaksimalkan pencapaian target-target kunci pada tahap awal ini, yang akan menjadi batu pijakan bagi tahapan pembangunan berikutnya. Keselarasan misi yang dianalisis dalam sub bab ini akan menjadi landasan yang kuat bagi perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian visi Kabupaten Sintang secara bertahap dan sistematis.

Tabel 3.1. Keselarasan Misi RPJPD Sintang dengan RPJMD Kabupaten Sintang, RPJM Nasional, RPJMD Kalimantan Barat dan RPJPN

Misi RPJPD Kabupaten Sintang	Misi RPJMD Kabupaten Sintang	Misi RPJM Nasional (ASTA CITA)	Misi RPJMD Prov Kalimantan Barat	Misi RPJP Nasional
Misi 3 : Mewujudkan Sintang yang Terkoneksi dan Terdigitalisasi Melalui Infrastruktur yang Handal dan Menyeluruh	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang	Asta Cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur Kalbar yang adil dan berkelanjutan 2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota 	<p>Misi 6 : Pembangunan Kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan Pemertaan dan Berkeadilan Pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</p> <p>Misi 7 : Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi</p> <p>Misi 8 : Kesenambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah</p>



Misi RPJPD Kabupaten Sintang	Misi RPJMD Kabupaten Sintang	Misi RPJM Nasional (ASTA CITA)	Misi RPJMD Prov Kalimantan Barat	Misi RPJP Nasional
				pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan
Misi 1 : Menghadirkan Ekonomi Sintang yang Produktif, Stabil, Inklusif, Mandiri dan Merata	Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah	<p>Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p> <p>Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p> <p>Asta Cita 6 : Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p>	<p>1.Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah serta mendukung perkembangan industri yang relevan sesuai dengan kearifan lokal</p> <p>2.Mewujudkan peningkatan PAD</p>	Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas Melalui Peningkatan Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif Penerapan Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik, dan Global, Serta Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi



Misi RPJPD Kabupaten Sintang	Misi RPJMD Kabupaten Sintang	Misi RPJM Nasional (ASTA CITA)	Misi RPJMD Prov Kalimantan Barat	Misi RPJP Nasional
<p>Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Manusia Sintang yang Bermoral, Unggul, Berdaya Saing dan Bermartabat</p> <p>Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola yang Adaptif untuk Pemerintahan Daerah yang Bersih, Efektif, Terpercaya, Melayani dan Sinergis</p>	<p>Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis</p>	<p>Asta Cita 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)</p> <p>Asta Cita 4 : Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas</p> <p>Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan SDM Kalbar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 2. Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, kompeten dengan prinsip Good Governande dan Good Government 3. Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tanga kesehatan 4. Mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera 5. Meningkatkan partisipasi generasi muda dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah 	<p>Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial untuk membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing</p> <p>Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola untuk Membangun Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif</p> <p>Misi 4 : Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar</p>



Misi RPJPD Kabupaten Sintang	Misi RPJMD Kabupaten Sintang	Misi RPJM Nasional (ASTA CITA)	Misi RPJMD Prov Kalimantan Barat	Misi RPJP Nasional
Misi 5 : Menjaga Ketahanan Ekologi Melalui Pelestarian Alam dan Ekosistem Lingkungan yang Berkelanjutan	Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menuju Ekonomi Hijau	Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender2. Mewujudkan peningkatan kualitas Lingkungan hidup dan Sumber daya alam	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Misi 6 : Pembangunan Kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan Pemertaan dan Berkeadilan Pembangunan melaulu penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Misi 8 : Kesenambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan



Gambar 3.1. Hubungan Antar Misi Antara RPJMD Kabupaten Sintang dengan RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Kalimantan Barat, RPJMD Kalimantan Barat dan RPJPN



3.4. Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.2. Visi, Misi, Tujuan Serta Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Capaian					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kabupaten Sintang yang Maju /Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga terciptanya Konektivitas antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang	Meningkatnya infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur	48,95	49,89	51,16	52,26	53,42	54,62	55,87
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	48,95	49,89	51,16	52,26	53,42	54,62	55,87
2	Kabupaten Sintang yang sejahtera /Mewujudkan Pemerataan Ekonomi melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah	Meningkatnya ekonomi masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	4,89	5,02	5,46	5,65	5,78	5,84	5,96
			Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB per Kapita	46,17	47,57	53,00	56,71	59,23	61,26	63,47



No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Capaian					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,85	2,82	2,8	2,76	2,72	2,70	2,67
			Meningkatnya pemerataan ekonomi	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,329	0,310	0,285	0,282	0,270	0,265	0,265
			Menurunnya Kemiskinan Daerah	Angka Kemiskinan	8,03	7,85	7,3	7,00	6,75	6,53	6,1
			Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,57	3,62	3,70	3,75	3,85	4,00	4,20
3	Kabupaten Sintang yang berkualitas/Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Trampil,	Meningkatnya kualitas SDM		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,13	70,25	70,45	70,79	71,00	71,21	71,47
				Meningkatnya Masyarakat Terdidik dan Berkarakter	Indeks Pendidikan	0,62	0,63	0,63	0,64	0,65	0,66



No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Capaian					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,84	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	9.657,00	9.720,00	9.821,00	9.930,00	9.959,00	9.989,00	10.021,00
		Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan sinergis		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	69,24 (B)	70,24 (BB)	72,31 (BB)	74,21 (BB)	76,65 (BB)	78,30 (BB)	79,87 (BB)
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Indeks SPBE	2,30	2,85	2,96	3,00	3,15	3,37	3,51
			Meningkatnya inovasi pelayanan public	Indeks Inovasi Daerah	41,85	45,27	50,39	55,76	59,21	65,67	68,46
			meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	60,57 (B)	65,30 (B)	70,00 (B)	74,68 (BB)	78,30 (BB)	80,02 (BB)	81,45 (A)



No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Capaian					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,61	3,76	3,92	4,09	4,27	4,46	4,64
4	Kabupaten Sintang yang berkelanjutan /Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menuju Ekonomi Hijau	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana		Indeks Resiko Bencana	123,96	122,47	121	119,55	118,12	116,76	115,3
			Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*	70,63	79,30	79,46	79,61	79,77	79,93	80,13

3.5. Strategi dan Arah Kebijakan

3.5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Makro

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi **Gregorius Herkulanus Bala dan Florensus Ronny** selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode tahun 2025-2029.

Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sintang
Tahun 2025 - 2029**

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN			
Misi 1: Meningkatkan infrastruktur dasar sehingga tercipta konektivitas antar wilayah berdasarkan perencanaan penataan ruang.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta. 2. Pengembangan infrastruktur transportasi terpadu berbasis perencanaan tata ruang.	1. Meningkatkan kualitas jalan strategis penghubung antar kecamatan dan Desa 2. Mengembangkan sistem transportasi sungai yang terintegrasi dengan transportasi darat.



		<ol style="list-style-type: none">3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan kawasan perbatasan.4. Penguatan koordinasi pembangunan daerah dengan tata ruang wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi5. Pembangunan infrastruktur berbasis desa untuk mendukung pemerataan pembangunan.6. Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung konektivitas dan pelayanan publik.7. Pengembangan infrastruktur sumber daya air dan energi terbarukan yang berkelanjutan.8. Penguatan koordinasi dan sinergisitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar kabupaten sintang menjadi lokus pembangunan jalan, jembatan, dll	<ol style="list-style-type: none">3. Memperluas akses air minum dan sanitasi layak di seluruh wilayah Kabupaten Sintang.4. Perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dengan pola tata ruang yang sesuai peruntukannya5. Memenuhi kebutuhan energi listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik.6. Mengembangkan infrastruktur TIK dan menghapus blank spot telekomunikasi di daerah terpencil.7. Memperkuat infrastruktur mitigasi bencana terutama di kawasan rawan banjir dan kebakaran hutan.8. Mengembangkan infrastruktur strategis di kawasan perbatasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
--	--	---	--



Misi 2: Mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kemudahan investasi, pengembangan produk lokal, pengendalian inflasi, stabilitas ketersediaan pangan, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. Menurunnya pengangguran Meningkatnya pemerataan ekonomi Menurunnya kemiskinan daerah Meningkatnya daya saing daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi Peningkatan investasi yang berbasis potensi unggulan lokal. Peningkatan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat. Peningkatan daya saing potensi unggulan daerah. Mempercepat rencana pembentukan BUMD Aneka Usaha. Penguatan Perkebunan sawit rakyat Penguatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Peningkatan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan sentra pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi sentra pertumbuhan ekonomi tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung. Meningkatkan investasi melalui promosi produk unggulan daerah dan inovasi percepatan layanan investasi. Meningkatkan jumlah wirausaha baru, dan mengembangkan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders. Meningkatkan daya saing potensi unggulan daerah. Pembentukan BUMD Aneka Usaha. Mendorong penguatan BUMD yang mandiri serta berdaya guna Mendorong penguatan dan kemandirian



			kelompok tani/pekebun rakyat 8. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan pengembangan usaha pangan lokal 9. Meningkatkan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan 10. Meningkatkan metode pertanian berkelanjutan
--	--	--	--

Misi 3: Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah Peningkatan Kurikulum berbasis digital Peningkatan Pendidikan vokasi Meningkatkan literasi masyarakat Peningkatan disiplin Pemeriksaan kehamilan Peningkatan gizi balita Memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan fakir miskin, 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Partisipasi sekolah dengan wajar 13 tahun Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang literasi Meningkatkan Ketersediaan Perangkat lunak digital Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja



		<p>penanganan anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial, melakukan pembinaan difabel dan memberdayakan kelembagaan sosial</p> <p>8. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok</p>	<p>5. Meningkatkan derajat kesehatan Ibu Anak</p> <p>6. Perlindungan Ibu dan Anak, peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, pelatihan, permodalan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial.</p> <p>7. Penguatan organisasi perempuan dari semua tingkatan dari hulu ke hilir.</p> <p>8. Meningkatkan infrastruktur perlindungan dan jaminan sosial.</p> <p>9. Intervensi terhadap pengendalian inflasi serta mendorong penggunaan produk local</p>
<p>Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan sinergis</p>	<p>1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital</p>	<p>1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah.</p> <p>2. Peningkatan OPD yang menerapkan pelayanan berdasarkan SPM</p> <p>3. Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah</p> <p>4. Meningkatkan kemandirian fiskal</p>	<p>1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public</p> <p>2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>3. Meningkatkan persentase aparatur dengan</p>



		<p>daerah melalui peningkatan PAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah 6. Meningkatkan efektifitas kelembagaan Pemerintahan. 7. Memfasilitasi terbentuknya Provinsi Kapuas Raya 	<p>kualifikasi sesuai bidang tugas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan infrastruktur dan pengelolaan pemerintah berbasis elektronik. 5. Meningkatkan efektifitas pelayanan pemerintahan dengan membentuk struktur kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien serta membentuk Pemerintahan Kecamatan sesuai kebutuhan pelayanan
--	--	---	---

Misi 4: Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menuju ekonomi hijau.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Resistensi Terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	<p><u>Terkait Kebencanaan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana terutama Masyarakat miskin termasuk dampak pasca bencana 2. Peningkatan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana <p><u>Terkait Pengelolaan lingkungan hidup</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetic 	<p><u>Terkait Kebencanaan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan metode upaya pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2. Meningkatnya layanan respon kebakaran dan bencana 3. Meningkatkan infrastruktur penanganan bencana <p><u>Terkait Pengelolaan lingkungan hidup</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perlindungan keanekaragaman



		<p>(keanekaragaman hayati)</p> <ol style="list-style-type: none">2. Peningkatan perlindungan ekosistem hutan3. Peningkatan pengelolaan sumber daya air4. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup selaras alam5. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam adaptasi perubahan iklim <p><u>Terkait industri dan Lingkungan hidup</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri (industri tersertifikasi hijau)2. Peningkatan pengelolaan bahan kimia dan limbah yang terpapar ke udara, air dan tanah (LB3, merkuri, bahan bakar perusak ozon) <p><u>Terkait pertumbuhan penduduk dan lingkungan hidup</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan akses sampah yang terkelola dengan baik2. Peningkatan penggunaan energi terbarukan	<p>hayati (termasuk ekosistem hingga spesies) melalui penerapan kajian dokumen lingkungan hidup seperti RPPLH dan KLHS</p> <ol style="list-style-type: none">2. Meningkatkan program bersama mitra Pembangunan3. penguatan Masyarakat adat dalam pelestarian perhutanan sosial dan lingkungan <p><u>Terkait industry dan Lingkungan hidup</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan izin usaha <p><u>Terkait pertumbuhan penduduk dan lingkungan hidup</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan penerapan teknologi pengolahan sampah (TPA)2. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan pada daerah berpotensi
--	--	--	--

3.5.2. Pentahapan Kebijakan Pembangunan Daerah

Pentahapan pembangunan dimaksudkan agar focus dan arah pembangunan lebih terjaga sehingga memudahkan daerah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pembangunan tahunan. Adapun fokus arah pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2026-2030 sebagai berikut :



1. Tahap Pertama (RKPD 2026); Penguatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai modal pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pada tahun 2026, kabupaten sintang akan fokus pada pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, penyediaan akses air bersih, sanitasi, irigasi, dan pengolahan persampahan. Pembangunan infrastruktur ini akan dimulai dengan penyusunan masterplan berbasis data agar pembangunan infrastruktur dapat lebih efektif, efisien serta tepat sasaran agar mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.

2. Tahap Kedua (RKPD 2027) ; pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna meningkatkan daya saing daerah

Pada tahapan ini fokus pembangunan masih dalam ruang lingkup penyediaan infrastruktur namun secara kualitas dan kuantitas akan diperkuat, mengingat



luasnya wilayah kabupaten sintang. Peningkatan infrastruktur ini akan menjadi modal dalam meningkatkan daya saing daerah pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata serta kualitas berkehidupan bermasyarakat.

3. Tahap Ketiga (RKPD 2028); Peningkatan Sumberdaya Manusia dan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Pada tahun 2028 fokus pembangunan yaitu pada peningkatan sumberdaya manusia dan ekonomi Masyarakat. Pembangunan sumberdaya manusia yaitu dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, meningkatkan derajat Kesehatan serta meningkatkan kualitas manusia yang tercermin dalam Pendidikan karakter anak usia sekolah. Pada sektor ekonomi fokus pembangunan yaitu dengan menjadikan kabupaten sintang sebagai sentra produksi pertanian, Perkebunan dan peternakan serta menjadi pusat bisnis dan ekonomi wilayah timur Kalimantan barat.

4. Tahap Keempat (RKPD 2029); Menumbuhkan Daya Saing Daerah yang Lestari didukung dengan tata Kelola pemerintahan yang baik

Di tahapan ini yaitu tahun 2029 fokus pembangunan pada pertumbuhan daya saing daerah yang memperhatikan kelestarian lingkungan, peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, industri barang dan jasa. Hal ini dapat lebih dipermudah dengan terbukanya border di ketungau hulu dan dibentuknya Provinsi Kapuas Raya yang ber ibukota di Sintang.

5. Tahap kelima (RKPD 2030); Perwujudan Sintang yang maju, Sejahtera, berkualitas dan berkelanjutan

Pada Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2030 diarahkan dengan tema “Perwujudan Sintang yang Maju, Sejahtera, berkualitas dan Berkelanjutan”, Tahap kelima ini juga diarahkan untuk fokus pada perwujudan kinerja pembangunan daerah dengan prioritas daerah meliputi:

- Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar;
- Perwujudan ekonomi kabupaten sintang yang mandiri dan berdaya saing;
- Perwujudan SDM yang cerdas serta sehat jasmani dan Rohani;



- Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan sinergis;
- Perwujudan tata kelola lingkungan hidup yang baik serta berketahanan terhadap bencana;



3.6. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 3.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga terciptanya Konektivitas antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang	Meningkatnya infrastruktur daerah			Indeks Infrastruktur	
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur		Indeks Infrastruktur	
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase penyediaan air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan aman)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Program Pengembangan Permukiman
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman
				Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	Mewujudkan Pemerataan Ekonomi melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah	Meningkatnya ekonomi Masyarakat				Pertumbuhan Ekonomi	
			Meningkatnya Pendapatan Masyarakat			PDRB per Kapita	
				Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
				Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
				Meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan Umkm



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkendalinya penambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TF)	Program Pengendalian Penduduk
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman pangan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Pengelolaan Sumber Daya Air
			Menurunnya pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
				meningkatnya produktifitas tenaga kerja	persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat produktifitasnya	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
				meningkatnya penempatan tenaga kerja	persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalamnegeri	Penempatan Tenaga Kerja
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	angka partisipasi sekolah	pengelolaan pendidikan
			Meningkatnya pemerataan ekonomi		Indeks Gini (Gini Ratio)	
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh	Pertumbuhan wirausaha	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Menurunnya Kemiskinan Daerah		Angka Kemiskinan	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Perlindungan dan Jaminan Sosial



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya/Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya/Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya/Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya/Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Rehabilitasi Sosial



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan
			Meningkatnya Daya Saing Daerah		Indeks Daya Saing Daerah	
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berijin	Promosi Penanaman Modal



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
				Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Riset dan Inovasi Daerah
3	Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Trampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kolaboratif	Meningkatnya kualitas SDM			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
			Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter		Indeks Pendidikan	
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	angka partisipasi sekolah	pengelolaan pendidikan
				Meningkatnya kualitas kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan local	Pengembangan Kurikulum



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Program pendidik dan tenaga kependidikan
				Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Pembinaan Perpustakaan
			Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan		Indeks Kesehatan	
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Penurunan AKI dan prevelensi stunting	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang tenaga Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Meningkatkan Daya Beli Masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
					Pengeluaran Perkapita	
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja`	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Penempatan Tenaga Kerja



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh	Pertumbuhan wirausaha	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Kolaboratif			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital		Indeks SPBE	
					Indeks Pelayanan Publik	
					Indeks Inovasi Daerah	
					Nilai SAKIP	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintahan	kematangan organisasi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas SPIP/Kapabilitas APIP	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
				meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Pengembangan Sumberdaya manusia
				Meningkatnya tata Kelola anggaran	Persentase alokasi anggaran infrastruktur alayanan publik	Pengelolaan Keuangan Daerah
				Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	Pengelolaan pendapatan daerah
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informasi	SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menuju Ekonomi Hijau	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana			Indeks Resiko Bencana	
			Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*	
			Meningkatnya tata kelola persampahan		Persentase timbulan sampah yang tertangani	Pengelolaan Persampahan
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	indeks kualitas air dan udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	persentase RTH	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sintang merupakan komponen krusial yang menerjemahkan visi dan misi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan" ke dalam agenda pembangunan yang konkret dan terukur. Program-program ini disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dan mengacu pada urusan wajib dan pilihan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perumusan program dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, mulai dari analisis situasi dan kondisi daerah, potensi dan permasalahan yang dihadapi, hingga kapasitas fiskal dan sumber daya yang tersedia. Dalam proses penyusunannya, program-program ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan, sehingga terdapat kejelasan peran dan tanggung jawab dalam pencapaian sasaran pembangunan. Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Aspek koordinasi antar Perangkat Daerah juga menjadi pertimbangan penting untuk memastikan adanya sinergitas dan menghindari tumpang tindih kegiatan pembangunan.

Proyeksi pendanaan yang disajikan dalam bab ini merupakan perkiraan alokasi sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program pembangunan selama lima tahun ke depan. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang mencakup potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu, proyeksi pendanaan juga memperhatikan tren dan proyeksi



pertumbuhan ekonomi daerah, kebutuhan belanja wajib dan belanja prioritas, serta kemampuan pembiayaan daerah. Sumber-sumber pendanaan program tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga mencakup potensi pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, pinjaman daerah, obligasi daerah, kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), corporate social responsibility (CSR), serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diversifikasi sumber pendanaan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD dan memaksimalkan potensi pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber.

Program-program yang dirumuskan mencakup berbagai sektor pembangunan dan diarahkan untuk mendukung pencapaian empat misi Kabupaten Sintang, yaitu meningkatkan infrastruktur dasar sehingga tercipta konektivitas antar wilayah, mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kemudahan investasi dan pengembangan produk lokal, meningkatkan SDM berkualitas melalui transformasi pendidikan, kesehatan, dan reformasi birokrasi, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui pengelolaan lingkungan hidup menuju ekonomi hijau. Penetapan indikator kinerja untuk setiap program dilakukan secara terukur dan dapat diverifikasi, dengan memperhatikan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound) yang dilengkapi dengan target capaian tahunan selama periode RPJMD. Tabel program perangkat daerah dan pagu indikatif yang disajikan berikutnya disusun secara sistematis menurut urusan pemerintahan, dengan rincian nama perangkat daerah, program prioritas, indikator kinerja program, target capaian untuk setiap tahun, serta proyeksi pendanaan dari tahun 2025 hingga 2029. Penyajian tabel ini memberikan gambaran komprehensif tentang arah pembangunan Kabupaten Sintang lima tahun ke depan dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD serta dasar dalam penyusunan RKPD dan APBD tahunan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Keberhasilan pelaksanaan program-program ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan kerja sama semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas, dan berkelanjutan.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah dan Proyeksi Pendanaan

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah (APS)	56,28	61,90%	366.827.882.067	68,09%	385.169.276.173	74,90%	404.427.739.978	82,39%	424.649.126.970	90,63%	445.881.583.327	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	0,57	0,62%	104.807.966.305	0,69%	110.048.364.621	0,72%	115.550.782.851	0,78%	121.328.321.991	0,81%	127.394.738.093	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	45,27	47,17%		49,08%		50,11%		51,09%		51,78%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	100	100%	52.403.983.152	100%	55.024.182.310	100%	57.775.391.425	100%	60.664.160.996	100%	63.697.369.047	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	159	142	85.839.659.648,9	126	90.155.185.711,4	110	95.140.962.875,8	96	100.179.503.050,32	96	105.497.058.061,49	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)	31	26,2%		23,80%		21,40%		19,00%		16,60%		Dinas Kesehatan
	Persentase Pasien yang mendapatkan layanan tindaklanjut sesuai standar	81,41	87,00		90,00		92,00		95,00		95,00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100	100%	42.919.829.824	100%	45.077.592.856	100%	47.570.481.438	100%	50.089.751.525	100%	52.748.529.031	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100	100%	53.649.787.281	100%	56.346.991.070	100%	59.463.101.797	100%	62.612.189.406	100%	65.935.661.288	Dinas Kesehatan

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	100	100%	32.189.872.368	100%	33.808.194.642	100%	35.677.861.078	100%	37.567.313.644	100%	39.561.396.773	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Berakses Air Minum	52,54	55,28%	34.112.590.000	56,38%	37.523.849.000	57,56%	41.276.233.900	58,80%	45.403.857.290	60,11%	49.944.243.019	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi	70,94	72,94%	16.473.455.000	74,94%	18.120.800.500	76,94%	19.932.880.550	78,94%	21.926.168.605	80,94%	24.118.785.466	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi Baik	60	62%	20.733.361.641	64%	22.806.697.805	68%	25.087.367.585	69%	27.596.104.344	71%	30.355.714.778	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam kondisi Baik	23,24	26,24%	11.839.000.000	29,24%	12.430.950.000	32,24%	13.052.497.500	35,24%	13.705.122.375	38,24%	14.390.378.494	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	67,04	69,04%	6.000.000.000	71,04%	6.300.000.000	73,04%	6.615.000.000	75,04%	6.945.750.000	77,04%	7.293.037.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	11,73	13,68%	355.923.365.836	15,08%	473.719.534.128	16,65%	471.905.510.834	18,33%	560.500.786.375	20,12%	689.525.825.695	Dinas Pekerjaan Umum
	Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan	59,1	59,70%		60,29%		60,90%		61,50%		62,12%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	30,16	31,66%		32,45%		33,18%		33,91%		34,63%		Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli	41	42%	2.000.000.000	43%	2.200.000.000	45%	2.420.000.000	47%	2.662.000.000	48,50%	2.928.200.000	Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8,93	13,13%	12.000.000.000	17,34%	12.500.000.000	21,54%	13.000.000.000	25,74%	13.500.000.000	29,94%	15.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum



BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	50	55%	573.000.000	60%	590.190.000	65%	708.228.000	70%	849.873.600	75%	1.019.848.320	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	100	100	6.290.000.000	100	6.478.700.000	100	7.774.440.000	100	9.329.328.000	100	11.195.193.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	0	0		0		0		0		0		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	12,01	12,4	34.988.000.000	12,6	36.037.640.000	12,8	39.157.640.000,00	13,0	41.887.640.000,00	13,2	46.517.528.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	100	100	2.100.000.000	100	2.163.000.000	100	2.227.890.000	100	2.294.726.700	100	2.409.463.035	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100	100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja		
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100	100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja		
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	0	25		25		25		25		Satuan Polisi Pamong Praja		



BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB			
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	40	45	2.300.000.000	50	2.369.000.000	55	2.440.070.000	60	2.513.272.100	65	2.638.935.705	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	Persentase Penangan Tanggap Darurat Bencana	100	100		100		-		100		-		100	-	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	25	30		35		-		40		-		45	-	50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100	100	250.000.000	100	257.500.000	100	265.225.000	100	273.181.750	100	286.840.838	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	21,4	28,6		35,7		-		42,9		-		50	-	57,7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	60	61	2.302.880.000	61,5	2.371.966.400	62	2.443.125.392	62,5	2.516.419.154	63	2.642.240.111	Dinas Sosial			
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial			



BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	50	50,1	2.893.000.000	50,2	2.979.790.000	50,3	3.069.183.700	50,4	3.161.259.211	50,5	3.319.322.172	Dinas Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya	50	50,1		50,2		50,3		50,4		50,5		Dinas Sosial
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	50	50,1		50,2		50,3		50,4		50,5		Dinas Sosial
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	50	50,1		50,2		50,3		50,4		50,5		Dinas Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	85	86	87	88	89	90	Dinas Sosial					
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	76,15	76,65	5.379.200.000	77,15	5.540.576.000	77,65	5.706.793.280	78,15	5.877.997.078	78,65	6.171.896.932	Dinas Sosial
	Presentase Penerima Manfaat Yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	76,15	76,65		77,15		77,65		78,15		78,65		Dinas Sosial
	Presentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	50	50,5		51		51,5		52		52,5		Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	2.439.000.000	100	2.512.170.000	100	2.587.535.100	100	2.665.161.153	100	2.798.419.211	Dinas Sosial
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat Kesiapsiagaannya	21,43	22,63		28,35		32,43		25,43		30,19		Dinas Sosial



BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	100	100	150.000.000	100	154.500.000	100	159.135.000	100	163.909.050	100	172.104.503	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Penyelesaian Dokumen Rencana ketenagakerjaan	100	100	175.000.000	100	180.250.000	100	185.657.500	100	191.227.225	100	200.788.586	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	100	96,5	3.746.000.000	96,75	3.858.380.000	97	3.974.131.400	97,15	4.093.355.342	97,5	4.298.023.109	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	20,25	20,5	1.732.000.000	20,75	1.783.960.000	30	1.837.478.800	30,25	1.892.603.164	30,5	1.987.233.322	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pekerja pada Perusahaan yang diberikan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	100	100	1.200.000.000	100	1.236.000.000	100	1.273.080.000	100	1.311.272.400	100	1.376.836.020	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	61,5	61,54	240.000.000	62	247.200.000	62,15	254.616.000	62,15	262.254.480	62,4	275.367.204	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	100	100	550.000.000	100	566.500.000	100	583.495.000	100	600.999.850	100	631.049.843	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	100	100%	200.000.000	100%	206.000.000	100%	212.180.000	100%	218.545.400	100%	229.472.670	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak



BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	100%	150.000.000	100%	154.500.000	100%	159.135.000	100%	163.909.050	100%	172.104.503	Dinas Keluarga Berencana, Pembe rdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	75	75	250.000.000	80	257.500.000	80	265.225.000	85	273.181.750	90	286.840.838	Dinas Keluarga Berencana, Pembe rdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	320.000.000	100	329.600.000	100	339.488.000	100	349.672.640	100	367.156.272	Dinas Keluarga Berencana, Pembe rdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan		7,11	2.500.000.000	7,82	2.575.000.000	8,6	2.652.250.000	9,49	2.731.817.500	10,41	2.868.408.375	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan		90,8	1.200.000.000	92,3	1.236.000.000	94,02	1.273.080.000	95,84	1.311.272.400	97,87	1.376.836.020	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		12,22	2.100.000.000	11	2.163.000.000	9,78	2.227.890.000	8,56	2.294.726.700	7,33	2.409.463.035	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan		78	220.000.000	80	226.600.000	82	233.398.000	86	240.399.940	88	252.419.937	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat Yang Dilakukan Melalui Mediasi	50	55	200.000.000	60	206.000.000	65	212.180.000	70	218.545.400	75	229.472.670	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100	100	2.500.000.000	100	2.575.000.000	100	2.652.250.000	100	2.731.817.500	100	2.868.408.375	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100	280.000.000	100	288.400.000	100	297.052.000	100	305.963.560	100	321.261.738	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	73,56	73,76	2.600.000.000	73,96	2.678.000.000	74,16	2.758.340.000	74,36	2.841.090.200	74,56	2.983.144.710	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	84,01	84,21		84,41		-		84,61		-		84,51
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	30	30	3.000.000.000	30	3.090.000.000	30	3.182.700.000	30	3.278.181.000	30	3.442.090.050	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	35	35	650.000.000	37	669.500.000	38	689.585.000	39	710.272.550	40	745.786.178	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH	66	66,25	1.150.000.000	66,5	1.184.500.000	66,75	1.220.035.000	67	1.256.636.050	67,5	1.319.467.853	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25	25	200.000.000	30	206.000.000	30	212.180.000	35	218.545.400	35	229.472.670	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	25	25	265.000.000	30	272.950.000	30	281.138.500	35	289.572.655	35	304.051.288	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15	20	875.000.000	20	901.250.000	30	928.287.500	30	956.136.125	30	1.003.942.931	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100	100	650.000.000	100	669.500.000	100	689.585.000	100	710.272.550	100	745.786.178	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	58,11	66	2.500.000.000	67	2.575.000.000	68	2.652.250.000	69	2.731.817.500	70	2.868.408.375	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	1,7	2	410.000.000	2,3	422.300.000	2,6	434.969.000	2,9	448.018.070	3,2	470.418.974	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	22,5	23		23,5	-	24	-	24,5	-	25		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	280.000.000	100	288.400.000	100	297.052.000	100	305.963.560	100	321.261.738	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	157.000.000	100	161.710.000	100	166.561.300	100	171.558.139	100	180.136.046	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	200.000.000	100	206.000.000	100	212.180.000	100	218.545.400	100	229.472.670	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa	62	63	320.000.000	64	329.600.000	65	339.488.000	66	349.672.640	67	367.156.272	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	75	76	210.000.000	77	216.300.000	78	222.789.000	79	229.472.670	80	240.946.304	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4,88	5,14	1.200.000.000	6	1.236.000.000	6,85	1.273.080.000	7,71	1.311.272.400	7,71	1.376.836.020	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	79,49	82,05		84,62		87,18		89,74		89,74		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK aktif	75,92	76,42	450.000.000	76,92	463.500.000	77,42	477.405.000	77,92	491.727.150	516.313.508		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase posyandu aktif	58,04	58,54		59,04		59,54		60,04				60,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,25	2,21	1.450.000.000	2,19	1.493.500.000	2,16	1.538.305.000	2,13	1.584.454.150	1.663.676.858		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	40,5	40,3		40,1		39,9		39,7				39,5
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	67	66,5	750.000.000	66	772.500.000	65,5	795.675.000	65	819.545.250	860.522.513		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	6,3	6,1		5,9		5,7		5,5				5,3
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	820.000.000	100	844.600.000	100	869.938.000	100	896.036.140	940.837.947		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat	0,23	0,24	2.950.000.000	0,25	3.038.500.000	0,26	3.129.655.000	0,27	3.223.544.650	0,28	3.384.721.883	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Sungai	0,53	0,54	1.350.000.000	0,55	1.390.500.000	0,56	1.432.215.000	0,57	1.475.181.450	0,58	1.548.940.523	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	87	88	2.400.000.000	89	2.472.000.000	90	2.546.160.000	91	2.622.544.800	92	2.753.672.040	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai layanan Administrasi Pemerintah Berbasis elektronik (SPBE)	3,1	3,2	855.000.000	3,3	880.650.000	3,4	907.069.500	3,5	934.281.585	3,6	980.995.664	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	1,34%	1,38%	2.211.000.000	1,40%	2.277.330.000	1,42%	2.345.649.900	1,44%	2.416.019.397	1,46%	2.536.820.367	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	13,11	14,21	250.000.000	15,3	257.500.000	16,39	265.225.000	17,49	273.181.750	18,58	286.840.838	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	49,21	50	575.000.000	50,79	592.250.000	51,59	610.017.500	52,38	628.318.025	53,17	659.733.926	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	22,95	24,59	2.450.000.000	25,68	2.523.500.000	26,78	2.599.205.000	27,32	2.677.181.150	28,42	2.811.040.208	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	47,54	49,18	3.280.000.000	50,82	3.378.400.000	52,46	3.479.752.000	54,1	3.584.144.560	55,74	3.763.351.788	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	19,46	20,7	2.150.000.000	21,95	2.214.500.000	23,19	2.280.935.000	24,43	2.349.363.050	25,67	2.466.831.203	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro	13,44	14,93	4.210.000.000	16,41	4.336.300.000	17,9	4.466.389.000	19,38	4.600.380.670	20,87	4.830.399.704	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan pinjam	19,05	23,81	320.000.000	28,57	329.600.000	33,33	339.488.000	35,71	349.672.640	38,1	367.156.272	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi MODAL	100	100	550.000.000	100	566.500.000	100	583.495.000	100	600.999.850	100	631.049.843	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100	100	958.000.000	100	986.740.000	100	1.016.342.200	100	1.046.832.466	100	1.099.174.089	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	95	95	240.000.000	95	247.200.000	100	254.616.000	100	262.254.480	100	275.367.204	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100	210.000.000	100	216.300.000	100	222.789.000	100	229.472.670	100	240.946.304	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	100	330.000.000	100	339.900.000	100	350.097.000	100	360.599.910	100	378.629.906	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	Persentase Kerja sama Penanaman Modal	100	100	325.000.000	100	334.750.000	100	344.792.500	100	355.136.275	100	372.893.089	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	28	28	550.000.000	29	566.500.000	29	583.495.000	30	600.999.850	30	631.049.843	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan olahraga	100	100	3.500.000.000	100	3.605.000.000	100	3.713.150.000	100	3.824.544.500	100	4.015.771.725	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	30	30	200.000.000	31	206.000.000	32	212.180.000	32	218.545.400	33	229.472.670	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2,2	2,3	150.000.000	2,4	154.500.000	2,5	159.135.000	2,7	163.909.050	3	180.299.955	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI	470	500	350.000.000	520	360.500.000	550	371.315.000	580	382.454.450	600	420.699.895	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	48	54	250.000.000	59	257.500.000	65	265.225.000	69	273.181.750	75	286.840.838	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	43	47	200.000.000	51	206.000.000	56	212.180.000	60	218.545.400	65	229.472.670	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	44	51	200.000.000	55	206.000.000	59	212.180.000	64	218.545.400	60	229.472.670	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	36	44		49		-		51		-		56
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	45	54	200.000.000	59	206.000.000	65	212.180.000	69	218.545.400	74	240.399.940	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	80,15	81,75	1.500.000.000	83,38	1.545.000.000	85,04	1.591.350.000	86,74	1.639.090.500	88,47	210.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang terpelihara dengan baik	100	100	246.500.000	100	253.895.000	100	261.511.850	100	269.357.206	100	296.292.926	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	0	100	367.000.000	100	378.010.000	100	389.350.300	100	401.030.809	100	441.133.890	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	75,68	77,37	330.000.000	79,06	339.900.000	81,1	350.097.000	83,34	360.599.910	85,49	378.629.906	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	5,25	7,5	267.000.000	9,25	275.010.000	11,45	283.260.300	13,38	291.758.109	15,2	306.346.014	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	5,1	7,15	250.000.000	9,2	257.500.000	11,25	265.225.000	13,35	273.181.750	15,45	286.840.838	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan Kompetensinya	73,5	75	468.000.000	77,2	482.040.000	77,9	496.501.200	78,1	511.396.236	78,46	536.966.048	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN													
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap		281	1.390.000.000	293	1.431.700.000	300	1.474.651.000	315	1.518.890.530	320	1.594.835.057	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya		940	1.500.000.000	951	1.545.000.000	959	1.591.350.000	963	1.639.090.500	1065	1.721.045.025	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan		54,28	750.000.000	55,18	772.500.000	56,21	795.675.000	57,29	819.545.250	58,51	860.522.513	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata	10	10,5	1.650.000.000	10,7	1.699.500.000	11	1.750.485.000	11,2	1.802.999.550	11,5	1.893.149.528	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	25	25	400.000.000	25	412.000.000	26	424.360.000	27	437.090.800	27	458.945.340	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	0,14	0,14	2.100.000.000	0,15	2.163.000.000	0,16	2.227.890.000	0,17	2.294.726.700	0,17	2.409.463.035	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	10,34	10,35	590.000.000	10,36	607.700.000	10,37	625.931.000	10,38	644.708.930	10,4	676.944.377	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	90	90	3.800.000.000	90	3.914.000.000	90	4.031.420.000	100	4.152.362.600	100	4.359.980.730	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Peningkatan Produksi Holtikultura	90	90		90		100		100		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura		
	Peningkatan Produksi Perkebunan	63	66		69		72		75		78		Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Peningkatan Produktivitas Perkebunan	63	66		69		72		75		78		Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	2,8	4,1		5,5		6,9		8,3		9,7		Dinas Perkebunan dan Peternakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	50.434	50.434	1.200.000.000	51.434	1.236.000.000	51.434	1.273.080.000	51.500	1.311.272.400	51.500	1.376.836.020	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	70	75	750.000.000	80	772.500.000	85	795.675.000	90	819.545.250	95	860.522.513	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	35	45		55		65		75		85		Dinas Perkebunan dan Peternakan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	90	90	580.000.000	90	597.400.000	90	615.322.000	100	633.781.660	100	697.159.826	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura,



BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BENCANA PERTANIAN								-		-			Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	90	90		90		95		100		100		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	90	90	440.000.000	90	453.200.000	90	466.796.000	100	480.799.880	100	528.879.868	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	90	90	850.000.000	90	875.500.000	90	901.765.000	100	928.817.950	100	1.021.699.745	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk	90	92		93		94		95		96		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	3,74	5,61	800.000.000	7,48	824.000.000	9,35	848.720.000	11,21	874.181.600	13,08	917.890.680	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	66,67	69,23	2.000.000.000	71,79	2.060.000.000	74,36	2.121.800.000	76,92	2.185.454.000	79,49	2.294.726.700	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	71,43	71,43	2.800.000.000	71,43	2.884.000.000	71,43	2.970.520.000	71,43	3.059.635.600	71,43	3.212.617.380	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	-244,37	-120,37	1.100.000.000	-3,63	1.133.000.000	127,63	1.166.990.000	251,63	1.201.999.700	375,63	1.262.099.685	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	100	1.000.000.000	100	1.030.000.000	100	1.060.900.000	100	1.092.727.000	100	1.147.363.350	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	3,7	3,7	850.000.000	3,7	875.500.000	3,7	901.765.000	3,7	928.817.950	3,7	975.258.848	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina Kelompok Pengrajin	35	38	950.000.000	40	978.500.000	42	1.007.855.000	44	1.038.090.650	46	1.089.995.183	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	10	11,5	550.000.000	12	566.500.000	12,5	583.495.000	13	600.999.850	13,5	631.049.843	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase Industri secara lengkap, Akurat, dan Terkini yang terdata pada sistem	100	100	470.000.000	100	484.100.000	100	498.623.000	100	513.581.690	100	539.260.775	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	97,25	97,5	350.000.000	97,65	360.500.000	97,75	371.315.000	97,85	382.454.450	97,85	401.577.173	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100	84,75	350.000.000	85	360.500.000	85,25	371.315.000	85,5	382.454.450	85,75	401.577.173	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH													
PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kematangan Organisasi	85,45	85,65	2.100.000.000	85,85	2.205.000.000	86,00	2.271.150.000	86,55	2.339.284.500	88,50	2.409.463.035	Sekretariat Daerah
PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kerjasama Daerah yang dilaksanakan secara efektif	100	100	1.400.000.000	100	1.470.000.000	100	1.514.100.000	100	1.559.523.000	100	1.606.308.690	Sekretariat Daerah
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Daerah	2,67 (Sedang)	2,70 (Sedang)		2,74 (Sedang)	-	2,78 (Sedang)	-	2,82 (Sedang)	-	2,85 (Sedang)	-	Sekretariat Daerah
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100	15.000.000.000	100	15.320.000.000	100	15.779.600.000	100	16.252.988.000	100	17.210.450.250	Sekretariat Daerah

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	100	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.081.500.000	100	1.113.945.000	100	1.147.363.350	Sekretariat Daerah
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.081.500.000	100	1.113.945.000	100	1.147.363.350	Sekretariat Daerah
KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat Kematangan UKPBJ	8/9	9/9	1.000.000.000	9/9	1.050.000.000	9/9	1.081.500.000	9/9	1.113.945.000	9/9	1.147.363.350	Sekretariat Daerah
URUSAN SEKRETARIAT DPRD													
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat Waktu	Tepat Waktu	5.500.000.000	Tepat Waktu	5.665.000.000	Tepat Waktu	5.834.950.000	Tepat Waktu	6.009.998.500	Tepat Waktu	6.610.998.350	Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	80	80		85		85		89		90		Sekretariat DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	80	80		85		85		90		90		Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
URUSAN PERENCANAAN													
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	70,41	70,41%	1.850.000.000	71,01%	1.905.500.000	72,19%	1.962.665.000	72,78%	2.021.544.950	73,37%	2.223.699.445	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100%		100%		-		100%		-		100%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100%	1.500.000.000	100%	1.545.000.000	100%	1.591.350.000	100%	1.639.090.500	100%	1.802.999.550	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB		
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastrukturyr dan Kewilayahan	100	100%		100%	-		100%	-		100%	-		100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100%		100%			100%			100%			100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
URUSAN KEUANGAN															
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	35	34%	501.949.750.248	33%		32%		31%		30%	575.471.630.678,82	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	30	31%		32%	517.008.242.755	33%	532.518.490.038	34%	548.494.044.739	40%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	100	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
	Persentase Penurunan SILPA	12	11%		10%	-	9%	-	8%	-	9%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	100	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	2	3%	1.500.000.000	4%	1.545.000.000	5%	1.591.350.000	6%	1.639.090.500	7%	1.802.999.550	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,57	9,52	15.000.000.000	10,07	15.450.000.000	10,67	15.913.500.000	11,32	16.390.905.000	11,97	18.029.995.500	Badan Pengelola Pendapatan Daerah		
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan berbasis digital	70,44	72,44		74,44		-		76,44		-		79,44	83,44	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
URUSAN KEPEGAWAIAN															



BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB			
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan formasi	87	88	3.000.000.000	88	3.090.000.000	89	3.182.700.000	90	3.278.181.000	92	3.605.999.100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	4,9	5,1		5,2		5,3		5,4		5,9		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	7,75	8		8,25		8,5		8,75		9,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	13	18		23		28		33		40		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	11,51	11,52	2.000.000.000	11,53	2.060.000.000	11,54	2.121.800.000	11,55	2.185.454.000	15,00	2.403.999.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	100	100		100		-		100		-		100	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	60	63		66		-		69		-		72	-	75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	4,5	5		5,5		6		6,5		8,0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																



BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	89	90	1.600.000.000	94	1.648.000.000	97	1.697.440.000	100	1.748.363.200	100	1.923.199.520	Badan Riset dan Inovasi Daerah
RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	43	45	1.800.000.000	55	1.854.000.000	65	1.909.620.000	70	1.966.908.600	75	2.163.599.460	Badan Riset dan Inovasi Daerah
URUSAN PENGELOLAAN PERBATASAN													
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	0,6083	0,6153	1.500.000.000	0,6203	1.545.000.000	0,6283	1.591.350.000	0,6365	1.639.090.500	0,6757	1.802.999.550	Badan Pengelola Perbatasan
URUSAN PENGAWASAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	91	92,6	4.500.000.000	94,2	4.635.000.000	95,8	4.774.050.000	97,4	4.917.271.500	99	5.408.998.650	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,3	3,35	8.750.000.000	3,4	9.012.500.000	3,45	9.282.875.000	3,5	9.375.703.750	3,55	10.313.274.125	Inspektorat
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,08	3,16		3,24		-		3,32		-		3,42
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan yang ditindaklanjuti	71,67	72,03%	6.750.000.000	75,65%	6.952.500.000	78,44%	7.161.075.000	81,69%	7.375.907.250	84,74%	8.113.497.975	Kantor Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan	76	76,39%	4.320.000.000	78,58%	4.449.600.000	81,08%	4.583.088.000	83,55%	4.720.580.640	85,66%	5.192.638.704	Kantor Kecamatan

BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	72	73,04%	3.100.000.000	75,82%	3.193.000.000	79,36%	3.288.790.000	82,50%	3.387.453.700	86,36%	3.726.199.070	Kantor Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Konflik yang difasilitasi	94	95,07%	2.650.000.000	96,21%	2.729.500.000	97,36%	2.811.385.000	98,50%	2.895.726.550	99,29%	3.185.299.205	Kantor Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77	78,43%	4.500.000.000	81,07%	4.635.000.000	83,79%	4.774.050.000	86,22%	4.917.271.500	89,05%	5.408.998.650	Kantor Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	40,1	41,5	1.500.000.000	43,5	1.545.000.000	44,5	1.591.350.000	45,5	1.639.090.500	50,5	1.802.999.550	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	77,5	79,5	1.200.000.000	80,5	1.236.000.000	83,5	1.273.080.000	85,5	1.311.272.400	87,5	1.442.399.640	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	40,5	50,5	500.000.000	55,5	515.000.000	65,5	530.450.000	70,5	546.363.500	75,5	600.999.850	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BIDANG/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	65	70	750.000.000	75	772.500.000	80	795.675.000	85	819.545.250	90	901.499.775	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	1.750.000.000	100	1.802.500.000	100	1.856.575.000	100	1.912.272.250	100	2.103.499.475	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kabupaten	60,57 (B)	70,00 (B)	532.360.777.965	74,68 (BB)	477.454.316.814	78,30 (BB)	464.975.200.556,01	80,02 (BB)	434.774.949.175,87	81,45 (A)	426.183.840.235,60	Semua opd

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja ditetapkan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode perencanaan. Pencapaian indikator ini mencerminkan akumulasi hasil yang diperoleh dari indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun, maupun indikator yang bersifat mandiri pada setiap tahunnya. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai secara optimal. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan analisis keterkaitan dan pengaruh antara satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat pencapaian indikator kinerja daerah. Indikator ini merupakan hasil agregasi dan akumulasi capaian indikator kinerja program yang berbasis outcomes dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, indikator kinerja program yang bersifat terukur merupakan hasil agregasi dari pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang berorientasi pada keluaran (outputs) yang juga dilaksanakan oleh OPD.

Indikator kinerja utama Bupati yang mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta indikator kinerja lainnya yang digunakan oleh Pemerintah. Indikator-indikator ini diintegrasikan dalam sebuah perumusan makro yang terukur dan kuantitatif guna memudahkan proses pengendalian, evaluasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada publik. Penetapan indikator kinerja utama Bupati harus disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi daerah, serta isu-isu strategis yang menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Sementara itu, perumusan indikator kinerja program OPD harus selaras dengan arah kebijakan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Bupati serta pelayanan yang menjadi tanggung jawab OPD.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sintang
Tahun 2025-2030**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Infrastruktur	Angka	48,95	49,89	51,16	52,26	53,42	54,62	55,87
2	Pertumbuhan ekonomi (%)	%	4,89	5,02	5,46	5,65	5,78	5,84	5,96
3	PDRB per Kapita	Angka	46,17	47,57	53,00	56,71	59,23	61,26	63,47
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	2,85	2,82	2,8	2,76	2,72	2,70	2,67
5	Indeks Gini (Gini Rasio)	Angka	0,329	0,310	0,285	0,282	0,270	0,265	0,265
6	Angka Kemiskinan (%)	%	8,03	7,85	7,3	7,00	6,75	6,53	6,10
7	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,57	3,62	3,70	3,75	3,85	4,00	4,20
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,13	70,25	70,45	70,79	71,00	71,21	71,47
9	Indeks Pendidikan	Angka	0,62	0,63	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67
10	Indeks Kesehatan	Angka	0,84	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98
11	Pengeluaran Perkapita	Angka	9.657,00	9.720,00	9.821,00	9.930,00	9.959,00	9.989,00	10.021,00
12	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	69,24 (B)	70,24 (BB)	72,31 (BB)	74,21 (BB)	76,65 (BB)	78,30 (BB)	79,87 (BB)
13	Indeks SPBE	Angka	2,30	2,85	2,96	3,00	3,15	3,37	3,51
14	Indeks Inovasi Daerah	Angka	41,85	45,27	50,39	55,76	59,21	65,67	68,46
15	Nilai SAKIP	Angka	60,57 (B)	65,30 (B)	70,00 (B)	74,68 (BB)	78,30 (BB)	80,02 (BB)	81,45 (A)
16	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,61	3,76	3,92	4,09	4,27	4,46	4,64
17	Indeks Risiko Bencana	Angka	123,96	122,47	121	119,55	118,12	116,76	115,3
18	Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	70,63	79,30	79,46	79,61	79,77	79,93	80,13



4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan Daerah merupakan indikator sasaran pembangunan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama daerah, IKD terdiri dari aspek Geografi dan demografi, aspek daya saing, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek pelayanan umum serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan pemerintahan. dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5	6	7	8	9	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	77,51	79,01	80,61	82,31	84,11	86,01	
2.	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	455,12	504,09	533,01	602	651,02	700	
3.	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	53,56	55,28	56,38	57,56	58,80	60,11	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	79,3	79,46	79,61	79,77	79,93	80,13	
5.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	69,46	70,32	70,83	71,35	71,87	72,39	
6.	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	18,69	20	23	30	35	37	
7.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	18,3	20	22	25	27	30	
8.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	67,1	68,71	70,32	71,93	73,54	75,15	
9.	Indeks Risiko Bencana	Poin	122,47	121	119,55	118,12	116,76	115,3	
10.	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,54	0,61	0,67	0,71	0,74	0,79	
11.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,38	1,4	1,42	1,46	1,49	1,52	
12.	Rasio Penduduk	%	107	108	109	110	111	112	
13.	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	21,03	21,56	21,78	22,34	22,95	23,41	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.	Pertumbuhan PDRB	%	4,91	5,02	5,23	5,65	5,98	5,96	
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,78	76,56	77,21	77,98	78,77	79,76	
3.	Tingkat Kemiskinan	%	7,85	7,3	7	6,75	6,53	6,10	
4.	PDRB per kapita	Rp. (Juta)	47,57	53	56,71	59,23	61,26	63,47	



No 1	Indikator 2	Satuan 3	Target						Ket 10
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5	6	7	8	9	
5.	Angka Melek Huruf	%	95,23	96,31	97,39	98,47	99,55	100	
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,82	2,8	2,76	2,72	2,7	2,67	
7.	Indeks Gini	Skor	0,31	0,285	0,282	0,27	0,265	0,265	
8.	Indeks Pembangunan Manusia	%	70,25	70,45	70,79	71	71,21	71,47	
9.	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,81	73	73,12	73,15	73,42	73,56	
10.	Prevelansi Stunting	%	28,6	26,2	23,8	21,4	19	16,6	
11.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,78	7,92	8,05	8,18	8,31	8,45	
12.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,47	12,58	12,63	12,71	12,85	12,92	
13.	Angka Literasi/Numerasi	%	60,06	60,21	60,54	60,89	61,03	61,15	
14.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	51,5	51,76	51,97	52,23	52,69	52,98	
15.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	47,22	49,97	52,72	55,47	58,22	60,97	
16.	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,5	0,498	0,465	0,431	0,41	0,382	
17.	Angka Kematian Balita	1000/kelahiran hidup	15,9	14,99	14,08	13,17	12,27	12,27	
18.	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	36,00	46,00	55,00	61,00	70,00	70,00	
19.	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	80,00	85,00	90,00	93,00	95,00	95,00	
19.	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	%	90	90	90	90	90	90	
20.	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	80	80	80	80	80	80	
21.	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	%	62,80	64,30	65,80	66,80	77,80	77,80	



No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9,61	9,84	9,98	10,02	10,16	10,19	
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,59	2,64	2,68	2,71	2,76	2,99	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,78	76,56	77,21	77,98	78,77	79,76	
4	Indeks Inovasi Daerah	Skor	45,27	50,39	55,76	59,21	65,67	68,46	
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	35,54	35,98	36,47	36,9	36,44	36,89	
6	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-0,65	-0,11	0,54	0,76	0,97	1,03	
7	Indeks Infrastruktur	Indeks	49,89	51,16	52,26	53,42	54,62	55,87	
8	Persentase Desa Mandiri	%	36,66	41,79	46,92	52,05	57,17	62,30	
9	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	0,32	0,38	0,42	0,49	0,52	0,58	
10	Tingkat Inflasi	%	2,9	2,93	2,95	2,97	2,93	2,91	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,85	2,96	3	3,15	3,37	3,51	
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,76	3,92	4,09	4,27	4,46	4,64	
3	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Capaian Aksi HAM	Nilai	90,02	91,86	93,05	93,97	94,66	95	
5	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,62	3,7	3,75	3,85	4	4,2	
6	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Poin	3,46	3,5	3,53	3,56	3,59	3,61	



No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
1	PENDIDIKAN								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1.	Persentase Anak Usia 5-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah (APS)	%	58,3	61,9	68,09	74,9	82,39	90,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1.1	Indeks Pemerataan Guru	%	0,59	0,62	0,69	0,72	0,78	0,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2.	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	46,27	47,17	49,08	50,11	51,09	51,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2.1	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	KESEHATAN								Dinas Kesehatan
2.1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	151	142	126	110	96	96	Dinas Kesehatan
2.2.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)	%	29,5	26,2	23,8	21,4	19,00	16,6	Dinas Kesehatan
2.3.	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.4.	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.5.	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.6	Cakupan Pasien yang mendapat layanan tingkat lanjut sesuai standar	%	85	87	90	92	95	95	Dinas Kesehatan/RSUD/RSJ
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								Dinas Pekerjaan Umum



No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	Tingkat Kemantapan Jalan	%	12,56	13,68	15,08	16,65	18,33	20,12	Dinas Pekerjaan Umum
3.2	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	30,86	31,66	32,45	33,18	33,91	34,63	Dinas Pekerjaan Umum
3.3	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	10,43	13,13	17,34	21,54	25,74	29,94	Dinas Pekerjaan Umum
3.4	Persentase Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli	%	41,5	42	43	45	47	48,5	Dinas Pekerjaan Umum
3.5	Persentase Rumah tangga Berakses Air Minum	%	53,56	55,28	56,38	57,56	58,80	60,11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.6	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi	%	71,58	72,94	74,94	76,94	78,94	80,94	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.7	Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi Baik	%	61	62	64	68	69	71	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.8	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	%	68,04	69,04	71,04	73,04	75,04	77,04	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.9	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi Baik	%	24,24	26,24	29,24	32,24	35,24	38,24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.10	Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan	%	59,4	59,7	60,29	60,9	61,5	62,12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.11	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	%	53	55	60	65	70	75	Dinas Pentaan Ruang dan Pertanahan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.3.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	%	12,21	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	%	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5.2.	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5.3.	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5.4.	Persentase PPNS yang Ditingkatnkan Kompetensinya	%	0	25	25	25	25	25	Satuan Polisi Pamong Praja
5.5	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5.6	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	25,4	28,6	35,7	42,9	50,0	57,1	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5.7	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	40	45	50	55	60	65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.8	Persentase Penangan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.9	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	27	30	35	40	45	50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Sosial								Dinas Sosial
6.4	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	60,50	61,00	61,50	62,00	62,50	63,00	Dinas Sosial
6.5	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.6	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	50	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5	Dinas Sosial
6.7	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya	%	50	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5	Dinas Sosial
6.8	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	50	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5	Dinas Sosial
6.9	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	50	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5	Dinas Sosial
6.10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	85	86	87	88	89	90	Dinas Sosial
6.11	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	76,15	76,65	77,15	77,65	78,15	78,65	Dinas Sosial
6.12	Presentase Penerima Manfaat Yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	76,25	76,65	77,15	77,65	78,15	78,65	Dinas Sosial
6.13	Presentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	50,3	50,5	51	51,5	52	52,5	Dinas Sosial
6.14	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.15	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat Kesiapsiagaannya	%	21,53	22,63	25,43	28,35	30,19	32,43	Dinas Sosial
6.16	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial



No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1.	Tenaga Kerja								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.1.	Persentase Penyelesaian Dokumen Rencana ketenagakerjaan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.2.	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	100	96,5	96,75	97	97,15	97,5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.3.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	20,25	20,5	20,75	30	30,25	30,5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.4.	Persentase Pekerja pada Perusahaan yang diberikan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	61,52	61,54	62	62,15	62,15	62,4	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.6.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.7.	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.8.	Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	77	80	80	85	90	90	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.10.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3.	Pangan								Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%		7,11	7,82	8,6	9,49	10,41	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor		90,8	92,3	94,02	95,84	97,87	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%		12,22	11	9,78	8,56	7,33	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%		78	80	82	86	88	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
4.	Pertanahan								Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
4.1.	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat Yang Dilakukan Melalui Mediasi	%	53	55	60	65	70	75	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
4.2.	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
5.	Lingkungan Hidup								Dinas Lingkungan Hidup
5.1.	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.2.	Indeks Kualitas Air	Nilai	73,66	73,76	73,96	74,16	74,36	74,56	Dinas Lingkungan Hidup
5.4.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	84,11	84,21	84,41	84,61	84,81	84,51	Dinas Lingkungan Hidup



No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5.	Persentase RTH	%	30	30	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup
5.6.	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	35	35,5	37	38	39	40	Dinas Lingkungan Hidup
5.7.	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH	%	66	66,25	66,5	66,75	67	67,5	Dinas Lingkungan Hidup
5.8.	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	25	25	30	30	35	35	Dinas Lingkungan Hidup
5.9.	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	25	25	30	30	35	35	Dinas Lingkungan Hidup
5.10	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	15	20	20	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup
5.11	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.12	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Nilai	65	66	67	68	69	70	Dinas Lingkungan Hidup
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6.1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	1,8	2	2,3	2,6	2,9	3,2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6.2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	22,7	23	23,5	24	24,5	25	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6.3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6.4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6.5	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6.6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6.8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7.1.	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	62,5	63	64	65	66	67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7.2.	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	75,5	76	77	78	79	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7.3.	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	4,99	5,14	6	6,85	7,71	7,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7.5.	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%	80,49	82,05	84,62	87,18	89,74	89,74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7.6.	Persentase PKK aktif	%	76,02	76,42	76,92	77,42	77,92	77,92	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7.7.	Persentase posyandu aktif	%	58,24	58,54	59,04	59,54	60,04	60,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8.1.	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	Angka	2,25	2,23	2,21	2,19	2,13	2,1	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Perempuan, dan Perlindungan Anak
8.2.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Angka	40,5	40,3	40,1	39,9	39,7	39,5	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8.3.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR)	%	67	66,5	66	65,5	65	64,8	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8.4.	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	%	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8.5.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
9.	Perhubungan								Dinas Perhubungan
9.1	Konektivitas Darat	%	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	Dinas Perhubungan
9.2	Konektivitas Sungai	%	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	Dinas Perhubungan
10.	Komunikasi dan Informatika								Dinas Komunikasi dan Informatika
10.1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	87	88	89	90	91	92	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.2	Nilai layanan Administrasi Pemerintah Berbasis elektronik (Penilaian Indeks SPBE)	Angka	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	Dinas Komunikasi dan Informatika
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM



No 1	Indikator 2	Satuan 3	Target						Ket 10
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	2030 9	
			11.1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1,36	1,38	1,40	
11.2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	14	14,21	15,3	16,39	17,49	18,58	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
11.3	Persentase Koperasi Aktif	%	49,60	50	50,79	51,59	52,38	53,17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
11.4	Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	23,50	24,59	25,68	26,78	27,32	28,42	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
11.5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	48,50	49,18	50,82	52,46	54,1	55,74	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
11.6	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan pinjam	%	21	23,81	28,57	33,33	35,71	38,1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
11.7	Persentase Usaha Mikro	%	14	14,93	16,41	17,9	19,38	20,87	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
11.8	Pertumbuhan Wirausaha	%	19,87	20,7	21,95	23,19	24,43	25,67	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
12.	Penanaman Modal								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	%	95	95	95	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.6	Persentase Kerja sama Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Kepemudaan dan Olahraga								Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
13.1	Rasio Wirausaha Pemuda	%	28	28	29	29	30	30	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
13.2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	30	30	31	32	32	33	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
13.3	Cakupan Pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
14.	Statistik								Dinas Komunikasi dan Informatika
14.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Persandian								Dinas Komunikasi dan Informatika
15.1	Indeks KAMI		485	500	520	550	580	600	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Kebudayaan								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	50	54	59	65	69	75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	45	47	51	56	60	65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.3	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	47	51	55	59	64	60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.4	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	40	44	49	51	56	60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.5	Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	%	49	54	59	65	69	74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Perpustakaan								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.1	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	80,85	81,75	83,38	85,04	86,74	88,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang dimiliki	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.3	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Kearsipan								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	76,30	77,37	79,06	81,1	83,34	85,49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	6,5	7,5	9,25	11,45	13,38	15,2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	%	6,1	7,15	9,2	11,25	13,35	15,45	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.4	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	74,4	75	77,2	77,9	78,1	78,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Layanan Urusan Pilihan									
1.	Pariwisata								Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
1.1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata	%	10,2	10,5	10,7	11	11,2	11,5	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
1.2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	25	25	25	26	27	27	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
1.3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	0,14	0,14	0,15	0,16	0,17	0,17	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
1.4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	10,34	10,35	10,36	10,37	10,38	10,4	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
2.	Pertanian								Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
2.1	Peningkatan Produksi Perkebunan	%	64	66	69	72	75	78	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.2	Peningkatan Produktivitas Perkebunan	%	64	66	69	72	75	78	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	3,5	4,1	5,5	6,9	8,3	9,7	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.4	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	73	75	80	85	90	95	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.5	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	40	45	55	65	75	85	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.6	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	90	90	90	90	100	100	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
2.7	Peningkatan Produksi Holtikultura	%	90	90	90	90	100	100	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura



No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5	6	7	8	9	
2.8	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ton	50.434	50.434	51.434	51.434	51.500	51.500	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.9	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	90	90	90	90	100	100	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.10	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	90	90	90	95	100	100	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.11	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%	90	90	90	90	100	100	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.12	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	90	90	90	90	100	100	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.13	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk	%	91	92	93	94	95	96	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
4.	Perdagangan								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
4.1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	4,74	5,61	7,48	9,35	11,21	13,08	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	67,67	69,23	71,79	74,36	76,92	79,49	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
4.3	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
4.4	Ekspor Bersih Perdagangan	Miliar	-200,10	-120,37	-3,63	127,63	251,63	375,63	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
4.5	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
4.6	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
5.	Perindustrian								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
5.1	Cakupan bina Kelompok Pengrajin	%	35	35	35	35	35	35	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
5.2	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	%	10	10	10	10	10	10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
5.3	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, Akurat, dan Terkini	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
6	Transmigrasi								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.1	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	%	97,35	97,5	97,65	97,75	97,85	97,85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	80	84,75	85	85,25	85,5	85,75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Kelautan dan Perikanan								Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
7.1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Thn		281	293	300	315	320	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
7.2	Produksi Perikanan Budidaya	Kg PER-KAPITA PER-TAHUN		940	951	959	963	1065	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
7.3	Angka Konsumsi Ikan	%		54,28	55,18	56,21	57,29	58,51	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
8	Perencanaan Pembangunan								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	70,41	70,41	71,01	72,19	72,78	73,37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktyr dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Keuangan								Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah
9.1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	35	34	33	32	31	30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No 1	Indikator 2	Satuan 3	Target					Ket 10	
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8		2030 9
9.2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	30,5	31	32	33	34	40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9.3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9.4	Persentase Penurunan SILPA	%	12,5	11	10	9	8	9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9.5	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9.6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	2,5	3	4	5	6	7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9.7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9,02	9,52	10,07	10,67	11,32	11,97	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
9.8	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan berbasis digital	%	71,44	72,44	74,44	76,44	79,44	83,44	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
10	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
10.1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan formasi	%	87,5	88	88	89	90	92	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
10.2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
10.3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	7,90	8	8,25	8,5	8,75	9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Indikator	Satuan	Target					Ket	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.4	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	16	18	23	28	33	40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
10.5	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	11,51	11,52	11,53	11,54	11,55	15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
10.6	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
10.7	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	62	63	66	69	72	75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
10.8	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	4,8	5	5,5	6	6,5	8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
11	Penelitian dan Pengembangan								Badan Riset dan Inovasi Daerah
11.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	88	90	94	97	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah
11.2	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	44	45	55	65	70	75	Badan Riset dan Inovasi Daerah
12	Pengawasan								Inspektorat
12.1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	91,5	92,6	94,2	95,8	97,4	99	Inspektorat
12.2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,33	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55	Inspektorat
12.3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,10	3,16	3,24	3,32	3,42	3,5	Inspektorat
13	Pemerintahan Umum								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	40,8	41,5	43,5	44,5	45,5	50,5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12.2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	78,5	79,5	80,5	83,5	85,5	87,5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12.3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	45,5	50,5	55,5	65,5	70,5	75,5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12.4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	68	70	75	80	85	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12.5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14	Sekretariat Daerah								Sekretariat Daerah
14.1	Indeks Kematangan Organisasi	Kategori	85,55	85,65	85,85	86	86,55	88,5	Sekretariat Daerah
14.2	Persentase Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan secara efektif	Kategori	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
14.3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kategori	2,68(Sedang)	2,70(Sedang)	2,74(Sedang)	2,78(Sedang)	2,82(Sedang)	2,85(Sedang)	Sekretariat Daerah
14.4	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
14.5	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
14.6	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
14.7	Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	Sekretariat Daerah
15	Sekretariat Dewan								Sekretariat DPRD



No 1	Indikator 2	Satuan 3	Target						Ket 10
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	2030 9	
			Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu						
15.1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sekretariat DPRD
15.2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	80	80	85	85	89	90	Sekretariat DPRD
15.3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	%	80	80	85	85	90	90	Sekretariat DPRD
16	Perbatasan								Badan Pengelola Perbatasan Daerah
16.1	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP)	Indeks	0,6113	0,6153	0,6203	0,6283	0,6365	0,6757	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
17	Kecamatan								
17.1	Persentase Layanan yang ditindaklanjuti	%	71,87	72,03	75,65	78,44	81,69	84,74	Kecamatan
17.2	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan	%	76,19	76,39	78,58	81,08	83,55	85,66	Kecamatan
17.3	Persentase Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	72,01	73,04	75,82	79,29	82,50	86,36	Kecamatan
17.4	Persentase Jumlah Konflik yang difasilitasi	%	94,2	95,07	96,21	97,36	98,50	99,29	Kecamatan
17.5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	77,5	78,43	81,07	83,79	86,22	89,05	Kecamatan



BAB V

PENUTUP

RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Sintang dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi Lembaga DPRD Kabupaten Sintang dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang dalam periode 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan perlu dijabarkan dalam RKPD untuk setiap tahun oleh masing-masing OPD yang ditetapkan dalam struktur pemerintahan daerah. RKPD memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Rencana Program Prioritas, dan Rencana Kerja dan Pendanaan yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu adanya pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahap pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya penetapan kaidah pelaksanaan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku pembangunan dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Sintang periode 2025-2029.



5.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam RKPD tahun 2026 sampai tahun 2030.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2030 yang dilaksanakan tahun 2029. Sebagaimana diketahui, tahun 2029 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sintang. Penyusunan RKPD tahun 2026 berpedoman pada RPJMD 2025-2029. Penyusunan RKPD tahun pertama yang harus diarahkan menjaga kesinambungan dan capaian program sebelumnya sehingga setiap perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun pertama tetap mengacu pada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Sedangkan RKPD 2030 yang disusun berdasarkan RPJMD 2025-2029 merupakan tahun transisi untuk kepala daerah 2030-2035.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sintang mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama menyukkseskan dan mengawal terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi sumber daya yang dimiliki.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini hendaknya dilakukan secara konsisten, transparan, partisipatif, akuntabel, dan penuh tanggung jawab. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Sintang, masyarakat, termasuk dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan, agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 ini dengan penuh tanggung jawab;
- 2) RPJMD ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);



- 3) Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);
- 4) Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 dan melaksanakan perencanaan partisipatif melalui forum Musrenbang;
- 5) Program dan kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran agenda pembangunan dan tetap memperhatikan prinsip prioritas dan efisiensi anggaran;
- 6) Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 sangat tergantung dari komitmen, koordinasi, sinergi, dan peran aktif seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya;
- 7) Masyarakat Kabupaten Sintang memiliki ruang dan peran penting dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan wujud penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan implementasi program;
- 8) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Sintang.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi memainkan peran krusial dalam menjamin keberhasilan perencanaan dan implementasi pembangunan di Kabupaten Sintang. Proses ini dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dengan berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mekanisme pengendalian dijalankan melalui pemantauan dan supervisi yang konsisten terhadap dokumen perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya, meliputi pengawasan RKPD dan Renja-OPD serta keselarasannya dengan RPJMD. Dengan pengendalian yang efektif, Pemerintah Kabupaten Sintang mampu mendeteksi permasalahan implementasi sejak dini, mengoordinasikan antar-OPD dalam mengatasi hambatan, dan melakukan penyesuaian pelaksanaan program tanpa mengurangi target kinerja yang sudah ditetapkan.

Sementara itu, evaluasi pembangunan Kabupaten Sintang dilakukan melalui penilaian yang sistematis dan rasional terhadap seluruh komponen input, proses, output, dan outcome dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Proses evaluasi mencakup tiga tahapan: *ex-ante* (evaluasi terhadap rancangan dokumen perencanaan), *on-going* (evaluasi selama proses implementasi), dan *ex-post* (evaluasi terhadap hasil dan dampak). Melalui evaluasi berkala yang meliputi capaian kinerja triwulanan, semesteran, dan tahunan, Pemerintah Kabupaten Sintang dapat mengukur keberhasilan program dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung efektivitas pengendalian dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Sintang telah mengembangkan sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan terintegrasi, membentuk tim koordinasi lintas OPD yang dikoordinasikan oleh Bapperida, serta menyusun dokumen standar sebagai acuan bersama.

Pengendalian dan evaluasi yang terstruktur memberikan manfaat strategis bagi Kabupaten Sintang dalam mengoptimalkan pencapaian target pembangunan. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran dengan memastikan kesesuaian implementasi dengan perencanaan dan mencegah pemborosan sumber daya. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan diperkuat melalui penyediaan data dan informasi kinerja yang akurat, yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tidak kalah penting, pengendalian dan evaluasi berfungsi sebagai media pembelajaran institusional yang mendokumentasikan praktik terbaik dan pelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan, sekaligus memfasilitasi adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi eksternal.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian dan evaluasi melalui integrasi yang lebih



komprehensif dengan sistem perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pemantauan kinerja, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan. Dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang adaptif, responsif, dan berbasis bukti, Kabupaten Sintang berupaya memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan diimplementasikan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya, pengendalian dan evaluasi yang efektif menjadi kunci dalam membangun landasan yang kokoh bagi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di masa mendatang.

 **BUPATI SINTANG**

GREGORIUS HERKULANUS BALA